



LAPORAN KINERJA | KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2018



Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018



RETNO L.P. MARSUDI

Menteri Luar Negeri RI

“ Di tengah berbagai tantangan dunia, target program dan kegiatan Kementerian Luar Negeri selama tahun 2018 telah tercapai sebagaimana diharapkan ”.

Pada tahun 2018 dunia dipenuhi banyak ketidakpastian dan tantangan. Konflik internasional banyak terjadi di berbagai negara, tantangan terhadap multilateralisme juga terus berjalan. Di tengah tantangan tersebut, diplomasi Indonesia terus dijalankan dengan fokus pada 4 prioritas, (i) penjagaan kedaulatan, (ii) perlindungan WNI di luar negeri, (iii) peningkatan diplomasi ekonomi, dan (iv) peningkatan peran Indonesia di dunia internasional.

Dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI, diplomasi kedaulatan Indonesia difokuskan pada upaya perundingan perbatasan RI dengan sejumlah negara tetangga, antara lain dengan Palau, Filipina, Vietnam, India, serta Singapura.

Terkait isu separatisme di Papua, selama tahun 2018, Indonesia telah berhasil meningkatkan dukungan negara-negara Pasifik kepada NKRI, termasuk dalam Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2018 upaya mencegah pengaruh kelompok separatisme Papua kepada negaranegara Pasifik. Peningkatan peran perlindungan WNI dilakukan melalui penyelesaian kasus-kasus yang menimpa WNI serta melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan perlindungan WNI dan BHI yang ada di luar negeri.

Dalam diplomasi ekonomi, berbagai terobosan dilakukan Indonesia untuk menembus pasar non-tradisional, khususnya di kawasan Afrika. Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) 2018 telah berhasil meraih transaksi dagang sebesar US\$ 586,56 juta dan *Business Announcement* sebesar US\$ 1,3 milyar. Di samping itu, Indonesia juga terus melakukan upaya penyelesaian berbagai kesepakatan kerja sama ekonomi dalam kerangka *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dengan negara mitra utama seperti Chile, Jepang, Uni Eropa, dan Australia.

Dalam upaya peningkatan peran di dunia Internasional, Indonesia telah terpilih kembali sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan dunia kepada peran Indonesia di tingkat global. Langkah mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian juga tercermin dengan kontribusi Indonesia untuk membantu penyelesaian beberapa isu dunia, antara lain Palestina, Afghanistan dan Myanmar.

Berbagai upaya dan pencapaian kinerja diplomasi Kementerian Luar Negeri yang dilakukan tersebut secara umum berhasil dilaksanakan sesuai program dan kegiatan yang tertuang dalam Peta Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 serta Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Luar Negeri Tahun 2018. Sebanyak 14 Sasaran Strategis (SS) dan 25 Indikator Utama (IKU) terangkum dalam Peta Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 tersebut.

Sebagai catatan terkait pencapaian inerja, untuk pertama kalinya pada Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2018 tahun 2018 Perwakilan RI di luar negeri telah menerapkan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berbasis Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja. Penerapan sistem baru BSC tersebut diharapkan dapat menggambarkan dan mengukur secara lebih jelas, akuntabel dan komprehensif capaian kinerja Kementerian Luar Negeri secara umum dan Perwakilan RI khususnya. Sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja Kementerian Luar Negeri, Laporan Kinerja (LKj) akan menjabarkan data dan informasi perkembangan realisasi target kinerja (PK) Kementerian Luar Negeri selama tahun 2018 beserta analisis dan proyeksi ke depan yang akan dilakukan. Dengan demikian, diharapkan para pemangku kepentingan dapat lebih memahami mengenai peran, tantangan, dan strategi Kementerian Luar Negeri dimasa depan. Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi atas dukungan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri serta pemangku kepentingan yang telah bekerja sama memajukan diplomasi Indonesia. Semoga Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang berkepentingan.

Jakarta, 28 Februari 2019
Menteri Luar Negeri,



RETNO L.P. MARSUDI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Pernyataan Telah Direviu	7
Ringkasan Eksekutif	8

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri	14
I.2 Tantangan dan Isu-Isu Strategis di Tahun 2018	15

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis	20
II.2 Peta Strategi	21
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	25

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

III.1 Capaian Kinerja: <i>Stakeholders Perspective</i>	30
III.2 Capaian Kinerja: <i>Customer Perspective</i>	71
III.3 Capaian Kinerja: <i>Internal Business Process Perspective</i>	100
III.4 Capaian Kinerja: <i>Learning and Growth Perspective</i>	215
III.5 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya	250

BAB 4

PENUTUP

253





**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri untuk tahun anggaran 2018 sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Luar Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2019

Inspektur Jenderal

Rachmat Budiman

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Luar Negeri telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi, sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 dan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019.

Sejalan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan Peta Strategis Tahun 2018 yang terdiri atas 4 (empat) Perspective, 14 Sasaran Strategis (SS) dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Tercatat sebanyak 15 IKU yang memenuhi target, antara lain pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional, tindak lanjut/ implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri, diplomasi maritim, Polkam dan perbatasan, diplomasi ekonomi, sosial dan budaya dan diplomasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri untuk Tahun 2018 mencapai 105,36% atau meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 104,34%. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil perhitungan pelaksanaan program-program yang terangkum dalam 4 perspektif, dengan capaian dan pembobotan sebagai berikut:

- Nilai Capaian Kinerja Perspektif *Stakeholder* dengan bobot 25% sebesar 105,29%;
- Nilai Capaian Kinerja Perspektif *Customer* dengan bobot 15% sebesar 110,40%;
- Nilai Capaian Perspektif *Internal Business Process* dengan bobot 30% sebesar 109,97%;
- Nilai Capaian Perspektif *Learning and Growth* dengan bobot 30% sebesar 98,29%

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Luar Negeri tahun 2018 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa IKU pada tahun 2018 tentunya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2019 mendatang.

Di bidang anggaran, Kementerian Luar Negeri tahun 2018 telah melaksanakan pengelolaan 12 program dalam APBN Kementerian Luar Negeri Tahun 2018. Pagu Kemenlu berdasarkan DIPA sebesar Rp 7.845.758.894.000 (Tujuh trilyun delapan ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut mengalami peningkatan dari alokasi anggaran yang tercantum dalam PK Menteri Luar Negeri, yaitu Rp 7.250.769.089.000. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran belanja tambahan (ABT), yang terdiri dari:

Kementerian Luar Negeri telah menetapkan visi dalam Renstra Kemenlu 2015-2019 yakni "Terwujudnya Wibawa Diplomasi Guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat", dengan tiga Misi yaitu:

- Memperkuat Peran dan Kepemimpinan Indonesia sebagai Negara Maritim dalam Kerja Sama Internasional untuk Memajukan Kepentingan Nasional;
- Memantapkan Peran Kementerian Luar Negeri sebagai Penjuru Pelaksana Hubungan Luar Negeri dengan Dukungan dan Peran Aktif Seluruh Pemangku Kepentingan Nasional dan
- Mewujudkan Kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang Mumpuni.

No.	Uraian	Jumlah
	Alokasi anggaran dalam PK Menlu 2018	Rp 7.250.769.089.000
	Peningkatan:	
1.	ABT Belanja Pegawai Perwakilan	Rp 148.237.676.000
2.	ABT Belanja Barang Operasional Perwakilan	70.747.946.000
3.	ABT PPh	75.519.231.000
4.	ABT Belanja Mutasi Pegawai	43.210.241.000
5.	ABT Insentif	87.939.560.000
6.	ABT Kontribusi Organisasi Internasional Unit Kerja Multilateral	169.335.151.000
	Total peningkatan (anggaran belanja tambahan)	Rp 594.989.805.000
	Alokasi anggaran akhir Kementerian Luar Negeri 2018	Rp 7.845.758.894.000

Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 96,15% atau sebesar Rp. 7.544.007.942.937. Hal ini merupakan peningkatan realisasi anggaran sebesar 4,48% jika dibandingkan tahun 2017.

Dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 105,36%, maka Kementerian Luar Negeri telah merealisasikan anggaran tahun 2018 berdasarkan prinsip budget follows program secara efektif dan efisien. Berikut disajikan tabel realisasi dan capaian IKU Kementerian Luar Negeri tahun 2018 menurut tujuan dan sasaran strategis:

KODE SS	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018 (%)
Stakeholder Perspective						
S.1	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Internasional	IKU S.1.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	85,33	94,69	110,96
S.2	Dukungan Diplomasi yang Optimal untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional	IKU S.2.1	Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Perdagangan dengan Indonesia	79	111	120
		IKU S.2.2	Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia	39	35	89,74
		IKU S.2.3	Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia	59	85	120
		Capaian Sasaran Strategis S.2				
S.3	Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional	IKU S.3.1	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	4 (skala 5)	3,8	95
		Capaian Sasaran Strategis S.3				

KODE SS	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018
Customer Perspective						
C.1	Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik	IKU C.1.1	Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik	4	3,84	96
		IKU C.1.2	Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB	Top 99	Top 40	120
Capaian Sasaran Strategis C.1						
C.2.	Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional	C2.1	Persentase tindaklanjut/ implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri	86.90%	100,10%	115,19
		Capaian Sasaran Strategis C.1				
Internal Business Process Perspective						
B.1	Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan yang Kuat	IKU B.1.1	Indeks Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan	95,44	105,73	110,79
		Capaian Sasaran Strategis B.1				
B.2	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Kuat	IKU B.2.1	Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya	94,48	115,16	120
		Capaian Sasaran Strategis B.2				
B.3	Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI yang Prima	IKU B.3.1	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	82,21	90,58	110,18
		Capaian Sasaran Strategis B.3				
B.4	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Kuat	IKU B.4.1	Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	90%	96,36%	107,07
		IKU B.4.2	Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	90%	83,12%	92,36
		IKU B.4.3	Persentase peningkatan jumlah pengunjung portal situs Kemenlu	10%	46,29%	120
		IKU B.4.4	Persentase peningkatan impresi dan engagement pada media sosial Kemenlu	20%	140,39%	120
		IKU B.4.5	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	15	9	120
		Capaian Sasaran Strategis B.4				
Learning and Growth Perspective						
L.1	SDM Kemenlu yang Kompeten	IKU L.1.1	Persentase Pejabat Kemenlu yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	85%	97,37%	114,55
L.2	Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik	IKU L.2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	90	76,44	84,93
		IKU L.2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	76	75,56	99,42
		IKU L.2.3	Indeks Engagement pegawai Kemenlu	3,75	3,42	91,20
Capaian Sasaran Strategis L.2						

L.3	Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Memadai	IKU L.3.1	Persentase sarana dan prasarana Kemenlu yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100%	80,80%	80,80
L.4	Sistem Informasi Manajemen Kemenlu yang Terintegrasi	IKU L.4.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3 (skala 5)	3,50	116,67
		IKU L.4.2	Indeks Peningkatan e-Government Indonesia (PEGI)	3,55	3,37	94,93
		Capaian Sasaran Strategis L.4				
L.5	Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel	IKU L.5.1	Persentase Realisasi Anggaran Kemenlu	100%	96,15%	96,15
		IKU L.5.2	Indeks opini BPK atas laporan keuangan Kemenlu	WTP	WTP	100
		Capaian Sasaran Strategis L.5				
Nilai Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri						105,36%



BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
Tahun 2018

I.1 ASPEK STRATEGIS

Kementerian Luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri mengamanatkan bahwa Kementerian Luar Negeri merupakan pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Luar Negeri bertugas membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan politik dan hubungan luar negeri, merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan dan sasarannya dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri sebagai berikut:

1. Kedudukan: Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Tugas: Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
 - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;
 - h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Terkait dengan aspek strategis keberadaan Kementerian Luar Negeri di Indonesia tercermin dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama"*.

Peran penting Kementerian Luar Negeri dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, terutama dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui upaya memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama internasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong terciptanya kerja sama ekonomi dalam tataran bilateral, regional dan multilateral. Hal ini terutama terkait dengan peran penting Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari solusi (part of the solution) dalam penyelesaian masalah global.

Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang diprioritaskan pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI BHI) di luar negeri, serta Diplomasi Ekonomi. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat, antara lain lingkungan hidup, demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan ancaman keamanan non-tradisional.

Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Kementerian Luar Negeri senantiasa berupaya meraih manfaat yang seluas-luasnya dari hubungan kerjasama yang terbangun dengan negara-negara sahabat dan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam berbagai forum regional dan internasional.

Menteri Luar Negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri, 10 pejabat Eselon Ia yang terdiri dari Sekretaris Jenderal; 7 (tujuh) pejabat Direktur Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; 5 (lima) Staf Ahli Menteri setingkat Eselon Ib, dan 2 (dua) Staf Khusus.

I.2 TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun yang sibuk bagi diplomasi dan kegiatan internasional Indonesia. Secara umum, target program dan kegiatan Kementerian Luar Negeri selama tahun 2018 telah tercapai sebagaimana diharapkan.

Sejumlah tantangan besar dihadapi Kementerian Luar Negeri selama tahun 2018 terutama masalah instabilitas di berbagai kawasan, radikalisme, terorisme, migrasi ireguler, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim dan bencana alam.

Sebagaimana pesan Ibu Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri RI, dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2019 tanggal 9 Januari 2019, disampaikan bahwa saat ini adalah saat yang tepat bagi bangsa-bangsa untuk melakukan kerja sama dalam menghadapi tantangan global yang sangat besar dan tidak mungkin satu negara dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain.

Selama Tahun 2018, capaian diplomasi Indonesia yang telah dilakukan adalah dalam hal: (I) Peningkatan Peran Indonesia di Dunia Internasional, (II) Menjaga Kedaulatan NKRI, (III) Perlindungan WNI di Luar Negeri, dan (IV) Peningkatan Diplomasi Ekonomi

INDONESIA DI TINGKAT GLOBAL DAN KAWASAN

Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dengan suara mayoritas (144 dari 190) periode 2019-2020. Dukungan mayoritas negara dunia tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan dunia kepada Indonesia.

Diplomasi Indonesia terus bekerja untuk Palestina. Indonesia senantiasa berada pada garis depan bersama dengan perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan dan hak-haknya. Pada tahun 2018, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan membebaskan bea masuk produk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia mulai 2018 dan mendorong negara-negara Asia Timur untuk memberikan bantuan pembangunan melalui *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD)*

Indonesia juga terus memfasilitasi berbagai pihak di Afghanistan, untuk berdamai. Termasuk, penyelenggaraan pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan-Pakistan dan Indonesia di Istana Bogor, 11 Mei 2018. Konferensi Ulama ini menghasilkan "*Bogor Ulema Declaration of Peace*"

Pada tahun 2018 Indonesia telah merealisasikan sejumlah kontribusi baru pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, yakni pengiriman 1 Satgas Rapid Deployment Battalion TNI berkekuatan 850 personil ke MONUSCO (Republik Demokratik Kongo) dan 1 Satgas *Formed Police Unit* Polri berkekuatan 140 personil ke MINUSCA (Republik Afrika Tengah). Langkah-langkah juga terus dilakukan untuk mewujudkan Visi 4000 *Peacekeepers* pada tahun 2019, termasuk meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian

Dalam mendorong terjaganya stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea, Indonesia telah mengirim Utusan Khusus Presiden RI ke Seoul dan Pyongyang dan menghadirkan PM Korea Selatan dan Wakil PM Korea Utara dalam upacara pembukaan Asian Games 2018 di Jakarta, 18 Agustus 2018.

Indonesia juga terus mendorong keterbukaan Myanmar untuk memberikan briefing kepada AICHR mengenai perkembangan situasi komunitas Muslim di Rakhine State serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Indonesia juga mengembangkan kerja sama pendidikan Islam dengan Filipina Selatan 2018 untuk mengatasi ideologi radikal di Filipina Selatan.

Selama tahun 2018, tercatat sejumlah realisasi kunjungan kenegaraan Indonesia dengan negara mitra, yakni Kunjungan Presiden RI ke Vietnam, Sri Lanka dan Afghanistan, serta Kunjungan Presiden Namibia, Federasi Mikronesia, Timor-Leste ke Indonesia, dan Kunjungan PM Malaysia ke Indonesia.

Dalam bidang maritim, beberapa peran dan kegiatan Indonesia yang dilakukan antara lain menjadi tuan rumah *Fourth Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities (IGR-4)* 6 - 7 September 2018 di Bali, tuan rumah *Our Ocean Conference* 29-30 Oktober 2018 di Bali dan menyelenggarakan *Indonesia Africa Maritime Dialogue (IAMD)* di sela-

sela *Our Ocean Conference*, pada 29 Oktober 2018 serta sebagai tuan rumah *Multilateral Meeting on the Nomination of Lesser Sunda and Bismarck Solomon Seas Ecoregion as Priority Seascapes CTI-CFF* di Jakarta, 20 April 2018.

Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan BDF dalam rangka meluaskan keterlibatan generasi muda dan *civil society* untuk berpartisipasi dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan *Bali Democracy Students Conference* (BDSC) yang dilaksanakan paralel dengan BDF sejak tahun 2017 dan *Bali Civil Society and Media Forum* (BCSMF) sebagai rangkaian dari BDF ke-11 tahun 2018.

Pada tahun 2018 Indonesia mendapatkan penghargaan dari UN-ESCAP dan UNOSSC atas kontribusi dan capaian dalam Kerja Sama Selatan-Selatan di Asia Pasifik.

DIPLOMASI KEDAULATAN

Diplomasi Indonesia terus bekerja untuk memastikan integritas kedaulatan NKRI. Menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI merupakan prioritas politik luar negeri yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Indonesia senantiasa menjaga hubungan baik dengan seluruh negara berdasarkan prinsip saling menghormati dan tidak intervensi. Namun demikian, Indonesia akan bersikap tegas dan tidak akan mundur satu inchi-pun untuk membela kedaulatan NKRI.

Menjaga kedaulatan juga dilakukan melalui diplomasi perbatasan. Upaya percepatan dan intensifikasi perundingan perbatasan dilakukan guna menyelesaikan perbatasan Indonesia dan negara sahabat yang masih tersisa. Selama tahun 2018, perundingan Penetapan Batas Maritim RI dengan negara tetangga yang dilaksanakan antara lain Palau, Filipina, Vietnam, India dan Singapura.

Keberhasilan Indonesia yang secara tegas menyikapi posisi satu negara yang mendukung kelompok Separatis Papua menghasilkan hasil yang positif, antara lain meningkatnya dukungan negara-negara Pasifik kepada NKRI dan dukungan untuk mencegah pengaruh kelompok separatisme Papua kepada negara-negara Pasifik.

Diplomasi pertahanan Indonesia juga ditujukan untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional serta diversifikasi kerja sama pertahanan. Upaya tersebut antara lain menindaklanjuti joint venture pembangunan kapal selam dan transfer teknologi pada 2017 dan 2018 dengan Korea Selatan dan penandatanganan kontrak pembelian pesawat tempur SU-35 asal Rusia dengan skema *Counter Trade dan offset* teknologi sesuai UU no.16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Indonesia secara pro aktif menggunakan diplomasi untuk menggalang kerja sama antar negara dalam menanggulangi berbagai ancaman keamanan non-tradisional yang secara progresif terus berkembang, seperti terorisme, perdagangan/penyelundupan manusia, *cyber-crimes*, dan penangkapan ikan secara ilegal.

DIPLOMASI EKONOMI

Diplomasi Indonesia bekerja dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat melalui diplomasi ekonomi. Berbagai terobosan dilakukan untuk menembus pasar non-tradisional khususnya di Afrika. Penyelenggaraan Indonesia-Afrika Forum (IAF). Penyelenggaraan IAF 2018 meraih transaksi sebesar US\$ 586,56 juta dan *Business Announcement* sebesar USD 1,3 milyar. Sebagai tindak lanjut Indonesia-Africa Forum, dan untuk menggenjot pelibatan Perusahaan dan BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur di Afrika. Di tahun 2019 akan diselenggarakan *Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue*.

Diplomasi Ekonomi juga dilakukan untuk memasarkan produk industri strategis dan mendorong ekspansi investasi Indonesia di luar negeri. Beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain ekspor produk industri strategis gerbong kereta ke Bangladesh, pesawat CN 235 ke Senegal dan Thailand dan beberapa negara Afrika lainnya.

Berbagai investasi dan Perusahaan Indonesia juga telah merambah ke berbagai negara di penjuru dunia seperti pabrik mie instan Indonesia di Serbia, pembangunan infrastruktur di berbagai negara khususnya Afrika, peluncuran Go-Viet di Viet Nam, perusahaan Semen dan properti Indonesia di berbagai negara.

Diplomasi ekonomi Indonesia juga terus didorong untuk memperluas pasar Indonesia melalui penyelesaian berbagai *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan beberapa mitra perdagangan. Dalam empat tahun terakhir Indonesia telah menandatangani Indonesia-Chile CEPA, dan sedang menegosiasikan

sejumlah perundingan CEPA, antara lain: *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, *Indonesia-European Union CEPA*, *Indonesia-EFTA CEPA*, *Indonesia-Australia CEPA*, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Kegiatan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Pada bulan Juni 2018, Komisi Eropa telah memperbaharui EU Air Safety List mengenai daftar maskapai penerbangan yang tidak memenuhi standar keselamatan internasional, dan karenanya tidak diperkenankan beroperasi di wilayah Uni Eropa. Pembukaan penerbangan Ethiopian Airlines rute Addis Ababa-Jakarta pada tanggal 21 Juli 2018, dengan frekuensi penerbangan 3 kali dalam 1 minggu.

Dalam *Digital Diplomacy Review 2017* merilis diplomasi digital Indonesia menempati posisi 8 (delapan) di kawasan Asia. Sementara di dalam negeri, akun Menlu RI dan akun Kemlu RI menempati posisi 3 (tiga) dan 4 (empat) di bawah Presiden Joko Widodo, Kantor Staf Presiden (KSP) dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Hal ini menunjukkan akun media digital Kemlu memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi sebagai sumber informasi mengenai diplomasi Indonesia. Hingga 20 September 2018, Facebook Page Kemlu RI memiliki 55.031 *followers*. Uniknya akun tersebut menjadi saluran komunikasi bagi para Buruh Migran Indonesia (BMI) di luar negeri untuk berkomunikasi dan menyampaikan pengaduan apabila mereka membutuhkan perlindungan. Hal ini mempermudah penanganan perlindungan WNI secara cepat

DIPLOMASI PERLINDUNGAN

Peningkatan upaya perlindungan dan keberpihakan kepada kepentingan WNI tampak sangat menonjol dalam politik luar negeri era Presiden Jokowi. Pemerintah terus berupaya menghadirkan negara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk WNI di luar negeri.

Penguatan sistem perlindungan WNI dilakukan melalui penggunaan inovasi teknologi. Selain aplikasi *Safe Travel*, *Smart Embassy*, *Welcoming SMS Blast*, Pemerintah baru saja meluncurkan Portal E-Perlindungan. Melalui portal ini, pembangunan *One Data Policy* akan juga meliputi WNI di luar negeri sehingga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terintegrasi bagi WNI baik di dalam maupun luar negeri. Ini merupakan terobosan besar sejak Kemerdekaan. Dengan aplikasi ini, Perwakilan RI di luar negeri dapat menerbitkan Nomor Induk Kependudukan/NIK dan menerbitkan dokumen akta catatan sipil yang terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional. Upaya untuk mempercepat penyelesaian kasus terus dilakukan.

Membangun *website Rogatory Online Monitoring (ROM)* dan Sistem Informasi Manajemen Rogatori (SIM Rogatori) guna meningkatkan kualitas penanganan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata sebagai upaya meningkatkan pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mekanisme pengiriman yang telah disepakati dan disesuaikan dengan prinsip hukum acara perdata internasional (biaya pengiriman dibayar oleh para pihak) ini telah diluncurkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan Ketua Mahkamah Agung pada acara Bimbingan Teknis untuk Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia untuk empat (umum, agama, TUN, militer) dan Ketua Pengadilan Negeri Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat pada 10 september 2018 lalu di Denpasar.

Menjadi salah satu negara yang secara tegas mendorong penguatan mekanisme perlindungan migran, terutama pekerja migran, dengan mengedepankan perlindungan HAM dalam penyusunan naskah *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)*. Indonesia juga terpilih untuk mewakili kawasan Asia dan Pasifik menjadi *Vice Chair* pada *Inter-Governmental Conference to Adopt GCM* yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2018 di Marrakesh, Maroko.

Indonesia juga mendirikan *Community Learning Center* bagi pendidikan anak-anak para TKI di Malaysia (Sabah dan Sarawak) hingga April 2018 berjumlah 263 pusat. Ini dilakukan untuk memberikan akses terhadap pendidikan bagi anak para Pekerja Migran (PMI) di Kuching (Sarawak), Kinabalu (Sabah) dan Tawau (Sabah).

Dalam mendorong kerjasama yang efektif dengan stakeholder, pada tahun 2018 Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral dengan negara penerima Pekerja Migran Indonesia (PMI), melakukan koordinasi melalui MoU di antara 7 Kementerian/Lembaga untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang sehingga penanganan tidak lagi sektoral serta mendorong pemberlakuan gratis visa untuk WNI paspor biasa ke India (efektif per Juni 2018)



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
Tahun 2018

II.1 RENCANA STRATEGIS

Kementerian Luar Negeri

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain menjabarkan hasil capaian pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Kementerian Luar Negeri juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta target kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

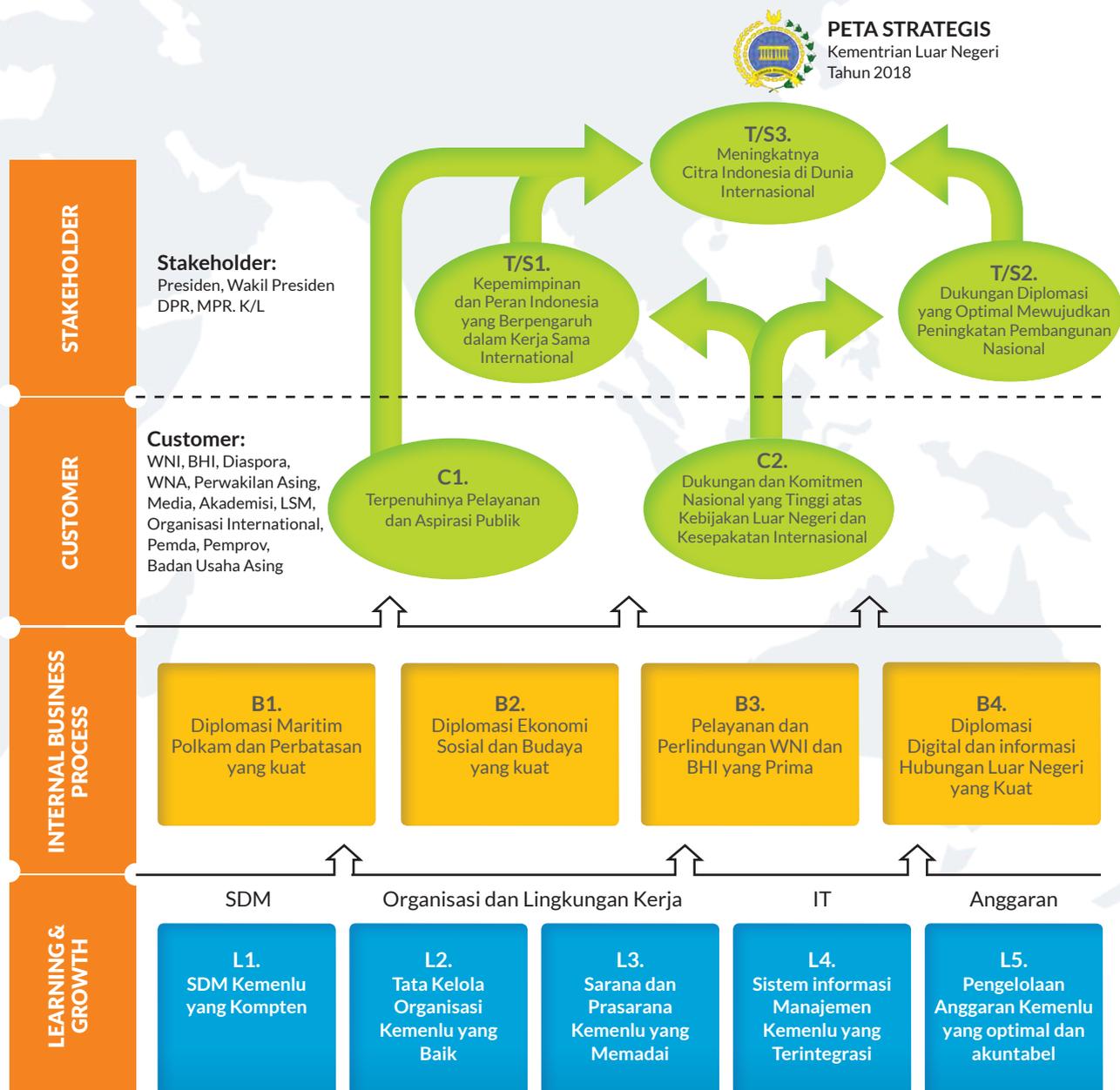
Dalam melaksanakan mandatnya, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan visi dalam Renstra Kementerian Luar Negeri tahun 2015-2019 yaitu: "Terwujudnya Wibawa Diplomasi Guna Memperkuat Jati Diri Bangsa Sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat". Berikut penjabaran Visi dan Misi Kemenlu yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI:



II.2 PETA STRATEGI

Kementerian Luar Negeri

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan Peta Strategis tahun 2018 berdasarkan metode manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), dengan tujuan agar proses pencapaian kinerja dapat lebih terukur dan terarah. Sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang melibatkan seluruh organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri tersebut terdiri atas 14 Sasaran Strategis (SS) dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terangkum dalam 4 perspective. Ke-4 (empat) *perspective* dimaksud adalah (1) *Stakeholder Perspective* yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis; (2) *Customer Perspective* yang terdiri atas 2 (dua) Sasaran Strategis; (3) *Internal Business Process Perspective* yang terdiri atas 4 (empat) Sasaran Strategis; dan (4) *Learning and Growth Perspective* yang terdiri atas 5 (lima) Sasaran Strategis.



KODE SS	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
Stakeholder Perspective			
S.1	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Internasional	IKU S.1.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional
		Sub IKU 1	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional dan Multilateral
		Sub IKU 2	Persentase Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang Diterima dalam Setiap Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN
		Sub IKU 3	Persentase Respons Positif Terhadap Bantuan Kerja Sama Teknik Melalui Mekanisme Bilateral dan Triangular
S.2	Dukungan Diplomasi yang Optimal Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional	Sub IKU 4	Persentase Dukungan Konstituen Internasional Terhadap Promosi Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia
		IKU S.2.1	Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Perdagangan dengan Indonesia
		IKU S.2.2	Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia
S.3	Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional	IKU S.2.3	Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
		IKU S.3.1	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional
Customer Perspective			
C.1	Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik	IKU C.1.1	Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik
		Sub IKU 1	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan
		Sub IKU 2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran
		Sub IKU 3	Indeks Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik
		Sub IKU 4	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI
		IKU C.1.2	Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB
C.2	Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi Atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional	IKU C.2.1	Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Stakeholders Dalam Negeri
		Sub IKU 1	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri
		Sub IKU 2	Persentase Prakarsa/Rekomendasi pada Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri
		Sub IKU 3	Persentase Saran Kebijakan yang disetujui untuk Pelaksanaan Kesepakatan ASEAN di Dalam Negeri
		Sub IKU 4	Persentase Rekomendasi dari Forum Multilateral yang ditanggapi oleh Pemangku Kepentingan Nasional
Internal Business Process Perspective			
B.1	Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan yang Kuat	IKU B.1.1	Indeks Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan
		Sub IKU 1	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Maritim, Polkam dan Perbatasan
		Sub IKU 2	Persentase Kemajuan Perundingan Batas Maritim, Penegasan Batas Darat, dan Kerja Sama Perbatasan
		Sub IKU 3	Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia di Bidang Kemaritiman, Polkam dan Perbatasan yang Diterima pada Forum Regional dan Multilateral

KODE SS	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
		Sub IKU 4	Persentase Naskah Mengenai Kebijakan Indonesia di Bidang Maritim, Polkam dan Perbatasan yang Dimuat di Berbagai Media Berbahasa Asing
		Sub IKU 5	Persentase Diskursus Mengenai Kebijakan Indonesia di Bidang Maritim, Polkam dan Perbatasan yang Diterima di Berbagai Fora Internasional
B.2	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Kuat	IKU B.2.1	Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Sub IKU 1	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Sub IKU 2	Persentase Kemajuan Perundingan Perdagangan Bebas dan Investasi
		Sub IKU 3	Jumlah Data Economic Intelligence Negara/Wilayah Akreditasi yang Dimiliki
		Sub IKU 4	Jumlah Database Kebijakan Perdagangan yang Dimiliki di Forum Multilateral
		Sub IKU 5	Persentase Bantuan Kerja Sama Teknik yang Memberikan Peluang Ekonomi
		Sub IKU 6	Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Diterima pada Forum Regional dan Multilateral
		Sub IKU 7	Jumlah Promosi Trade, Tourism and Investment (TTI)
		Sub IKU 8	Persentase Naskah Mengenai Kebijakan Indonesia di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dimuat di Berbagai Media Berbahasa Asing
		Sub IKU 9	Persentase Diskursus Mengenai Kebijakan Indonesia di Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya yang Diterima Diberbagai Fora Internasional
B.3	Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI yang Prima	IKU B.3.1	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI
		Sub IKU 1	Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri
		Komponen 1	Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan.
		Komponen 2	Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan.
		Sub IKU 2	Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri
		Komponen 1	Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di Luar Negeri.
		Komponen 2	Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang Luar Negeri yang Diterapkan.
		Komponen 3	Persentase Pejabat/Staf yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri.
		Komponen 4	Persentase Implementasi Aplikasi Portal Pelayanan dan Perlindungan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri
		Sub IKU 3	Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri
		Komponen 1	Persentase Rekomendasi Kemenlu yang Diterima dalam Isu Perlindungan WNI-BHI pada Forum Perundingan Internasional.
		Komponen 2	Persentase Rekomendasi Kemenlu yang Diterima dalam Kebijakan/Regulasi Nasional Terkait Perlindungan WNI-BHI.
		Komponen 3	Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign Perlindungan WNI.
		Komponen 4	Persentase Respon Positif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat.

KODE SS	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
B.4	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Kuat	IKU B.4.1	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa Nasional Terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI
		IKU B.4.2	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa International terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI
		IKU B.4.3	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Portal Situs Kemenlu
		IKU B.4.4	Persentase Peningkatan Impresi dan Engagement pada Media Sosial Kemenlu
		IKU B.4.5	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik
Learning and Growth Perspective			
L.1	SDM Kemenlu yang Kompeten	IKU L.1.1	Persentase Pejabat Kemenlu yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
L.2	Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik	IKU L.2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu
		IKU L.2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu
		IKU L.2.3	Indeks Engagement Pegawai Kemenlu
L.3	Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Memadai	IKU L.3.1	Persentase Sarana dan Prasarana Kemenlu yang dipenuhi sesuai dengan Rencana
L.4	Sistem Informasi Manajemen Kemenlu yang Terintegrasi	IKU L.4.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
		IKU L.4.2	Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)
L.5	Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel	IKU L.5.1	Persentase Realisasi Anggaran Kemenlu
		IKU L.5.2	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

II.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Kementerian Luar Negeri

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Kementerian Luar Negeri telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terdiri atas 14 Sasaran Strategis (SS) selama periode satu tahun dimana pengukurannya dilakukan melalui instrumen realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), berdasarkan target kinerja yang akan dicapai. Penetapan Kinerja Kementerian Luar Negeri (*Wide*) Tahun 2018, secara rinci sebagai berikut:

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholder Perspective				
S.1	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Internasional	IKU S.1.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	85,33
S.2	Dukungan Diplomasi yang Optimal Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional	IKU S.2.1	Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Perdagangan dengan Indonesia	79
		IKU S.2.2	Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia	39
		IKU S.2.3	Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia	59
S.3	Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional	IKU S.3.1	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	4 (skala5)
Customer Perspective				
C.1	Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik	IKU C.1.1	Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik	4 (skala4)
		IKU C.1.2	Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenpanRB	TOP 99
C.2	Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi Atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional	IKU C.1.2	Persentase Tindak Lanjut/ Implementasi Kesepakatan Internasional oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri"	86,90%
Internal Business Process Perspective				
B.1	Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan yang Kuat	IKU B.1.1	Indeks Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan	95,44
B.2	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Kuat	IKU B.2.1	Indeks Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya	94,48
B.3	Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI yang Prima	IKU B.3.1	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	82,21
B.4	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Kuat	IKU B.4.1	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa Nasional Terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	90%
		IKU B.4.2	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa International Terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	90%
		IKU B.4.3	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Portal Situs Kemenlu	10%
		IKU B.4.4	Persentase Peningkatan Impresi dan Engagement pada Media Sosial Kemenlu	20%
		IKU B.4.5	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	15

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Learning and Growth Perspective				
L.1	SDM Kemenlu yang Kompeten	IKU L.1.1	Persentase Pejabat Kemenlu yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	85%
L.2	Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik	IKU L.2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	90
		IKU L.2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	76 (BB)
		IKU L.2.3	Indeks <i>Engagement</i> Pegawai Kemenlu	3,75 (skala 5)
L.3	Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Memadai	IKU L.3.1	Persentase Sarana dan Prasarana Kemenlu yang dipenuhi sesuai dengan Rencana	100%
L.4	Sistem Informasi Manajemen Kemenlu yang Terintegrasi	IKU L.4.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3 (skala 5)
		IKU L.4.2	Indeks Peningkatan e-Government Indonesia (PEGI)	3,55 (skala 4)
L.5	Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel	IKU L.5.1	Persentase Realisasi Anggaran Kemenlu	100%
		IKU L.5.2	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	4 (WTP)

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.528.845.372.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	1.016.908.688.000,-
3	Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	577.441.000.000,-
4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	69.186.051.000,-
5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	46.020.058.000,-
6	Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	59.098.302.000,-
7	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	618.471.405.000,-
8	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	93.881.322.000,-
9	Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	40.681.495.000,-
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	137.701.366.000,-
11	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	31.399.139.000,-
12	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	31.134.891.000,-
Anggaran Kemenlu 2017		7.250.769.089.000,-

Jakarta, 27 Januari 2017

Menteri Luar Negeri

Retno L. P. Marsudi



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Laporan Kinerja
Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
Tahun 2018

III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

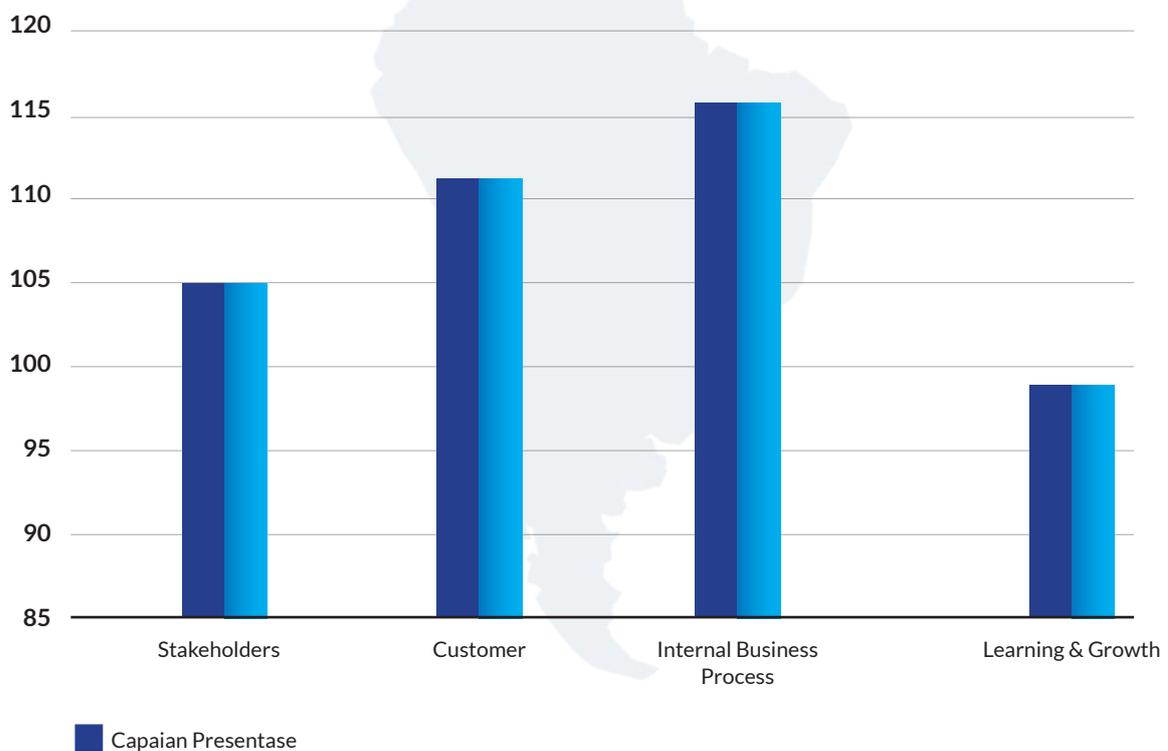
Kementerian Luar Negeri

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2018 dilakukan dengan cara mem-bandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja organisasi Kementerian Luar Negeri sebesar 106,96%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada Tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Tabel Capaian Kinerja Organisasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2018

No	Perspektif	Bobot	Capaian
1	<i>Stakeholders</i>	25%	105,29%
2	<i>Customer</i>	15%	110,40%
3	<i>Internal Business Process</i>	30%	109,97%
4	<i>Learning and Growth</i>	30%	98,29%
Nilai Kinerja Organisasi			105,36%

Grafik Capaian Kinerja Organisasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2018



Berikut ini merupakan perbandingan capaian kinerja organisasi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2017 dan 2018:

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2017 dan 2018

No	Perspektif	Bobot	Capaian 2017	Capaian 2018
1	Stakeholders	25%	107,69%	105,29%
2	Customer	15%	89,85%	110,40%
3	Internal Business Process	30%	107,74%	109,97%
4	Learning and Growth	30%	105,27%	98,29%
Nilai Kinerja Organisasi			104,31%	105,36%

Dari tabel perbandingan di atas terlihat kenaikan capaian di perspektif *customer* dan *internal business process*, namun terjadi penurunan pada perspektif *stakeholders* dan *learning and growth*. *Summary* dari capaian tiap perspektif ditampilkan pada infografis berikut ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	PENCAPAIAN 2018	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	PENCAPAIAN 2018
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Internasional	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	85,33	94,69	110,96%	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri yang kuat	Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	90,00%	96,36%	107,07%
Dukungan Diplomasi yang Optimal Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	79	111	120,00%		Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	90,00%	83,12%	92,36%
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	39	35	89,74%		Persentase peningkatan jumlah pengunjung portal situs Kemenlu	10,00%	46,29%	120,00%
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	59	85	120,00%		Persentase peningkatan impresi dan engagement pada media sosial Kemenlu	20,00%	140,39%	120,00%
Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	4	3,8	95,00%	SDM Kemenlu yang Kompeten	Persentase pejabat Kemenlu yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	85%	97,37	1114,55%
Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik	Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik	4	3,84	96,00%	Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	90	76,44	84,93%
	Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB	TOP 99	TOP 40	120,00%		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	76	75,56	99,42%
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional	Persentase tindak lanjut/ implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri	86,90	100,10	115,19%		Indeks Engagement pegawai Kemenlu	3,75	3,42	91,20%
Diplomasi maritim, Polkam dan perbatasan yang kuat	Indeks diplomasi maritim, polkam dan perbatasan	95,44	105,73	110,78%	Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Memadai	Persentase Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana	100%	80,80%	80,80%
Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Kuat	Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya	94,48	115,16	120%	Sistem Informasi Manajemen Kemenlu yang Terintegrasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3	3,5	116,67%
						Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)	3,55	3,37	94,93%
Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI yang Prima	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	82,21	90,62	110,23%	Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel	Persentase realisasi anggaran Kemenlu	100%	96,15%	96,15%
						Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	WTP	WTP	100,00%

III.1 CAPAIAN KINERJA

Stakeholders Perspective

Sasaran Strategis (S.1): Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Internasional

Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam kerja sama internasional merupakan amanat dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 pada Sasaran Utama Bidang Politik Luar Negeri. Pencapaian sasaran strategis Kementerian Luar Negeri pada “Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam kerja sama internasional” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional”, yang terdiri atas 4 (empat) Sub IKU, yaitu:

IKU “Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di dunia Internasional”

IKU ini untuk mengukur pengaruh Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional

1. Sub IKU-1: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral;
2. Sub IKU-2: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN;
3. Sub IKU-3: Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular;
4. Sub IKU-4: Persentase dukungan konstituen inter-nasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia.

Pada tahun 2018, capaian IKU “Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di dunia internasional” **ditargetkan sebesar 85,33**, dengan **realisasi sebesar 94,69** dan **capaian 110,96%**. Perbandingan yang diperoleh dari IKU dan masing-masing Sub IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian IKU S.1 Tahun 2017 dan 2018

No	IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di dunia internasional	79,73	98,39	123,41% (Toleransi 120%)	85,33	94,69	110,96%

Tabel Perbandingan Capaian Sub IKU S.1 Tahun 2017 dan 2018

No	Sub IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral (Sub IKU-1)	67,94%	94,55%	139,17%	78,33%	91,84%	117,24%
2	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN (Sub IKU-2)	92%	95,04%	103,30%	92%	98,48%	107,05%

3	Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular (Sub IKU-3)	90%	97,42%	108,24%	93%	94,63%	101,75%
4	Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia (Sub IKU-4)	80%	110,42%	138,03%	85%	96,64%	113,70%
						Realisasi	94,69
						Target	85,33
						Capaian	110,96%
						Batas Toleransi	120%

Jika dibandingkan dengan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2015-2019 yang telah direvisi peta strategi dan indikator kinerja utamanya melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 84/B/RO/I/2017/01 tahun 2017 tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri tahun 2017, target IKU “Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional” pada tahun 2018 (sebesar 78,33) telah direalisasikan yaitu sebesar 94,69.

Analisis Sub IKU-1: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral

Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral didasarkan atas jumlah pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia di forum regional dan multilateral serta jumlah pencalonan yang berhasil dibandingkan dengan jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia serta jumlah pencalonan yang diusulkan. Sepanjang tahun 2018, realisasi sub IKU “Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral” sebesar **91,84%** dari target **78,50%**, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-1 S.1 Tahun 2018

Sub IKU-1 S.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral	Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia + jumlah pencalonan yang berhasil	90
	Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia + jumlah pencalonan yang diusulkan	98
Realisasi		91,84%
Target		78,33%
Capaian		117,24%
Batas Toleransi		120%

Sepanjang tahun 2018, Kementerian Luar Negeri terus berupaya mendorong peningkatan peran dan pengaruh Indonesia melalui kepemimpinan di berbagai fora internasional. Kementerian Luar Negeri berinisiatif dan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai chair dan host dari berbagai pertemuan internasional untuk mempromosikan agenda nasional dan kontribusi Indonesia pada penyelesaian tantangan global di arena politik, ekonomi, perubahan iklim dan lingkungan hidup, maritim, maupun pembangunan berkelanjutan.

Kepemimpinan Indonesia dalam forum di kawasan Amerika dan Eropa terwujud dengan kedudukan atau peran Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum regional dan multilateral, misalnya sebagai *chair, co-chair, host, co-host, member of bureau*, dan keberhasilan pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional (OI) sebagai hasil dari peran/kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional, khususnya di wilayah Amerop. Sepuluh pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia tersebut dihasilkan dalam pertemuan-pertemuan sebagai berikut:

1)	Perundingan Putaran ke-4 <i>Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> , Solo, 19-23 Februari 2018;
2)	Perundingan Putaran ke-14 <i>Indonesia-EFTA CEPA</i> , Jenewa, 26 Februari-2 Maret 2018;
3)	Perundingan Putaran ke-15 <i>Indonesia-EFTA CEPA</i> , Banten, 23-27 April 2018;
4)	Perundingan Putaran ke-5 <i>Indonesia-EU CEPA</i> , Brussel, 9-13 Juli 2018;
5)	<i>Asia-Europe Meeting (ASEM) Transport Senior Officials' Meeting (SOM)</i> , Medan, 18-19 Juli 2018;
6)	Perundingan Putaran ke-15bis <i>Indonesia-EFTA CEPA</i> , Yogyakarta, 27-31 Agustus 2018;
7)	Perundingan Putaran ke-6 <i>Indonesia-EU CEPA</i> , Palembang, 15-19 Oktober 2018;
8)	<i>Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) SOM</i> , Vientiane, Laos, 19-22 November 2018;
9)	<i>3rd Indonesia-EU Political Dialogue</i> , Jakarta, 29 November 2018;
10)	<i>3rd Indonesia-EU Joint Committee</i> , Brussel, 11 Desember 2018.

Kemajuan besar berhasil dicapai pada tahun 2018 dengan diselesaikannya perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) atau disingkat "IE-CEPA" (*Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Pada 16 Desember 2018, Indonesia dan empat negara anggota EFTA telah menandatangani Perjanjian IE-CEPA di Jakarta. Keempat negara tersebut adalah Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia.

Penandatanganan tersebut menandai selesainya perundingan perjanjian perdagangan barang, jasa, dan investasi antara Indonesia dan EFTA. Melalui perjanjian ini Indonesia akan mendapatkan manfaat di sektor perdagangan, jasa, dan investasi. EFTA akan menjadi pintu masuk produk-produk ekspor unggulan Indonesia, salah satunya minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya. Belakangan CPO kesulitan masuk pasar Uni Eropa (UE) karena kampanye negatif dan kebijakan UE yang mengeluarkan CPO dari daftar energi terbarukan.

Selain itu, di sektor jasa (*Trade in Services*) Indonesia akan mendapatkan fasilitas magang di sejumlah sektor di empat negara tersebut. Dalam Perundingan Putaran 15bis IE-CEPA di Yogyakarta, 27-31 Agustus 2018, disepakati Indonesia akan mendapatkan tambahan kuota dan ijin tinggal untuk akses pasar tenaga kerja menjadi 500 *Graduate Trainee* selama 6 bulan dan penambahan sub sektor untuk Independent Professional (IP) selama 4 bulan. Sementara itu, di sektor investasi, perusahaan dari empat negara tersebut akan meningkatkan investasi dan transfer teknologi. Dengan demikian, akan ada tambahan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja di Indonesia.

Di samping itu, sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan ASEM *Transport Ministers' Meeting* KE-4 (ASEM TMM4) di Bali, 4 September 2017, Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEM *Transport Senior Officials' Meeting* (ASEM TSOM) di Medan, 18-19 Juli 2018. Kesuksesan penyelenggaraan ASEM TMM4 pada tahun 2017 telah meningkatkan peran Indonesia dalam ASEM khususnya di bidang transportasi, sehingga pada pertemuan ASEM TSOM di Medan telah berhasil disepakati paragraf masukan dari sektor transportasi untuk *outcome document* KTT ASEM ke-12 yang disampaikan pada ASEM SOM di Tokyo, 13-14 September 2018.

Capaian yang berhasil diperoleh melalui kepe-mimpinan Indonesia tersebut antara lain disepakatinya masukan dari sektor transportasi untuk *outcome document* KTT ASEM ke-12 dan disepakatinya usulan Indonesia mengenai FEALAC Day dan penyelenggaraan business forum di sela-sela FEALAC FMM ke-9 tahun 2019.

Kesuksesan perundingan hingga akhirnya IEFTA-CEPA dapat ditandatangani merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian prioritas utama Presiden RI untuk membuka pasar baru dan menarik investasi. Disamping itu, keberhasilan perundingan IEFTA-CEPA diyakini akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia berupa pembukaan akses pasar produk Indonesia ke pasar Uni Eropa, peningkatan ekspor barang dan jasa, investasi serta meningkatkan daya saing Indonesia di Eropa dan bahkan di pasar global.

Pada tahun 2018, Indonesia telah berhasil terpilih untuk menduduki posisi-posisi strategis di berbagai organisasi internasional melalui mekanisme pencalonan pada OI. Tujuh dari total 8 pencalonan Indonesia di tahun 2018 telah berhasil. Dari total 8 pencalonan Indonesia tersebut, 5 di antaranya merupakan pencalonan negara, sedangkan 3 lainnya merupakan pencalonan individu. Seluruh pencalonan negara tahun 2018 telah berhasil dimenangkan. Adapun untuk pencalonan individu, 2 dari 3 pencalonan berhasil. Keberhasilan pencalonan tahun ini merupakan capaian yang mencerminkan peningkatan profil dan peran Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, adil, dan sejahtera serta sebagai pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Keberhasilan utama pencalonan Indonesia pada tahun 2018, yang juga merupakan salah satu Program Prioritas Nasional Pemerintah Indonesia, adalah terpilihnya Indonesia untuk duduk sebagai Anggota Tidak Tetap pada Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. Indonesia berhasil memperoleh 144 dukungan dari total 190 negara anggota PBB yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional bagi Indonesia untuk berkiprah dalam kerja sama keamanan dan perdamaian internasional.



UN Photo/Eskinder Debebe

■ Kiri ke Kanan: Menteri Luar Negeri Jerman, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Menteri Luar Negeri Indonesia, Menteri Luar Negeri Belgia (negara-negara terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020) berfoto bersama setelah pemungutan suara dalam Sidang Umum PBB di New York, 8 Juni 2018.

Indonesia juga telah berhasil terpilih sebagai anggota Dewan *International Seabed Authority (ISA)* periode 2019-2022, anggota *Advisory Committee* pada *International Mobile Satellite Organisation (IMSO)* periode 2018-2020, dan anggota Dewan *International Telecommunication Union (ITU)* periode 2018-2022. Posisi-posisi tersebut memberi peluang strategis bagi Indonesia untuk terlibat aktif menentukan program dan kegiatan organisasi-organisasi internasional tersebut. Selain itu, Indonesia juga terpilih kembali sebagai anggota *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* periode 2019-2025, yang merupakan bentuk kepercayaan bagi Indonesia untuk melanjutkan kontribusinya dalam pembahasan hukum dagang internasional.

Tidak hanya itu, dua orang warga negara Indonesia juga telah berhasil terpilih menduduki jabatan-jabatan strategis di OI, yakni Bapak Thomas Gatot Hendarto sebagai Auditor Eksternal pada *International Anti-Corruption Academy (IACA)* periode 2019-2021 dan Ibu Risnawati Utami sebagai anggota *Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* periode 2019-2022.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU ini utamanya disebabkan oleh keterlambatan penyampaian rencana pencalonan dari Kementerian/Lembaga, yang berakibat pada kurangnya waktu bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penggalangan dukungan pencalonan. Faktor kesiapan kandidat individu Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan strategis pada Organisasi Internasional yang kurang dianalisis secara tepat juga turut andil dalam ketidakberhasilan pencalonan yang diajukan. Di samping itu, juga terdapat kendala dalam pelaksanaan sejumlah pertemuan yang diprakarsai oleh Indonesia. Pada umumnya kendala itu dapat bersifat teknis seperti penjadwalan pertemuan para pemimpin pertemuan, namun juga dapat berbentuk kendala eksternal seperti, terjadinya bencana alam yang mengubah jadwal dan tempat pertemuan. Terkait dengan kepemimpinan Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa tidak mengalami kendala yang berarti karena sudah melakukan mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan terkait sub IKU ini.

Dalam **mengatasi kendala** tersebut, Kementerian Luar Negeri berupaya meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri juga senantiasa memberikan analisis peluang kemenangan Indonesia di berbagai pencalonan yang diajukan dengan melihat postur Indonesia/kandidat Indonesia pada isu terkait.

Analisis Sub IKU-2: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

Selama tahun 2018, Indonesia terus berupaya meningkatkan kepemimpinannya di ASEAN. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN selalu dilandasi oleh kepentingan nasional. Diplomasi Indonesia dalam rangka kerja sama kemitraan ASEAN merupakan upaya aktif Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, dan damai di berbagai aspek kehidupan khususnya untuk mendukung perwujudan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

IKU Persentase Rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN merupakan IKU yang baru. Pengembangan IKU baru ini dilaksanakan untuk dapat memfokuskan pengukuran kinerja Kementerian Luar Negeri kepada rekomendasi yang bersifat lebih signifikan. Sepanjang tahun 2018, dari 132 rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang disampaikan oleh Kemenlu dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN, 130 berhasil diterima dengan baik.

Tabel Capaian Sub IKU-2 S.1 Tahun 2018

Sub IKU-2 S.1	Informasi Kinerja	Jumlah	Nilai
Persentase Rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN	Jumlah rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima	130	98,48%
	Jumlah rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang disampaikan	132	100%
	Target		92%
	Realisasi		98,48%
	Capaian		107,05%

Sejak awal tahun 2018, Indonesia telah mengedepankan konsep Indo-Pasifik, suatu konsep yang diinisiasi Indonesia untuk menyikapi perkembangan geopolitik global. Konsep ini secara konsisten diajukan Indonesia di setiap tingkatan pertemuan ASEAN baik di level SOM, Menteri maupun KTT. Konsep Indo-Pasifik diajukan pertama kali oleh Indonesia pada *ASEAN Foreign Ministers' Meeting Retreat (AMM Retreat)*, Januari 2018 dan masih dalam pembahasan hingga KTT ke-33 ASEAN bulan November 2018. Konsep Indo-Pasifik ini mendapatkan sambutan yang positif dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Konsep ini dikembangkan di atas prinsip keterbukaan, inklusif, transparan dan mengedepankan kerja sama dan persahabatan dengan menjadikan ASEAN sebagai motor utamanya. Indonesia tetap menjadikan sentralitas ASEAN sebagai titik penjuror kerja sama ini. ASEAN harus mampu memainkan perannya dan mengubah potensi ancaman dan tantangan di kawasan akibat dari dinamika geopolitik menjadi sebuah peluang kerja sama.

Di level Kepala Negara/Pemerintahan, Presiden Joko Widodo secara resmi memperkenalkan konsep ini pada saat KTT ASEAN – India, Januari 2018. Pada KTT ke-33 bulan November, konsep Indonesia akhirnya disepakati untuk dikembangkan sebagai konsep bersama ASEAN. Diharapkan, di 2019 pada saat keketuaan Thailand, konsep ini dapat dimunculkan sebagai sebuah *Stand Alone ASEAN Leaders' statement on ASEAN's Collective Outlook on Indo-Pacific* yang menegaskan posisi dan solusi dari ASEAN untuk menyikapi perkembangan politik terkini di kawasan.

Peran aktif Indonesia juga terus dikedepankan di sepanjang tahun 2018 dalam penyelesaian sejumlah isu-isu krusial di kawasan. Sebagai *honest broker*, modalitas Indonesia untuk upaya pro aktif ini sangatlah memungkinkan. Dalam isu Laut China Selatan, Indonesia berperan aktif dalam negosiasi untuk mendorong disepakatinya *Single draft CoC Negotiating Text*, hingga disahkannya dokumen tersebut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan China pada pertemuan *ASEAN Post Ministerial Conferences (PMC) Plus One with China* tanggal 2 Agustus 2018 di Singapura. Dokumen ini merupakan pengembangan dan sekaligus implementasi *Framework of CoC* yang merupakan inisiatif Indonesia dan telah disepakati 2017 lalu.

Selain memelihara posisi sebagai *traditional leader of ASEAN*, Indonesia berhasil mendorong *collective leadership* ASEAN yang kuat dan bertanggung jawab untuk menjawab dinamika kawasan dan tantangan global. Atas inisiatif dan dorongan Indonesia, para Menlu ASEAN pada pertemuan *ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)*, April 2018 sepakat mengeluarkan *Foreign Ministers' Statement on the Development in the Korean Peninsula* dan Surat Bersama terkait Final Document GNB. Hal ini merefleksikan kesatuan ASEAN dalam menyikapi perkembangan di tingkat Kawasan. Kedua hal di atas juga menunjukkan bahwa peran aktif Indonesia dalam menentukan arah ASEAN sangat penting. Posisi dan postur Indonesia di ASEAN menjadikannya sebagai pihak yang kredibel dan dipercaya oleh semua pihak.

Dalam pembahasan isu penanggulangan teroris-me, secara khusus Presiden Joko Widodo menyerukan agar upaya-upaya yang dilakukan haruslah mengutamakan peningkatan kerja sama pengembangan kapasitas pencegahan terorisme melalui program-program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi, pelibatan generasi milenial, organisasi keagamaan, dan para mantan narapidana terorisme yang sudah insaf dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian dengan memberikan contoh-contoh yang telah dilakukan Indonesia.

Sebagai langkah tindak lanjut atas arahan Presiden ini, Kementerian Luar Negeri dan seluruh Kementerian atau Lembaga terkait lainnya di bawah pilar politik keamanan melakukan upaya diplomasi yang terkoordinir di semua pertemuan ASEAN untuk melaksanakannya. Hasilnya adalah bahwa pada *12th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (12th AMMTC)*, November 2018, Indonesia berhasil mendorong disahkannya *ASEAN Plan of Action (PoA) to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism 2018-2025*. *Plan of Action* ini merupakan hasil dari kepemimpinan Indonesia selaku *lead-shepherd* (negara koordinator) dalam menetapkan rencana aksi yang akan dilakukan ASEAN untuk menangani isu terorisme di kawasan. Contoh sukses Indonesia dalam penanganan isu ini menjadi modal penting bagi diterimanya kepemimpinan Indonesia untuk menyusun PoA. Di tahun 2019 mendatang, Indonesia sudah menyiapkan langkah lanjutan guna menyusun rencana kerja lintas sektor dan lintas pilar di ASEAN guna mengimplementasikan PoA dimaksud.

Dua rekomendasi yang diajukan Indonesia dan ditolak kesemuanya terjadi dalam pertemuan ASEAN *Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*. Rancangan resolusi terkait krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar yang merupakan inisiatif Indonesia dan didukung Malaysia ditolak oleh delegasi Parlemen Myanmar. Negosiasi yang

deadlock mengakibatkan tidak disetujuinya seluruh rancangan resolusi di Komite Politik termasuk rancangan resolusi usulan Indonesia. Selain itu, rekomendasi parlemen Indonesia untuk meng-gol-kan resolusi mengenai Amandemen Statuta AIPA yang berisi agar sistem pengambilan keputusan di AIPA tidak lagi menggunakan sistem konsensus namun menggunakan sistem voting, juga ditolak dan tidak mendapatkan dukungan dari delegasi parlemen negara anggota ASEAN lainnya.

Beberapa rekomendasi dan prakarsa lainnya yang disetujui di pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dalam rentang tahun 2018 diantaranya adalah :

- (1) **Pertemuan Sesi Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 ASEAN, Singapura, 27 April 2018.**
Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia yang menyampaikan pentingnya Gerakan menuju 100 *Smart City*. ASCN diharapkan dapat memaksimalkan kemajuan teknologi untuk mewujudkan data kelola pemerintah kota yang efektif, transparan dan terpercaya. Presiden RI menegaskan pentingnya memastikan tujuan akhir ASCN untuk membangun pola pikir, sikap, karakter masyarakat ASEAN.
- (2) **Sesi Pleno KTT-33 ASEAN, Singapura, 13 November 2018**
Atas usul Indonesia, ASEAN sepakat untuk mengirim sebuah needs assessment team melalui AHA Center ke Myanmar untuk identifikasi bidang kerja sama untuk fasilitasi pemulangan pengungsi ke Rakhine State. Indonesia juga meminta agar Myanmar bisa memberikan jaminan keselamatan dan keamanan para pengungsi Rohingya untuk kembali ke tempat asal tanpa rasa mendapatkan ancaman dan kekerasan.
- (3) **Rekomendasi Indonesia pada pertemuan Tingkat Tinggi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tanggal 14 November 2018**
di Singapura, agar target penyelesaian RCEP dapat dicapai pada putaran perundingan tahun 2019 diterima oleh 15 negara RCEP lainnya, sebagaimana tercantum dalam *Leaders joint statement* para pemimpin 16 negara anggota RCEP pada pertemuan tersebut.
- (4) **Pada putaran pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke 91 tanggal 5-10 November 2018**
Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah menyelesaikan putaran perundingan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), sehingga pada tahun 2019 perjanjian ini telah siap untuk ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN.
- (5) **Pada KTT Ke-13 Asia Timur (East Asia Summit) di Singapura, 15 November 2018,**
Indonesia mengusulkan perlunya penebalan kerja sama di Kawasan Samudra Pasifik dan Hindia melalui Indo-Pacific *Outlook* yang fokus akan kerja sama maritim, konektivitas, dan pencapaian SDGs. Indonesia juga berhasil mendorong pengesahan *EAS Leaders' Statement on Combatting Marine Plastic Debris* yang merupakan prakarsa Indonesia serta mendorong pemajuan sistem perdagangan *free and fair*, penguatan mekanisme regional *currency swap* dalam kerangka ASEAN+3, sinergi kebijakan dengan Lembaga Inter-nasional seperti IMF, serta penguatan fundamental perekonomian domestik serta perlunya menyelesaikan perundingan RCEP di tahun 2019. Tidak henti Indonesia juga menyuarakan pentingnya penyelesaian konflik Israel-Palestina untuk mengacu pada berbagai Resolusi DK PBB yang telah ada.

Kendala dalam kerja sama ASEAN adalah adanya perbedaan persepsi dan prioritas di antara Negara Anggota ASEAN. Perbedaan ini masih sangat dirasakan pada tahun 2018 dimana terdapat kontestasi kepentingan masing-masing negara anggota dengan bayang-bayang pengaruh negara-negara besar terhadap isu-isu strategis di ASEAN. Hal yang sama pun dihadapi Indonesia dalam mendorong rekomendasi prakarsa yang diusung agar dapat disetujui, termasuk di dalamnya mengenai pentingnya konsep Indo-Pasifik bagi ASEAN.

Sebagai **proyeksi ke depan**, untuk memastikan capaian Indonesia bisa lebih maksimal, sinergi ketiga Pilar Masyarakat ASEAN di lingkungan K/L Indonesia perlu ditingkatkan, utamanya aspek koordinasi lintas pilar dan lintas sektor. Keadaan yang dicapai ASEAN saat ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar ASEAN dapat



■ Presiden Jokowi saat berbincang dalam forum EAS di Suntec Convention Centre, Singapura, Kamis (15/11).
(Foto: BPMI)

lebih berkontribusi bagi terwujudnya perdamaian dan kemakmuran di kawasan dan dunia. Dalam hal ini, inisiatif Indonesia mengenai Konsep Indo-Pasifik pada dasarnya dapat menjadi peluang dimana konsep ini bisa berfungsi sebagai global platform ASEAN sekaligus penegasan sentralitas ASEAN untuk memastikan relevansi ASEAN di tengah perubahan dan dinamika yang terjadi di kawasan dan dunia.

Analisis Sub IKU-3: Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

Dalam rangka meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional serta melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan 14 (empat-belas) bantuan teknis dalam bentuk program peningkatan kapasitas (pelatihan dan lokakarya) yang diikuti oleh 384 peserta dari 53 negara berkembang di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika Tengah, Karibia, dan Eropa Timur di dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Dari pelaksanaan program-program tersebut, 335 peserta mengembalikan kuesioner yang disebarkan di akhir kegiatan dan 317 di antaranya menyatakan kepuasan terhadap penyelenggaraan kegiatan.

Tabel Capaian Sub IKU-3 S.1 Tahun 2018

Sub IKU-2 S.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular	Jumlah respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik	317
	Jumlah seluruh respon terhadap bantuan kerja sama teknik	335
	Realisasi	94,63%
	Target	93%
	Capaian	101,75%

Masing-masing program peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan tersebut ditujukan sebagai salah satu kontribusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 serta memenuhi komitmen Pemerintah RI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral yang memperhatikan prioritas dan kepentingan politik/sosial/ekonomi Indonesia. Bidang-bidang kegiatan dipilih berdasarkan ketersediaan keahlian yang menjadi kapasitas unggulan (*flagship sector*) KSST Indonesia serta mempertimbangkan permintaan/kebutuhan dari calon negara-negara penerima bantuan. Dalam kaitan ini, selama tahun 2018, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan program peningkatan kapasitas di bidang pertanian, perikanan, infrastruktur, pengembangan UKM, micro-finance, keprotokolan, kesehatan, dan manajemen risiko bencana.

Daftar kegiatan

1. *International Workshop on Microfinance for Palestine, Amman, Yordania, 25-29 Maret 2018;*
2. *International Workshop on Disaster Risk Management for Countries in the Regions of Pacific, Africa, Europe, South America and the Caribbean, Banda Aceh, NAD, 16-25 April 2018;*
3. *International Training on SMEs Empowerment for Asia and Pacific Countries, Bandung dan Jakarta, 22 April – 1 Mei 2018;*
4. *International Training on Aquaculture for African Countries, Banyuwangi, Jawa Timur, 15-21 Juli 2018;*
5. *International Training on Fisheries for Asia Pacific Countries, Banyuwangi, Jawa Timur, 15-21 Juli 2018;*
6. *International Workshop on Infrastructure for Afghanistan: Sharing Best Practices to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs); Tangerang, Banten, 26 Agustus – 1 September 2018;*
7. *International Training on Processing Technology of Agricultural and Animal Husbandry Products for African Countries: Sharing Best Practices to Achieve SDGs, Malang dan Batu, Jawa Timur, 1-10 September 2018;*
8. *Training on Youth and Women Empowerment for Border Communities in Indonesia and Papua New Guinea, Jayapura, Papua, 28 Oktober – 1 November 2018;*
9. *Dispatch of Expert for Coconut Shell Craft Training in Contributing to the Global SDGs Agenda, Belize City, Belize, 5-9 November 2018;*
10. *International Workshop on Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Empowerment for Palestine and Jordan: Working Together to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs), Amman, Yordania, 17-21 November 2018;*
11. *Dispatch of Expert on Health and Medical Assistance for Timor Leste, Dili, Timor-Leste, 18-23 November 2018;*
12. *Workshop on International Conference Management for Gambia: Partnership in Achieving SDGs, Banjul, Gambia, 27-30 November 2018;*
13. *Dispatch of Expert on Agriculture for Myanmar, Yangon, Myanmar, 6-11 Desember 2018;*
14. *International Workshop on Young Social Entrepreneurship: Achieving SDGs through Creative Economy, Jayapura, Papua, 11 Desember 2018.*

Metode pengukuran IKU ini dilakukan dengan menggunakan data dukung berupa kuesioner yang disebarkan kepada peserta pada akhir pelaksanaan tiap-tiap kegiatan. Kuesioner tersebut terdiri dari kumpulan pertanyaan untuk mengukur kualitas komponen penyelenggaraan kegiatan, yaitu: materi, narasumber, dan fasilitas. Peserta dapat memberikan skala 1 sampai 5 pada masing-masing komponen yang dinilai. Skala 3 sampai dengan 5 dikategorikan memuaskan (positif), sedangkan skala 1 sampai dengan 2 dikategorikan sebagai tidak memuaskan (tidak positif).

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: (1) faktor internal, yaitu keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan, standar biaya khusus dalam pelaksanaan bantuan teknis (per diem dan remunerasi/honorarium tenaga ahli) yang belum tersedia, keahlian berbahasa Inggris tenaga ahli yang terbatas; (2) faktor eksternal, yaitu kondisi sosial/keamanan/cuaca di negara target penerima bantuan yang tidak kondusif, keahlian berbahasa Inggris calon peserta yang terbatas, ketidaksiapan negara target untuk menerima bantuan teknis dan/atau menerima tenaga ahli Indonesia, dan ketersediaan waktu institusi mitra pelaksana kegiatan.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut di atas antara lain melakukan koordinasi di antara unit terkait untuk pembagian beban kerja antara bidang substansi dan bidang administrasi, pelaksanaan *Training of Trainers (ToT)* bagi tenaga ahli Indonesia tentang pengembangan keahlian berbahasa Inggris, dan koordinasi yang intensif dengan Perwakilan RI untuk memperketat proses seleksi peserta dan mengatur keberangkatan peserta dari negara asal.

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan dan memastikan aspek akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, Kementerian Luar Negeri akan mengusulkan Standar Biaya Khusus dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan dalam kerangka KSST.

Analisis Sub IKU-4: Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia

Definisi dukungan konstituen Internasional dalam hal ini merupakan bentuk partisipasi dan pernyataan mendukung yang diberikan oleh konstituen internasional. Konstituen internasional adalah pribadi-pribadi maupun lembaga asing yang secara aktif mengambil bagian dalam proses kegiatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan politik luar negeri RI dan citra Indonesia di luar negeri. Promosi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan, bersifat persuasif, dilakukan secara intensif dan terus menerus. Definisi aset diplomasi publik adalah hal-hal yang dimiliki Indonesia, *to win the hearts and minds, domestically and internationally*, antara lain sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi yang progresif, masyarakat yang pluralis dan toleran, Islam yang moderat dan keragaman budaya.

IKU Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia mengukur sejauh mana bentuk partisipasi dan pernyataan mendukung yang diberikan oleh konstituen internasional maupun domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia. Definisi aset diplomasi publik sendiri adalah hal-hal yang dimiliki Indonesia, *to win the hearts and minds, domestically and internationally*, antara lain sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi yang progresif, masyarakat yang pluralis dan toleran, Islam yang moderat dan keragaman budaya.

Selama tahun 2018, tercatat sebanyak 96 negara dengan 74 yang menyatakan dukungan terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia, serta 747 orang konstituen internasional, atau sebesar 113.69% (dukungan konstituen internasional dan terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia), sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-4 S1 Tahun 2018

Persentase Dukungan Konstituen Internasional terhadap Promosi Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia	Jumlah negara yang hadir	96
	Jumlah total negara yang diundang	120
	Jumlah pernyataan yang mendukung	74
	Jumlah total pernyataan	81
	Jumlah peserta yang hadir	747
	Jumlah total peserta yang diundang	630
Formula	$\frac{(((\text{Jumlah negara yang hadir dibagi Jumlah total negara yang diundang}) \times 100\%)) + ((\text{Jumlah pernyataan yang mendukung dibagi Jumlah total pernyataan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah peserta yang hadir dibagi Jumlah total peserta yang diundang}) \times 100\%))}{3}$ $\frac{(((96/120) \times 100\%) + ((74/81) \times 100\%) + ((747/630) \times 100\%))}{3}$	
Realisasi	96.64%	
Target	85%	
Capaian	113.69%	

Walaupun capaian pada tahun 2018 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2017, namun masih melampaui target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. Hal tersebut dikarenakan formula perhitungan IKU ini berbeda dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, aspek pernyataan yang mendukung dan negara yang hadir pada siding BDF juga turut dimasukkan dalam formula perhitungan. Adapun perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Kementerian Luar Negeri, TA. 2015, TA 2016 dan TA 2017 pada capaian IKU S1.2 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia				
Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah Dukungan atas aset-aset Diplomasi Publik	5.493 dukungan dari 6.990 konstituen (79%)	4.418 dukungan	106 dukungan	
Jumlah Konstituen yang mengikuti program promosi aset-aset Diplomasi Publik	102.232 kehadiran dari 85.290 target undangan (120%)	3.346 target konstituen	96 target konstituen	
Realisasi	99,22%	90,01%	110,42%	96,64%
Capaian	110,24%	112,58%	120%	113,69%

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri untuk *outcome* dukungan terhadap aset-aset diplomasi publik adalah BSBI, *Interfaith Dialogue*, Promosi Pembangunan Indonesia melalui *Friends of Indonesia*, *Dialogue for Peace and Democracy*, *Bilateral Intermedia Dialogue*, *Working group on Democracy and Civil Society* dan *Bali Democracy Forum*.



■ Bali Democracy Forum ke-11, 5-6 Desember 2018

Pada tahun 2018, penyelenggaraan BSBI melibatkan 72 pemuda dari 44 negara, termasuk 5 (lima) orang peserta dari Indonesia. Pada tahun ini terdapat keikutsertaan dari lima negara baru yaitu Benin, Ghana, Bosnia Herzegovina, Jordania dan Bangladesh. BSBI 2018 mengangkat tema *"The Colours of Beautiful Indonesia"* yang merefleksikan Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk namun dapat bersatu dalam toleransi dan harmoni yang indah.

Para peserta BSBI mendapatkan pelatihan kesenian dan budaya di salah satu sanggar seni yang menjadi mitra kerja Kemlu RI. Pada tahun 2018 terdapat 6 (enam) sanggar seni mitra Kemlu yaitu Sanggar Semarandana-Denpasar (sejak tahun 2003), Sanggar Sayu Gringsing – Banyuwangi (sejak 2018), Rumah Budaya Rumata' - Makassar (sejak 2012), Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" – Yogyakarta (sejak tahun 2013), Sanggar Sofyani – Padang (sejak 2016) dan Sanggar Gumbang – Kutai Kartanegara (sejak 2018).

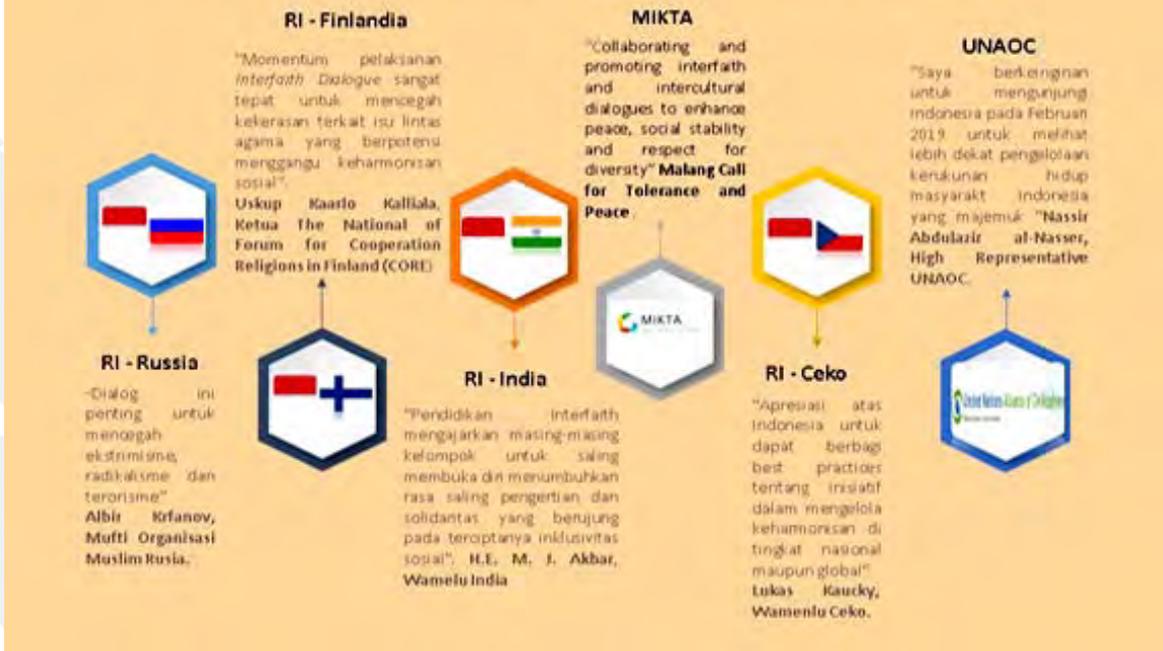
Dalam kurun waktu 15 tahun pelaksanaannya (2003 s/d 2018), BSBI telah melahirkan 848 alumni dari 73 negara. Para Alumni tersebut telah berkiprah turut mempromosikan budaya Indonesia di negara asalnya masing-masing seperti mendirikan komunitas Pemuda Indonesia-Belanda (Indonesia,-*Nederlands Youth Society*), padepokan Pencak Silat di Austria, pusat kebudayaan Indo-Benin Banyuwangi, aktif mengajar Tari di berbagai universitas di Thailand, menulis novel tentang Indonesia, serta membuat film dokumenter mengenai Tari Pakarena dari Makassar dan lainnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh alumni BSBI tersebut mendukung peningkatan citra positif Indonesia sehingga memudahkan dalam pelaksanaan diplomasi.

Berbagai kegiatan alumni BSBI



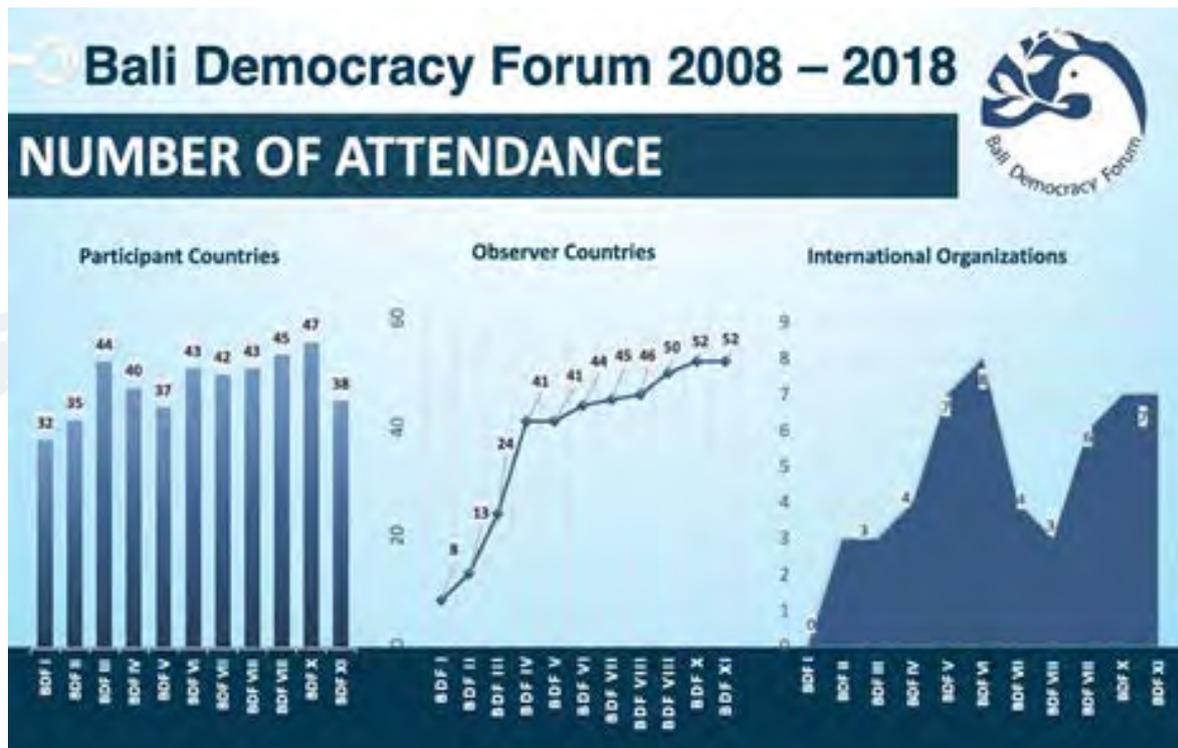
Dialog Lintas Agama (DLA) merupakan suatu kegiatan/program guna mempromosikan perdamaian dunia dengan memanfaatkan aset diplomasi publik Indonesia yaitu masyarakat yang pluralis dan toleran, serta Islam yang moderat. Dalam pelaksanaan DLA Indonesia senantiasa menggaungkan pesan perdamaian dan mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memupuk solidaritas, toleransi dan transparansi; dan mengembangkan generasi muda yang menghargai perbedaan dan memperjuangkan nilai-nilai kema-nusiaan; dan membangun jaringan antar agama dan budaya di antara negara.

Interfaith Dialogue Tahun 2018



DLA diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan internasional seperti masalah ekstrimisme, radikalisme dan terorisme yang berbasis agama. Forum DLA diharapkan tidak semata-mata menjadi ajang dialog, tetapi hasil-hasilnya juga dapat diimplementasikan ke seluruh tingkatan di kalangan akar rumput. Untuk itu, kegiatan DLA juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh agama, masyarakat madani dan media. *Interfaith Dialogue* yang dilakukan turut mendukung upaya Indonesia untuk mengelola keharmonisan antar kelompok di tingkat nasional maupun global. Indonesia menjadi role model untuk berbagi *best practices* tentang mengelola dan mencegah konflik terkait isu agama di dunia.

Terkait kegiatan diplomasi publik dalam ranah demokrasi, pada tanggal 6-7 Desember 2018 diselenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) XI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, yang dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri RI. BDF XI dihadiri 92 negara dan 7 organisasi internasional. Forum dihadiri oleh 1 orang Kepala Negara, 4 pejabat setingkat Menteri, 26 pejabat setingkat Wakil Menteri, dan 50 Duta Besar/Kepala Perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta. BDF XI bertema *Democracy for Prosperity* dan diikuti oleh sekitar 573 peserta. Penyelenggaraan BDF XI mendapat apresiasi positif dari negara-negara yang hadir terhadap peranan dan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan demokrasi yang berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Melalui forum ini, Indonesia secara konsisten senantiasa mendorong upaya penguatan demokrasi di berbagai negara dan kawasan. Hasil-hasil pembahasan dan saling tukar pengalaman selama penyelenggaraan BDF telah memberikan inspirasi bagi negara lainnya dalam mengatasi tantangan berdemokrasi. Tingginya tingkat kehadiran negara peserta dalam kurun waktu selama 11 tahun pelaksanaan BDF (2007-2018) di Kawasan Asia Pasifik, negara peninjau (non Kawasan Asia Pasifik) dan organisasi internasional dalam pertemuan ini, menunjukkan BDF telah berhasil menjadikan demokrasi agenda strategis di kawasan Asia Pasifik. Sejalan dengan hal itu, BDF XI mempunyai 3 pilar yaitu BDF, Bali Democracy Students Conference (BDSC) dan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF).



BDF selama ini telah mendukung pembangunan demokrasi baik di kawasan Asia Pasifik maupun kawasan lainnya melalui implementasi program kerja sama teknis oleh Pemerintah Indonesia. Program peningkatan kapasitas (*capacity building*) telah dilaksanakan di berbagai negara di Kawasan Asia Pasifik, bahkan hingga Afrika Utara, Timur Tengah dan Eropa. Keberhasilan BDF dalam mempromosikan nilai-nilai dan praktek demokrasi telah mendorong diselenggarakannya pertemuan BDF Chapter Berlin di tahun 2018. BDF *Chapter* Berlin cermin pengakuan internasional, khususnya benua Eropa mengenai capaian dan relevansi dari forum BDF bagi demokrasi dunia.



"The Bali Democracy Forum is an important opportunity to protect and promote the benefits of democracy with a wide range of nations. Indonesia is the world's third largest democracy. Australia welcomes Indonesia's international leadership in advocating the principles of democracy, and highlighting the importance of democracy as a part of the strategic agenda of our region" Menlu Australia Marise Payne -Bali Democracy Forum (BDF) ke 11, (6/12/18)



"Tidak ada keraguan lagi bahwa Papua Nugini posisinya selalu konsisten jika menyangkut Papua dan Papua Barat. Kami tegas mendukung Indonesia dan ini menjadi dasar persahabatan yang muncul dari rakyat dan Pemerintah Indonesia," Menlu PNG, Rimbink Pato-Bali Democracy Forum (BDF) ke 11, (6/12/18), dikutip dari medcom.co.id <https://www.medcom.id/internasional/asia/0Kvq969k-papua-nugini-tegaskan-kembali-papua-bagian-indonesia>

BDF XI bertema Democracy for Prosperity dan diikuti oleh sekitar 573 peserta. Penyelenggaraan BDF XI mendapat apresiasi positif dari negara-negara yang hadir terhadap peranan dan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan demokrasi yang berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Melalui forum ini, Indonesia secara konsisten senantiasa mendorong upaya penguatan demokrasi di berbagai negara dan kawasan. Hasil-hasil pembahasan dan saling tukar pengalaman selama penyelenggaraan BDF telah memberikan inspirasi bagi negara lainnya dalam mengatasi tantangan berdemokrasi. Tingginya tingkat kehadiran negara peserta dalam kurun waktu selama 11 tahun pelaksanaan BDF (2007 – 2018) di Kawasan Asia Pasifik, negara peninjau (non Kawasan Asia Pasifik) dan organisasi internasional dalam pertemuan ini, menunjukkan BDF telah berhasil menjadikan demokrasi agenda strategis di kawasan Asia Pasifik. Sejalan dengan hal itu, BDF XI mempunyai 3 pilar yaitu BDF, Bali Democracy Students Conference (BDSC) dan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF).

Sebagai bagian dari upaya pembahasan demokrasi secara inklusif, untuk pertama kalinya kegiatan BCSMF 2018 dilaksanakan secara parallel dengan BDF XI. BCSMF 2018 membahas tema “Democracy Disfigured and the Prospect of Democracy” diikuti oleh 91 peserta dari 10 negara, dari unsur masyarakat madani serta unsur media. BCSMF 2018 menekankan pentingnya mekanisme untuk saling belajar dan berukar pengalaman antara masyarakat madani dan media guna mengatasi tantangan yang dihadapi oleh demokrasi.



“Sustainable Development Goals (SDGs) reflected the spirit of democracy and inclusiveness in multilateralism. It requires synergy between governments, academics, civil society and media, and private sector in global partnership for prosperity” Conveners’note BCSMF, Bali, 7 Desember 2018.



“Voice of the Youth BDSC adalah penegasan bahwa demokrasi memerlukan pemerintahan yang transparan, akuntabel, mematuhi prinsip good governance, dan memperkuat platform yang memudahkan para pemuda berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi” Banten, 7 Desember 2017.

Untuk melanjutkan promosi demokrasi kepada generasi muda, BDSC ke-2 dilaksanakan bersamaan dengan BDF XI. Kegiatan ini mengikutsertakan 137 mahasiswa dari 57 negara dan membahas manfaat nilai demokrasi bagi kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang pemuda. BDSC ke-2, sebagai forum estafet semangat demokrasi kepada generasi muda, telah menyatakan bahwa generasi muda dan pendidikan merupakan dua variabel yang tidak terpisahkan dalam menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat, serta berkontribusi dalam mencapai demokrasi yang inklusif dan mensejahterakan rakyat.

BDF selama ini telah mendukung pembangunan demokrasi baik di kawasan Asia Pasifik maupun kawasan lainnya melalui implementasi program kerja sama teknis oleh Pemerintah Indonesia. Program peningkatan kapasitas (*capacity building*) telah dilaksanakan di berbagai negara di Kawasan Asia Pasifik.

Kementerian Luar Negeri juga menyelenggarakan kegiatan diseminasi berbagai capaian diplomasi Indonesia periode 2014-2018 yang mencakup isu Kedaulatan NKRI, Diplomasi Ekonomi, Peran Indonesia di Fora Internasional serta Perlindungan WNI dan BHI kepada publik. Salah satu bentuk terobosan yang dilakukan guna mengikutsertakan dan mendorong partisipasi masyarakat khususnya para pelajar dan mahasiswa (generasi milenial) dalam pelaksanaan politik luar negeri, adalah dengan menyelenggarakan *Diplomacy Festival (#DiploFest)*. Pada tahun 2018, kegiatan Diplomacy Festival dilaksanakan di 3 (tiga) kota yaitu Yogyakarta, Surabaya dan Bandung.



■ Berbagai penyelenggaraan Diplofest tahun 2018 (dari kiri ke kanan : Diplofest Yogya, Diplofest Surabaya, Diplofest Bandung)

Dalam rangka peningkatan dukungan konstituen domestik terhadap diplomasi Indonesia, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan Indonesian *Solidarity Week for Palestine* pada 12 – 17 Oktober 2018 berupa penyelenggaraan peresmian *Palestine Walk: Road to Freedom* di Bandung, dan Kuliah Umum di Bandung dan Jakarta. *Palestine Walk* merupakan simbol dukungan dan komitmen masyarakat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus sebagai pengingat semangat perjuangan tersebut bagi masyarakat Indonesia. Acara Peresmian *Palestine Walk: Road to Freedom* diselenggarakan pada 13 Oktober 2018 di Jalan Alun-Alun Timur, Bandung, atas kerjasama Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Kota Bandung. Peresmian *Palestine Walk: Road to Freedom* dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L. P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Palestina, Riad al Malki, dan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial. Peresmian disaksikan pula oleh berbagai elemen masyarakat yang ada di kota Bandung.



■ Peresmian Palestine Walk oleh Menlu RI, Menlu Palestina dan Walikota Bandung, 13 Oktober 2018

Selain itu, guna meningkatkan pemahaman serta solidaritas masyarakat akan isu Palestina khususnya di kalangan generasi muda yang secara aktif menyuarakan pendapatnya melalui media sosial sebagai saluran yang dinilai ampuh dan efektif untuk menggalang dukungan massa, telah dilaksanakan pula Kuliah Umum oleh Menteri Luar Negeri Palestina, Riad al Malki di Bandung dan Jakarta.

Salah satu kendala dalam mencapai IKU Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia diantaranya:

- a) Fasilitas kesehatan yang kurang memadai bagi para peserta BSBI
- b) Kurikulum dari sanggar yang dilibatkan tidak sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan
- c) Anggaran pelaksanaan kegiatan *Interfaith Dialogue* dan BDF terbatas

Dalam **mengatasi kendala** tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa melakukan komunikasi dengan negara-negara mitra dalam rangka persiapan pelaksanaan maupun pengaturan kegiatan yang akan diselenggarakan, termasuk penjadwalan kembali dan/atau penggantian lokasi kegiatan dalam hal terjadi permasalahan yang disebabkan karena faktor di luar dugaan.

Sebagai **langkah solutif ke depan**, Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan :

- a) Melibatkan tim medis dari Kementerian Luar Negeri untuk membantu pelayanan kesehatan peserta BSBI
- b) Melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya
- c) Mengajukan anggaran belanja tambahan untuk kegiatan *Interfaith Dialogue* dan optimalisasi anggaran untuk BDF

Sasaran Strategis (S.2): Dukungan Diplomasi yang Optimal untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional

“Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia”

IKU ini untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi melalui berbagai macam kegiatan promosi dagang, dll.

“Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia”

IKU ini untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia.

“Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia”

IKU ini untuk meningkatkan peran Perwakilan RI Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai wisatawan asing ke Indonesia melalui berbagai macam kegiatan promosi budaya, pariwisata, kuliner, dll.

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja Kementerian Luar Negeri melalui langkah diplomasi total telah berhasil memperlihatkan kepemimpinannya di dunia internasional. Capaian diplomasi tersebut perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

Pencapaian Sasaran Strategis “Dukungan diplomasi untuk mewujudkan peningkatan pembangunan nasional” diukur melalui capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: (a) “Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia”, (b) “Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia”, dan (c) “Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia”.

Adapun nilai pencapaian Sasaran Strategis (NSS) “Dukungan diplomasi yang optimal untuk mewujudkan peningkatan pembangunan nasional” yang diperoleh dari hasil pengukuran ke-3 IKU dimaksud, adalah nilai rata-rata sebesar **112,47%**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan jumlah negara akreditasi yang meningkat dibidang perdagangan sebanyak 10 negara, penurunan jumlah negara akreditasi yang meningkat di bidang investasi sebanyak 16 negara, dan peningkatan jumlah negara akreditasi yang meningkat di bidang wisatawan sebanyak 39 negara. Berikut nilai capaian dari masing-masing IKU tersebut:

Tabel Perbandingan Capaian S.2 Tahun 2018

No	IKU	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	122 dari target 48 negara	254,16% (batas toleransi 120%)	112 dari target 79 negara	141,77% (batas toleransi 120%)
2	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	54 dari target 32 negara	168,75% (batas toleransi 120%)	38 dari target 39 negara	97,43%
3	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	41 dari target 51 negara	80,39%	80 dari target 59 negara	135,60% (batas toleransi 120%)
Nilai rata-rata			106,80%		112,47%

Analisis IKU-1: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

Selama tahun 2018, Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia untuk kawasan Aspasaf dan Amerop capaiannya sebesar **141,77%** atau mengalami penurunan sebesar 112,39% dibandingkan tahun sebelumnya (2017) dimana jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia, capaian kinerjanya adalah sebesar 254,16%, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target dari tahun 2017 dari 48 negara menjadi 79 negara di tahun 2018. Rincian informasi untuk capaian kinerja IKU-1 S.2 adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian IKU-1 S.2 Tahun 2018

IKU-1 S.2	Informasi Kinerja	Nilai
Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 3%	68
	Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 2%	44
	Realisasi	112
	Target	79
	Capaian	141,77%
	Batas Toleransi	120%

Berdasarkan data dalam tabel di bawah, pada tahun 2018, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 3% untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika adalah sebesar 68 negara dan 44 negara di kawasan Amerika dan Eropa yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 2%.

Tabel Perbandingan Peningkatan Nilai Perdagangan Negara Mitra dengan Indonesia Tahun 2017 dan 2018

No.	Negara	Jan-Nov 2017 (Dalam Ribu USD)	Jan-Nov 2018 (Dalam Ribu USD)	Peningkatan (%)
Wilayah Asia Pasifik dan Afrika				
1	Guinea Ekuatorial	3.599,2	122.252,0	3.296,66%
2	Namibia	1.007,6	11.808,4	1.071,99%
3	Zimbabwe	26.863,7	133.408,8	396,61%
4	Rwanda	5.023,4	15.144,5	201,48%
5	Eritrea	140,5	419,6	198,71%
6	Libya	62.378,6	183.699,6	194,49%
7	Lesotho	140,8	411,1	192%
8	Sudan Selatan	99.151,9	278.127,1	180,51%
9	Sudan	99.151,9	278.127,1	180,51%
10	Burundi	739,4	1.995,3	169,86%
11	Angola	289.871,3	778.229,5	168,47%
12	Botswana	236,5	554,2	134,29%
13	Laos	12.924,5	29.300,9	126,71%
14	Kyrgyzstan	787,3	1.746,0	121,77%
15	Seychelles	6.048,5	12.491,8	106,53%
16	Uzbekistan	26.493,1	54.465,5	105,58%

No.	Negara	Jan-Okt 2017 (Dalam Ribu USD)	Jan-Okt 2018 (Dalam Ribu USD)	Peningkatan (%)
17	Nigeria	1.323.424,0	2.442.721,3	84,58%
18	Nepal	7.328,4	13.044,9	78%
19	Qatar	700.262,8	1.243.367,7	77,56%
20	Azerbaijan	300.469,7	503.590,6	67,6%
21	Palestina	1.911,3	3.108,5	62,63%
22	Guinea	24.698,2	39.777,8	61,06%
23	Mauritius	47.099,1	74.822,7	58,86%
24	Bhutan	632,0	939,0	48,57%
25	Afrika Selatan	933.725,9	1.367.292,8	46,43%
26	Maladewa	30.888,6	45.222,3	46,4%
27	Lebanon	68.966,9	92.933,1	34,75%
28	Arab Saudi	3.830.491,8	5.091.684,9	32,93%
29	Suriah	27.092,3	35.079,4	29,48%
30	Tiongkok	46.588.079,2	59.443.201,6	27,59%
31	Oman	398.922,0	503.546,2	26,23%
32	Kazakhstan	40.884,3	51.428,7	25,79%
33	Papua New Guinea	175.042,8	219.845,8	25,6%
34	Hong Kong SAR	3.433.854,0	4.304.123,0	25,34%
35	Iran	537.223,5	670.915,3	24,89%
36	Samoa	5.711,6	7.090,8	24,15%
37	Bangladesh	1.377.403,0	1.701.395,0	23,52%
38	Vietnam	5.595.014,8	6.871.357,5	22,81%
39	Tanzania	237.878,4	288.393,7	21,24%
40	Pakistan	2.133.769,0	2.547.417,3	19,39%
41	Ghana	100.749,4	120.118,8	19,23%
42	Kepulauan Solomon	14.543,1	17.319,9	19,09%
43	Singapura	24.045.710,6	28.535.462,2	18,67%
44	Ethiopia	57.442,6	68.004,2	18,39%
45	Togo	116.466,2	137.073,4	17,69%
46	Jepang	26.810.348,5	31.472.315,4	17,39%
47	Thailand	13.050.465,8	15.134.484,7	15,97%
48	Myanmar	776.313,8	895.838,8	15,4%
49	Korea Selatan	13.600.985,5	15.556.537,0	14,38%
50	Fiji	19.439,5	22.017,1	13,26%
51	Aljazair	407.063,0	456.341,0	12,11%
52	Republik Kongo	45.181,9	50.562,8	11,91%

No.	Negara	Jan-Okt 2017 (Dalam Ribu USD)	Jan-Okt 2018 (Dalam Ribu USD)	Peningkatan (%)
53	Selandia Baru	968.843,4	1.058.853,8	9,29%
54	Pantai Gading	156.151,0	170.391,6	9,12%
55	Filipina	6.067.010,3	6.595.085,0	8,7%
56	Irak	103.973,4	112.283,9	7,99%
57	Maroko	134.102,1	143.353,4	6,9%
58	Malaysia	14.052.496,2	15.006.187,0	6,79%
59	Sri Lanka	283.221,9	302.121,5	6,67%
60	Yaman	112.098,7	119.093,8	6,24%
61	Tonga	2.808,6	2.981,7	6,17%
62	Mozambik	75.063,3	79.670,7	6,14%
63	India	14.848.253,3	15.676.832,7	5,58%
64	Vanuatu	3.929,3	4.135,7	5,25%
65	Kenya	252.780,4	265.913,6	5,2%
66	Malawi	23.264,1	24.469,5	5,18%
67	Yordania	253.997,6	267.099,0	5,16%
68	Kamboja	441.578,6	455.876,9	3,24%
Wilayah Amerika dan Eropa				
1.	Amerika Serikat	21.276.117,60	23.960.630,80	12,62
2.	Antigua dan Barbuda	762,50	1.314,70	77,21
3.	Austria	305.842,00	341.455,50	11,64
4.	Bahama	560,50	1.402,00	150,16
5.	Barbados	4.432,20	5.207,10	17,49
6.	Belanda	4.156.089,20	4.317.529,20	3,88
7.	Belarus	178.698,30	190.646,70	6,69
8.	Bulgaria	96.770,30	374.419,10	286,92
9.	Denmark	285.095,90	344.327,00	20,78
10.	Ekuador	111.689,70	181.824,20	62,79
11.	Estonia	73.321,50	110.538,60	50,76
12.	Grenada	439,60	803,30	82,73
13.	Honduras	17.919,20	24.115,30	34,58
14.	Hongaria	106.851,30	106.851,30	14,83
15.	Inggris	1.999.380,50	2.216.376,00	10,85
16.	Irlandia	167.902,00	210.911,00	25,62
17.	Islandia	1.612,40	7.098,00	340,2
18.	Italia	2.880.196,40	3.192.374,30	10,84
19.	Jerman	5.081.794,30	5.678.948,10	11,75

No.	Negara	Jan-Okt 2017 (Dalam Ribu USD)	Jan-Okt 2018 (Dalam Ribu USD)	Peningkatan (%)
20.	Kanada	2.002.337,30	2.251.308,50	12,43
21.	Kroasia	53.904,70	68.421,40	26,93
22.	Latvia	87.554,50	120.810,60	37,98
23.	Liechtenstein	101,60	2.096,70	1.962,69
24.	Luksemburg	28.552,50	37.613,10	31,73
25.	Makedonia	6.274,30	9.519,70	51,73
26.	Montenegro	4.565,20	8.602,80	88,45
27.	Nikaragua	11.007,40	14.596,80	32,61
28.	Paraguay	54.134,70	115.926,70	114,15
29.	Peru	187.542,70	238.514,00	27,18
30.	Polandia	429.776,60	528.641,30	23
31.	Prancis	2.146.691,20	2.239.292,20	4,31
32.	Republik Dominika	55.042,50	74.026,20	34,49
33.	Rusia	2.072.793,6	2.129.713,8	2,75
34.	Saint Lucia	633,30	757,00	19,53
35.	Serbia	15.762,50	17.515,60	11,12
36.	Siprus	12.101,4	21.446,3	77,22
37.	Spanyol	2.130.061,00	2.533.932,80	18,96
38.	Swedia	602.847,80	701.420,30	16,35
39.	Trinidad dan Tobago	16.021,60	21.768,40	35,87
40.	Turki	1.350.779,00	1.450.193,60	7,36
41.	Ukraina	571.626,60	742.830,30	29,95
42.	Yunani	221.320,40	268.427,20	21,28

Sumber: website Kementerian Perdagangan (diakses tanggal 20 Desember 2018)

(* Nilai Perdagangan yang digunakan merupakan data Neraca Perdagangan RI dengan negara mitra

Realisasi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang mengalami peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia melebihi target yang telah direncanakan yaitu 68 negara dari target sebanyak 39 negara.

Beberapa contoh capaian nyata dari diplomasi ekonomi RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika pada tahun 2018 antara lain:

1. Kontrak pembelian 1,21 juta ton produk kelapa sawit dan turunannya dari perkebunan sawit di Sumatera oleh beberapa perusahaan RRT, antara lain: Cofco China dan Kerry Investment Co. Ltd senilai USD 726 juta.
2. Kontrak pembelian produk surfaktan (untuk keperluan produksi minyak dan gas) Indonesia antara Prime Star Energy Arab Saudi dengan PT. Golden Surfactant Indonesia senilai USD 100 juta; serta kontrak pembelian produk-produk makanan antara Sami Al Kathiri Trading Est. dengan PT. Rodamas Inti International, serta Mohammed Bawazir for Trading/MBT dengan PT. Mayora Indah Tbk dengan nilai total USD 40 juta.
3. *Trade Expo Indonesia* (TEI) ke-33, tanggal 24-28 Oktober 2018, tercatat total komitmen kerja sama bisnis (*trade* dan investasi) melalui penandatanganan MoU untuk kawasan Asia Tenggara sebesar USD554,537,119.35 dengan rincian yaitu: (i)Malaysia sebesar USD 283,673,919.35, (ii)Thailand sebesar USD 243,163,200, (iii) Singapura sebesar USD26,500,000, (iv)Filipina sebesar USD1,200,000.



■ Penandatanganan Kontrak Kerjasama (MoU) pembelian produk antara pengusaha Indonesia dengan Arab Saudi pada momentum TEI ke-33, Jakarta, 24 Oktober 2018

Sementara untuk realisasi negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa yang mengalami peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia melebihi target yang telah direncanakan yaitu sebesar 44 negara dari target sebanyak 40 negara.

Keberhasilan peningkatan nilai perdagangan Indonesia pada wilayah Amerop tahun 2018 menggambarkan peningkatan kinerja Kementerian Luar Negeri dalam mengupayakan diplomasi ekonomi terutama dalam menggarap pasar non-tradisional. Hal ini tercermin dari sebagian besar negara yang mengalami peningkatan nilai perdagangan adalah negara-negara kecil di kawasan Amerop.

Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, terdapat sejumlah negara yang mengalami kenaikan nilai perdagangan dengan Indonesia karena adanya kunjungan level pejabat tinggi yang menghasilkan komitmen untuk meningkatkan perdagangan, antara lain:

1. Forum Bisnis Indonesia – Ukraina di Kyiv, Ukraina, 21 Februari 2018 berhasil mendorong *direct people to people contact* antara pelaku usaha bidang perdagangan, pariwisata dan investasi kedua Negara. Tercatat nilai perdagangan RI-Ukraina pada 2018 meningkat sebesar 29,95% dari tahun 2017;
2. Kunjungan kerja Menteri Perdagangan RI dan Delri ke Washington DC, AS, pada 23-27 Juli 2018, yang menghasilkan kesepakatan pengurangan hambatan dagang dan investasi serta peningkatan nilai perdagangan RI-AS dari US\$ 26 miliar menjadi sebesar US\$ 50 miliar. Di sela-sela kunjungan kerja, pelaku bisnis Indonesia dan AS menyelenggarakan kegiatan Business Forum dan *One-on-One Business Matching* yang berhasil menyepakati transaksi dan rencana perdagangan serta investasi dalam berbagai sektor, antara lain baja, garmen dan apparel, produk buah, dan bioavtur/biodiesel;
3. Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael Richard Pompeo, ke Jakarta yang diisi dengan pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI pada 4 Agustus 2018 dan kunjungan kerormatan Menlu AS kepada Presiden RI pada 5 Agustus 2018. Kedua pihak sepakat bahwa RI dan AS memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan perdagangan. AS memberikan pertimbangan yang serius bagi kelanjutan fasilitas *Generalized System of Preferences (GSP)* untuk Indonesia;
4. Kunjungan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, ke New York, Amerika Serikat (AS), pada September 2018 dalam rangka pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden AS, Mike Pence. Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dengan AS;

5. Kunjungan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, ke Brussel, Belgia, pada Oktober 2018 dalam rangka melakukan pertemuan Bilateral dengan Wakil Presiden Pertama Komisi dan Komisioner Uni Eropa, Frans Timmermans. Salah satu isu yang dibahas dalam Kunjungan Wakil Presiden RI ini adalah percepatan penyelesaian perundingan CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dengan Uni Eropa dan kelapa sawit;
6. Kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Norwegia, Ine Eriksen Sørreide, pada 28 Oktober 2018 di Bali dalam rangka Pertemuan Ke-4 Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral RI-Norwegia (*4th Joint Commission for Bilateral Cooperation/JCBC*). Dalam Pertemuan JCBC RI-Norwegia keempat ini, salah satu agenda pembahasan kerja sama prioritas adalah perdagangan dan investasi (termasuk penyelesaian perundingan Indonesia-EFTA CEPA);
7. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Chile, Roberto Ampuero, di sela-sela Pertemuan *Our Ocean Conference* (OOC) pada 30 Oktober 2018 yang sepakat untuk segera memberlakukan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Chile (IC-CEPA) yang dapat menjadi dasar pengembangan hubungan di bidang perdagangan antara kedua negara;
8. Kunjungan Wapres Panama, Isabel de Saint Malo de Alvarado, ke Indonesia pada akhir Oktober 2018 dalam rangka peningkatan kerja sama di bidang ekonomi dan maritim. Pada pertemuan ini kedua pihak sepakat untuk mendorong pembahasan pengelolaan pelabuhan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus; dan
9. Kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz, pada 24 - 27 November 2018. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Polandia sepakat untuk mengintensifkan hubungan dagang dan investasi kedua negara yang meningkat selama 3 tahun terakhir. Selain itu, Kedua pihak menyambut baik pembukaan *Polish Trade and Investment Agency* di Jakarta untuk mendorong interaksi bisnis kedua negara.



■ Kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz, pada 24 - 27 November 2018



■ Festival Indonesia di Moskow, 2-5 Agustus 2018

Pencapaian keberhasilan pada IKU ini juga didorong oleh terobosan/ inovasi Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan berbagai kegiatan diplomasi ekonomi, antara lain:

1. Partisipasi Indonesia pada "*Seafood Expo North America*" (SENA) 2018 di Boston, Amerika Serikat, 11-13 Maret 2018.
2. Pelaksanaan "*Indonesian Tourism Trade Show*" dalam kegiatan *Remarkable Indonesia Fair* di Chicago, AS, pada 5-7 Juli 2018, untuk promosi potensi investasi pariwisata Indonesia, khususnya wilayah Banyuwangi.
3. penyelenggaraan "*Workshop on Strengthening the Implementation of FLEGT License*" di Jakarta, 4 Juli 2018, dalam rangka meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Austria;
4. penyelenggaraan "*Promoting Business Opportunities between Indonesia and Belarus*", Bali, 5-6 November 2018. Forum bisnis ini diselenggarakan untuk mempromosikan produk perikanan dan buah-buahan Indonesia ke pasar Belarus dan negara sekitarnya;
5. Festival Indonesia di Moskow, Rusia, 2-5 Agustus 2018, merupakan pameran terpadu yang mengedepankan promosi pariwisata, perdagangan, dan investasi.

Selain hal tersebut, pencapaian keberhasilan IKU ini juga didorong oleh upaya-upaya Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi khususnya dalam bidang perdagangan, antara lain:

- a. Menginisiasi atau melaksanakan pertemuan bisnis antar pengusaha dalam kunjungan kenegaraan, forum bisnis, dan pameran di luar negeri, untuk mendorong dialog antar pelaku usaha dan pembahasan isu-isu penting;
- b. Penggalangan pemerintah dan pengusaha di daerah untuk mempromosikan secara langsung komoditas unggulan daerahnya;
- c. Memfasilitasi peluang kerja sama pelaku usaha dan mengkoordinasi upaya penyelesaian hambatan perdagangan pada kunjungan kepala negara serta pejabat tinggi di Indonesia.

Meskipun realisasi pada IKU ini melampaui target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa **catatan dan kendala** yang kiranya perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a. Masih rendahnya motivasi para pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan promosi perdagangan di negara-negara pasar prospektif, karena adanya faktor keterbatasan informasi yang dimiliki terkait potensi di negara-negara tersebut serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan promosi perdagangan di luar negeri;
- b. Penerapan hambatan tarif dan non-tarif oleh negara mitra;
- c. Belum terdapat kerja sama korespondensi antara perbankan RI dengan perbankan di seluruh negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika, sehingga menyulitkan para pengusaha di kedua negara dalam proses penyelesaian transaksi perdagangan.
- d. Maraknya kampanye negatif terhadap minyak sawit di wilayah Uni Eropa.;
- e. Terdapat beberapa negara di wilayah Amerop yang memiliki komoditas serupa yang bersaing dengan Indonesia;
- f. Belum tersedianya skema pembiayaan ekspor impor yang efektif bagi stakeholders kedua negara;
- g. Biaya logistik perdagangan yang masih tinggi; dan
- h. Adanya regulasi Indonesia yang dianggap sebagai hambatan dagang oleh pelaku usaha negara mitra, antara lain implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 34 tahun 2014) dan masih dipertanyakannya penegakan hukum perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Sebagai **langkah solutif dan proyeksi kedepan**, Kementerian Luar Negeri akan melaksanakan beberapa upaya untuk mendorong peningkatan perdagangan antara lain:

- a. Meningkatkan upaya promosi perdagangan yang lebih terarah, terpadu dan sinergi dengan K/L teknis maupun dengan pelaku usaha;
- b. Pemanfaatan dokumen economic intelligence yang dikirimkan oleh Perwakilan RI dalam rangka menggali/mengeksplorasi potensi produk-produk Indonesia yang dapat diekspor ke negara-negara mitra baik tradisional maupun non-tradisional;
- c. Lebih aktif memperjuangkan pembentukan kesepakatan perdagangan bebas/FTA dan atau PTA dengan negara-negara mitra maupun pembentukan working group on trade dalam mekanisme bilateral Indonesia dengan negara mitra;
- d. Meningkatkan koordinasi antara *stakeholders* di dalam negeri guna menghadapi tuduhan/ tuntutan yang merugikan Indonesia di negara-negara mitra;
- e. Secara aktif mempromosikan kebijakan minyak kelapa sawit Indonesia yang berkesinambungan, antara lain dengan mendiseminasikan hasil *joint-research* kajian ilmiah sawit Indonesia berkelanjutan, yaitu *Collaborative Research Center 990 (CRC-990)*, ke negara mitra di kawasan Amerop, khususnya ke Norwegia, Jerman, Swiss, Belanda, dan Italia
- f. Mengintensifkan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan RI serta stakeholders terkait lainnya untuk peningkatan jumlah pelaksanaan program promosi yang terpadu dan bersinergi, baik antar kementerian pemerintah, maupun sektor pelaku usaha dan pelaku ekspor melalui pameran dagang, misi dagang, instore promotion, serta buying mission. Salah satu kegiatan promosi yang perlu ditingkatkan adalah pameran dagang berskala internasional yang dilaksanakan di dalam negeri (seperti: *Trade Expo Indonesia*), sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak lagi pelaku usaha nasional dengan biaya yang relatif lebih murah;

- g. Mendorong pembentukan dan implementasi skema pembiayaan yang efektif, termasuk Penugasan Khusus Ekspor dan *Counter Trade*; dan
- h. Mendorong pembentukan kerja sama pelayaran dan pengapalan barang antar perusahaan logistik RI dengan negara mitra, kerja sama sea ports serta pembentukan *Bonded Logistic Centers*.
- i. Sosialisasi UU kepada pelaku industri, sehingga keseluruhan prosedur ekspor impor barang termasuk sertifikasi halal dapat dipahami secara menyeluruh. Solusi lain yang ditawarkan oleh BPJPH adalah mengakui sertifikat sebelumnya masih berlaku selama setahun. Hal ini dilakukan karena darurat, agar tidak terjadi kendala dan menghambat dalam masuknya barang impor.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perwakilan RI di luar negeri guna mengoptimalkan pemanfaatan market intelligence sebagai sumber data dan informasi bagi para pengusaha nasional terkait berbagai potensi yang ada di negara-negara pasar prospektif. Selain untuk identifikasi peluang pasar, data tersebut juga dapat digunakan stakeholders sebagai bahan masukan dalam pengembangan produk, mengetahui hambatan perdagangan serta sistem jaringan logistik dan distribusi di negara akreditasi.

Analisis IKU-2: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

Peningkatan nilai investasi ke Indonesia merupakan hasil upaya diplomasi ekonomi Indonesia baik ke negara-negara ekonomi maju yang merupakan pasar tradisional untuk penanaman modal di Indonesia, maupun ke negara-negara mitra non-tradisional.

Pada tahun 2018, realisasi IKU “Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia” sebesar 38 negara dengan capaian 97,43% dari target sebanyak 39 negara, atau mengalami penurunan sebesar 71.32% dibandingkan tahun sebelumnya (2017) dimana jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi dengan Indonesia capaian kinerjanya sebesar 168,75%. Rincian informasi untuk capaian kinerja IKU-2 S.2 adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian IKU-2 S2 Tahun 2018

IKU-2 S.2	Informasi Kinerja	Nilai
Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia minimal 3%	22
	Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia minimal 2%	16
	Realisasi	38
	Target	39
	Capaian	97.43%

Berdasarkan data dalam tabel di bawah, pada tahun 2018, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika adalah sebesar 22 negara dan 13 negara di kawasan Amerika dan Eropa.

**Tabel Perkembangan Realisasi Investasi Asing (FDI)
Dari Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika dan Eropa Tahun 2017 dan 2018**

No.	Negara	Nilai Investasi Q3 2017	Nilai Investasi Q3 2018	Peningkatan Nilai Investasi
Wilayah Asia dan Pasifik				
1	Marshall Island	2.8	199.95	7.041.07%
2	Samoa	1.6	11.11	594.38%
3	Uni Emirat Arab	13.2	61.59	366.59%
4	Afrika Selatan	1.7	5	194.12%
5	Mali	0.4	1.1	175.00%
6	Nigeria	0.1	0.27	170.00%
7	Thailand	156.9	323.99	106.49%
8	Yaman	2.4	3.86	60.83%
9	Bangladesh	0.2	0.31	55.00%
10	Malaysia	785.2	1181.16	50.43%
11	Yordania	2.2	3.27	48.64%
12	Mesir	0.5	0.64	28.00%
13	Hongkong	1365.5	1636.58	19.85%
14	Singapura	6119.1	6702	9.53%
15	Australia	315.2	344.36	9.25%
16	Namibia	0	2.12	-
17	Ethiopia	-	0.65	-
18	Tunisia	-	0.3	-
19	Qatar	-	0.2	-
20	Kongo	-	0	-
21	Nepal	-	0	-
22	Azerbaijan	-	0	-

No	Negara	Jan-Sep 2017		Jan-Sep 2018		Peningkatan (%)	
		P	I	P	I	P	I
Wilayah Amerika dan Eropa							
1.	Austria	27,00	3,00	47,00	71,10	74	2.270
2.	Belgia	93,00	114,70	140,00	216,37	51	89
3.	Finlandia	17,00	0,20	20,00	3,53	18	1.665
4.	Kanada	83,00	52,20	90,00	170,77	8	227
5.	Latvia	2,00	0,10	1,00	0,14	-50	40
6.	Lithuania	1,00	0,30	2,00	1,81	100	503
7.	Luksemburg	91,00	79,40	134,00	134,26	47	69

No	Negara	Jan-Sep 2017		Jan-Sep 2018		Peningkatan (%)	
		P	I	P	I	P	I
Wilayah Amerika dan Eropa							
8.	Meksiko	1,00	0,30	4,00	0,32	300	7
9.	Norwegia	22,00	1,40	24,00	17,20	9	1.129
10.	Panama	14,00	3,90	23,00	100,71	64	2.482
11.	Portugal	3,00	0,40	8,00	1,19	167	198
12.	Spanyol	70,00	4,90	102,00	10,52	46	115
13.	Swedia	34,00	10,60	94,00	16,83	176	59
14.	Hongaria	3,00	0,10	7,00	1,90	133	1.800
15.	Uruguay	0,00	0,00	3,00	2,19	100	100
16.	Yunani	5,00	0,60	6,00	0,73	20	22

Keterangan:

P : Jumlah Proyek Investasi

I : Nilai Investasi (Dalam Juta Dollar AS)

- Nilai Investasi dalam Juta Dollar AS

- Data yang tersedia adalah data periode Kuartal ke-3 (Januari-September)

- Nilai Investasi 0 berarti nilainya kurang dari USD 100 ribu

Sumber: 1. BKPM (Data investasi Dari masing-masing negara mitra tersebut diatas diperkirakan masih akan meningkat hingga akhir tahun 2018)

2. (Data peningkatan nilai investasi dengan Negara kawasan Amerika dan Eropa update per 13 Februari 2019)

3. (Data peningkatan nilai investasi dengan Negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika update per 20 Desember 2019)

Realisasi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang mengalami peningkatan nilai investasi dengan Indonesia melebihi target yang telah direncanakan yaitu 22 negara dari target sebanyak 19 negara.

Beberapa contoh capaian nyata dari diplomasi ekonomi RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika pada tahun 2018 antara lain:

1. Komitmen investasi dari Naza Holdings Pte Ltd Singapura sebesar USD 500 juta untuk pembangunan proyek pariwisata di Kabupaten Belitung. *Launching* investasi tersebut dilakukan di Singapura, tanggal 23 Maret 2018. Langkah awal investasi tersebut dimulai dengan rencana pembangunan pembangkit listrik berkekuatan 10 Megawatt yang izin pembangunannya saat ini masih dalam proses penyelesaian.
2. Perjanjian investasi untuk pembangunan proyek infrastruktur destinasi wisata di Indonesia antara Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC) dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) RRT, dengan total nilai mencapai USD 248,4 juta. Pembangunan fase I proyek ini diperkirakan akan berlangsung pada periode 2019-2023.

Pertumbuhan nilai investasi tertinggi dari kawasan Amerop berasal dari negara pasar non tradisional yaitu Panama dengan nilai pertumbuhan sebesar 2.482,31% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017. Selain itu, mitra non tradisional lainnya, yaitu Austria dan Hungaria juga menunjukkan pertumbuhan nilai investasi yang cukup signifikan sebesar 2.270% dan 1.800%. Hal ini menunjukkan upaya konkrit dari Kementerian Luar Negeri dalam menggarap pasar non tradisional di kawasan Amerop. Selain didorong oleh peningkatan intensitas promosi khususnya di bidang investasi Indonesia, juga dihasilkan oleh komitmen yang ditandatangani pada saat kunjungan Kepala Negara dan pejabat setingkat menteri negara-negara mitra.

Peningkatan nilai investasi asing di Indonesia juga didorong oleh inovasi/terobosan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan diplomasi ekonomi, antara lain:

1. melakukan perundingan Putaran Pertama "*Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement*" (IT-CEPA) di Jakarta, 8-9 Januari 2018, di Jakarta;
2. menyelenggarakan seminar investasi Indonesia bertajuk "*How to Attract Investors from US' Investors Perspective*" pada 22 Februari 2018 di Jakarta dengan mendatangkan 16 (enam belas) orang investor AS;

3. Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi “*Trade and Investment Framework Agreement*” (TIFA) RI-AS ke-17, 14 Mei 2018 di Jakarta;
4. Perundingan Putaran ke-2 IT-CEPA, 26-31 Mei 2018;
5. “Promosi Potensi Ekonomi dan Investasi Aceh bagi Pelaku Bisnis Turki” di Banda Aceh, 9-11 Juli 2018;
6. Fasilitasi kunjungan BUMN khususnya dari bidang industri strategis ke negara mitra, antara lain, kunjungan PT. INKA dan PT. Barata Indonesia ke Meksiko dan Kosta Rika pada September 2018.



■ Presentasi PT. INKA dan PT. Barata Indonesia di depan Komunitas industri kereta api Meksiko, September 2018

Dalam pencapaian IKU-2 S.2 tersebut, Kementerian Luar Negeri menghadapi beberapa kendala diantaranya yaitu:

- a. Masih terdapatnya stigma negatif dari para investor di negara akreditasi terhadap kondisi, iklim dan kebijakan investasi Indonesia;
- b. Masih terdapatnya persoalan tumpang tindih regulasi nasional;
- c. Krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara kawasan Amerop masih berpengaruh terhadap minat investasi negara-negara di kawasan tersebut. Namun demikian, beberapa negara sudah mengarahkan pengembangan ekonominya ke wilayah Asia (*Look East Policy*);
- d. Beberapa negara di kawasan Amerika Selatan, Tengah dan Karibia, serta Eropa Timur dan Tenggara masih belum memiliki kapasitas untuk berinvestasi di Indonesia, dan sebaliknya lebih mengharapkan pihak Indonesia untuk berinvestasi di negaranya;
- e. Negara-negara di kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia lebih tertarik berinvestasi di negara-negara yang ada di kawasannya sendiri mengingat telah ada perjanjian perdagangan regional dan bilateral yang memberikan kemudahan berinvestasi di antara negara-negara di Kawasan tersebut; dan
- f. Terdapat kekhawatiran dari kalangan investor di kawasan Amerop terhadap diskontinuasi Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) RI dengan negara mitra;
- g. adanya aturan investasi di dalam negeri yang belum sepenuhnya mendukung iklim investasi asing, antara lain pasal 20 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten, yang mewajibkan agar pemegang paten yang didaftarkan di Indonesia melakukan produksi atau menggunakan proses produksi di Indonesia. Pasal tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip dasar *National Treatment* WTO (non-diskriminasi antara produk impor dan produk dalam negeri) sehingga menurunkan minat para investor dari kawasan Amerop yang sudah atau merencanakan untuk berinvestasi di Indonesia; dan
- h. kebijakan *Online Single Submission* (OSS) belum efektif dan pro investasi karena belum ada harmonisasi antar regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai **langkah solutif** dan proyeksi ke depan, langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antara para *stakeholders*, khususnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait guna mencegah adanya tumpang tindih regulasi dalam bidang investasi. Seiring dengan hal tersebut, akan diupayakan untuk mendorong percepatan review atas Perjanjian Promosi dan Proteksi atas Penanaman Modal Asing (P4M), sehingga jaminan keamanan dan proteksi hukum yang diberikan kepada investor asing dapat berimplikasi positif pada ekonomi nasional di masa mendatang;
- b. Meningkatkan kerja sama antara para *stakeholders* terkait dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan promosi yang sifatnya terintegrasi antara sektor investasi, perdagangan dan pariwisata (*trade, tourism and investment - TTI*) serta budaya dan kuliner Indonesia, termasuk melibatkan Pemerintah Daerah dan sektor swasta lainnya;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Perwakilan RI untuk menggalakkan pelaksanaan promosi investasi secara “*door-to-door*” kepada investor potensial di negara akreditasi. Kegiatan ini selain untuk promosi investasi juga bertujuan untuk dapat memperoleh *feed back* secara spesifik dari masing-masing investor potensial terkait sektor yang dituju, kendala yang mungkin dihadapi di lapangan serta upaya penyelesaiannya, serta kemungkinan perlunya fasilitasi *business matchmaking* dengan *stakeholders* di Indonesia;
- d. Mendorong pembentukan kesepakatan perlindungan investasi kedua pihak di masing-masing negara melalui rapat koordinasi dan dialog dengan para *stakeholders* terkait; dan
- e. mengupayakan kerja sama trilateral antara Kementerian Luar Negeri, BKPM dan BPS untuk penyediaan data terkini terkait nilai investasi dari kawasan Amerop ke Indonesia secara berkelanjutan.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan *stakeholders* lainnya melalui Indonesia *Investment Promotion Center* (IIPC) untuk lebih mengintensifkan dan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan promosi investasi Indonesia, khususnya kepada potential investors di luar negeri. Melalui kegiatan promosi tersebut, dilakukan pula diseminasi informasi terkait sektor-sektor utama investasi di Indonesia serta perkembangan iklim dan reformasi kebijakan di Indonesia yang mendukung investasi.

Analisis IKU-3: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

Selama tahun 2018, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia sebesar 80 dari target sebanyak 59 negara, dengan capaian 135,60%. Dengan demikian, maka capaian kinerja untuk IKU-3 pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 55,21% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2017) yaitu 80,39%. Rincian informasi untuk capaian kinerja IKU-3 adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Capaian IKU-3 S.2 Tahun 2018

IKU-2 S.2	Informasi Kinerja	Nilai
Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia minimal 5%	52
	Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia minimal 5%	28
	Realisasi	80
	Target	59
	Capaian	135,60%
	Batas Toleransi	120%

Berdasarkan data dalam tabel di bawah, pada tahun 2018, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika adalah sebanyak 52 negara dan sebanyak 28 negara di kawasan Amerika dan Eropa.

**Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari Kawasan Aspasaf dan Amerop
Bulan Januari-Oktober 2017 dan Januari-Oktober 2018**

No.	Kebangsaan	Jan -Des 2017	Jan - Des 2018	Peningkatan
Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika				
1.	Micronesia Rep.	5	42	740,00
2.	Korea Utara	140	622	344,29
3.	Palau Rep.	18	69	283,33
4.	Guinea Equator	3	11	266,67
5.	Lesotho	45	122	171,11
6.	Eritrea	118	312	164,41
7.	Sao Tome & Principe	9	19	111,11
8.	Afganistan	595	1.139	91,43
9.	Marshall Islands	25	46	84,00
10.	Timor Leste	960.026	1.762.120	83,55
11.	Turkmenistan	233	426	82,83
12.	Ivory Coast (Pantai Gading)	488	834	70,90
13.	Benin	133	214	60,90
14.	Guinea Bissau	85	133	56,47
15.	Mongolia	2.414	3.699	53,23
16.	Tajikistan	350	525	50,00
17.	Burundi	24	36	50,00
18.	Senegal	690	999	44,78
19.	Gabon	61	86	40,98
20.	Oman	18.615	25.702	38,07
21.	Bostwana	224	304	35,71
22.	Kamboja	6.506	8.819	35,55
23.	Gambia	256	344	34,38
24.	Palestina	2.035	2.600	27,76
25.	Samoa Barat	102	129	26,47
26.	Zambia	298	373	25,17
27.	Tuvalu	23	28	21,74
28.	New Zealand	106.914	128.308	20,01
29.	Solomon Islands	160	192	20,00
30.	Congo Rep. Dem.	186	221	18,82
31.	Yaman	8.453	9.989	18,17
32.	Malagasy (Madagascar)	470	555	18,09
33.	Malaysia	2.121.888	2.501.611	17,90
34.	Pakistan	11.424	13.414	17,42
35.	Afrika Tengah Rep.	12	14	16,67
36.	Nepal	12.821	14.945	16,57
37.	Nauru	67	78	16,42
38.	Zimbabwe	1.049	1.220	16,30
39.	Namibia	459	531	15,69
40.	Cape Verde	130	149	14,62
41.	Singapore	1.554.119	1.768.598	13,80
42.	Burkina Faso	200	227	13,50
43.	Qatar	1.859	2.102	13,07
44.	Nigeria	4.197	4.737	12,87
45.	Uganda	1.026	1.154	12,48

No.	Kebangsaan	Jan – Okt 2017	Jan – Okt 2018	Peningkatan
Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika				
46	India	536.902	595.060	10,83
47	Bhutan	610	674	10,49
48	Kazakhstan	7.219	7.950	10,13
49	South Africa	38.073	41.912	10,08
50	Irak	2.167	2.352	8,54
51	Mauritius	3.702	3.939	6,40
52	Guinea	82	87	6,10
Wilayah Amerika dan Eropa				
1.	Albania	592	755	27,53
2.	Amerika Serikat	344.766	387.295	12,34
3.	Andorra	191	218	14,14
4.	Antigua dan Barbuda	56	70	25
5.	Armenia	772	857	11,01
6.	Austria	27.208	29.454	8,25
7.	Belarus	4.576	4.818	5,29
8.	Ceko	19.904	22.103	11,05
9.	Chile	10.049	11.004	9,5
10.	Denmark	43.721	46.750	6,93
11.	Finlandia	24.447	27.114	10,91
12.	Grenada	63	112	77,78
13.	Haiti	60	74	23,33
14.	Hongaria	12.600	13.413	6,45
15.	Kolombia	5.051	5.442	7,74
16.	Latvia	3.932	4.214	7,17
17.	Luksemburg	1.720	2.061	19,83
18.	Meksiko	11.497	12.408	7,92
19.	Montenegro	0	326	100
20.	Norwegia	22.838	24.885	8,96
21.	Persemakmuran Dominika	393	457	16,28
22.	Portugal	33.223	36.766	10,66
23.	Republik Dominika	393	457	16,28
24.	Rusia	117.532	125.697	6,95
25.	St. Lucia	73	88	20,55
26.	St. Vincent	20	38	90
27.	Uruguay	1.578	1.934	22,56
28.	Vatikan	30	36	20

Sumber: BPS

(Data peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dari negara kawasan Amerika dan Eropa update per 13 Februari 2019)

(Data peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dari negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika update per 22 Februari 2019)

Pencapaian yang cukup signifikan pada IKU ini didorong oleh kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan promosi pariwisata antara Kantor Pusat Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan RI di berbagai kawasan secara berkelanjutan, baik melalui partisipasi pada pameran wisata, pelaksanaan kegiatan yang bersifat kebudayaan di negara mitra, maupun pelaksanaan kegiatan *familiarization trip* di Indonesia.

Demi mendorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan sejumlah terobosan antara lain:

- a. Menyelenggarakan kegiatan *familiarization trip* bagi tour operator, blogger, jurnalis luar negeri, dan public influencer dari negara-negara di Kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia, Eropa Tengah dan Timur serta Eropa Barat ke destinasi wisata di Banyuwangi, Bali, Yogyakarta dan Labuan Bajo pada 19 Oktober-2 November 2018;
- b. Menyelenggarakan temu bisnis dalam agenda kegiatan familiarization trip dengan format table top, melalui kerja sama dengan Dinas Pariwisata Yogyakarta dan ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia);
- c. Melaksanakan *one-on one meeting* antara tour operator Indonesia dengan tour operator negara mitra;
- d. Mengkoordinasikan penyediaan kursus bahasa Spanyol intensif bagi pemandu wisata Indonesia di negara-negara di kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia, antara lain Kolombia, untuk meningkatkan jumlah pemandu wisata yang mampu berbahasa Spanyol di Indonesia;
- e. Berpartisipasi pada pameran pariwisata dan kegiatan budaya di negara mitra, seperti keikutsertaan Indonesia



■ Peserta Famstrip dari Kawasan Amerika Selatan, Tengah dan Karibia.

pada temu bisnis Indonesia *Tourism Trade Show* (ITTS) di sela-sela *Remarkable Indonesia Fair* 2018 di Chicago, Indonesian Festival 2018 di Ottawa, Kanada dan Moskow, Rusia (2-5 Agustus 2018);

- f. Melaksanakan *roadshow Business Meeting* pelaku industri pariwisata ke negara-negara non tradisional di Eropa Utara dan Tengah, seperti Slowakia, Ceko, dan Hongaria;
- g. Perluasan tema dan sektor misi bisnis, tidak terbatas pada sektor pariwisata, namun juga mencakup sektor lainnya seperti keikutsertaan misi bisnis Indonesia melalui business mission on financial technology di Swiss dan partisipasi pada pameran furnitur di Austria.

Kendala utama dalam pencapaian realisasi IKU tersebut antara lain :

- a. Tidak tersedianya data yang dipublikasikan secara luas oleh K/L terkait negara-negara mitra yang ditargetkan mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga terdapat perbedaan antara data-data yang diperoleh dari Kemenpar dan Imigrasi;
- b. Terbatasnya dana promosi untuk negara-negara yang tidak menjadi prioritas dari K/L terkait menjadi kendala dalam upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia;
- c. Kurangnya pembuatan media informasi promosi pariwisata Indonesia (misalnya brosur, DVD) dalam bahasa setempat selain bahasa Inggris;

- d. Belum dikenalnya daerah-daerah tujuan wisata “*beyond Bali*” oleh wisatawan mancanegara secara umum sebagai keragaman destinasi wisata Indonesia;
- e. Sinergi dan koordinasi antara *stakeholders* dalam promosi pariwisata juga masih relatif kurang, sehingga masih terdapat kegiatan promosi yang dilakukan secara terpisah oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan tema promosi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan rancangan *booth* serta tema promosi yang kurang terintegrasi sebagai kesatuan “Promosi Indonesia”;
- f. Perkembangan penggunaan teknologi media sosial oleh wisatawan mancanegara dalam perjalanan wisata belum diimbangi dengan pemanfaatan aplikasi media sosial untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, *blog*, dan lain sebagainya;
- g. Masih mahalnya biaya penerbangan menuju Indonesia, khususnya dari negara-negara mitra yang belum memiliki penerbangan langsung ke Indonesia atau belum terdapat kerja sama antar maskapai penerbangan dengan Indonesia; dan
- h. Adanya berbagai kejadian yang mengancam keamanan, seperti tindakan terorisme, serta faktor *force majeure* berupa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah tujuan wisata di Indonesia, antara lain: gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu; gempa bumi di Lombok-NTB (menyebabkan tertutupnya kawasan wisata Gili Terawang); puting beliung di Bogor-Jawa Barat; tanah longsor di Sumatera Utara (memutuskan akses ke Datau Toba); serta letusan gunung di beberapa daerah tujuan wisata (Gunung Merapi, Gunung Gamalama, Gunung Soputan dan Gunung Krakatau). Kondisi tersebut telah menyebabkan beberapa negara mengeluarkan *travel advice* yang berdampak negatif terhadap upaya pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Dalam upaya **mengatasi tantangan** yang dihadapi beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan masukan dan saran kepada stakeholders, terkait promosi wisata, baik dalam bentuk peningkatan *familiarization trip* ke Indonesia bagi awak media, *travel writer* dan tour operator, serta pengemasan paket-paket wisata nasional yang menarik dengan harga kompetitif;
- b. Pembuatan media informasi promosi (misalnya brosur, DVD) dalam bahasa Inggris dan bahasa setempat;
- c. Menggencarkan promosi pariwisata melalui berbagai media sosial terkini, termasuk aplikasi *Quick Response* (QR) Code sebagai pengganti brosur cetak, sehingga dengan media yang lebih sederhana dapat memuat informasi yang lebih banyak dan dapat menjangkau lebih banyak wisatawan potensial; dan
- d. Menyebarkan informasi mengenai upaya-upaya Pemri untuk meningkatkan keamanan melalui berbagai media, disamping melakukan pendekatan kepada Perwakilan negara mitra di Jakarta untuk dapat menurunkan status *travel warning* yang dikeluarkan.

Sebagai **langkah solutif** dan proyeksi kedepan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait seperti Kementerian Pariwisata, BPS dan Ditjen Imigrasi untuk penyediaan data terkini secara berkelanjutan tiap tahunnya;
- b. Meningkatkan partisipasi pada pameran pariwisata dan kerja sama antara *tour operator* Indonesia dengan *tour operator* negara-negara di kawasan Amerop;
- c. Mendukung realisasi kerja sama *joint promotion* dan *joint market* antara pengelola taman wisata Indonesia dengan pengelola taman wisata di negara-negara di kawasan Amerop lainnya;
- d. Melaksanakan peningkatan promosi pariwisata ke negara-negara yang belum menjadi prioritas dari K/L terkait, baik melalui keikutsertaan pada pameran, penyelenggaraan rangkaian kegiatan promosi wisata, *familiarization trip*, maupun temu bisnis.

Sasaran Strategis (S.3): Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional

Indeks Citra Indonesia di dunia internasional merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Luar Negeri yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana Indonesia dikenal oleh publik internasional.

Pengukuran IKU tersebut menggunakan model Anholt yang dilakukan dengan menilai 6 (enam) dimensi yaitu:

- *Governance* yakni mengukur opini publik tentang “*Competency dan Fairness*” termasuk komitmen suatu negara (Indonesia) terhadap isu-isu global;
- *Export* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara (Indonesia);
- *Tourism* yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi suatu negara (Indonesia) baik untuk wisata alam maupun menonton atraksi atau even pariwisata;
- *Investment and Immigration* yakni mengukur ketertarikan atau minat publik untuk tinggal, atau berinvestasi atau belajar, di suatu negara (Indonesia) termasuk pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia;
- *Culture and Heritage* yakni mengukur keter-tarikan publik tentang Budaya Warisan maupun Kontemporer suatu negara (Indonesia);
- *People* yakni mengukur pandangan publik tentang reputasi penduduk suatu negara (Indonesia) tentang kompetensi, keterbukaan, keramah-tamahan, nilai-nilai universal seperti toleransi.

Pada tahun 2018, target IKU “Indeks Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional” adalah 4, dengan rentang indeks 1-5. Kategori indeks yang digunakan adalah sebagai berikut:

Interval	Kategori Indeks
0 - 16,67	Sangat Buruk
16,68 - 35,35	Buruk
35,36 - 50,01	Cukup Buruk
50,02 - 66,68	Cukup Baik
66,69 - 83,35	Baik
83,36 - 100	Sangat Baik

Catatan:

Perhitungan kategori indeks menggunakan formula:

Indeks yang dicapai dibagi 5 (indeks tertinggi Anholt) x 100 Jika indeks yang dicapai adalah 3.00 maka:

$$3.00/5 \times 100 = 60$$

Dengan interval masuk pada rentang **50,02 - 66,68** maka indeks tersebut tergolong “**cukup baik**”

Pengukuran IKU “Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional” diukur melalui survey yang dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri dengan segmentasi masyarakat asing di luar negeri. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Perwakilan RI pada tahun 2018, rata-rata “Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional” mencapai **3.8** dari target **4**, atau sebesar 95% dengan kategori indeks sebesar **76** atau ‘baik’.

Tabel Capaian IKU-1 S.3 Tahun 2018

IKU-1 S.3	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks citra Indonesia di dunia internasional	Indeks hasil survei terhadap citra Indonesia	3,8
	Target	4 (skala 5)
	Capaian	95%
	Nilai	76
	Kategori	Baik

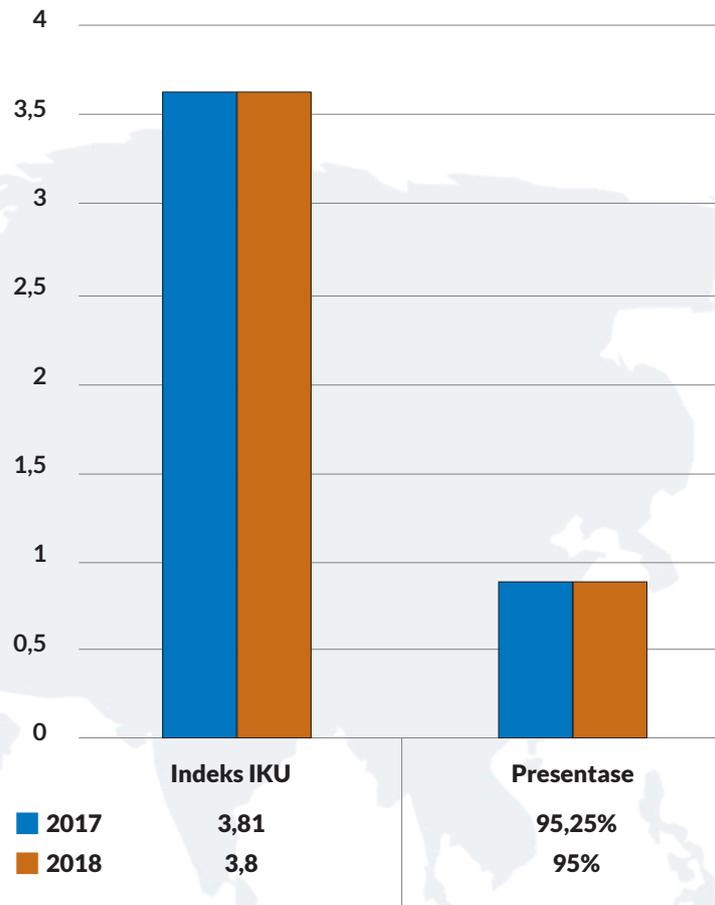
Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018, capaian IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional relatif sama meskipun mengalami penurunan sebesar 0,01 atau sebesar 0,25%. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:

- Adanya tantangan perbedaan kebijakan masing-masing negara dalam hal keterbukaan teknologi informasi berbasis *online* dan akses internet sehingga beberapa Perwakilan RI mengalami kesulitan untuk melaksanakan survey melalui sistem *online*.
- Pada beberapa Perwakilan RI, penghitungan IKU Indeks citra positif Indonesia di dunia internasional telah dilakukan namun belum memenuhi jumlah minimum responden yaitu 50 responden.
- Adanya pemahaman bahasa yang berbeda-beda di setiap negara.
- Meskipun jumlah responden meningkat namun belum tentu dapat mendukung kenaikan nilai indeks citra Indonesia di dunia internasional mengingat setiap responden memiliki opini yang berbeda-beda.

Tabel Capaian IKU-1 S.3 Tahun 2017

IKU-1 S.3	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks citra Indonesia di dunia internasional	Indeks hasil survei terhadap citra Indonesia	3,81
	Target	4 (skala 5)
	Capaian	95,25%
	Nilai	76,20
	Kategori	Baik

Perbandingan IKU S.3.1 Tahun 2017-2018

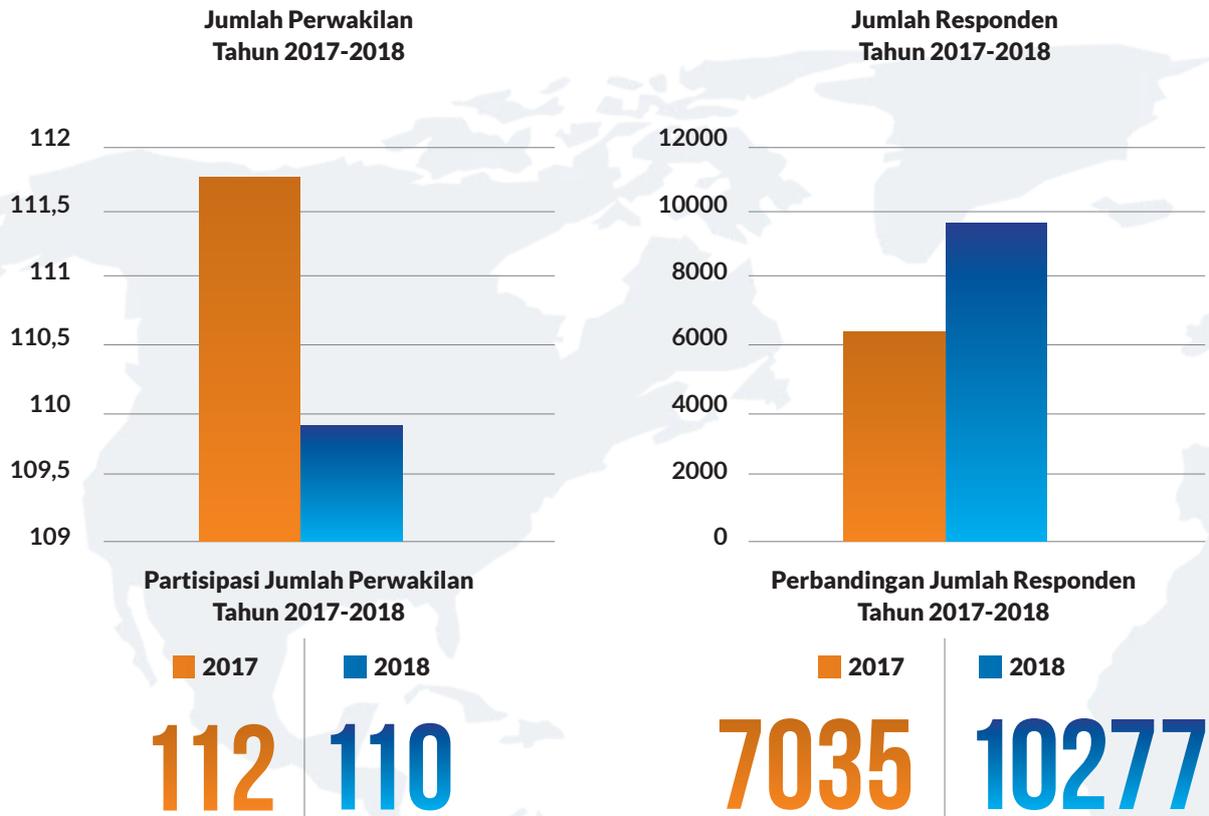


Responden yang berhasil dicapai pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 10.277 dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 7.035 responden. Kenaikan responden tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Meningkatnya jumlah kegiatan promosi di Perwakilan RI;
- Kegiatan promosi yang menarik sehingga banyak calon responden yang hadir dalam kegiatan promosi tersebut;
- Adanya strategi penggunaan berbagai media oleh Perwakilan RI untuk amplifikasi kegiatan promosi yang menjangkau masyarakat asing secara luas dan dengan frekuensi yang konsisten.

Meskipun jumlah responden mengalami kenaikan namun jumlah Perwakilan yang berpartisipasi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu 110 Perwakilan RI sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 112 Perwakilan RI. Hal tersebut disebabkan karena beberapa Perwakilan RI mengandalkan data survey yang dihasilkan melalui sistem online. Akan tetapi beberapa data survey *online* dari Perwakilan RI tersebut tidak mencapai jumlah responden minimum yang mengakibatkan penghitungan data tidak dapat dilakukan karena tidak valid.

Perbandingan jumlah responden dan partipasi Perwakilan RI 2017-2018



Pada tahun 2018, rata-rata IKU “Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional” paling tinggi berada di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara, yang masing-masing mencapai 3,94 atau sebesar 98,57% dan 97,55% dari target 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia cukup baik dikenal oleh masyarakat asing di wilayah Asia Tenggara dan wilayah Timur Tengah. Di wilayah Asia Tenggara terdapat 4 (empat) negara dengan perolehan indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional yang mencapai ataupun melebihi target, 4 yaitu:

ASIA TENGGARA	CAPAIAN INDEKS	RENTANG INDEKS	KATEGORI
HANOI	4,00	80	Baik
BS BEGAWAN	4,13	82,6	Baik
HO CHI MINH CITY	4,05	81	Baik
TAWAU	4,25	85	Sangat baik

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Adanya kedekatan Indonesia secara historis dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah berpotensi mendukung pemahaman masyarakat mengenai Indonesia di kedua wilayah tersebut. Sebagai contoh Indonesia dan beberapa negara di wilayah di Asia Tenggara dan Timur Tengah terlibat dalam Konferensi Asia Afrika, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam (atau sebelumnya dikenal sebagai Organisasi Konferensi Islam).
- Program/kegiatan promosi yang ditingkatkan oleh Perwakilan RI untuk memperdalam pemahaman masyarakat di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah.
- Nilai sosial dan budaya yang relatif dekat antara Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah berpotensi mendukung pemahaman masyarakat asing di kedua wilayah tersebut.

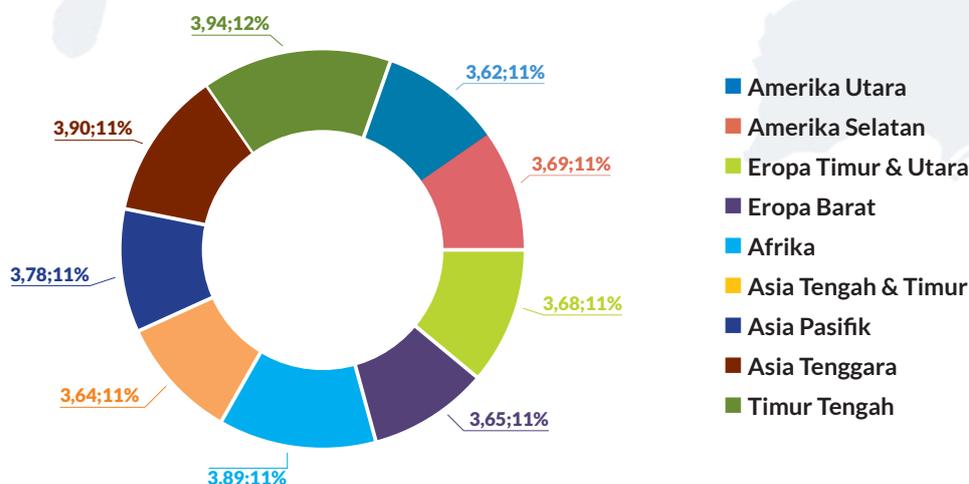
Untuk wilayah Timur Tengah, terdapat 4 (empat) negara yang IKU indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional mencapai atau melebihi target 4, yaitu:

TIMUR TENGAH	CAPAIAN INDEKS	RENTANG INDEKS	KATEGORI
DAMASCUS	4,44	88,7	Sangat Baik
SANA'A	4,70	94	Sangat Baik
MANAMA	4,04	80,8	Baik
TEHERAN	4,01	80,2	Baik

Meskipun demikian, capaian indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional paling besar berada di negara Afrika Selatan yaitu di wilayah Pretoria yang mencapai 4,79 atau sebesar 119,75% dari target 4. Kategori yang diperoleh Pretoria adalah sangat baik dengan nilai mencapai 95,8.

AFRIKA	CAPAIAN INDEKS	RENTANG INDEKS	KATEGORI
PRETORIA	4,79	95,8	Sangat Baik

Diagram capaian "Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional berdasarkan wilayah - Tahun 2018



Sebagai dukungan terhadap capaian indeks citra Indonesia di dunia internasional tersebut, KBRI Pretoria sebagai contoh melakukan kegiatan promosi seperti Pameran Africa Big 7 dan Indonesia Bazaar and *Cultural Day* 2018. Melalui kegiatan promosi tersebut, KBRI Pretoria secara paralel juga melakukan survey. Survey menunjukkan hasil yang positif yang menunjukkan adanya pemahaman warga negara asing terhadap image Indonesia.



■ Gambar 1

■ Gambar 2

■ Gambar 3

Keterangan gambar:

1, 2 dan 3: pengisian Survey Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional di Bandar Seri Begawan

Namun dalam pelaksanaan program tersebut, tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Belum adanya *grand design* terkait penguatan citra Indonesia di luar negeri, seperti image seperti apa yang akan ditampilkan di negara masing-masing dan strategi serta program seperti apa yang dapat disusun dan dilaksanakan.
- Koordinasi internal dan eksternal masih belum terlalu kuat dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri.
- Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta kondisi negara yang berbeda-beda dalam hal mewujudkan program dan strategis untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.
- Masih belum maksimalnya penggunaan media asing dan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri.
- Responden yang belum mencapai jumlah minimum mengakibatkan penghitungan IKU tidak dapat terlaksana pada beberapa Perwakilan RI.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Adanya penyusunan *grand design* terkait penguatan citra Indonesia di luar negeri melalui penyusunan white book yang dapat disampaikan kepada Perwakilan RI di luar negeri dan K/L terkait di dalam negeri.
- Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait penyusunan strategi serta program yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri.
- Membentuk berbagai kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk dapat mengisi berbagai keterbatasan dalam menjalankan strategi dan program untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.
- Perlunya meningkatkan kerja sama dengan berbagai media asing dan media sosial yang dapat digunakan sebagai ampliefier untuk menjangkau massa yang lebih luas serta perlu ditingkatkan frekuensi peningkatan promosi mengenai Indonesia.
- Perlunya peningkatan strategi penyebaran survey dalam mencapai jumlah minimum responden oleh Perwakilan RI.

III.2 CAPAIAN KINERJA

Customer Perspective

Sasaran Strategis (C.1): Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik

Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri sesuai tugas fungsinya, memberikan pelayanan publik yang mencakup pelayanan di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), pelayanan fasilitas diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, pelayanan di bidang kekonsuleran, serta pelayanan di bidang keprotokolan. Dengan demikian, publik yang mendapatkan pelayanan dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler tidak hanya individu Warga Negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) saja namun juga Lembaga Negara/Pemerintah, Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

Adapun jenis pelayanan publik yang diberikan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bersifat administratif, yaitu pemberian dokumen-dokumen terkait perijinan, identitas individu, dan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat umum.

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri "Terpenuhinya pelayanan dan aspirasi publik" sebagai Sasaran Strategis C.1 diperoleh dari pengukuran 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU-1 "Indeks pelayanan dan aspirasi publik" dan IKU-2 "Peringkat inovasi pelayanan publik oleh KemenPAN RB".

Pada tahun 2018, berdasarkan realisasi kedua IKU dimaksud, rata-rata nilai capaian SS "Terpenuhinya pelayanan dan aspirasi publik" sebesar 97,60%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, berdasarkan realisasi kedua IKU dimaksud, rata-rata nilai capaian SS "Terpenuhinya pelayanan dan aspirasi publik" sebesar 89,85%, seperti tabel dibawah ini:

Tabel Capaian C.1 Tahun 2018

No	IKU	Target 2018	Bobot 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian Pembobotan 2018
1	Indeks pelayanan dan aspirasi publik	4 (skala 4)	60%	3,84	96%	57.60%
2	Peringkat inovasi pelayanan publik oleh KemenPAN RB	Top 99	40%	Top 40	100%	40%
Capaian C.1						97.60%

Tabel Capaian C.1 Tahun 2017

No	IKU	Target 2017	Bobot 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Capaian Pembobotan 2017
1	Indeks pelayanan dan aspirasi publik	3,4 (skala 4)	60%	2,84	83,09%	49.85%
2	Peringkat inovasi pelayanan publik oleh KemenPAN RB	Top 99	40%	Top 40	100%	40%
Capaian C.1						89.85%

*) IKU baru di Tahun 2017

Analisis IKU-1: Indeks pelayanan dan aspirasi publik

IKU “Indeks pelayanan dan aspirasi publik” bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan serta tingkat aspirasi publik yang telah dipenuhi Kementerian Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam mendapatkan layanan yang baik.

Pada tahun 2018, target IKU-1 C.1 adalah 4 (skala 4) dengan realisasi kinerja sebesar 3.84 dengan capaian 96% yang diperoleh dari penjumlahan masing-masing sub IKU dan pembobotan, sebagai berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-1 C.1 Tahun 2018

No	IKU	Target 2018	Bobot 2018	Realisasi 2018	Realisasi Pembobotan 2018
1	Indeks pelayanan dan aspirasi publik	4	10%	4	0,40
2	Peringkat inovasi pelayanan publik oleh KemenPAN RB	4	40%	4	1,60
3	Indeks kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	4	10%	3,96	0,40
4	Indeks kepuasan pelayanan perlindungan WNI/BHI	4	40%	3,61	1,44
Realisasi					3,84
Target					4
Capaian					96

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, target IKU-1 C.1 adalah 3,4 (skala 4) dengan realisasi kinerja sebesar 2,83 dengan capaian 83,09% yang diperoleh dari penjumlahan masing-masing sub IKU dan pembobotan, sebagai berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-1 C.1 Tahun 2017

No	IKU	Target 2017	Bobot 2017	Realisasi 2017	Realisasi Pembobotan 2017
1	Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	3	10%	3	0,30
2	Indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran	4	40%	3,25	1,30
3	Indeks kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	3	10%	3,25	0,33
4	Indeks kepuasan pelayanan perlindungan WNI/BHI	3	40%	2,25	0,90
Realisasi					2,83
Target					3,4
Capaian					83,09%

Analisis sub IKU: Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan



Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan di bidang protokol yang prima, berkualitas dan profesional, Kementerian Luar Negeri senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan yang diberikan.

Pada tahun 2018, implementasi dari komitmen ini tercermin dalam Sertifikat ISO 9001:2015 yang diraih oleh Kementerian Luar Negeri berdasarkan standar pelayanan manajemen mutu pelayanan keprotokolan yang dimiliki, khususnya dalam bidang pemrosesan permohonan ruang VIP/VVIP bandara dan pemrosesan permohonan agreement dubes asing.

Dengan diraihnya Sertifikat ISO 9001:2015 ini, kualitas pelayanan Kementerian Luar Negeri akan terus ditingkatkan demi terpenuhinya pelayanan dan aspirasi publik.

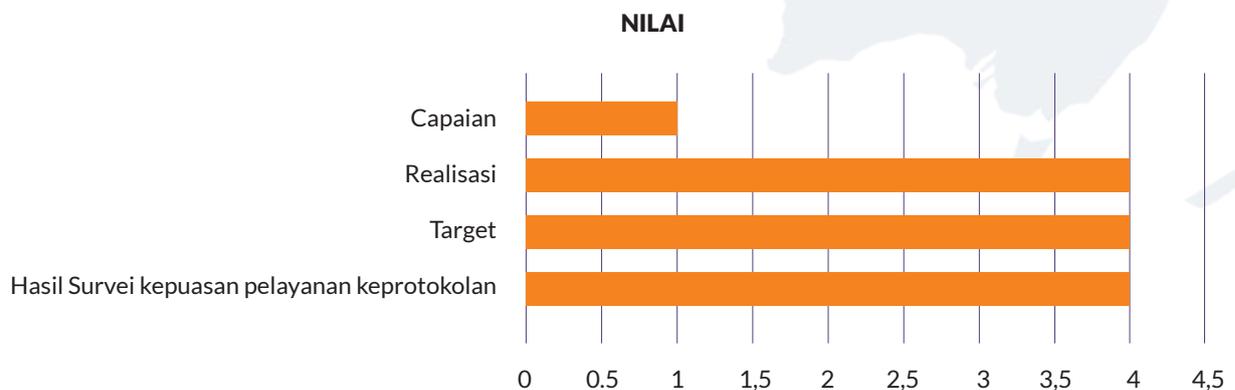
Sejak tahun 2018, terpenuhinya pelayanan publik di bidang keprotokolan diukur melalui indeks kepuasan pelayanan keprotokolan sesuai pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada 31 responden. Sampel tersebut mewakili jumlah pengguna layanan keprotokolan yang merupakan pengguna inti berbagai layanan keprotokolan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri.

Kuesioner menggunakan 3 (tiga) pertanyaan sederhana terkait kepuasan pengguna pelayanan keprotokolan dengan pilihan jawaban "Sangat Tidak Puas (STP)", "Tidak Puas (TP)", "Puas (P)", dan "Sangat Puas (SP). Target yang ditetapkan pada awal tahun 2017 adalah untuk mencapai indeks 4. Target indeks 4 tersebut dikonversikan menjadi 100% responden yang menyatakan puas atau sangat puas.

Hingga akhir tahun 2018 tercapai angka indeks 4 yang berarti 100% responden menyatakan puas atau sangat puas dengan pelayanan keprotokolan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri.

Tabel Capaian Sub IKU-1 IKU-1 C.1 Tahun 2018

Sub IKU-1 IKU-1 C.1	Informasi Kinerja	Nilai
Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	Hasil survei kepuasan pelayanan keprotokolan	4
	Realisasi	4
	Target	4
	Capaian	100%



Guna meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan, dalam periode triwulan pertama tahun 2019, akan dilakukan peningkatan sebaran kuesioner serta revisi format kuesioner sehingga dapat menjangkau lebih banyak responden.

Adapun pelayanan keprotokolan sepanjang tahun 2018 secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Perbandingan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri Tahun 2017 - 2018.

Tahun 2017		Tahun 2018	
3 x	Kunjungan Kenegaraan Presiden	6 x	Kunjungan Kenegaraan Presiden
1 x	Kunjungan Kehormatan Wakil Presiden	5 x	Kunjungan Kerja Presiden
19 x	Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden Pertemuan Bilateral maupun KTT	9 x	Kunjungan Kerja Wakil Presiden
		1 x	Kunjungan Pribadi Wakil Presiden

Pelayanan kunjungan Presiden tidak memenuhi target 2018 sebesar 25 kunjungan karena terdapat pembatalan dari pihak Presiden RI antara lain kunjungan ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Keputusan kunjungan ke luar negeri adalah keputusan prerogatif Presiden RI sehingga kunjungan yang sudah terjadwal bisa berubah. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Negara.

Tantangan dalam pelayanan keprotokolan untuk kunjungan Presiden RI dan Wakil Presiden RI ke luar negeri antara lain:

1. Peraturan keprotokolan yang belum jelas dari negara setempat. Perbedaan peraturan ini menyebabkan peraturan keprotokolan tidak bisa diterapkan berdasarkan asas resiprositas di negara yang dikunjungi;
2. Perubahan jadwal penerbangan dan izin melintas di wilayah udara negara-negara terkait (flight clearance) sehingga Direktorat Protokol harus melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Konsuler dan Perwakilan RI untuk kepastian jadwal penerbangan;
3. Keterbatasan waktu kedatangan Tim Pendahulu yang dekat dengan kunjungan Presiden RI sehingga koordinasi dengan pihak Pemerintah setempat menjadi terbatas;
4. Dinamika yang tinggi terkait pengaturan acara dari pihak panitia negara tuan rumah;
5. Dinamika perubahan agenda Presiden RI dan Wakil Presiden RI beserta delegasi yang tinggi pada acara konferensi internasional yang memerlukan koordinasi intensif untuk pengaturannya.

2. 42 pelayanan kunjungan Kepala Negara / Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri negara-negara sahabat ke Indonesia.

terdapat kenaikan 31% dari kunjungan tamu tahun 2017, yang menunjukkan peran aktif Indonesia yang semakin tinggi dalam dunia internasional sehingga terdapat peningkatan pertemuan dan kerja sama bilateral.

Tahun 2017		Tahun 2018	
9 x	Kunjungan Kenegaraan	3 x	Kunjungan Kenegaraan
5 x	Kunjungan Resmi	6 x	Kunjungan Resmi
5 x	Kunjungan Kerja	13 x	Kunjungan Kerja
3 x	Kunjungan Pribadi	2 x	Kunjungan Pribadi
9 x	Kunjungan tamu Menteri Luar Negeri.	18 x	Kunjungan tamu Menteri Luar Negeri



Tantangan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan antara lain:

- 1) Pemberlakuan asas resiprositas untuk pelayanan yang tidak sama antara tamu VVIP/VIP asing yang datang dengan pelayanan Keprotokolan untuk pejabat VVIP/VIP Indonesia di negara sahabat;
- 2) Perubahan jadwal kunjungan tamu VVIP/VIP ke Indonesia yang menyebabkan perlunya penyesuaian antara pelayanan keprotokolan di Indonesia dengan praktik pelayanan di pihak negara yang melakukan kunjungan sehingga menimbulkan dinamika yang tinggi dalam koordinasi antara kedua pihak mengenai pengaturan kunjungan.

Kedua tantangan mendasar ini diharapkan dapat diatasi dengan peningkatan koordinasi serta peningkatan kapa-sitas petugas protokol dalam pelayanan keprotokolan kepada semua pemangku kepentingan sehingga tingkat kepuasan pengguna layanan keprotokolan dapat tercapai secara optimal.

3. **Bantuan keprotokolan pada 74 kegiatan yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat/ Daerah yang mengundang Duta Besar Negara Sahabat.**

Keprotokolan diberikan untuk mengatur tata tempat sebagai penghormatan kepada kepala perwakilan negara asing. Untuk bantuan keprotokolan, terdapat cukup banyaknya permintaan pelayanan keprotokolan yang bersifat mendadak dan di luar kegiatan yang direncanakan sehingga menuntut penyesuaian dalam hal penyediaan anggaran, pengalokasian petugas protokol dan penyiapan logistic. Selain itu, melihat pada jumlah permintaan yang cukup tinggi, tantangan yang dihadapi adalah jumlah petugas protocol yang tidak bias memenuhi permintaan Kementerian/Lembaga. Hal ini karena waktu pelaksanaan kegiatan yang berdekatan sehingga alokasi petugas tidak bisa sesuai dengan jumlah yang diperlukan.

4. **26 pelayanan keprotokolan pada konferensi internasional.**

Kementerian Luar Negeri memberikan pelayanan keprotokolan untuk konferensi internasional yang diselenggarakan di Indonesia baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian atau Lembaga lainnya. Pelayanan keprotokolan yang diberikan adalah pengaturan keprotokolan bagi delegasi VVIP/VIP.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan ditemukan tantangan antara lain keterbatasan informasi dan data dari pihak panitia pelaksana konferensi internasional sehingga tidak bisa melakukan persiapan pada waktu yang cukup sebelum pelaksanaan kegiatan.

5. **Pelayanan keprotokolan juga diberikan dalam hal pemberian rekomendasi penggunaan ruangan VIP bandar udara oleh Duta Besar LBBP negara sahabat di Jakarta maupun tamu kedutaan setingkat Menteri pada saat ketibaan dan keberangkatan.**

Rekomendasi penggunaan ruangan VIP bandar udara pada Triwulan I tahun 2018	199
Rekomendasi penggunaan ruangan VIP bandar udara pada Triwulan II tahun 2018	170
Rekomendasi penggunaan ruangan VIP bandar udara pada Triwulan III tahun 2018	165
Rekomendasi penggunaan ruangan VIP bandar udara pada Triwulan IV tahun 2018	138
Total rekomendasi yang telah dikeluarkan	672

Sepanjang tahun 2018, Kementerian Luar Negeri telah memberikan 672 rekomendasi penggunaan ruangan VIP Bandar Udara. Adapun 75,14% permintaan surat rekomendasi penggunaan *VIP Room* selama tahun 2018 diterbitkan dalam waktu 0-1 hari sejak diterimanya surat permintaan.

Tantangan yang dihadapi dalam pemberian rekomendasi *VIP Room* di bandar udara adalah permintaan dari perwakilan negara asing disampaikan mendadak dekat dengan waktu keberangkatan.

Kemenlu mengkoordinasikan proses permohonan agreement untuk kepala perwakilan negara asing yang bertugas di Indonesia. Tantangan yang dihadapi adalah penerimaan masukan dari unit kerja regional dan pihak terkait untuk proses rekomendasi pada waktu lebih lama dari prosedur yang ditentukan.

6. 41 pelayanan permohonan surat kepercayaan/agreement dubes asing (resident/non-resident).

Kemenlu juga mengkoordinasikan kedatangan Menteri Kabinet sebagai tamu kehormatan untuk peringatan hari kemerdekaan/nasional negara-negara sahabat, dan melakukan penyambutan/pelepasan Duta Besar negara asing di bandara.

Berdasarkan data dari dua tahun terakhir tersebut, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan intensitas yang signifikan dalam hal jumlah pelayanan kunjungan, khususnya pelayanan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri dan pelayanan kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan kunjungan tamu Menteri Luar Negeri. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2019 jumlah pelayanan kunjungan juga dapat terukur dengan perencanaan yang baik.

Dalam upaya menjaga mutu pelayanan, khususnya standarisasi pelayanan publik, Kemenlu telah mensertifikasi kembali ISO 9001:2008 untuk izin penerbangan.

Perencanaan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan keprotokolan. Hal ini dikarenakan dengan perencanaan yang matang, pelayanan keprotokolan dapat diberikan sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku sehingga dapat memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada para pengguna layanan. Namun demikian, pada praktiknya dapat diidentifikasi antara lain 3 (tiga) tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan keprotokolan.

Pertama,	terdapat cukup banyaknya permintaan pelayanan keprotokolan yang bersifat mendadak dan di luar kegiatan yang direncanakan sehingga menuntut penyesuaian dalam hal penyediaan anggaran, pengalokasian petugas protokol, dan penyiapan logistik.
Kedua,	dalam rangka pelayanan keprotokolan pada kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri, susunan daftar delegasi RI seringkali berubah sewaktu-waktu sehingga penyampaian daftar delegasi tersebut tidak dapat dilakukan jauh hari sebelumnya kepada pihak tuan rumah negara yang dikunjungi.
Ketiga,	dalam hal penerimaan kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri negara-negara sahabat, seringkali terdapat perbedaan praktik yang mendasar antara pelayanan keprotokolan di Indonesia dengan praktik pelayanan di pihak negara yang melakukan kunjungan sehingga menimbulkan dinamika yang tinggi dalam koordinasi antara kedua belah pihak mengenai pengaturan kunjungan

Ketiga tantangan mendasar ini diharapkan dapat diatasi dengan peningkatan koordinasi serta sosialisasi prosedur tetap pelayanan keprotokolan kepada semua pemangku kepentingan sehingga tingkat kepuasan pengguna layanan keprotokolan dapat tercapai secara optimal.

Analisis sub IKU: Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

Pada tahun 2018, realisasi Sub IKU-2 "Indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran" mencapai 4 dari target 4, adanya peningkatan berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap pelayanan kekonsuleran, bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai 3,25 dari target 4, sebagaimana tabel berikut:

IKU-1 SS-C.1	Informasi Kinerja	2017	2018
Indeks kepuasan pelayanan Kekonsuleran	Hasil survei kepuasan pelayanan kekonsuleran	3,25	4
	Realisasi	3,25	4
	Target	4	4
	Capaian	81,25%	100%

Indeks pelayanan kekonsuleran dihitung menggunakan metode kuesioner dan dihitung berdasarkan jumlah kuesioner yang dikembalikan. Kuesioner tersebut terdiri dari kuesioner untuk pelayanan paspor diplomatik dan dinas, legalisasi dan izin tinggal diplomatik dan dinas. Pemberian kuesioner dilakukan setiap hari di masing – masing loket dan penghitungan dilakukan setiap bulan. Setiap kuesioner yang dikembalikan responden dilakukan perhitungan kepuasan pada tiap – tiap pertanyaan yang diajukan, untuk legalisasi dan paspor diplomatik dan dinas diajukan sebanyak 4 pertanyaan dan 10 pertanyaan untuk izin tinggal diplomatik dan dinas, dari keseluruhan pertanyaan di Kuesioner didapat hasil seperti tertera pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tabel kepuasan pelayanan kekonsuleran, Kementerian Luar Negeri

Bulan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah	%
Total Responden	1086	1186	1034	533	510	632	808	929	1175	1270	1204	1095	11462	
Sangat Tidak Puas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tidak Puas	0	0	0	29	14	0	0	0	0	0	0	10	53	0,09
Puas	2461	2283	2029	1086	980	1414	2056	2458	2603	2868	2507	1949	24714	42,38
Sangat Puas	3239	3121	2839	1242	1307	1870	2616	2848	3657	3868	3437	3505	33549	57,53
Jumlah	5700	5404	4868	2357	2301	3284	4672	5306	6260	6736	5944	5464	58316	100

Sumber : e-monev dan opname fisik Direktorat Konsuler, 2018

Sepanjang bulan Januari hingga Desember, berdasarkan hasil kuesioner yang melibatkan 11.462 responden dengan jumlah 58.316 pertanyaan, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas, sebanyak 53 orang atau 0,09% responden menyatakan tidak puas, dan 24.714 atau 42,38% responden menyatakan puas serta 33.549 atau 57,53% menyatakan sangat puas terhadap pelayanan kekonsuleran Kementerian Luar Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 99,90% pemohon menyatakan puas dengan pelayanan publik Kementerian Luar Negeri. Persentase kepuasan pelayanan Kementerian Luar Negeri ditunjukkan pada

Diagram kepuasan Pelayanan Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri tahun 2018



Pada tahun 2018 Kemenlu mengalami kenaikan kepuasan atas pelayanan Kekonsuleran, kenaikan ini disebabkan karena beberapa hal, seperti :

- a. Komitmen pimpinan dalam menciptakan transformasi sistem pelayanan dari manual menjadi digital.
- b. Kepemimpinan yang kondusif melibatkan seluruh staf melalui briefing rutin dan kegiatan pengembangan motivasi SDM secara berkala dengan pemantauan target kinerja yang terukur.
- c. Pengawasan sistem pelayanan publik Direktorat Konsuler juga dilakukan secara terbuka oleh instansi eksternal.

Pada tahun 2018 Kemenlu senantiasa berkomitmen menciptakan transformasi sistem pelayanan dari manual menjadi digital, adapun aplikasi pelayanan online yang diterapkan antara lain:

1.	aplikasi online legalisasi;
2.	aplikasi online exit permit only (EPO);
3.	aplikasi online web base untuk visa dinas dan visa diplomatik;
4.	aplikasi online android untuk pelayanan paspor diplomatik dan dinas.

Empat aplikasi ini dipercaya dapat memudahkan pemohon dalam mengakses pelayanan yang dapat dilakukan dimana dan kapan saja, serta memberikan kepastian waktu bagi pemohon. Selain itu masih ada aplikasi online yang dikembangkan, yaitu aplikasi dashboard Pelayanan Kekonsuleran, aplikasi online ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan secara real time.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan mengadakan beberapa kegiatan pelatihan SDM untuk pelayanan publik dengan mengundang trainer profesional dengan materi yang dibuat menarik dan berguna bagi pengetahuan staf dalam menjalankan tugas. Tahun 2018 telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pelatihan SDM bekerja sama antara lain dengan trainer dari Bank Mandiri, Jakoef Ezra Human Resource Trainer dan High Performa.

Dalam upaya menjaga mutu pelayanan, Kemenlu melakukan evaluasi dan pembuatan 17 (tujuh belas) Standard Operational Procedure (SOP) yang mengatur pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian penting. Selain itu, untuk menjaga mutu pelayanan khususnya standarisasi pelayanan publik, Kemenlu menetapkan aplikasi telah diuji mutu oleh badan terkait. Terdapat 3 (tiga) pelayanan publik yang telah disertifikasi kembali adalah resertifikasi ISO 9001:2015 untuk izin penerbangan, pelayanan paspor, dan penerbitan izin tinggal diplomatik dan dinas.

Secara keseluruhan tidak adanya hambatan berarti dalam meningkatkan realisasi dan capaian kinerja atas persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran, pemohon menyatakan puas atas pelayanan yang diberikan, terdapat beberapa kendala yang sering terjadi, baik itu kendala teknis maupun kendala sumber daya manusia berupa kesalahan input ke sistem maupun sistem error, kendala tersebut ditanggulangi dengan pemberian sosialisasi maupun pemeliharaan sistem secara berkala.

Analisis sub IKU: Indeks Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik

Kementerian Luar Negeri pada tahun 2018, mencapai Indeks kepuasan fasilitas diplomatik sebesar 96,83% dari target indeks yang ditetapkan sebesar 100% untuk kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik. Hasil tersebut seperti tertera dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 - Capaian Tahun 2018

Sub IKU-3 IKU-1 C.1	Informasi Kinerja	Nilai
Indeks kepuasan pelayanan	Hasil survey kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	3,96
Fasilitas diplomatik		252
	Realisasi	3,96
	Target	4
	Capaian	99

Sebagai perbandingan, pada tahun 2017, realisasi Sub IKU-3 IKU-1 C.1. "Indeks kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik" mencapai nilai 3,25 dari target sebesar 3 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - Capaian Tahun 2017

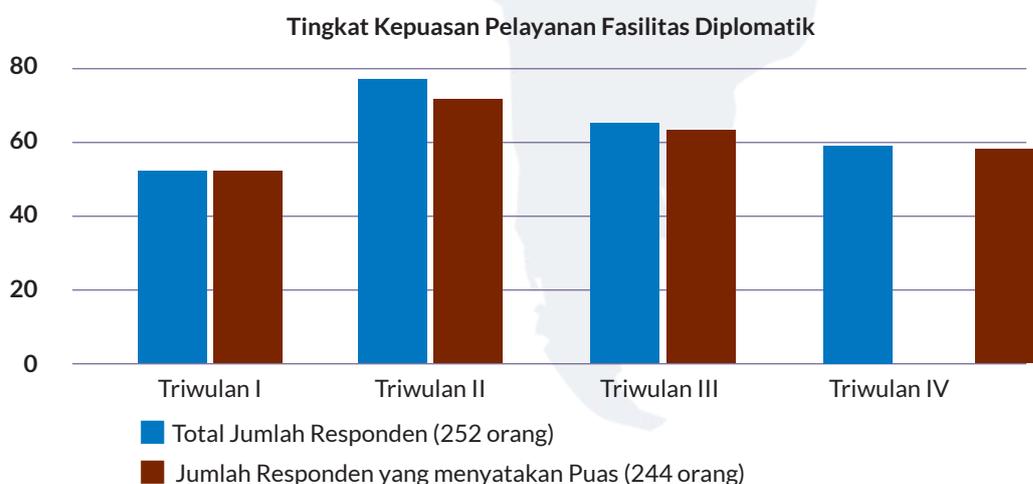
Sub IKU-3 IKU-1 C.1	Informasi Kinerja	Nilai
Indeks kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	Hasil survei kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	3,25
	Realisasi	3,25
	Target	3
	Capaian	108,33%

Indeks pelayanan fasilitas diplomatik dihitung menggunakan metode kuesioner dan dihitung berdasarkan jumlah kuesioner yang dikembalikan. Kuesioner tersebut terdiri dari kuesioner untuk pelayanan dokumen fasilitas diplomatic yang meliputi fasilitas kendaraan bermotor, perpajakan, barang, perizinan senjata api dan alat komunikasi, perizinan bangunan, permohonan ID-Card, penempatan pejabat/staf baru PNA, izin kunjungan diplomat ke daerah, permohonan pembuatan airport pass.

Adapun jumlah pelayanan berdasarkan Triwulan adalah sebagai berikut:

Periode	Total Responden	Yang Menyatakan Puas	Persentase
Triwulan I	52	51	98,07%
Triwulan II	76	72	94,73%
Triwulan III	64	62	96,87%
Triwulan IV	60	59	98,33%
Jumlah	252	244	96,83%

Sumber: e-monev Direktorat Fasilitas Diplomatik 2018



Sumber: e-monev Direktorat Fasilitas Diplomatik 2018

Adapun rincian bulanan tingkat kepuasan pelayanan Direktorat Fasilitas Diplomatik adalah sebagai berikut:

Bulan	Total Responden	Yang Menyatakan Puas
Januari	25	24
Februari	15	15
Maret	12	12
April	30	28
Mei	20	20
Juni	26	24
Juli	16	16
Agustus	28	26
September	20	20
Oktober	26	26
November	22	21
Desember	12	12
Total	252	244

Analisis Sub IKU-4: Indeks kepuasan pelayanan perlindungan WNI dan BHI



Bicara mengenai pelayanan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri sebagai pelayanan publik tidak akan lepas dari konsep kepercayaan publik. Bagaimana sebuah sistem dengan basis pelayanan akan selalu berinteraksi dengan manusia yang sangat kompleks menafsirkan “rasa”. Tetapi “rasa” tersebut dapat berespon positif jika sudah diberi “kepercayaan”. Dan sejatinya “kepercayaan” itu adalah “amanah”. Sehingga melaksanakan pelayanan publik berarti mengemban amanah untuk senantiasa dipercaya dapat membantu, menolong, meringankan, memberi solusi, atau setidaknya berbagi rasa simpati.



Sebagai ujung tombak dari perlindungan WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri merespon peristiwa-peristiwa yang muncul untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi para WNI di seluruh dunia.

Dengan ditetapkannya Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI pada indeks pengukuran kinerja Direktorat Perlindungan WNI dan BHI pada tahun 2018, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI melakukan sampling penyebaran kuesioner terhadap 67 orang responden yang mendapatkan pelayanan perlindungan WNI dan BHI. Sampel tersebut mewakili jumlah permasalahan kasus khusus dan umum dari para responden yang melakukan pengaduan langsung ke Kementerian Luar Negeri.



Pengukuran terhadap 219 orang responden menggunakan metode likert dengan 10 pertanyaan sederhana dan pilihan jawaban: “STP”, “TP”, “P” dan “SP”. Target yang ditentukan terhadap kepuasan pelayanan perlindungan WNI dan BHI adalah 4 dari skala 4. Target 4 tersebut dikonversikan menjadi 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh adalah 3.61. Capaian kepuasan pelayanan perlindungan WNI dan BHI sebesar 90,25%.

Dalam penyebaran kuesioner tersebut beberapa hambatan yang perlu dicatat adalah perlunya melakukan revisi pertanyaan kuesioner dan perhitungannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan di Kementerian Luar Negeri. Terkait dengan hal ini, proses revisi akan dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2019. Untuk menunjang proses pembangunan sistem pelayanan publik yang prima, Kementerian Luar Negeri pada tahun 2018 juga telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk para petugas pelayanan publik.

Sub IKU-3 IKU-1 C.1	Informasi Kinerja	Nilai
Indeks kepuasan pelayanan perlindungan WNI/BHI	Hasil survei kepuasan pelayanan Perlindungan WNI/BHI	3,61
	Realisasi	3,61
	Target	4
	Capaian	90,25%

Analisis IKU-2: Peringkat inovasi pelayanan publik oleh KemenPAN RB

Pelayanan publik yang berkualitas adalah dambaan setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika inovasi-inovasi diperlukan bagi pemerintah dalam mengambil berbagai inisiatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB memperkenalkan inisiatif “Satu Instansi, Satu Inovasi (*One Agency, One Innovation*)” sejak tahun 2013. Pada prinsipnya inisiatif ini mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah agar melakukan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahunnya. Sejalan dengan inisiatif ini juga diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik merupakan ajang tertinggi dari Pemerintah c.q. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk pelaksanaannya, telah dibuat SiNovik sebagai sistem online untuk mempermudah pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Pada tahun 2018, Kementerian Luar Negeri berhasil meraih peringkat tertinggi (Top 40) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), atas program program MENIKUM (Menikah Untuk Melindungi) yang dibangun dan dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu dan program JARUM PENTUL (Jadi Relawan museum itu Penting dan gaul) yang dibangun dan dilakukan oleh Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung dibawah penanganan Direktorat Diplomasi Publik, pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu.

Penghargaan tersebut dimenangkan setelah bersaing dengan 2.824 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga Pusat maupun Pemerintah Daerah serta BUMN/BUMD.

Capaian ini meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana pada tahun 2017 hanya ada 1 pelayanan publik Kemenlu yaitu yang dilakukan oleh KBRI Berlin.



Kementerian Luar Negeri berupaya mendorong seluruh Unit Kerja Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk membuat dan mengembangkan program-program yang inovatif dalam meningkatkan kualitas dan sebaran penerima pelayanan publik di tengah masyarakat.

Sasaran Strategis (C.2): Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional

“Persentase tindak lanjut/ implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri”

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesepakatan kerja sama pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral telah ditindaklanjuti pada tingkat nasional.

IKU ini diperlukan agar Kementerian Luar Negeri dapat melakukan monitoring, follow up dan melakukan koordinasi dalam menindaklanjuti kesepakatan kerja sama oleh pemangku kepentingan terkait

Pada tingkat bilateral serta forum-forum regional dan multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negara-negara lain. Kesepakatan tersebut perlu diimplementasikan agar dapat dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. Mengingat tugas Kementerian Luar Negeri bukan sebagai *implementing agency*, Kementerian Luar Negeri perlu memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga focal point untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan bilateral, regional, dan multilateral terkait di tingkat nasional. Fungsi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut terimplementasi dengan baik.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) “Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional” diukur dengan IKU “Persentase tindak lanjut/ implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri” yang capaiannya diperoleh dari 4 (empat) Sub IKU sebagai berikut:

1. SUB IKU-1: Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* dalam negeri;
2. SUB IKU-2: Persentase prakarsa/ rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* dalam negeri;
3. SUB IKU-3: Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di dalam negeri;
4. SUB IKU-4: Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional.

Analisis IKU-1 : Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

Pada tahun 2018, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU-1 yaitu “Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri” berdasarkan capaian dari ke-4 (empat) Sub IKU-nya mencapai 115,18% (dengan konversi sebesar 120%) atau mengalami penurunan sebesar 12.19% jika dibandingkan tahun sebelumnya (2017) sebesar 127,37%. Berikut rincian informasi untuk capaian kinerja IKU-1 C.2:

Tabel Perbandingan Capaian SUB IKU C.2.1 Tahun 2017 dan 2018

No	Sub IKU	Target	Bobot 2017 dan 2018	Realisasi 2017	Realisasi Pembobotan 2017	Realisasi 2018	Realisasi Pembobotan 2018
1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri (Sub IKU-1)	86%	40%	110,64%	44,25%	105,56%	42,22%
2	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri (Sub IKU-2)	90%	30%	100%	30%	100%	30%
3	Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di dalam negeri (Sub IKU-3)	85%	20%	100%	20%	100%	20%
4	Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional (Sub IKU-4)	85%	10%	100%	10%	78,81%	7,88%
					Realisasi	104,26%	100,1%
					Target	81,85%	86,90%
					Capaian	127,37%	115,18%
					Batas Toleransi Capaian	120%	

Analisis Sub IKU-1 : Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Pada tahun 2018, realisasi Sub IKU Persentase Kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri sebesar 105,56% dari target 86%. Nilai capaian tersebut diperoleh dari jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri sebanyak 95 kesepakatan dari target 90 kesepakatan. Berikut tabel capaian Sub IKU dimaksud berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-1 C.2 Tahun 2018

Sub IKU-3 IKU-1 C.1	Informasi Kinerja	Nilai
Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	95
	Jumlah kesepakatan yang akan ditindaklanjuti	90
		Realisasi
		105,56%
		Target
		86%
		Capaian
		122,74%
		Batas Toleransi
		120%

Raihannya pencapaian yang melampaui target pada sub IKU ini tidak saja merefleksikan perhatian stakeholder terkait yang semakin tinggi dalam optimalisasi manfaat ragam kemitraan bilateral, namun juga didorong oleh peningkatan intensitas *official exchanges* selama tahun 2018 dimana di dalamnya dibahas langkah tindak lanjut kerjasama. Hal tersebut antara lain ditandai dengan rangkaian kunjungan Presiden RI ke luar negeri serta kunjungan kepala negara/kepala pemerintahan asing ke Indonesia, pertukaran kunjungan tingkat menteri dan pejabat tinggi, penyelenggaraan Forum Komisi Bersama (FKB) atau Sidang Komisi Bersama (SKB).

Di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, dicapai sejumlah 61 kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti dari target 57 kesepakatan, antara lain:

1. Penyelenggaraan *Workshop on Islamic Education* RI-Filipina di Jakarta, 14 Februari 2018 sebagai tindak lanjut Kerja Sama Pendidikan Islam Indonesia-Filipina yang diluncurkan oleh Menlu RI di Davao City, 3 Januari 2018. *Workshop* terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Agama RI, *Centre for Humanitarian Dialogue*, Departemen Pendidikan Filipina, Kementerian Luar Negeri Filipina di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI. Dalam kegiatan tersebut peserta antara lain bertukar pandangan dan *lessons learned* pelaksanaan pendidikan Islam di kedua negara.
2. Pelaksanaan *the 1st Trilateral Counter-terrorism Intelligence Cooperation Workshop* di Bali, 20-23 Februari 2018 oleh Jakarta *Centre for Law Enforcement and Cooperation* (JCLEC). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari *Trilateral Cooperative Arrangement* Indonesia-Malaysia-Filipina yang ditandatangani di Jakarta, 14 Juli 2016. Dalam pertemuan antara lain dibahas tantangan data *gathering* dan peningkatan pertukaran informasi intelijen antar agensi/ badan terkait dalam rangka menangkal dan melemahkan kejahatan terorisme.



■ The 1st Trilateral Counter-terrorism Intelligence Cooperation Workshop, Bali, 20-23 Februari 2018.

3. Terlaksananya Pertemuan Konsultasi Pertama implementasi Perjanjian 1982 RI-Malaysia terkait Koridor Udara, 8 Maret 2018. Pertemuan dilaksanakan untuk menindaklanjuti butir kesepakatan pada Annual Consultation RI-Malaysia ke-12, di Kuching, Malaysia, 22 November 2017. Dalam pertemuan dibahas aspek-aspek kerja sama dan konsultasi teknis yang berkaitan dengan penggunaan ruang udara di perbatasan RI-Malaysia.
4. Sebagaimana dimaklumi, perluasan akses pendidikan bagi TKI dan keluarganya di Malaysia merupakan salah satu hasil yang disepakati dalam Annual Consultation RI-Malaysia ke-12, tanggal 22 November 2017. Hal ini ditindaklanjuti dengan peresmian 17 Community Learning Center (CLC) di Sabah, Malaysia, 15-17 Maret 2018 oleh KBRI Kuala Lumpur serta pengiriman 95 guru Indonesia untuk menjadi tenaga pendidik di CLC Sarawak dan Sabah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Kota Kinabalu, 31 Oktober 2018.

5. Sebagai langkah tindak lanjut kerja sama pengembangan ekonomi digital yang disepakati dalam Leaders Retreat RI-Singapura di Singapura, 7 September 2017, Menlu RI dan Menlu Singapura mewakili masing-masing Pemerintah telah membuka Nangsa Digital Park di Batam, tanggal 20 Maret 2019. Nangsa Digital Park dikelola oleh Citramas Group dengan luas sekitar 166 hektar dan diharapkan dapat menjadi basis pengembangan bisnis digital berskala global di Indonesia.
6. Penandatanganan MoU Kerjasama Perawatan Pesawat antara PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia Tbk dan Ethiopian Airlines di sela-sela Indonesia - Africa Forum (IAF) di Bali, 11 April 2018. Pencapaian kontrak kerja sama bisnis tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan Air Service Agreement Indonesia-Ethiopia yang ditandatangani di Jakarta, 21 Desember 2017, serta hasil kunjungan misi bisnis delegasi Tur Afrika ke-2 Menlu/Wamenlu RI ke Ethiopia, tanggal 11-13 Juni 2017.



■ Dirut PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia Tbk, Iwan Joeniarto berjabat tangan dengan CEO Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, se usai penandatanganan kerja sama di sela-sela Forum Indonesia Africa Forum (IAF) 2018 di Nusa Dua, Bali, 11 April 2018.

7. Kesepakatan Air Service Agreement Indonesia-Ethiopia juga ditindaklanjuti dengan pembukaan jalur penerbangan Adis Ababa-Jakarta dengan transit di Bangkok, Thailand oleh Ethiopian Airlines. Selain peningkatan kunjungan wisatawan, pembukaan rute penerbangan tersebut juga diharapkan dapat mendorong saling kunjung pengusaha kedua negara untuk menjajaki kerja sama.
8. Peluncuran rangkaian perundingan *Preferential Trade Agreement* (PTA) RI-Mozambik oleh Kementerian Perdagangan RI dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Mozambik di sela-sela kegiatan Indonesia-Africa Forum (IAF) Bali pada bulan April 2018. *Launching* PTA tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama RI-Mozambik hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dengan Presiden Mozambik, H.E. Filipe Jacinto Nyusi di Maputo, Mozambik, 7 Februari 2017.

Sementara beberapa kesepakatan bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri selama tahun 2018 berjumlah, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat interkem persiapan pelaksanaan Senior Official Meeting RI-AS sebagai penguatan mekanisme *Annual Ministerial Strategic Dialogue* (AMSD) RI-AS, di Bogor tanggal 18-19 Januari 2018;
2. Pertemuan dengan Delegasi AS yang dipimpin oleh *Assistant Secretary of the Treasury for Terrorist Financing and Financial Crimes*, Marshall Billingslea di Jakarta, 10 Agustus 2018;
3. Kunjungan Menlu Republik Federasi Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, ke Bogor, 11 Mei 2018 (Pengganti kegiatan SKB ke-3 RI - Brasil). Dalam kunjungan tersebut, Menlu Brasil menyampaikan surat dari Presiden Brasil kepada Presiden RI terkait pembatalan rencana kunjungan Presiden Brasil ke Indonesia yang sedianya dilakukan 10-12 Mei 2018. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu membahas isu-isu terkait kerja sama perdagangan, pertanian, kerja sama bidang kelapa sawit, serta bebas visa. Selain itu dibahas pula isu-isu kerja sama multilateral dan regional yang menjadi perhatian bersama Indonesia – Brasil.
4. Forum Koordinasi Implementasi dan Tindak Lanjut Kemitraan RI-Belanda
Forum koordinasi menyepakati, antara lain:
 - a) secara substantif forum ini memiliki peran strategis dalam memonitor progres kerja sama dalam hubungan bilateral kedua negara, utamanya dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018) dari sejak ditandatanganinya *Joint Declaration on Comprehensive Partnership*;
 - b) forum koordinasi menjadi instrumen efektif untuk koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait khususnya dalam hal monitoring dan update perkembangan kerja sama yang tercantum dalam matrik implementasi dan tindak lanjut Kemitraan Komprehensif RI – Belanda;
 - c) hasil-hasil forum koordinasi ini dapat memperkaya persiapan pertemuan-pertemuan dalam mekanisme bilateral kedua negara di masa mendatang.
5. Kunjungan Menlu Republik Italia, Y.M. Tn. Angelino Alfano, ke Jakarta (7 Februari 2018). Dalam kunjungan tersebut, Menlu Italia telah melakukan pertemuan bilateral (Forum Konsultasi Bilateral) dengan Menlu RI. FKB Ketiga RI - Italia tersebut merupakan implementasi dari *Memorandum of Understanding between the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic on Bilateral Consultation* yang ditandatangani pada 04 Maret 2009.
6. FKB ke-3 RI – Polandia (Jakarta, 11 April 2018). Pelaksanaan FKB merupakan implementasi dari MoU Mengenai Konsultasi Bilateral RI – Polandia, yang ditanda tangani di New Delhi, 11 November 2013. Forum membahas perkembangan kerja sama bilateral di berbagai bidang, kerja sama di fora multilateral dan isu-isu regional serta global yang menjadi perhatian bersama kedua negara. Beberapa hal bilateral yang dibahas dalam pertemuan antara lain rencana kunjungan Presiden Polandia ke Indonesia; keinginan untuk memperkuat platform kerja sama antara Indonesia – *Visegrad Countries*; ekonomi; dan *people to people contact*. Forum juga membahas beberapa isu regional dan global antara lain konflik Polandia – Rusia, hubungan Polandia dengan UE dan NATO, konflik Krimea, isu pengungsi, Tiongkok, Israel, dll. Secara khusus dibahas juga perihal proses perizinan Gedung KBRI yang akan dibeli oleh Pemri. Diharapkan Polandia perlu mempertimbangkan asas resiprositas atas fasilitasi yang telah diberikan Indonesia saat pembelian premis-premis Polandia di Indonesia.
7. Rangkaian kegiatan penguatan implementasi FLEGT License (3-5 Juli 2018). Kegiatan merupakan tindak lanjut *Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)*. Rangkaian kegiatan terdiri dari pertemuan konsultasi bilateral (3 Juli 2018); workshop (4 Juli 2018); dan kunjungan lapangan (5 Juli 2018). Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dengan negara-negara di kawasan Eropa II untuk pemanfaatan *FLEGT License* dan diharapkan akan mampu meningkatkan *awareness* di kalangan eksportir/importir produk kayu dan para pemangku kepentingan di Indonesia. Kegiatan juga diharapkan mampu mengurangi hambatan yang dihadapi pelaku usaha Indonesia, antara lain compliance yang harus dipenuhi oleh para pelaku eksportir produk kayu Indonesia dalam mengadakan kegiatan perdagangan dengan Austria.

8. Perundingan Perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan Ekstradisi RI-Rusia (Moskow, 11-14 September 2018). Dalam perundingan ini Indonesia mengusulkan agar tahapan penyidikan dimasukkan sebagai tahapan terintegrasi dalam *criminal justice system*. *Criminal proceeding* diartikan sebagai suatu rangkaian proses penegakan hukum yang mencakup penyidikan, penuntutan dan persidangan. Selain itu, pada pasal mengenai kejahatan terekstradisi, Indonesia mengusulkan agar batas waktu penghitungan durasi hukuman yang harus dijalani Termohon Ekstradisi lebih dipertegas.



■ Perundingan Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi RI-Rusia

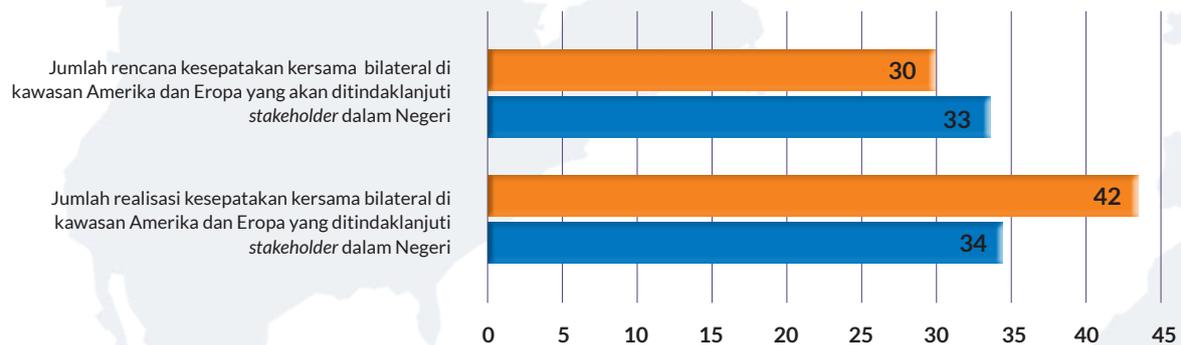
9. Sidang Komisi Bersama Kerja Sama Teknik-Militer ke- 14 RI – Rusia (*the 14th Indonesia – Russia Intergovernmental Commission on Military Technical Cooperation*) (Moskow, 22-24 November 2018). Dalam pertemuan, Delri memastikan pihak Rusia menjalankan komitmen menunjuk calon Industri Pertahanannya yang sesuai khusus Sukhoi Data Link untuk dapat bekerja sama secara B to B dengan PT. LEN Indonesia. Delri menegaskan bahwa Indonesia tidak saja sebagai pasar untuk produk pertahanan dari Rusia, akan tetapi juga memberikan makna dan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kemandirian industri pertahanannya. Pihak Rusia memahami keinginan Indonesia untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri dan menyambut baik rencana kerja sama dalam pengembangan dimaksud.



■ Perundingan Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi RI-Rusia

10. Implementasi Komunike Bersama untuk Memerangi IUU Fishing RI-Rusia melalui pembentukan *Working Group on Marine, Fisheries and Agriculture RI-Rusia*. RI dan Rusia sepakat menindaklanjuti Komunike bersama mengenai *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang telah ditandatangani pada 2016. Indonesia telah menyampaikan kerangka acuan *WG Marine and Fisheries* untuk dipelajari oleh Rusia. Pada 26 Oktober 2018 di Moskow, kedua negara sepakat untuk membentuk *Working Group on Marine and Fisheries*. Hal ini disepakati pada saat pertemuan ke-12 SKB RI-Rusia.

Perbandingan Capaian IKU "Presentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder dalam Negeri" Tahun 2017 dan 2018



Perubahan positif yang berhasil diwujudkan dalam pencapaian IKU ini, antara lain:

- Munculnya kesadaran pada K/L terkait perihal urgensi implementasi kerja sama yang telah disepakati;
- Terlaksananya kerja sama yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian dengan negara mitra;
- Ditandatanganinya berbagai kesepakatan yang tertunda;
- Meningkatnya kapasitas SDM atas K/L teknis di Indonesia dengan diselenggarakannya berbagai pelatihan yang telah disepakati;
- Didapatnya solusi atas masalah-masalah dalam berbagai bidang dengan negara mitra;
- Menjadi sarana koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Meskipun capaian pada IKU ini cukup signifikan, dalam menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan dengan negara mitra, Kementerian Luar Negeri masih menghadapi kendala, antara lain:

- Perbedaan penilaian urgensi dan skala prioritas antar K/L teknis atas cakupan maupun tingkat kedalaman tindak lanjut dari kerja sama yang telah terbentuk;
- Kesiapan kapasitas/ aset daya dukung K/L yang tidak merata dalam menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat;
- Perubahan kebijakan atau peraturan, pergantian kepemimpinan, dan perubahan rencana kegiatan pada K/L teknis menangani, sehingga berpengaruh pada implementasi kesepakatan tersebut.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Luar Negeri memproyeksikan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan K/L teknis untuk pemetaan kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti berikut penguatan saling dukung dalam pelaksanaannya;
- Melaksanakan monitoring secara berkala kemajuan implementasi kerja sama yang telah disepakati, dengan K/L teknis, perwakilan asing di Indonesia, perwakilan RI di kawasan Aspasaf dan Amerop, dan *stakeholders* lainnya.

Analisis Sub IKU-2 : Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antar kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Capaian Sub IKU Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri sebesar 111,11% dari target 90%. Nilai capaian tersebut diperoleh dari jumlah kesepakatan dari forum intra dan antarkawasan yang semua targetnya berhasil ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri sebanyak 12 kesepakatan. Berikut tabel capaian Sub IKU dimaksud:

Tabel Capaian Sub IKU-2 C.2 Tahun 2018

Sub IKU-2 C.2	Informasi Kinerja	Nilai
Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri (Sub IKU-2)	Jumlah realisasi prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerjasama Intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti	12
	Jumlah rencana prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerjasama Intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti	12
	Realisasi	100%
	Target	90%
	Capaian	111,11%

Tingginya capaian IKU ini mencerminkan kinerja yang optimal dari Kementerian Luar Negeri dalam mengkoordinasikan tindak lanjut kesepakatan-kesepakatan oleh stakeholders dalam negeri.

Prakarsa/ rekomendasi Indonesia di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti berjumlah 4 prakarsa/ rekomendasi, antara lain:

1. FGD bertema IORA Paska Keketuaan Indonesia di Bandung, 4 Mei 2018. Penyelenggaraan FGD tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil-hasil KTT IORA 2017 dan meneruskan kiprah kepemimpinan Indonesia di IORA. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan pemangku kepentingan dalam negeri dan mengidentifikasi langkah yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi dan inisiatif yang dihasilkan FGD antara lain:
 - a) Rencana kerja ke depan LIPI terkait IORA adalah program *Business Innovation Centre dan Joint Research on Coastal Health and Wealth in the Indian Ocean*. Melihat lingkup kerja samanya, LIPI juga menawarkan sejumlah tema riset yang dapat dikembangkan untuk 6 area prioritas IORA, khususnya perikanan.
 - b) Kementerian Luar Negeri memberi perhatian besar pada kerja sama IORA utamanya semenjak persiapan keketuaan Indonesia. Hal ini mengingat besarnya potensi sumber daya kelautan dan perdagangan di kawasan. Sejumlah kajian yang telah dihasilkan antara lain Proyeksi Keketuaan Indonesia di IORA dan *IORA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Terkait kerja sama ekonomi, Kementerian Luar Negeri menyimpulkan bahwa hubungan ekonomi IORA mulai dibangun dari skema FTA antar negara yang setuju.
 - c) KPPA mengusulkan pendekatan lebih pada tingkat pimpinan untuk dapat mendorong peran aktif Kementerian di IORA.
 - d) KKP sebagai salah satu focal point utama Indonesia di IORA kembali menekankan komitmennya untuk berperan aktif utamanya dalam posisi Indonesia sebagai koordinator manajemen perikanan IORA dan siap melaksanakan program pembangunan kapasitas dan penelitian.

2. Terkait kerangka kerja sama APEC, telah diselenggarakan pertemuan para pemangku kepentingan dalam rangka konsolidasi rencana kerja APEC 2018, yaitu kegiatan Penyusunan Strategi Indonesia dalam Kerja Sama Regional APEC di Era Digital pada 2-4 Mei 2018 di Bandung. Pertemuan menghasilkan sejumlah rekomendasi tindak lanjut, antara lain:
 - a) Mendorong partisipasi UKM dalam pembangunan ekonomi nasional.
 - b) Seluruh K/L *focal point* telah mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait isu-isu internet and digital economy di APEC dan akan mencerminkan posisi Indonesia dimaksud pada *fora/working group* masing-masing. Beberapa K/L juga menyampaikan terkait rencana untuk menyampaikan proyek (*concept note*) yang akan diajukan untuk mendapatkan pembiayaan APEC, misalnya, KKP ingin menyampaikan proposal proyek terkait minapadi, dan Kemenko Perekonomian yang akan menyelenggarakan proyek terkait *single online portal* yang telah mendapatkan biaya APEC.
 - c) Kemdag menyampaikan tindak lanjut inisiatif Indonesia terkait pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan (*rural development and poverty alleviation*), yaitu proposal untuk mengadakan *trade policy dialogue* terkait non-tariff measures pada produk-produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Proposal dimaksud telah mendapatkan co-sponsor yaitu Papua Nugini, Peru, dan Viet Nam.

Sementara beberapa prakarsa/ rekomendasi Indonesia di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan di wilayah Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti berjumlah 8 prakarsa/ rekomendasi, yaitu:

1. Peresmian *FEALAC Youth Center (FEALAC Youth Forum)*, Bandung, 19 Januari 2018;
2. Diskusi Kewirausahaan dan Kamis Inggris di *FEALAC Youth Center (FEALAC Youth Forum)*, Bandung, 22 Maret 2018;
3. *ASEM Day*, Jakarta 26 Maret 2018;
4. *FEALAC Trade Regulation Database*, Jakarta, 10-11 April 2018;
5. *Outreach ASEM* dan EU termasuk Diplomasi Penguatan ISPO, Pekanbaru, 5 September 2018;
6. Peresmian mural di *FEALAC Youth Center*, Bandung, 7 September 2018, dan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 September 2018;
7. Kunjungan ke *FEALAC Youth Center* dan pertemuan dengan Pemerintah Kota Bandung, 3-4 November 2018;
8. *ASEM Passionpreneur Workshop* 2018, Jakarta, 5-7 Desember 2018.

Perubahan positif yang berhasil diwujudkan adalah Indonesia telah merealisasikan salah satu mandat Pertemuan *8th FEALAC Foreign Ministers' Meeting* di Busan, Korea Selatan, tanggal 31 Agustus 2017 mengenai pembentukan *FEALAC Youth Center* di kota Bandung. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung, *FEALAC Youth Center* yang menempati ruangan di Bandung *Creative Hub (BCH)* telah diresmikan pada tanggal 19 Januari 2018 oleh Walikota Bandung dan Kementerian Luar Negeri. *FEALAC Youth Center* diharapkan akan menjadi *host* bagi kegiatan kepemudaan FEALAC di berbagai bidang yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar-bangsa dari kawasan Asia Timur dan Amerika Latin.

Selain itu, kegiatan *Outreach ASEM* dan EU termasuk Diplomasi Penguatan ISPO yang diselenggarakan di Pekanbaru, 5 September 2018, telah membantu mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam mengenai ASEM dan Uni Eropa.

Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini.

Sebagai proyeksi kedepan, Kementerian Luar Negeri akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) menyusun program kegiatan untuk dilaksanakan di *FEALAC Youth Center* untuk tahun 2019.
- b) melaksanakan Forum Kewirausahaan dan Kamis Inggris di *FEALAC Youth Center* secara rutin untuk memperluas jejaring pemuda disektor-sektor yang diminati yang juga sejalan dengan kepentingan Indonesia.
- c) melaksanakan kegiatan *ASEM Day* secara rutin setiap tahun. Pemilihan mitra kerja sama dan persiapan akan dilakukan lebih awal untuk mengupayakan pelaksanaan *ASEM Day* tepat waktu pada 1 Maret.
- d) berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Kolombia di Jakarta dan Pemkot Bandung untuk penyelenggaraan kursus Bahasa Spanyol di *FEALAC Youth Center*.

Analisis Sub IKU-3 : Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di dalam negeri.

Pada tahun 2018, realisasi Sub IKU Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan Kerja Sama ASEAN di dalam negeri sebesar 117.65% dari target 85%. Nilai capaian tersebut diperoleh dari jumlah saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN ditingkat nasional yang mencapai target sebanyak 72 kesepakatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-3 C.2 Tahun 2018

Sub IKU-3 C.2	Informasi Kinerja	Nilai
Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan Kerja Sama ASEAN di dalam negeri	Jumlah saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di dalam negeri	72
	Jumlah saran kebijakan yang dikemukakan untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di dalam negeri	72
	Realisasi	100%
	Target	85%
	Capaian	117.65%

Dalam rangka mengejawantahkan visi ASEAN di tingkat nasional, penting untuk melakukan diseminasi, sosialisasi, serta memberikan pemahaman agar terdapat satu visi yang sama di tingkat nasional terhadap isu-isu internasional. Mengingat pentingnya isu Laut China Selatan, isu tersebut menjadi salah satu perhatian Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Di tahun 2018 Kementerian Luar Negeri berhasil meyakinkan pemegang kepentingan nasional untuk memiliki satu suara terkait penolakan terhadap klausul usulan Filipina dalam *Single Draft COC Negotiating Text* yang mewajibkan negara pihak pada COC untuk membuat *guidelines* dan mekanisme di tingkat nasional untuk operasionalisasi *element to exercise self-restraint in the South China Sea*. Usulan ini dinilai terlalu dini diajukan dan berpotensi membuat pembahasan terlalu melebar.

Selain itu, isu Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu prioritas pemerintah, oleh karena itu Kementerian Luar Negeri senantiasa mendorong untuk dilakukannya koordinasi internal di Indonesia terutama bagi para penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mengenai larangan penyiksaan berdasarkan *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)* dan *United Nations Convention Against Tortures (UN CAT)*.

Isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pun menjadi isu penting dalam upaya peningkatan komitmen nasional untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan ASEAN. Konvensi ASEAN bagi pencegahan TPPO (ACTIP) diperlukan untuk memastikan seluruh negara ASEAN mematuhi dan terikat pada satu kesepakatan bersama. Kementerian Luar Negeri dapat meyakinkan seluruh pemegang kepentingan nasional terkait tentang pentingnya ACTIP sebagai kerangka kerja regional yang akan berguna di level internasional, level nasional, level pemerintahan lokal, LSM, sektor bisnis, hingga level individual/keluarga.

Indonesia juga telah menempuh beberapa langkah konkret di sektor Sosial dan Budaya. Salah satunya adalah melalui "kampanye" Budaya Pencegahan atau "*Upstream Policies*" yang digaungkan para Pemimpin ASEAN melalui *ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society (COP)*. Selain itu juga terdapat kegiatan dalam bentuk Seminar dan Pelatihan Tangkal Hoax "ASEAN Rajut Harmoni : SilihAsah, SilihAsih, SilihAsuh", Bandung, Jawa Barat, 27 Agustus 2018 yang bertujuan memberikan pemahaman dan keahlian terkait cara menangkal berita bohong (hoax) guna menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis sesuai cita-cita Piagam ASEAN dan Visi ASEAN 2025.

Upaya untuk melibatkan generasi muda juga terus dilaksanakan, salah satunya adalah dengan pelaksanaan ASEAN Youth Interfaith Conference (AYIC) 2018 di 3 kota yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Bali dari 28 Oktober-4 November 2018 sebagai salah satu bentuk implementasi dari ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society yang disahkan oleh para Kepala Negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 tahun 2017 di Manila, Filipina. Deklarasi ini menekankan pada pendekatan berbasis masyarakat, sehingga manfaat ASEAN dapat dirasakan di tataran akar rumput, serta dapat berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian dan kestabilan kawasan.

“ASEAN perlu menanamkan nilai-nilai toleransi dan cara mengelola keberagaman agama dan budaya kepada calon pemuka agama masa depan untuk memastikan bahwa kawasan ini akan selalu damai, sejahtera dan berkeadilan”

Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir
Pembukaan ASEAN
Youth Interfaith Camp, 2018



■ Para peserta AYIC 2018 berfoto Bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Dirjen Kerja Sama ASEAN, Direktur Kerja Sama Sosbud ASEAN, para perwakilan dari Perwakilan Tetap ASEAN di Jakarta

Beberapa kegiatan lain yang telah dilaksanakan antara lain :

Dalam rangka meningkatkan awareness mengenai upaya Indonesia dalam perlindungan dan pemajuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di ASEAN, Kementerian Luar Negeri melaksanakan Konsultasi Publik mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak PMI pada 3-4 Desember 2018 di Kota Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan upaya penyebaran informasi setelah disepakatinya ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers pada KTT ASEAN ke-31, November 2017 di Manila dan Rencana Aksi Implementasi dari ASEAN Consensus yang telah dicatat oleh para Pemimpin negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-33 di Singapura bulan November 2018. Kegiatan ini juga Konsultasi Publik tersebut juga bertujuan untuk mendorong peran berbagai pemangku kepentingan di daerah dalam mewujudkan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang memperhatikan hak dan kewajiban PMI di kawasan Asia Tenggara.

Pada 13-14 September 2018, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan Konferensi Pusat Studi ASEAN (PSA) ke-3 di Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi forum diskusi dan koordinasi bagi 56 PSA di seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya, Konferensi ini menghadirkan seluruh Kementerian dan Lembaga di bawah 3 Pilar Kerja Sama ASEAN/anggota Setnas ASEAN-Indonesia, perwakilan pihak swasta, dan ASEAN University Network (AUN). Konferensi PSA Tahun 2018 juga menjadi forum untuk menyampaikan Grand Strategy PSA yang menjadi landasan bagi penguatan kerja sama dan kolaborasi yang bersifat practical dan tailor-made antara para pemangku kepentingan di Indonesia. Di dalam Grand Strategy disebutkan bahwa PSA merupakan equal partners untuk mengimplementasikan program yang berpedoman pada Visi Masyarakat ASEAN 2025 sekaligus mendukung tercapainya Sustainable Development Goals. Pertemuan tersebut sepakat untuk mengupayakan pengembangan kurikulum kompetensi standar bagi 8 profesi yang diatur dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) di ASEAN sebagai salah satu sub-tema baru dimana Indonesia dapat menjadi lead.



Dalam rangka pengejawantahan dukungan dan komitmen nasional, Kementerian Luar Negeri juga telah menyelenggarakan Kegiatan Dialog Kebijakan dan Konsultasi Publik dengan Tema “Membangun kota dengan konsep *Smart City*” di Kota Makassar sebagai salah satu kota *Smart City* di Indonesia. Konsep *Smart City* dengan penggunaan berbasis teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari diharapkan menjadikan solusi bagi permasalahan di tiap daerah, terutama pada penanganan masalah kemacetan, keamanan, kesehatan maupun permasalahan dalam pengelolaan sampah di masyarakat.

Selain itu, dalam rangka pemanfaatan *ASEAN Trust Fund* dan *ASEAN Project Fund* yang dianggap masih belum optimal, Kementerian Luar Negeri senantiasa mendorong *stakeholders* nasional untuk memanfaatkan *Asean Trust Fund* dan *Asean Project Fund*, Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN dan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia di Jakarta telah menyelenggarakan:

- a. *Workshop Proposal Development ASEAN Trust Fund and Project Fund* bagi Pusat Studi ASEAN pada tanggal 31 Agustus 2017 di Jakarta.
- b. *Workshop dan coaching clinic* Pemanfaatan *ASEAN Trust Fund* dan *ASEAN Project Fund* bagi pejabat dari K/L di bawah 3 (tiga) Pilar Komunitas ASEAN pada tanggal 30-31 Agustus 2018 di Cirebon.

Dalam upaya untuk melakukan diseminasi informasi, Kementerian Luar Negeri juga telah menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Hasil *ASEAN Ministerial's Meeting/Post Ministerials Meeting +1* kepada para pemangku kepentingan di dalam negeri di Hotel Harris Vertu, Jakarta, 30-31 Juli 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan update informasi perkembangan isu-isu yang menjadi fokus utama Menlu RI pada pertemuan *ASEAN Ministerial's Meeting/Post Ministerials Meeting +1* serta mempersiapkan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-33 ASEAN dan KTT lainnya pada bulan November 2018 di Singapura.

Mengingat pentingnya pemahaman dalam rangka memanfaatkan dan memahami Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri juga telah menyelenggarakan serangkaian Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan Pemanfaatan MEA yang dilaksanakan sepanjang tahun di Kota Malang, Batam, Sorong, Raja Ampat, Pangkal Pinang, Kupang, Makassar, Balikpapan, Manado dan Medan serta dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, UMKM, dan para pemangku kepentingan.

Selain isu-isu terkait pilar Masyarakat ASEAN, capaian Kementerian Luar Negeri juga didorong untuk penguatan Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia. Setnas diharapkan dapat beroperasi secara penuh untuk dapat melakukan fungsi koordinasi nasional dalam perencanaan, harmonisasi dan implementasi kebijakan nasional terkait ASEAN.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah *ASEAN Marine Environmental Protection Conference & Exhibition*, 22 – 23 November 2018. Bekerjasama dengan Universitas Udayana, kegiatan diikuti oleh 371 peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa/siswa SMA di Provinsi Bali. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk (i) *ASEAN Marine Environmental Protection Conference*; (ii) *ASEAN Marine Environmental Protection Exhibition*; dan (iii) *ASEAN Marine Environmental Innovations Ideas*. Kegiatan dilaksanakan melalui kerja sama dengan PSA Universitas Udayana sebagai salah satu mitra penting dalam penguatan pemahaman publik tentang Masyarakat ASEAN di daerah. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai ASEAN dengan berbagai pemangku kepentingan melalui isu-isu yang dekat dengan kebutuhan masyarakat di daerah untuk menekankan peran penting dan relevansi kerja sama ASEAN.



■ ASEAN Marine Environmental Protection Conference & Exhibition, 22-23 November 2018

Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini.

Sebagai **proyeksi kedepan**, animo tinggi yang ditunjukkan oleh para stakeholders nasional kiranya dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan kegiatan serupa di masa datang dan dilakukan secara berkesinambungan. Hal tersebut penting agar Kementerian Luar Negeri dapat lebih banyak menyerap suara dan elemen masyarakat, contohnya pemuda, dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini dipandang positif untuk lebih dapat membumikan kebijakan luar negeri Indonesia sekaligus mendapatkan rasa kepemilikan akan kebijakan tersebut di masyarakat.

Analisis Sub IKU-4 : Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

Pada tahun 2018, realisasi Sub IKU Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional sebesar **78.81%** dari target **85%**. Nilai capaian tersebut diperoleh dari jumlah kesepakatan dari forum kerjasama multilateral yang semua targetnya berhasil ditindaklanjuti *stakeholders* dalam negeri sebanyak **119** kesepakatan dari target 151 kesepakatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-4 C.2 Tahun 2017

Sub IKU-4 C.2	Informasi Kinerja	Nilai
Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	Jumlah rekomendasi yang ditanggapi oleh <i>stakeholders</i>	119
	Jumlah total kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti	151
	Realisasi	78.81%
	Target	85%
	Capaian	92.72%

Di tengah situasi politik internasional yang semakin memanas sebagai akibat maraknya aksi unilateralisme dari perang dagang di antara dua negara dengan perekonomian yang terbesar, diplomasi multilateral Indonesia pada tahun 2018 terus menunjukkan kiprah positif. Indonesia senantiasa memposisikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bridge-builder dalam penyelesaian masalah-masalah internasional. Dalam kaitan ini, Kemlu senantiasa melakukan konsultasi dengan *Stakeholders* dalam negeri terkait pelaksanaan diplomasi multilateral.

Adapun beberapa capaian rekomendasi dari forum kerja sama multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional adalah sejumlah 119 dari 151 total kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya adalah:

1. Pada tanggal 5 Februari 2018, telah terlaksana kunjungan Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano ke Indonesia yang bertemu dengan Wakil Menlu RI didampingi jajaran pejabat K/L terkait. Tujuan utama kunjungan antara lain adalah guna melihat secara lebih dekat perkembangan kemajuan berbagai kerja sama IAEA dengan Pemerintah Indonesia, khususnya di bidang kerja sama teknis dan aplikasi teknologi nuklir untuk tujuan damai, serta menjajaki langkah-langkah pengembangannya ke depan. Kunjungan dimaksud juga dimanfaatkan untuk penandatanganan *Practical Arrangement* antara IAEA dengan Indonesia terkait *Enhancing Technical Cooperation Among Developing Countries (TCDC) and Strengthening South-South Cooperation*. Penandatanganan *Arrangement* tersebut dapat memperluas kiprah Indonesia dalam kerjasama Selatan-selatan, khususnya guna membuka berbagai peluang untuk mengirimkan pakar-pakar Indonesia di dunia internasional serta meningkatkan profiling Indonesia di bidang teknologi nuklir.



- Kunjungan Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano ke Indonesia untuk melihat lebih dekat perkembangan kemajuan kerja sama IAEA dengan Pemri sekaligus penandatanganan *Practical Arrangement* terkait *Enhancing Technical Cooperation Among Developing Countries*.

2. Penyelenggaraan seminar tematik *Indo-Defence Business Forum 2018*, bertepatan dengan kegiatan *Indo-Defence Business Forum* di Jakarta, pada tanggal 7 November 2018. *Business Forum* bertujuan untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan (indhan) antara Indonesia dengan mitra-mitra potensial non-tradisional, khususnya dari kawasan Afrika, Asia Selatan dan Amerika Selatan. *Business Forum* dibuka oleh Menteri Pertahanan RI yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi di antara para pembuat kebijakan, industri pertahanan, serta sektor keuangan untuk menjadi wadah pemajuan potensi kerja sama industri pertahanan dengan negara lain, khususnya mitra-mitra potensial RI di Afrika, Asia Selatan dan Amerika Latin. Peserta *Business Forum* antara lain: Pejabat-pejabat Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan indhan; Perwakilan Negara sahabat/ Komunitas Diplomatik; Sektor Industri serta Akademisi.



- Kunjungan Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano ke Indonesia untuk melihat lebih dekat perkembangan kemajuan kerja sama IAEA dengan Pemri sekaligus penandatanganan *Practical Arrangement* terkait *Enhancing Technical Cooperation Among Developing Countries*.

3. Seminar tanggal 14 Agustus 2018 yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang dengan tema "Diplomasi RI bagi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 di Indonesia". Seminar tersebut sejalan dengan langkah-langkah yang mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya agenda pembangunan yang setara, *bottom-up*, transparan dan inklusif.
4. Jaring Masukan mengenai Panduan Bisnis dan HAM, 18 Desember 2018. Penyusunan Panduan merupakan mandat Rencana Aksi HAM 2018 sebagai upaya peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terkait isu Bisnis dan HAM. Hasil akhir FGD adalah naskah Panduan Nasional Bisnis dan HAM.
5. Dialog Kemanusiaan dengan 15 LSM Kemanusiaan Indonesia di Jakarta, 9 Februari 2018. Hal yang disepakati dalam pertemuan antara lain adalah: (1) Pentingnya kesinambungan dialog dan sinergi antara Pemerintah dan LSM Kemanusiaan di Indonesia; (2) Perlunya menjajaki pelaksanaan *sharing of best practices*; serta (3) Pentingnya menyusun suatu standarisasi dan *code of conduct* sebagai rujukan bagi terselenggaranya diplomasi kemanusiaan.
6. Penyelenggaraan Jaring Masukan Daerah terkait isu HAM dan Kemanusiaan di sejumlah daerah di Indonesia yaitu: Batam, Denpasar, Yogyakarta, Ambon dan Bandung dalam rangka edukasi dan sosialisasi isu HAM dan Kemanusiaan kepada pemangku kepentingan daerah. Jarmasda bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam isu HAM dan Kemanusiaan, serta *showcasing* diplomasi HAM dan Kemanusiaan Indonesia di tingkat akar rumput.

7. Pada tanggal 10-13 Desember 2018 Indonesia telah menyelenggarakan *WTO Regional Workshop on Agreement on Agriculture for Asia Pacific Countries* di Bali. Workshop bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta yang terdiri dari Pejabat Pemerintah dari anggota WTO di wilayah Asia Pasifik mengenai disiplin sektor pertanian dan perkembangan negosiasi isu pertanian di WTO.
8. Pada tanggal 16-19 Juli 2018 telah dilaksanakan Lokakarya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pemerintah mengenai Perundingan Perdagangan Internasional. Pembahasan lokakarya kali ini difokuskan pada emerging issues di WTO yang mulai disuarakan oleh sejumlah anggota menjelang pelaksanaan KTM ke-11 WTO di Buenos Aires tahun 2017 silam. Isu-isu tersebut mencakup disiplin baru untuk isu *e-commerce; Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)*; dan *investment facilitation*. Hal tersebut dipandang perlu untuk memberikan gambaran serta *state of play* terkini dari setiap isu dimaksud guna mendukung pembahasan posisi nasional oleh K/L terkait.
9. Penyusunan posisi nasional menghadapi tahap negosiasi *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM)* untuk periode Januari hingga Juli 2018. Posisi nasional mengedepankan kepentingan RI untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan tata kelola migrasi global, termasuk penegasan hak dan tanggung jawab migran, tanggung jawab negara dan pelaku usaha, serta penanganan migrasi ireguler.
10. Penyelenggaraan pertemuan *Forum Stakeholders OKI* yang pertama di Jakarta, 14 November 2018 yang dihadiri memaksimalkan peranan Indonesia di seluruh bidang kerja sama OKI melalui partisipasi langsung *stakeholders* yang terkait, mengoptimalkan peran K/L yang menjadi *focal point* kerja sama sektoral OKI/badan-badan OKI, dan menentukan focal point berbagai kerja sama sektoral/badan-badan OKI yang belum aktif.
11. Seminar “Peran Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Pemanfaatannya Bagi Kepentingan Negara” di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 27 November 2018 yang melibatkan civitas academica UNS dan wakil dari KADIN untuk membahas dua agenda utama yaitu: peran Indonesia dalam OKI, antara lain dalam (i) isu politik dalam menjawab krisis di Timur Tengah, terutama di Palestina dan Yaman, serta isu krisis kemanusiaan di Myanmar; dan (ii) pemanfaatan OKI bagi kepentingan negara melalui kerja sama di bidang ekonomi.
12. Dalam pengelolaan perizinan ormas asing di Indonesia, Kementerian Luar Negeri selaku Koordinator Tim Perizinan Ormas Asing telah menyelenggarakan sejumlah rapat koordinasi pada tahun 2018 yang menghasilkan keputusan di antaranya: Pemberian izin prinsip bagi 2 ormas asing, penolakan izin prinsip bagi 4 ormas asing dan penolakan pemberian pertimbangan bagi 2 badan hukum yayasan yang didirikan WNA.
13. Penerbitan Buku Direktori Ormas Asing, dan Penyelenggaraan Sosialisasi Ketentuan Pemerintah terkait Ormas Asing di Indonesia. Penerbitan buku direktori merupakan kontribusi Kementerian Luar Negeri RI selaku koordinator Tim Perizinan Ormas Asing dalam upaya menyemai proses partisipasi publik yang lebih transparan sehingga masyarakat dapat secara jelas mengetahui program kegiatan dan wilayah kerja masing-masing Ormas Asing sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan kementerian terkait yang menjadi mitra Ormas Asing tersebut. Adapun sosialisasi yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2018 bertujuan untuk menginformasikan dasar hukum dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan dan pembinaan ormas asing di Indonesia.
14. Penyusunan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) tentang Tim Perizinan dan Penjatuhan Sanksi terhadap Organisasi Kemasyarakatan Badan Hukum Yayasan Asing atau sebutan lain sesuai mandat Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2016 Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1).

Dalam pelaksanaan IKU ini Kementerian Luar Negeri menghadapi beberapa kendala antara lain komitmen dari pemangku kepentingan terkait dengan penetapan waktu penyelenggaraan serta isu-isu yang akan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan antara lain meningkatkan intensitas komunikasi dan memperluas jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan memperlancar kerja sama dengan Kementerian/Instansi/*counterpart* terkait.

III.3 CAPAIAN KINERJA

Internal Business Process Perspective

Sasaran Strategis (B.1): Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan yang Kuat

Diplomasi Maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang berhubungan dengan penyelenggaraan hubungan antar negara di bidang kelautan dalam rangka mewujudkan keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur kemaritiman.

Diplomasi Politik dan Keamanan merupakan negosiasi atau perundingan yang dilakukan mengenai hubungan politik dan keamanan yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Sementara Diplomasi Perbatasan adalah pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penetapan dan pengelolaan batas negara yang meliputi penetapan batas maritim, penegasan batas darat, manajemen pengelolaan perbatasan, serta penanganan isu udara dan antariksa.

Pencapaian Sasaran Strategis “Diplomasi maritim, polkam dan perbatasan yang kuat” diukur dengan IKU “Indeks diplomasi maritim, polkam dan perbatasan” yang capaiannya diperoleh dari 5 (lima) Sub IKU berikut:

1. SUB IKU-1: Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang maritim, polkam dan perbatasan;
2. SUB IKU-2: Persentase kemajuan perundingan batas maritim, penegasan batas darat, dan kerja sama perbatasan;
3. SUB IKU-3: Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum regional dan multilateral;
4. SUB IKU-4: Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang dimuat di berbagai media berbahasa asing;
5. SUB IKU-5: Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang diterima di berbagai fora internasional.

“Indeks Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan”

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemajuan diplomasi maritim polkam dan perbatasan Indonesia. Sebagai bagian dari Nawa Cita Presiden Jokowi, isu maritim dan perbatasan menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri, sehingga Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim dalam diplomasi dan kebijakan politik luar negerinya.

Analisis IKU : “Indeks Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan”

IKU “Indeks diplomasi maritim, polkam dan perbatasan” diukur melalui penjumlahan realisasi masing-masing sub IKU dengan pembobotan yang berbeda.

Pada tahun 2018, capaian IKU “Indeks diplomasi maritim, polkam dan perbatasan” ditargetkan 95,44 dengan realisasi sebesar 105,73 dan capaian 110,78% (batas toleransi 120%), yang diperoleh dari 5 (lima) Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut:

Tabel Capaian IKU B.1 Tahun 2017 dan 2018

No	Sub IKU	Target 2018	Target 2017	Realisasi 2017	Bobot 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang maritim, polkam dan perbatasan (Sub IKU-1)	86	54	84	35%	112	130,23%
2	Persentase kemajuan perundingan batas maritim, penegasan batas darat, dan kerja sama perbatasan (Sub IKU-2)	100%	100%	100%	25%	98,11%	98,11%
3	Persentase posisi/prakarsa/ rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum regional dan multilateral (Sub IKU-3)	89,75%	87,25%	97,15%	25%	96,82%	107,88%
4	Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang dimuat di berbagai media berbahasa asing (Sub IKU-4)	90%	70%	100%	10%	100%	111,11%
5	Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang diterima di berbagai fora internasional (Sub IKU-5)	80%	70%	100%	5%	100%	125%
						Realisasi	105,73
						Target	95,44
						Capaian	110,78%
						Batas Toleransi	120%

Jika dibandingkan dengan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2015-2019 yang telah direvisi peta strategi dan indikator kinerja utamanya melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 84/B/RO/I/2017/01 tahun 2017 tentang Perubahan peta strategi dan indikator kinerja utama Kementerian Luar Negeri tahun 2017, target IKU “Indeks diplomasi maritim, polkam dan perbatasan” pada tahun 2018 (sebesar 95,44) telah direalisasikan yaitu sebesar 105,73.

Analisis Sub IKU-1 : Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang maritim, polkam dan perbatasan

Sepanjang tahun 2018, realisasi Sub IKU Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang maritim, polkam dan perbatasan sebesar 112 dari target 86, dengan capaian sebesar **130,23% (batas toleransi 120%)**, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-1 B.1 Tahun 2018

Sub IKU-1 B.1	Informasi Kinerja	Nilai
Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang maritim, polkam dan perbatasan	Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim, polkam dan perbatasan yang ditindaklanjuti	112
		Realisasi
		112
		Target
		86
		Capaian
		130,23%
		Toleransi Capaian
		120%

Capaian yang signifikan atas IKU ini merupakan keberhasilan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan diplomasi maritim dan polkam sesuai visi dan misi yang diembannya. Adapun, kegiatan-kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU ini, antara lain:

- 1) Dalam rangka memperkuat diplomasi ekonomi dan diplomasi maritim, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berupaya mendorong kerja sama pengembangan industri pelabuhan laut antara Indonesia dan Meksiko. Terkait hal ini, PT Pelindo II dan Otoritas Pelabuhan Lazaro Cardenas telah menandatangani **MOU on Sister Port** di Lazaro Cardenas, Meksiko, tanggal 8 November 2018. Pelabuhan Lazaro Cardenas adalah pelabuhan utama di Meksiko yang terletak di pantai Barat Meksiko dan menjadi hub fasilitas penanganan peti kemas dan logistik di Meksiko dan kawasan sekitarnya. Selain itu, selama kunjungan, Delegasi juga telah bertemu dengan Senator Cora Cecilia Pinedo Alonso, Ketua Komisi Urusan Luar Negeri untuk Asia-Pasifik dan Afrika Senat Meksiko. Dalam kunjungan tersebut, Direktur PT Pelindo II didampingi oleh Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, EVP Strategi Perusahaan, dan Direksi IPC Car Terminal. Pertemuan bertujuan utk meminta dukungan Senat Meksiko atas keterlibatan PT. Pelindo II dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama Presiden terpilih AMLO. Terdapat 2 peluang utama kerja sama yaitu *knowledge transfer dan business expansion*. *Knowledge transfer* dilakukan dicapai dengan programs berupa *smart port technology, partnership, port operation, dan post logistics integration*; dan *Business expansion* dapat dilakukan melalui *joint study/partnership* untuk mencapai kerja sama yg berkesinambungan dan peletakan *footprint* perusahaan yang baik.
- 2) **Kesepakatan implementasi penuh SAFE SEAS Project (SSP)** antara RI-AS pada tanggal 12 Oktober 2018. SSP merupakan bantuan *grant* dari Pemerintah AS senilai USD5 juta (shared di antara negara penerima bantuan lainnya, yaitu Filipina) yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI pada 19 Desember 2017. Tujuan SSP antara lain untuk meningkatkan kapasitas *stakeholders* dalam memerangi tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia pada kapal penangkapan ikan (*forced labor and human trafficking on fishing vessels*).
- 3) Dalam pertemuan Menlu RI-Wapres/Menlu Panama, 25 Oktober 2018, kedua pihak **sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kemaritiman RI-Panama**, antara lain manajemen pelabuhan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang maritim. Wapres/Menlu Panama akan mendorong penyelesaian konsep **Nota Kesepahaman (MoU) Pengakuan Sertifikasi Pelaut** yang saat ini ada di pihak Panama, yang dapat meningkatkan akses ABK WNI bekerja di kapal berbendera Panama. Pada 22 Maret 2018, juga telah dilakukan rapat koordinasi persiapan kunjungan Menteri Otoritas Maritim Panama serta rapat pembahasan *counterdraft* Indonesia untuk MoU Kerja Sama Saling Pengakuan Sertifikasi Pelaut RI-Panama. MOU Pengakuan Sertifikasi Pelaut tersebut pada dasarnya telah disepakati pada tahun 2002. Pembahasan saat ini merupakan perpanjangan serta amandemen perjanjian sebelumnya karena Konvensi *Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers (STCW)* sebagai konvensi induk telah mengalami perubahan pada tahun 2010. Saat ini terdapat lebih dari 6000 pelaut Indonesia bekerja di kapal-kapal berbendera Panama. Panama memiliki keunggulan dalam mengelola pelabuhan dan tol laut serta peran internasional di bidang maritim.
- 4) Penguatan komitmen Kemitraan Strategis RI-AS, khususnya di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, terorisme dan keamanan internasional melalui pelaksanaan **Senior Official Meeting** RI-AS sebagai penguatan mekanisme *Annual Ministerial Strategic Dialogue (AMSD)* RI-AS, 24 Januari 2018, yang didahului dengan rapat interkem di Bogor tanggal 18-19 Januari 2018. SOM RI-AS mempunyai arti penting untuk memulai momentum bagi perwujudan Kemitraan Strategis RI-AS yang disepakati pada tahun 2015. Pertemuan SOM ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di bawah kerangka Kemitraan Strategis dan diharapkan sebagai *roadmap* untuk penyelenggaraan Dialog Strategis Tingkat Menteri RI-AS. Dalam pertemuan tersebut, turut disepakati menghidupkan kembali *working groups* guna memperkuat mekanisme AMSD.

- 5) Penegasan penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada melalui pelaksanaan **pertemuan pendahulu Senior Official Meeting RI-Kanada** pada 11 April 2018. Pertemuan tersebut merupakan mekanisme bilateral pertama sejak terakhir kali pelaksanaan FKB RI-Kanada ke-1 di Jakarta, Agustus 2014.
- 6) Penandatanganan **Memorandum of Understanding on Strengthening Counterterrorism (Nota Kesepahaman Perkuatan Kerja Sama Penanggulangan Terorisme) (MoU-CT)** dan **Arrangement for the Exchange of Terrorist Screening Information/Pengaturan Pertukaran Informasi Penyaringan Teroris (PPIPT)** antara RI-AS di Jakarta, 14 September 2018. Sebagaimana diketahui, penanggulangan terorisme merupakan salah satu prioritas kerja sama RI-AS di bawah Kemitraan Strategis. Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen (Pol.) Suhardi Alius. Sementara Pemerintah Amerika Serikat (AS) diwakili oleh *Coordinator for Counterterrorism* Deplu AS, Duta Besar Nathan A. Sales (untuk MoU-CT) dan *Director of the Terrorist Screening Center* (TSC), Charles H. Kable (untuk PPIPT).
- 7) Pemerintah RI dan AS sepakat memajukan kerja sama dan pembangunan kapasitas di ruang siber melalui penandatanganan **Pernyataan Kehendak tentang Memajukan Kerja Sama Ruang Siber Yang Erat (Letter of Intent on Promoting Strong Cyber Space Cooperation/Lol Siber)** pada 28 September 2018 di Jakarta. Bertindak sebagai penandatanganan mewakili Pemerintah RI adalah Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri, sedangkan dari Pihak AS adalah Duta Besar AS di Jakarta. Lol Siber RI-AS diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kapabilitas Pemri dalam membangun ketahanan nasional atas berbagai ancaman dan tantangan siber dewasa ini, serta kesempatan ekonomi yang timbul atas penggunaan teknologi-informasi. Lol Siber juga diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertindak sebagai *focal point* nasional manajemen isu-isu siber.
- 8) Kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama bilateral bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui pelaksanaan **Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD)** di Washington DC, Oktober 2018 dan pelaksanaan **United States-Indonesia Bilateral Defense Discussion (USIBDD)**, di Honolulu, Hawaii, 6-8 Desember 2018.
- 9) **Dukungan negara mitra atas pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020**
Adapun negara di bawah supervisi Direktorat Amerika I yang memberikan dukungan atas pencalonan Indonesia tersebut yaitu Kuba, Republik Dominika, Haiti, Mexico, El Salvador, Guatemala, Panama, Niakragua, Kosta Rika, Belize, dan Honduras.
- 10) Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Chile serta Menteri Luar Negeri Chile dengan Menteri Kelautan & Perikanan RI pada 30 Oktober 2018 yang menyambut baik usulan kerja sama terkait hak laut (*ocean rights*).
- 11) Penandatanganan MoU Kerja Sama Perikanan dan Budidaya antara Indonesia dan Chile oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan Menteri Luar Negeri Chile di Bali, 30 Oktober 2018.
- 12) Penjajakan tindak lanjut MoU Kerja Sama Perikanan dan Budidaya dimana Chile menyambut baik keinginan Indonesia untuk belajar praktik budidaya air/laut dan investasi kegiatan produksi *fishmeal* dan *fish oil* di Indonesia sebagai salah satu hasil dari kegiatan Kunjungan dalam rangka persiapan Implementasi IC-CEPA Chile, Santiago, 10-17 November 2018.
- 13) Penandatanganan Perubahan Atas Persetujuan Bebas Visa Diplomatik dan Dinas Indonesia-Brasil pada 10-11 Mei 2018 di Indonesia.
- 14) Pertukaran Nota Persetujuan Bebas Visa Paspor Biasa Indonesia-Brasil pada 10 - 11 Mei 2018 di Indonesia.
- 15) Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Guyana dalam rangka penggalangan dukungan untuk pencalonan Indonesia di DK PBB di Guyana, 18 Mei 2018.

- 16) Penandatanganan Persetujuan Bebas Visa Diplomatik dan Dinas RI-Guyana di sela-sela UNGA, 28 September 2018.
- 17) Pertemuan Bilateral antara Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Argentina, Jorge Faurie, di sela-sela KTT G-20 2018 di Buenos Aires, Argentina. Dalam kesempatan ini menyampaikan pentingnya upaya untuk meningkatkan volume perdagangan RI-Argentina serta usulan untuk mempermudah dalam pemberian visa untuk WNI guna peningkatan *people-to-people contact*.
- 18) Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Menteri Luar Negeri RI Peru, Néstor Francisco Popolizio Bardales, di Lima, 23 Mei 2018, yang menghasilkan pemahaman bersama bahwa perlu diupayakan peningkatan kerja sama perdagangan menuju *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* Indonesia-Peru.
- 19) Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dengan Menteri Luar Negeri Grenada dan Guyana di sela-sela UNGA pada 28 September 2018 yang menghasilkan komitmen politik dari Grenada dan Guyana untuk mendorong pendekatan yang lebih konstruktif terhadap isu negatif Papua.
- 20) **Kegiatan lanjutan penanganan tiga kerangka kapal perang Belanda di Laut Jawa**
Kegiatan telah melalui fase verifikasi dan apresiasi bersama, sehingga sejak Juni 2017, pada titik lokasi tenggelamnya kapal telah ditandai sebagai lokasi "*historical wreck*", dan disiarkan dalam *Notice to Mariners* untuk keselamatan pelayaran. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan pihak Kepolisian RI, pemerintah setempat dan kepolisian setempat; bersama dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Kedubes Belanda di Jakarta.
- 21) **Kunjungan kerja Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI ke Yunani, 17-21 April 2018, dalam rangka pertemuan dengan Komandan *Hellenic Coast Guard (HCG)*, di markas besar HCG, Piraeus.**
Dalam kunjungan ini, Kepala Bakamla dan Komandan HCG telah menandatangani *Letter of Intent (LoI)* di bidang Peningkatan Kapasitas pada 20 April 2018. Kerja sama mencakup *sharing of experiences and best practices* terhadap upaya kedua negara dalam menjaga keamanan laut dan kemungkinan pertukaran spesifikasi teknis peralatan serta bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua pihak
- 22) **Agreement on Recognition of Training Certification for Seafarer Indonesia – Denmark**
Penandatanganan perjanjian dilaksanakan dalam kesempatan pelaksanaan kegiatan 1st Bilateral Maritime Forum (BMF) RI-Denmark, di Jakarta, 7 September 2018. Dengan berlakunya perjanjian tersebut, Sertifikat Kepelautan pelaut Indonesia diakui dan berlaku di Denmark dan sebaliknya sesuai Konvensi *Standard of Training, Certification and Watchkeeping (STCW)* 1978 dan Amandemennya. Dengan adanya perjanjian tersebut, diharapkan dapat membantu para pelaut dari kedua negara meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan mereka.
- 23) **MoU Kerjasama STIP Jakarta dengan *Maritime University of Szczecin Poland***
Penandatanganan perjanjian dilaksanakan dalam kesempatan berlabuhnya kapal perang Polandia, Dar Młodziezy, di Tanjung Priok, pada 3 Oktober 2018. Kunjungan kapal latih Polandia sebagai perayaan 100 tahun independensi Polandia. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan di atas kapal latih Dar Młodziezy Polandia, disaksikan oleh Poland Dept. Minister Madam Anna Moskwa dan Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Madam Beata Stoczynska. Kegiatan tersebut berlangsung di *Officer Lounge* dan disaksikan oleh peserta yang hadir dari kedua belah pihak, yaitu dari MarUniv of Szczecin Madam Agnieszka Deja, dr.eng. dan STIP Jakarta sendiri diwakili oleh Puket 1, Capt. Egbert Edward Djajasasana, M.Pd., beberapa pejabat struktural dan fungsional STIP Jakarta, serta Wakil Direktorat Eropa II Kementerian Luar Negeri.
- 24) **MoU Kerjasama STIP Jakarta dengan *Maritime University of Gdynia Poland***
Penandatanganan perjanjian dilaksanakan dalam kesempatan berlabuhnya kapal perang Polandia, Dar Młodziezy, di Tanjung Priok, pada 3 Oktober 2018. Kunjungan kapal latih Polandia sebagai perayaan 100 tahun independensi Polandia. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan di atas kapal latih Dar Młodziezy Polandia, disaksikan oleh Poland Dept. Minister Madam Anna Moskwa dan Duta Besar Polandia untuk

Indonesia, Madam Beata Stoczynska. Kegiatan tersebut berlangsung di *Officer Lounge* dan disaksikan oleh peserta yang hadir dari kedua belah pihak, yaitu dari Gdynia MarUniv disaksikan oleh Deputy Rector Prof. Ireneusz Czarnowski dan dari STIP Jakarta sendiri diwakili oleh Puket 1, Capt. Egbert Edward Djajasasana, M.Pd., beberapa pejabat struktural dan fungsional STIP Jakarta, serta Wakil Direktorat Eropa II Kementerian Luar Negeri.

25) **Lol Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI – Norwegia**

Penandatanganan kerja sama dilakukan dalam kesempatan pertemuan bilateral Menteri KKP RI dan Menteri Perikanan Norwegia, di sela-sela *Our Ocean Conference* (OOC) 2018, di Bali, 29 Oktober 2018. Di tahun 2019, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan perjanjian kerja sama menjadi MoU. Perjanjian ini merupakan upaya bersama kedua negara mengintensifkan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan.



■ Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov

26) **Kunjungan Menlu RI ke Moskow, Rusia, 13 Maret 2018**

Pertemuan membahas perkembangan kerja sama bilateral di berbagai bidang termasuk peluncuran kembali kemitraan strategis RI-Rusia dan isu-isu regional serta global. Kedua Pihak sepakat untuk menyelesaikan MoU dan perjanjian pending termasuk memfinalisasi Deklarasi Kemitraan Strategis RI-Rusia pada saat kunjungan Presiden Rusia ke Indonesia bulan November 2018.

27) **Pertemuan ke-4 Konsultasi Bilateral Bidang Politik dan Keamanan RI-Rusia**

Kedua negara menegaskan pentingnya kerja sama keamanan yang menyentuh isu-isu yang menjadi *concern* kedua negara seperti kerja sama teknik pertahanan, penanggulangan terorisme, keamanan siber, intelijen, pendanaan terorisme dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

28) **Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-I RI-Kroasia di Zagreb, Kroasia, 16 Maret 2018**

FKB ke-1 RI-Kroasia merupakan penegasan komitmen kedua pihak untuk peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, serta pembahasan isu-isu regional dan internasional. Hasil-hasil utama FKB antara lain rencana kunjungan Menlu Kroasia ke Indonesia pada paruh II/2018 atau awal 2019, peningkatan kerja sama ekonomi perdagangan serta mendorong intensifikasi interaksi B2B.

- 29) **Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-I RI-Montenegro di Podgorica, Montenegro, 19 Maret 2018**
FKB ke-I RI-Montenegro menegaskan komitmen bagi persahabatan kedua negara, serta komitmen bagi kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan untuk menindaklanjuti kunjungan Utusan Khusus Presiden RI pada Desember 2017 yang meminta Montenegro untuk mendukung pencalonan RI sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB Periode 2019-2020. Forum Bisnis RI-Montenegro yang telah mengidentifikasi beberapa peluang kerja sama, antara lain keinginan maskapai penerbangan Montenegro untuk *code share*, dan minat Kementerian Pertahanan mengenai kapasitas produk kapal Indonesia untuk jenis kapal perang (korvet) untuk AL Montenegro, serta minat kota Niksic untuk pengadaan industri strategis pesawat terbang.
- 30) **FKB ke-2 RI-Ukraina di Kyiv, Ukraina, 22 Februari 2018**
FKB kembali diselenggarakan setelah hampir 9 tahun absen. Kedua pihak mendorong bergulirnya intensifikasi interaksi dan kerja sama bilateral RI-Ukraina di semua bidang. Kedua negara menegaskan kembali dukungan atas kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara, khususnya dalam hal ini wilayah Ukraina (dalam konteks konflik mengenai Crimea dengan Rusia) dimanfaatkan sebagai investasi politik bagi kerja sama bilateral demi kepentingan nasional RI.
- 31) **FKB ke-5 RI-Georgia di Tbilisi pada 21-22 Mei 2018**
Penyelenggaraan FKB tersebut bertepatan dengan perayaan 25 tahun hubungan diplomatik RI-Georgia yang jatuh pada bulan Januari 2018. Pada kesempatan FKB, delegasi Georgia menyampaikan dukungan resmi lisan dan tertulis secara unilateral atas pencalonan Indonesia pada keanggotaan Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020.
- 32) **FKB ke-2 RI-Belarus di Minsk 23-24 Mei 2018**
Dalam FKB, kedua pihak sepakat meningkatkan nilai perdagangan yang melibatkan sektor swasta dan KADIN. Disampaikan permintaan dukungan Belarus (sebagai anggota *Eurasian Economic Union*, EAEU) atas rencana Indonesia untuk membentuk FTA dengan EAEU; serta dukungan pada pencalonan Indonesia di DK PBB periode 2019-2020.
- 33) **Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-4 RI-Serbia di Bali, 5 April 2018**
Dalam FKB, pihak Serbia mengusulkan untuk mengadakan kegiatan memperingati 65 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2019, yang bersifat konkret, berupa joint activities seperti penerbitan bersama artikel di media oleh kedua Menlu, dan kegiatan budaya. Delri juga memanfaatkan FKB untuk mempromosikan produk pesawat PTDI dan usulan perluasan kerja sama bidang penanggulangan terorisme.
- 34) **Konsultasi Bilateral Khusus ke-2 Bidang International Information Security (IIS) RI-Rusia, 24-25 Juli 2018**
Kedua pihak sepakat untuk membuat Joint Press Statement yang diparaf oleh masing-masing ketua delegasi dari kedua negara. Indonesia dapat memperoleh manfaat dengan mempelajari pengalaman Rusia di bidang informasi/siber.
- 35) **Perundingan Finalisasi Perjanjian Penyederhanaan Rezim Visa RI-Rusia/*Mutual Travels Agreement* (MTA), 27-28 Agustus 2018**
Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia telah menyepakati naskah final *Agreement on Simplification of Visa Regime for Mutual Trips of Citizens of the Republic of Indonesia and Citizens of the Russian Federation* untuk dapat ditandatangani oleh Presiden Federasi Rusia pada kunjungannya ke Indonesia yang direncanakan pada tahun 2019.
- 36) **Kunjungan Utusan Khusus Presiden RI ke Georgia (Dukungan tertulis diterima saat FKB ke-5 RI-Georgia)**
Dukungan Georgia terhadap pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB periode 2019-2020 disampaikan Ketua Delegasi Georgia langsung secara lisan dan tulisan kepada Ketua Delri pada saat FKB ke-5 RI-Georgia di Tbilisi, 21-22 Mei 2018. Pendekatan kepada pihak Georgia telah dilakukan dalam berbagai tingkatan sejak tahun 2017.

37) **Konferensi Internasional Para Kepala Layanan Khusus, Lembaga Keamanan dan Organisasi Penegakan Hukum ke-17, di Moskow, Rusia, 7- 8 November 2018**

Sejumlah negara menyampaikan perihal yang sama seperti Indonesia bahwa dalam rangka menanggulangi radikalisasi dan *violent extremism* perlu ditilik *root cause* dari terorisme itu sendiri. Pertemuan menghasilkan dua dokumen yakni *Joint Statement dan Communiqué*. Partisipasi Delri dapat membagi *lesson learned* dan *best practices* dalam upaya penanggulangan terorisme dengan metode *soft approach* termasuk deradikalisasi yang selama ini telah dilakukan Indonesia.

38) **4th Working Group on Countering Terrorism RI-Rusia, Moskow, 22 Oktober 2018**

Working group membahas sejumlah potensi kerja sama, *sharing* informasi mengenai posisi masing-masing pihak di berbagai fora internasional, serta berbagi informasi mengenai situasi di beberapa kawasan. Pertemuan WG ke-4 ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan melalui jalur antar Kementerian Luar Negeri kedua negara, dan dilakukan secara tertutup tanpa adanya *minutes of meeting*. Kedua delegasi memanfaatkan pertemuan kali ini untuk membahas isu-isu sensitif.

39) **Pertemuan ke-9 Dialog Hak Asasi Manusia RI-Rusia, Nusa Dua, Bali, 7 Desember 2018**

Pertemuan membahas langkah-langkah pemajuan HAM di masing-masing negara melalui pelaksanaan *Universal Periodic Review (UPR)* dan berbagai isu yang menjadi perhatian bersama di Dewan HAM PBB dan Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. Kedua pihak telah menyepakati pengaturan saling dukung bagi pencalonan RI di Dewan HAM periode 2020-2022 dengan pencalonan Rusia untuk periode 2021-2023 (Nota Diplomatik terkait pengaturan saling dukung tersebut telah disampaikan secara resmi).

Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, tingginya dinamika hubungan bilateral dengan negara mitra pada berbagai level telah menghasilkan berbagai kesepakatan di bidang politik dan keamanan lainnya, yaitu:

- a) penekanan komitmen Kemitraan Strategis RI-Amerika Serikat, khususnya di bidang pembangunan masyarakat majemuk, kerja sama ekonomi dan perdagangan, dan perdamaian dan keamanan di kawasan, melalui pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, Michael Richard Pence di sela-sela pelaksanaan KTT ke-33 ASEAN, Singapura, pada 14 November 2018;



■ Presiden Joko Widodo bertemu dengan Wakil Presiden AS, Michael Pence, di Singapura pada KTT ke-33 ASEAN, 14 November 2018

- b) kegiatan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo ke Jakarta dimulai dengan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI pada 4 Agustus 2018. Pada tanggal 5 Agustus 2018, Presiden Republik Indonesia (RI) telah menerima kunjungan kehormatan Menlu Pompeo. RI dan AS memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan perdagangan. AS memberikan pertimbangan yang serius bagi kelanjutan fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP) untuk Indonesia. Terkait potensi sanksi *Countering American Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA), Menlu Pompeo mengindikasikan peluang bahwa Kongres akan memberikan keleluasaan bagi Menlu dan Menhan AS dalam menetapkan pengecualian penerapan CAATSA bagi Indonesia;



■ *Courtesy Call* Menlu AS Michael Richard Pompeo kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, 5 Agustus 2018

- c) Wakil Presiden merangkap Menteri Luar Negeri Panama, Y.M. Isabel de Saint Malo de Alvarado, telah melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 25-26 Oktober 2018. Kunjungan tersebut adalah yang pertama kali dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi Panama ke Indonesia sejak hubungan diplomatik RI-Panama dibuka pada tahun 1979. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Wapres/Menlu Panama melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Menlu RI, dan Menteri Perdagangan, dan kunjungan kehormatan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi dengan menjajaki pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) serta meningkatkan kerja sama di bidang kemaritiman, antara lain manajemen pelabuhan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang maritim. Untuk peningkatan *business-to-business* dan *people-to-people contact*, Wapres/Menlu Panama akan mendorong Pemerintah Panama untuk mengeluarkan Indonesia dari *restricted list* Panama guna memudahkan penerbitan visa Panama bagi WNI pemegang paspor biasa.

Naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim, polkam dan perbatasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika antara lain:

- a. MoU RI-Maroko dalam bidang kerjasama: (1) Pemberian Bebas Visa Diplomatik, dan (2) Anti Narkotika, di Jakarta, 26 Oktober 2018.
- b. MoU antara Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) RI dengan *Royal Jordanian National Defense College* (RJNDC) mengenai Kerjasama Pendidikan, Pelatihan dan Kajian Strategis di Bidang Pertahanan dan Keamanan, di Amman, 17 Oktober 2018.

- c. MoU antara RI-Republik Demokratik Kongo mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral, di Jakarta, 6 September 2018.
- d. MoU antara RI-Namibia tentang Kerjasama Kelautan dan Perikanan, di Bogor, 30 Agustus 2018.
- e. *Plan of Action 2018-2023 Implementasi Kemitraan Strategis RI-Viet Nam*, di Ha Noi, 11 September 2018.
- f. *Joint Communiqué on Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance RI-Viet Nam*, di Ha Noi, 11 September 2018.



■ Pertemuan Wapres RI Bapak Jusuf Kalla dengan Wapres/Menlu Panama, Y.M. Isabel de Saint Malo de Alvarado di Jakarta, 26 Oktober 2018

- g. *Agreed Minutes* Pertemuan ke-3 Sidang Komisi Bersama RI-Viet Nam, di Ha Noi, 17 April 2018.
- h. *Record of Discussion* Pertemuan ke-9 Sidang Komisi Bersama RI-Thailand, di Yogyakarta, 6 Juli 2018.
- i. *Agreed Minutes* Pertemuan ke-4 Sidang Komisi Bersama RI-Brunei Darussalam, di Jakarta, 20 Juli 2018.
- j. *Agreed Minutes* Pertemuan ke-4 Sidang Komisi Bersama RI-Kamboja, di Jakarta, 4 Desember 2018.
- k. *Statement on Shared Vision* antara RI-India mengenai Kerjasama Maritim dalam kerangka Indo-Pacific yang disepakati pada pertemuan Presiden RI, H.E. Joko Widodo dengan Perdana Menteri India, H.E. Shri Narendra Modi di Jakarta, 29-30 Mei 2018.
- l. MoU antara RI-India mengenai Kerjasama Dalam Bidang Pertahanan yang ditandatangani secara terpisah oleh Menteri Pertahanan India, Smt. Nirmla Sitharaman di New Delhi, 25 Mei 2018 dan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Jakarta, 27 Mei 2018.
- m. *Summary Records* Pertemuan Pertama Konsultasi Politik antara Kementerian Luar Negeri RI dengan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Bahrain mengenai kerjasama dalam berbagai bidang, antara lain: politik, keamanan dan perdamaian, di Jakarta, 2 Agustus 2018.
- n. MoU antara RI-Palestina tentang Pembentukan Komisi Bersama Untuk Kerjasama Bilateral, di Jakarta, 16 Oktober 2018.



■ Wakil Menlu RI, Dr. A.M. Fachir bersama Wakil Menlu Maroko, Madame Mounia Boucetta pada saat penandatanganan MoU Kerjasama RI-Maroko dalam momentum Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-2 di Jakarta, 26 Oktober 2018

- o. *Joint Communiqué IUU (illegal, unreported, and unregulated) Fishing RI-Viet Nam* yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI, H.E. Retno L.P. Marsudi dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, H.E. Nguyen Xuan Cuong di Hanoi, 11 September 2018. Komunike tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan pencurian ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Terkait isu kemaritiman, kedua Kepala Negara juga menyepakati upaya mengintensifkan penyelesaian pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Disamping itu, ditandatangani pula *Strategic Partnership Action Plan 2019-2023 Indonesia-Viet Nam* oleh kedua Menteri Luar Negeri. *Action Plan* tersebut akan menjadi acuan dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia – Vietnam dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- p. *Agreed Minutes The 3rd Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) RI-Vietnam* mengenai kerjasama dalam berbagai bidang, antara lain: politik, pertahanan dan keamanan, kerjasama maritim dan *boundary delimitation* serta konsuler, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI mewakili Pemerintah RI, H.E. Retno L.P. Marsudi; dan Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri mewakili Pemerintah Viet Nam, H.E. Pham Binh Minh, di Hanoi, 17 April 2018.



■ Penandatanganan MoU oleh Gubernur Lemhanas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Komandan RJNDC, Brigjen Abdullah S. Al Shdaift, di Amman, Yordania, 17 Oktober 2018



■ Penandatanganan *Agreed Minutes The 3rd JCBC RI-Viet Nam* oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dan Menteri Luar Negeri Viet Nam, Pham Binh Minh, di Ha Noi, Viet Nam, 17 April 2018

Keberhasilan pencapaian Kementerian Luar Negeri pada IKU ini mencerminkan kinerja optimal termasuk perubahan positif yang berhasil diwujudkan, antara lain:

- a) mendorong upaya perwujudan Indonesia menjadi poros maritim dunia melalui kerangka forum maritim bilateral dengan negara-negara mitra;
- b) menciptakan kerangka kerja sama, antara lain untuk keamanan dan keselamatan bidang maritim, perlindungan lingkungan laut, infrastruktur dan pengembangan industri strategis bidang maritim dan kerja sama bidang perikanan;
- c) membuka peluang:
 - kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian/Lembaga (K/L) teknis untuk peningkatan kapasitas K/L teknis di bidang kemaritiman termasuk bidang pelabuhan laut, pembelajaran bahasa asing, dan lain-lain;
 - peningkatan angka perdagangan RI-Meksiko dengan adanya kerja sama MoU *Sister Port* PT. Pelindo II dan Otoritas Pelabuhan Lazaro Cardenas Meksiko.
 - meningkatkan peluang peningkatan kapasitas *stakeholder* dalam memerangi tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia pada kapal penangkapan ikan sebagai hasil implementasi penuh *SAFE SEAS Project* (SSP) antara RI dan AS;
 - kerja sama konkrit di bidang kesiagaan udara dan laut;
 - kerja sama penanggulangan terorisme;

Pencapaian keberhasilan pada IKU ini didorong oleh **inovasi/terobosan** Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan diplomasi bidang maritim dan polkam untuk mendorong implementasi berbagai kesepakatan kerja sama dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa, antara lain:

- a) memanfaatkan berbagai pertemuan internasional untuk membahas kesepakatan di bidang maritim, termasuk pada pelaksanaan *Our Ocean Conference* 2018 dimana turut dihadiri oleh pejabat-pejabat senior seperti John Kerry (Mantan Menlu AS), Isabel de Saint Malo de Alvarado (Wakil Presiden/Menlu Panama), dan Jonathan Wilkinson (*Parliamentary Secretary of Canada*);

- b) memanfaatkan pertemuan dalam rangka penandatanganan berbagai perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas dengan negara mitra guna meningkatkan saling kunjung pejabat kedua belah pihak dalam rangka mempererat hubungan bilateral di bidang maritim dan polkam;
- c) pelibatan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pameran atau *business forum* bidang kemaritiman di negara mitra, seperti kolaborasi Ditjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dalam memfasilitasi kunjungan Direktur Pelindo II pada pelaksanaan *Lazaro Cardenas Business Forum (LCBF)* ke-10 di Lazaro Cardenas, Negara Bagian Michoacan, Meksiko;
- d) menjalin kerja sama dengan *like-minded countries* seperti Monako yang memiliki perhatian terhadap isu-isu lingkungan, termasuk konservasi laut. Sebagai bentuk perhatian yang besar terhadap konservasi terumbu karang, Indonesia bersama Monako dan Australia menjadi host Sekretariat ICRI (*International Coral Reef Initiative*). Pada 6 Desember 2018, Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga melakukan kunjungan ke Monako dan menandatangani Lol Kerja Sama Penelitian dan Konservasi Terumbu Karang.

Walaupun terdapat keberhasilan dalam pencapaian target IKU, masih terdapat beberapa **kendala** antara lain:

- a) sulitnya menjalin koordinasi yang berkesinambungan dengan K/L dan para pemangku kepentingan terkait;
- b) hambatan perencanaan dan anggaran akibat perkembangan hubungan bilateral yang dinamis sehingga sulit untuk diperkirakan dalam perencanaan. Kunjungan tamu asing seringkali diindikasikan/dikonfirmasikan oleh negara mitra beberapa minggu/bulan menjelang kunjungan, atau kunjungan yang telah direncanakan mendadak dibatalkan/diubah.
- c) Tidak terlaksananya perundingan yang telah direncanakan karena tidak adanya respon dari negara mitra atas usulan Indonesia
- d) Lamanya waktu negosiasi, pembahasan pertukaran draft kesepakatan, serta finalisasi kesepakatan. Proses finalisasi yang memakan waktu relatif lama disebabkan karena kesulitan dalam menyamakan pandangan antara Indonesia dengan para negara mitra, serta proses konsolidasi yang alot dengan para pemangku kepentingan dalam negeri, baik di tingkat nasional maupun daerah yang turut memperlambat disepakatinya posisi Indonesia.
- e) Adanya perubahan prioritas, geopolitik dan pergantian pemerintahan di negara mitra yang menyebabkan batalnya pembentukan kesepakatan.

Untuk **mengatasi tantangan** tersebut, Kementerian Luar Negeri mengupayakan solusi sebagai berikut:

- a. Melakukan komunikasi secara intensif melalui Kedutaan Besar RI di Negara Mitra atau Kedutaan Besar Negara Mitra di Jakarta untuk mendapatkan komitmen dilaksanakannya perundingan bilateral serta untuk menyamakan persepsi atas program-program kerja sama yang akan disepakati.
- b. Mengintensifkan pelaksanaan negosiasi bilateral dan pertemuan dengan negara mitra terkait dalam upaya mempercepat proses finalisasi kesepakatan.
- c. Apabila terjadi pembatalan pembentukan kesepakatan, diupayakan untuk mendorong pelaksanaan pembahasan berbagai kesepakatan kerja sama baru dengan negara mitra dalam koridor kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan.

Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. Mengintensifkan komunikasi informal kepada negara mitra serta bekerjasama dengan berbagai *stakeholders* terkait untuk dapat mendorong dilaksanakannya negosiasi dan pertemuan pada tingkat pejabat tinggi kedua negara, sehingga proses finalisasi kesepakatan dapat dilaksanakan lebih cepat.
- b. Mengintensifkan koordinasi dan konsolidasi internal dengan *stakeholders* dalam negeri guna penetapan posisi Pemerintah Republik Indonesia dan secara konsisten berupaya untuk memastikan substansi perjanjian internasional sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan.

- c. merancang kegiatan secara solid, sinergis, dan sinkron dengan jadwal pelaksanaan yang sudah direncanakan untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana dengan efektif, efisien, focus, tepat sasaran, dan bermakna;
- d. merancang program kerja yang “*aligned dan mutually reinforcing*” dengan program Perwakilan RI;
- e. meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa dan perwakilan negara asing dari kawasan Amerika dan Eropa di Indonesia untuk mengantisipasi/mendapatkan informasi terkait rencana kunjungan pemerintah negara akreditasi ke Indonesia;
- f. memastikan setiap SDM memiliki *strong sense of mission*;
- g. meningkatkan intensitas komunikasi dengan K/L serta pemangku kepentingan terkait, baik melalui mekanisme formal maupun non-formal;
- h. mengajukan usulan anggaran secara cermat dan terencana agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik.

Analisis Sub IKU-2 : Persentase Kemajuan Perundingan Batas Maritim, Penegasan Batas Darat, dan Kerjasama Perbatasan

Pada tahun 2018, mekanisme penentuan kinerja perundingan batas maritim dilakukan dengan menggunakan mistar perundingan yang titik awal dan titik target untuk masing-masing negara telah ditentukan pada awal tahun. Penggunaan mistar perundingan diharapkan dapat menggambarkan kemajuan proses perundingan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Mistar perundingan secara umum menjabarkan mengenai proses perundingan yang dilakukan dalam rangka penetapan batas maritim, penegasan batas darat dan kerjasama perbatasan. Proses perundingan di dalam mistar dibagi menjadi tahapan-tahapan yang dapat diukur dengan titik awal 0 (nol) dan titik akhir 300 (tiga ratus). Setiap tahunnya, akan ditetapkan titik awal dan titik target perundingan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Target Kemajuan Perundingan Penetapan Batas Maritim RI Dengan Negara Tetangga Tahun 2018

No.	Negara	Titik Awal	Titik Target
1.	India	0	45
2.	Thailand	0	10
3.	Malaysia	132	162
4.	Vietnam	112	162
5.	Filipina	282	285
6.	Palau	63	87
7	Timor Leste	0	10

Untuk tahun 2018, perundingan batas maritim telah dilaksanakan dengan 7 (tujuh) negara yaitu Malaysia, Vietnam, India, Palau, Filipina, Thailand, dan Timor Leste. Adapun penjabaran dari masing-masing proses perundingan tersebut adalah sebagai berikut:

Malaysia

Sepanjang tahun 2018, kedua negara telah melakukan perundingan sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan teknis. Pertemuan teknis pertama di tahun 2018 adalah Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia ke-33 yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 7-8 Maret 2018. Pertemuan teknis selanjutnya adalah Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia ke-34 yang dilaksanakan di Malaka, Malaysia pada tanggal 17-18 November 2018.

Perundingan batas maritim RI-Malaysia pada tahun 2018 mengalami penurunan intensitas perundingan dikarenakan terdapat perubahan Pemerintahan di Malaysia yang juga berdampak pada perubahan tim perunding Malaysia. Namun demikian, pada Pertemuan Teknis Batas Maritim RI-Malaysia ke-34 terdapat indikasi positif terkait beberapa segmen batas maritim antara kedua negara yang dapat segera disepakati.

Vietnam

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan 4 (empat) perundingan penetapan batas ZEE RI-Vietnam yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan teknis dan pertemuan informal. Pertemuan informal Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Bandung pada tanggal 12 Maret 2018 dan di Hanoi pada tanggal 14 April 2018. Selain itu juga dilakukan Pertemuan Informal Antarsesi di Sentul, Bogor pada tanggal 10 Agustus 2018. Perundingan Batas ZEE RI-Vietnam terakhir dilaksanakan dalam bentuk Pertemuan Teknis ke-11 yang dilaksanakan di Ho Chi Minh City, Vietnam pada tanggal 14-15 September 2018.

Perkembangan perundingan batas ZEE RI-Vietnam sepanjang tahun 2018 masih menunjukkan posisi Pemerintah Vietnam yang kaku dan belum memberikan solusi yang dapat diterima kedua negara. Untuk itu, Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI akan terus melakukan pendekatan baik secara formal maupun informal untuk dapat segera mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua negara.

India

Pada tahun 2018, telah dilakukan upaya pendekatan agar Pemerintah India dapat menyepakati untuk melakukan pembahasan, baik secara formal maupun informal, untuk mendiskusikan batas ZEE antara Indonesia dan India. Pada bulan Maret 2018, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional telah melakukan kunjungan dan menemui Pejabat Pemerintah India di New Delhi guna melakukan pendekatan dan peninjauan dimulainya perundingan dan pembahasan mengenai batas ZEE RI-India.

Perkembangan perundingan batas ZEE antara RI-India selama tahun 2018 menunjukkan masih terdapat perbedaan pandangan antara RI dan India terkait delimitasi batas ZEE. Namun demikian, kedua negara berkomitmen untuk membahas hal tersebut di waktu yang akan datang.

Palau

Perundingan batas ZEE antara RI-Palau pada tahun 2018 mengalami peningkatan cukup pesat mengingat sebelumnya pihak Palau tidak memberikan tanggapan mengenai berbagai usulan RI untuk bertemu dan membahas batas ZEE antara kedua negara. Pada Triwulan III Tahun 2018, pihak Palau menyampaikan kesediaan untuk bertemu secara informal guna melanjutkan proses perundingan yang telah tertunda sejak tahun 2015.

Sepanjang tahun 2018, telah dilaksanakan 3 (tiga) perundingan batas ZEE antara RI-Palau yang dilakukan secara formal maupun informal. Adapun ketiga pertemuan dimaksud adalah Pertemuan Informal Persiapan Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim RI-Palau ke-5 di Koror, Palau pada tanggal 2 Agustus 2018, *2nd Preparatory Meeting to the 5th Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation between the Republic of Indonesia and the Republic of Palau* yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 15-16 Oktober 2018, dan *5th Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation between the Republic of Indonesia and the Republic of Palau* yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 31 Oktober-1 November 2018.

Filipina

Pada tahun 2018, telah dilakukan 1 (satu) kali Konsultasi Informal guna mendorong ratifikasi Perjanjian Batas ZEE RI-Filipina oleh Pemerintah Filipina serta menjajaki dimulainya perundingan batas landas kontinen. Hingga saat ini, Pemerintah Filipina belum dapat menyelesaikan proses ratifikasi Perjanjian Batas ZEE RI-Filipina, dimana saat ini proses ratifikasi masih berada di Parlemen Filipina. Terkait dengan usulan Indonesia untuk menjajaki dimulainya pembahasan batas landas kontinen kedua negara, pihak Filipina masih memerlukan waktu untuk melakukan konsultasi internal terlebih dahulu.

Thailand

Pada bulan Juli 2018, telah dilakukan peninjauan terkait delimitasi batas ZEE RI-Thailand di Bangkok, Thailand. Hal ini dilakukan untuk mendorong agar pihak Thailand bersedia melakukan pertemuan dalam rangka *exchange of views* secara informal pada level teknis. Pendekatan terus dilakukan mengingat Thailand menganut rezim *single line* dimana batas landas kontinen dianggap juga merupakan batas ZEE kedua negara.

Timor Leste

Pada Triwulan IV tahun 2018, Pemerintah RI dan Pemerintah Timor Leste telah menyelenggarakan 1 (satu) kali exploratory meeting dalam rangka pertukaran pandangan mengenai perundingan batas maritim antara RI-Timor Leste. Kedua pihak sebelumnya telah sepakat bahwa perundingan batas maritim akan dimulai setelah perundingan batas darat selesai.

Sepanjang tahun 2018, realisasi Persentase kemajuan perundingan batas maritim, penegasan batas darat, dan kerjasama perbatasan sebesar 98.11% dari target 100%. Adapun penghitungan capaian target kinerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel Capaian Sub IKU-2 SS B.1 Tahun 2018
(Capaian per negara)**

Negara	Titik Target (TT)	Titik Awal (TA)	Realisasi Kemajuan (RK)	Capaian $\left(\frac{RK}{TT-TA} \times 100\%\right)$
Malaysia	162	132	30	100%
Vietnam	162	112	50	100%
India	45	0	45	100%
Palau	87	63	49	204%
Filipina	285	282	2	66.6%*
Thailand	10	0	10	100%
Timor Leste	10	0	10	100%

* Target (pertukaran naskah ratifikasi RI-Filipina) belum dapat dicapai karena pihak Filipina belum menyelesaikan proses ratifikasi. Saat ini proses ratifikasi pihak Filipina masih berada di Parlemen Filipina

Tabel Capaian Sub IKU-2 SS B.1 Tahun 2018
(Capaian Keseluruhan)

Sub IKU-2 SS B.1	Capaian
Persentase kemajuan penyelesaian perjanjian batas maritim, penegasan batas darat, dan kerja sama perbatasan	98.1%

Perbandingan capaian antara tahun 2017 dan 2018 terdapat sedikit penurunan capaian. Terjadinya penurunan capaian tersebut dikarenakan adanya proses internal di negara mitra perundingan (Filipina) yang belum dapat menyelesaikan proses domestic ratifikasi Perjanjian Batas ZEE sehingga belum dapat melakukan pertukaran piagam ratifikasi. Meski demikian, sepanjang tahun 2018 telah dilakukan berbagai upaya untuk mendorong pihak Filipina agar dapat segera menyelesaikan proses domestik ratifikasinya untuk kemudian melakukan pertukaran piagam ratifikasi dengan Indonesia.

Grafik Capaian Sub IKU-2 SS B.1 Tahun 2017 dan 2018



Adapun capaian pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan terhadap capaian pada tahun 2015-2016, dikarenakan terdapat perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Selain itu juga perubahan mekanisme penghitungan capaian juga menyebabkan perbandingan secara langsung tidak tepat untuk dilakukan.

Untuk tahun 2019, direncanakan untuk terus melanjutkan proses perundingan yang sudah berjalan sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 juga terdapat Proyek Prioritas Nasional (ProPN) khusus untuk India, Vietnam, dan Filipina.

Kendala yang menjadi hambatan dalam pemenuhan target IKU pada tahun 2018 lebih kepada situasi atau kondisi domestik negara mitra dhi. Filipina. Target pertukaran piagam ratifikasi dengan Filipina belum dapat dilaksanakan pada tahun 2018 dikarenakan proses domestik ratifikasi oleh Filipina masih belum selesai dari Parlemen Filipina. Dengan demikian, kondisi internal dari negara mitra (kesiapan, situasi politik, ketentuan nasional) merupakan kendala utama dalam proses perundingan.

Sebagai langkah tindak lanjut dan solusi atas kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri sebagai Ketua Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI akan terus melakukan upaya pendekatan baik secara formal maupun informal pada berbagai level guna mendorong negara mitra untuk dapat melaksanakan perundingan dan mencapai kemajuan positif atas perundingan batas maritim kedua pihak. Secara khusus, Kementerian Luar Negeri RI melalui Tim Teknis akan terus melakukan pendekatan dan mendorong Pemerintah Filipina agar dapat segera menyelesaikan proses ratifikasinya dengan Parlemen Filipina.

Proyeksi kedepan dalam proses perundingan batas maritim diharapkan bahwa proses perundingan dapat menghasilkan kesepakatan terkait beberapa segmen yang hingga tahun 2018 telah menunjukkan tren positif untuk disepakati oleh kedua pihak. Untuk itu, selain terus mendorong proses perundingan secara keseluruhan untuk mempercepat dicapainya kesepakatan, juga akan fokus pada finalisasi hasil-hasil perundingan yang sudah mengerucut dan dapat diterima kedua pihak.

Analisis Sub IKU-3 : Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang Kemaritiman, Polkam dan Perbatasan yang diterima pada Forum Regional dan Multilateral

Sepanjang tahun 2018, realisasi Sub IKU 3 mengenai “Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum regional dan multilateral” sebesar **96,82%** dari target **89,75%**. Nilai capaian tersebut diperoleh dari jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima sebanyak 274 posisi/prakarsa dari target sebanyak 283 posisi/prakarsa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-3 B.1 Tahun 2018

Sub IKU-3 B.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase posisi/prakarsa/ rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum regional dan multilateral	Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima	213
	Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang disampaikan	220
	Realisasi	96,82%
	Target	89,75%
	Capaian	107,88%

Beberapa prakarsa/rekomendasi Indonesia yang mendukung sub IKU “Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum regional dan multilateral” antara lain:

- a. Keberhasilan Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB (KTHAM), Zeid Ra’ad Al Husein ke Indonesia pada tanggal 4-7 Februari 2018. KTHAM bertemu dengan Presiden dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta berpartisipasi dalam Jakarta International *Conversation on Human Rights*, di Kementerian Luar Negeri
- b. Indonesia menjadi tuan rumah “Our Ocean Conference” (OOC) tahun 2018 yang diselenggarakan di Bali tanggal 29-30 Oktober 2018 . Konferensi ini dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia kelautan yang berkomitmen melakukan perubahan bersama guna mengubah tantangan menjadi peluang kerja sama, inovasi, dan keberlanjutan. OCC 2018 mengusung tema “Our Ocean, Our Legacy” (Laut Kita, Warisan Kita). Ini bermakna bahwa laut kita adalah amanah yang akan kita wariskan untuk generasi penerus kita.



■ Pertemuan *Our Ocean Conference* (OOC) 2018 yang akan diselenggarakan di Bali 29-30 Oktober 2018

- c. Pertemuan *FAO Technical Consultation on the Marking of Fishing Gear* telah diselenggarakan di Roma pada tanggal 5-9 Februari 2018 dalam rangka penanganan *Abandoned, Lost, or Otherwise Discarded Fishing Gear* (ALDFG). ALDFG merupakan salah satu sumber sampah laut terbesar yang mengancam habitat dan stok ikan serta makhluk air lainnya. Pertemuan berhasil menyusun *Guidelines on the Marking of Fishing Gear* yang selanjutnya disahkan pada Sesi ke-33 *Committee on Fisheries* (COFI) bulan Juli 2018.
- d. Kesepakatan finalisasi *Paris Agreement Work Programme* (PAWP) yang berisi modalitas, prosedur, dan panduan implementasi Persetujuan Paris pada *The 24th Meeting of the Conference of Parties (COP 24) United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Katowice, Polandia, 9-14 Desember 2018.
- e. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi 2 deklarasi terkait perubahan iklim pada COP 24 yaitu *Solidarity and Just Transition Silesia Declaration* dan *Ministerial Katowice Declaration on Forest for Climate*.
- f. Keberhasilan Indonesia menjadi anggota Dewan ITU periode 2018-2022 dari kawasan Asia-Pasifik serta kembali menjadi anggota *Advisory Committee International Mobile Satellite Organization* (IMSO) periode 2017-2018. Keanggotaan Indonesia di kedua dewan dimaksud mendukung kemajuan Indonesia di bidang komunikasi satelit dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- g. Pada tahun 2018, Pemerintah RI telah berhasil melaksanakan pengiriman 1 *Satgas Rapid Deployment Battalion/RDB* TNI berkekuatan 850 personel ke misi PBB MINUSCA di Republik Afrika Tengah pada pertengahan bulan November 2018. Pengiriman Satgas RDB TNI tersebut telah berhasil menempatkan Indonesia pada peringkat 7 dari 124 Negara-negara Kontributor Pasukan Perdamaian PBB dengan jumlah personel meningkat menjadi sebanyak 3.545 personel, termasuk 94 personel perempuan.

Indonesia merupakan salah satu dari 30 negara anggota GCTF yang ditujukan sebagai forum untuk kerja sama global mengatasi ancaman terorisme. Forum yang dibentuk tahun 2011 tersebut dari berbagai kelompok kerja yang mengeluarkan rekomendasi kebijakan dan kegiatan untuk melawan terorisme.



- h. Pada *The 18th IORA Councils of Ministers Related Meetings (COMM)* di Durban, Afrika Selatan, 31 Oktober – 2 November 2018 Indonesia menyampaikan prakarsa antara lain: (1) Konsep Indo-Pasifik Indonesia secara umum yang berdasarkan prinsip sentralitas ASEAN, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, dan *respect for international law*; (2) Penyelenggaraan *IORA High Level Panel* mengenai tindak lanjut KTT IORA pada bulan Desember 2018 serta Indonesia *Indo-Pacific Maritime Dialogue* pada tahun 2019; (3) Pengakuan forum atas pencapaian IORA pada periode keketuaan Indonesia, termasuk keberhasilan implementasi Jakarta Concord dan *IORA Action Plan 2017-2021*, antara lain melalui program *Workshop on Marine Aquaculture and Fish Health Management* yang diselenggarakan oleh Indonesia di Situbondo pada 23-28 November 2017. Usulan Indonesia disambut baik dan bahkan diadopsi dalam dokumen Deklarasi Bersama yang merupakan hasil pertemuan tersebut.
- i. Pada pertemuan Menteri Koordinator Polhukam dengan Pemerintah Nauru dalam rangkaian HUT Kemerdekaan Nauru tanggal 31 Januari 2018, ditekankan upaya Pemri dalam mendorong pembangunan untuk kesejahteraan di Papua. Dalam kegiatan ini, Indonesia memprakarsai berbagai peluang kerja sama teknik dengan negara-negara Pasifik termasuk di bidang budidaya kelautan dan pembinaan UMKM. Dalam pidato kenegaraan HUT Nauru, Presiden Nauru menyampaikan apresiasi bantuan asing dari berbagai negara termasuk Indonesia.
- j. Pada pertemuan *30th Leaders Session with Forum Dialogue Partners (FDP)* tanggal 4 September 2018 dalam rangkaian *49th Pacific Islands Forum (PIF) and Related Meetings*, Nauru, 3-6 September 2018, Indonesia menyampaikan prakarsa terkait peningkatan kerja sama kemaritiman dalam rangka mengatasi ancaman keamanan bersama, terutama dalam penanganan *IUU Fishing dan marine plastic debris*, yaitu: (1) Pembentukan *Pacific Framework in Combatting IUU Fishing* untuk memperkuat kerja sama penanganan *IUU Fishing RI-Pasifik*; serta (2) *Sharing* teknologi *biodegradable plastic* kepada negara-negara PIF dalam upaya penanganan *marine plastic debris*.

- k. Pada Pertemuan KTT ke-21 *Melanesian Spearhead Group* (MSG) di Port Moresby, PNG, 10-15 Februari 2018, Indonesia merekomendasikan antara lain: (1) Agar MSG fokus kepada upaya peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan dan tidak teralihkan dengan isu yang tidak terkait, termasuk isu Papua; (2) Prakarsa kerja sama dalam berbagai bidang yang menjadi isu prioritas MSG, seperti perikanan, perubahan iklim, penanganan sampah plastik di laut, dan mekanisme *secondment* di Sekretariat MSG.

Komitmen dan prakarsa Indonesia sebagai bagian integral MSG untuk terus melakukan kerja sama secara aktif dengan negara anggota MSG diterima dengan baik pada KTT tersebut. Diplomasi RI juga telah berhasil menggagalkan upaya *United Movement Liberation of West Papua* (UMLWP) yang merupakan kelompok pendukung separatis Papua untuk menjadi *full member* MSG.

Pada sidang tahunan ke-26 *Asian Pacific Parliamentary Forum* (APPF) di Hanoi, 18-21 Januari 2018, Indonesia menyampaikan prakarsa berupa usulan resolusi di bidang *gender equality* serta terorisme dan kejahatan lintas batas di kawasan Asia Pasifik, yaitu: (1) *Resolution on Promoting Gender Equality for Sustainable Development and Shared Prosperity in the Asia-Pacific Region*; serta (2) *Resolution on Combating International Terrorism and Trans-Border Crime*

Diplomasi Indonesia di tahun 2018 untuk isu-isu pilar Polkam ASEAN diarahkan pada spektrum isu yang cukup beragam. Di samping isu-isu prioritas seperti pemajuan konsep Indo-Pasifik, negosiasi penyelesaian *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC), pengawalan diplomasi kerja sama maritim, penanganan terorisme, radikalisme dan ekstremisme dan isu-isu tradisional lainnya, isu-isu seperti *cyber security*, IUU *Fishing*, serta isu-isu baru lainnya sesuai dengan prioritas keketuaan Singapura di ASEAN tahun 2018 juga dilakukan.

Pemajuan konsep Indo-Pasifik hingga disepakati untuk menjadi konsep bersama ASEAN pada KTT ke-33 ASEAN, November 2018 merupakan inisiatif Indonesia sejak awal 2018. Sepanjang tahun 2018, Indonesia telah melakukan dua kali pertemuan di level workshop dan SOM untuk menyampaikan konsep Indonesia serta meminta masukan dari negara anggota ASEAN lainnya guna memastikan kepemilikan bersama ASEAN atas konsep Indo-Pasifik ini. Hasil yang diperoleh adalah kesepakatan ASEAN untuk melanjutkan inisiatif Indonesia ini sebagai “*ASEAN concept*” dan diharapkan di tahun 2019 mendatang dapat dihasilkan suatu *Stand Alone ASEAN Leaders’ statement on ASEAN’s Collective Outlook on Indo-Pacific*.

Terkait isu Laut China Selatan, di tahun 2018 telah dicapai suatu kesepakatan atas *Single Draft CoC Negotiating Text* oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan China pada pertemuan *ASEAN Post Ministerial Conferences (PMC) Plus One with China* tanggal 2 Agustus 2018 di Singapura. Dokumen ini merupakan pengembangan dan sekaligus implementasi *Framework of CoC* yang merupakan inisiatif Indonesia dan telah disepakati 2017 lalu.

Indonesia juga memberikan perhatian khusus pada implementasi Peta Jalan ASEAN 2025 salah satunya pada operasionalisasi penuh ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR). Pada tanggal 1 Februari 2018, telah dilaksanakan Terkait penandatanganan *Host Country Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dan ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR). Setelah dukungan penuh Indonesia untuk AIPR, dan mengingat pentingnya peran AIPR dalam isu perdamaian dan rekonsiliasi, Menlu RI mengharap agar Negara Anggota ASEAN dapat bersama mendukung dan berkontribusi terhadap pendanaan institusi tersebut setelah Indonesia menanggung operasionalisasinya selama tiga tahun (2018-2020).

Menunjukkan komitmennya pada ASEAN, Indonesia telah membangun gedung sekretariat ASEAN yang baru dan direncanakan gedung tersebut akan beroperasi penuh pada tengah tahun 2019 mendatang. Negara-negara anggota ASEAN telah menyampaikan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas komitmen dan kontribusi yang diberikan dalam pendanaan konstruksi dan furnishing gedung baru ASEC.

Terkait isu terorisme, Indonesia mendapatkan apresiasi dari negara-negara Anggota ASEAN lainnya atas kepemimpinan Indonesia dalam menyusun dan mengoordinasikan pembahasan ASEAN *Plan of Action (PoA) to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism 2018-2025*, sehingga dapat diadopsi di Pertemuan 12th AMMTC, November 2018. Indonesia juga telah menyampaikan rencana penyelenggaraan *workshop* untuk menyusun *cross-sectoral* dan *cross-pillar work plan* untuk mengimplementasikan PoA dimaksud pada tahun 2019. Indonesia akan mengundang berbagai badan sektoral ASEAN terkait dari ketiga pilar ASEAN dan sejumlah negara mitra wicara ASEAN.

Indonesia juga berhasil mendorong penyelesaian draft Model ASEAN *Extradition Treaty* (MAET) pada pertemuan ke-8 ASEAN *Senior Law Officials' Meeting* (ASLOM) *Working Group*, Maret 2018 yang telah dilakukan sejak 2007. Teks MAET ini merupakan model dasar bagi pembuatan perjanjian ekstradisi bilateral antara negara anggota ASEAN dalam bentuk ASEAN *Extradition Treaty*.

Mendorong terus agar kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan bebas senjata nuklir, dalam ketekuaan bersama dengan Korea Selatan – Jepang dalam ARF *ISM on Non-Proliferation and Disarmament* (ARF ISM on NPD) 2018, Indonesia telah menegaskan posisi agar pembahasan isu senjata pemusnah massal harus seimbang di ketiga pilar yaitu non-proliferasi, perlucutan senjata dan penggunaan teknologi bagi tujuan damai. Hak negara untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai tidak boleh disalahartikan sebagai proliferasi nuklir. Selain itu, Indonesia juga mendorong agar negara-negara di kawasan dapat (1) bekerja bersama mendukung suksesnya *review process Non-Proliferation Treaty* (NPT); (2) mendukung implementasi *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty* (CTBT) sebagai langkah strategis rezim nonproliferasi dan perlucutan senjata internasional, dan (3) meratifikasi *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (TPNW). Indonesia juga mendukung *Nuclear Weapon Free Zone* di sejumlah kawasan (dalam hal ini juga mendorong akses P5 atas Protokol Traktat SEANWFZ) dan menyampaikan dorongan agar negara-negara Annex II CTBT segera menandatangani dan meratifikasi CTBT.

Sepanjang tahun 2018, Kementerian Luar Negeri juga telah menyampaikan berbagai rekomendasi di bidang kerja sama maritim dan politik kemanan ASEAN antara lain pada Pertemuan ASEAN *Senior Officials' Meeting* (SOM), *The 24th ASEAN-China Senior Officials' Consultation* (ACSOC) dan *APT & EAS Meeting* di Singapura, *The 31st ASEAN-U.S. Dialogue*, di Malaysia, *The 15th ASEAN-Russia Senior Officials' Meeting* di Rusia, serta *The 30th ASEAN-Australia Forum* di Australia,

Selain berbentuk kegiatan di tingkat Pejabat Tinggi, terdapat juga pertemuan berupa *workshop/seminar* seperti *ASEAN-Australia Cybersecurity Workshop: Strengthening Legal Implementation in Tackling Cybersecurity Challenges in the Region* diselenggarakan bersama oleh Thailand dan Australia, di Bangkok, Thailand, 12-13 Februari 2018 dan Pertemuan *ASEAN-EU Young Leaders Forum and ASEAN-EU Strategic Thinkers Forum*, Brussels, Belgia, 26-28 Februari 2018.

Beberapa rekomendasi Indonesia yang bernilai strategis di bidang maritim dan politik keamanan antara lain seperti: Indonesia usulan 3 (tiga) prioritas kerja sama selama *country coordinatorship* Indonesia untuk kemitraan ASEAN-Rusia (2018-2021) yaitu kontra terorisme, keamanan siber, dan penanganan bencana; perlunya semua negara ASEAN mendukung "*regional-collective interest*", khususnya dalam menjamin keamanan, perdamaian dan kesejahteraan kawasan; menekankan bahwa teks COC harus bersifat *actionable* dan efektif dalam mencegah dan mengelola insiden di kawasan serta tidak merupakan duplikasi DOC; perlunya penguatan kerja sama penanggulangan terorisme, khususnya implementasi *MoU on Cooperation to Counter International Terrorism* yang ditandatangani pada *ASEAN-Australia Special Summit* (AASS), serta meminta mitra wicara untuk mendukung konsep Indo-Pacific usulan Indonesia.

Kemudian pada Pertemuan *ARF Workshop on Sustainable Fisheries in South East Asia* 13-14 Maret 2018 di Bangkok, delegasi Indonesia berhasil mencegah agar kesimpulan hasil *workshop* memberikan rekomendasi kepada SOM-AMAF terkait keinginan untuk menciptakan konsep *shared fisheries resources* yang akan disampaikan melalui inisiatif *ASEAN Common Fisheries Policy*.

Pada Pertemuan *ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries* (ASWGF) ke-26 di Bangkok tanggal 7-12 Mei 2018, Indonesia berhasil mendapatkan persetujuan forum untuk mengubah nama inisiatif Thailand terkait *ASEAN Common Fisheries Policy* (ACFG) menjadi *ASEAN General Fisheries Policy* (AGFP) sehingga mencegah inisiatif tersebut dibawa ke arah pembentukan persetujuan kebijakan perikanan bersama (*Common Fisheries*) di ASEAN, menjadi hanya sekedar kumpulan persetujuan terkait perikanan yang ada di ASEAN.

Pada pertemuan *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry* (AMAF) ke 40 tanggal 8-12 Oktober 2018 di Hanoi, Viet Nam, Delegasi Indonesia berhasil mendapatkan pengesahan AMAF untuk inisiatif pembentukan kerja sama ASEAN *Tuna Ecolabelling* (ATEL) *Policy Paper*, dan *Endorsement* terhadap inisiatif AGFP.



■ Mentan Andi Amran Sulaiman bersama para Delri di pertemuan AMAF ke-40 Vietnam

Pada pertemuan *ASEAN Transports Ministers Meeting* di Bangkok tanggal 5-9 November 2018, Indonesia dan Malaysia juga menyetujui untuk mematangkan rencana pembukaan jalur *RO-RO Shipping Network* antara Dumai dan Melaka, dan Indonesia dan Filipina akan menyempurnakan *RO-RO Shipping Network* yang telah dibuka antara Bitung dan General Santos Mindanao.

Tingginya capaian IKU ini disebabkan karena seluruh prakarsa/rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia sesuai rencana aksi baik dibidang maritim maupun polkam diterima seluruhnya pada forum regional kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa.

Prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman dan polkam di forum intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa termasuk perubahan positif yang terjadi adalah sebagai berikut:

Bidang Maritim

1) *Indonesia-European Union 2nd High Level Dialogue on Fisheries and Maritime Issues (27 September 2018)*

Indonesia dan UE telah saling bertukar informasi dan pengalaman serta mencari kesepahaman guna saling dukung dalam berbagai fora regional dan global.

Bidang Polkam

2) *8th RI-EU Human Rights Dialogue (Jakarta, 1 Februari 2018)*

Indonesia dan Uni Eropa sepakat memberikan perhatian penuh pada transparansi dan kesepahaman dalam isu hukuman mati, kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

3) *ASEM SOM Retreat (Zurich, 3-4 Mei 2018)*

Delegasi Indonesia telah menyuarakan kepentingan Indonesia mengenai pentingnya keterlibatan pemuda dalam proses ASEM. Kepentingan Indonesia lainnya seperti isu-isu penanggulangan terorisme, kerja sama ekonomi, dan kerja sama maritim juga disetujui oleh mitra ASEM lainnya dalam diskusi mengenai topik-topik yang akan diangkat pada *outcome document* KTT ASEM ke-12 mendatang.

4) **1st ASEM SOM pra-KTT** (Wina, 28-29 Juni 2018)

Indonesia telah menyampaikan masukan terkait elemen yang perlu masuk dalam *outcome document* KTT ASEM ke-12, antara lain *ocean governance and maritime security, sustainable economic growth, SMEs, gender equality, vocational training, creative economy, drug trafficking, exchange of students and youth*.

5) **2nd ASEM SOM pra-KTT** (12-14 September 2018)

Elemen-elemen yang diusulkan Indonesia telah terakomodasi dengan memadai di draf terakhir *outcome documents* KTT ASEM ke-12, antara lain:

- key messages dari hasil ASEM TSOM;
- rujukan mengenai perlunya memperbaiki berfungsinya mekanisme di ASEM untuk meningkatkan *visibility* dan dampaknya pada tingkat akar rumput; dan
- rujukan yang kuat mengenai multilateralisme.

6) Rangkaian Pertemuan KTT ASEM ke-12 (Brussel, 15-19 Oktober 2018)

Elemen-elemen yang diusulkan/didukung Indonesia telah terakomodasi dengan memadai di *Chair's Statement* final, antara lain:

- key messages dari hasil ASEM Transport SOM yang diselenggarakan di Medan, Juli 2018, telah tercermin dalam paragraf 22;
 - Pentingnya dialog antaragama sebagai salah satu faktor pengembangan konektivitas antar Asia dan Eropa dalam paragraf 30.
- 7) **3rd Indonesia-EU Security Dialogue** (Jakarta, 29 November 2018)

Kedua pihak sepakat mengembangkan inisiatif kerja sama konkrit yang akan diimplementasikan pada 2019, antara lain:

- penyelenggaraan *workshop on drugs rehabilitation*;
- peningkatan status RI dari observer menjadi planner pada program *European Union Naval Force ATALANTA*;
- peninjauan kerja sama *capacity building* bagi komponen sipil pada *peace keeping missions*;
- pertukaran dosen dan *joint research* Unhan RI dan *European Defense and Security College*.

Keberhasilan capaian pada IKU ini adalah kesepakatan dari UE dan negara-negara anggota ASEM terhadap berbagai usulan Indonesia yang penting untuk dikerjasamakan dalam lingkup kerja sama UE maupun ASEM. Perubahan positif yang dicapai adalah disepakatinya peninjauan berbagai kerja sama konkrit dibidang-bidang ekonomi, politik dan keamanan, sosial budaya termasuk kepemudaan. Perubahan positif lainnya adalah tercapainya kemajuan dalam pemahaman isu-isu domestik tertentu di Indonesia oleh negara mitra, termasuk isu-isu yang selama ini dinilai sensitif, sehingga menjadi landasan bagi pengembangan kerja sama selanjutnya untuk mewujudkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam bagi *stakeholder* negara mitra. Inovasi kinerja yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah melakukan serangkaian pendekatan dan negosiasi secara intensif pada berbagai tingkatan dengan negara mitra, khususnya pihak-pihak yang selama ini menyampaikan pandangan negatif terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia. Terobosan kinerja lain yang juga dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah merumuskan dan mengusulkan program kerja sama yang tidak hanya menjadi kepentingan Indonesia tetapi juga menjadi kepentingan negara mitra.

Tantangan utama yang dihadapi Kementerian Luar Negeri dalam pencapaian target IKU ini antara lain: kurang optimalnya respon dari negara mitra terhadap usulan prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Selain itu, implementasi kesepakatan regional oleh negara anggota tidak berjalan/tercapai secara maksimal karena kondisi di masing-masing negara. Tantangan lainnya adalah masih tetap adanya perbedaan persepsi dan prioritas di antara Negara Anggota ASEAN. Perbedaan ini masih sangat dirasakan pada tahun 2018 dimana terdapat kontestasi kepentingan masing-masing negara anggota dengan bayang-bayang

pengaruh negara-negara besar isu-isu strategis di ASEAN. Hal yang sama pun dihadapi Indonesia dalam mendorong rekomendasi prakarsa yang diusung agar dapat disetujui.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa melakukan upaya pendekatan dan koordinasi kepada pihak-pihak dan negara-negara terkait guna mempromosikan usulan prakarsa/rekomendasi Indonesia sehingga dapat diterima pada forum regional maupun multilateral. Kementerian Luar Negeri juga akan berupaya mengintensifkan pertemuan informal dan formal dalam rangka mempertemukan mutual understanding atas national interest dengan negara mitra. Pertemuan akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan 6-12 bulan sebelum pelaksanaan forum regional maupun multilateral.

Sebagai proyeksi ke depan, melalui diplomasi Indonesia yang luwes, Kementerian Luar Negeri berusaha memastikan capaian-capaian penting adalah yang bersifat lebih strategis dan memiliki dampak jangka panjang. Terkait kerja sama di negara ASEAN, pendekatan Indonesia yang tidak selalu mengedepankan “kebesaran” dan posisi Indonesia sebagai mayoritas namun bersedia duduk bersama dan mendiskusikannya bersama negara-negara anggota ASEAN banyak dipuji sebagai jiwa besar Indonesia dalam memenangkan negosiasi demi kepentingan yang lebih besar. Secara strategis, Politik Luar Negeri Indonesia yang menempatkan ASEAN sebagai soko guru memberikan penegasan bahwa ASEAN adalah penting bagi Indonesia dan sebaliknya, keamanan dan stabilitas Indonesia yang makmur merupakan jaminan kesejahteraan bagi ASEAN. Selain itu, Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan stakeholder dalam negeri maupun negara mitra untuk mengimplementasikan usulan kerja sama secara konkrit dan menjadikan Indonesia sebagai mitra yang potensial dan dipandang penting dalam penanganan isu-isu internasional. Indonesia juga akan lebih meningkatkan komitmen untuk akuntabilitas kebijakan bidang HAM, termasuk didalamnya mengenai isu hukuman mati, jaminan hak-hak kelompok agama minoritas maupun perlindungan terhadap kebebasan beragama.

Analisis Sub IKU-4 : Persentase Naskah Mengenai Kebijakan Indonesia di Bidang Maritim, Polkam dan Perbatasan yang Dimuat di Berbagai Media Berbahasa Asing

Dalam mewujudkan pelaksanaan diplomasi maritim, polkam dan perbatasan yang kuat, Kementerian Luar Negeri c.q. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) pada tahun 2018 melakukan kajian Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pimpinan Kementerian Luar Negeri dan bahan penyusunan dokumen posisi delegasi Indonesia di fora internasional.

Selain menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pimpinan Kementerian Luar Negeri, hasil kajian juga disebarluaskan kepada masyarakat, melalui penerbitan naskah / artikel di berbagai media berbahasa asing. BPPK juga aktif melaksanakan diskursus mengenai kebijakan dan posisi Indonesia, khususnya di bidang maritim, polkam dan perbatasan di berbagai fora internasional.

Sesuai dengan instruksi Menteri Luar Negeri pada saat Rakor Kepri bulan Februari 2018, BPPK disertai tugas untuk mengembangkan Konsep Indo-Pacific. Setelah melalui berbagai konsultasi yang intensif dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga kajian, K/L, dan perwakilan RI di luar negeri (melalui *Video Conference*), akhirnya berhasil dirumuskan suatu dokumen (*a developing concept*) dengan judul “*Indonesia’s Perspective for an ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Towards a Peaceful, Prosperous, and Inclusive Region*”. Konsep ini telah dipaparkan oleh Kepala BPPK kepada SOM ASEAN di Singapura, serta secara intensif didiskusikan dengan para SOM Leaders negara-negara East Asia Summit, di Singapura, pada acara *51st ASEAN Foreign Ministers’ Meeting and Related Meetings*, tanggal 29 Juli - 2 Agustus 2018.

Concept Paper “Indonesia’s Perspective for an ASEAN Outlook on Indo – Pacific: Towards a Peaceful, Prosperous, and Inclusive Region” juga telah dipresentasikan di berbagai fora internasional, antara lain di Canberra-ANU, *Colombo-Indian Ocean Conference*, dan Xiamen. Selanjutnya, BPPK juga telah diundang oleh INDOPACOM di Hawaii pada bulan April dan Mei 2018, serta di Washington, pada bulan Oktober 2018 untuk secara khusus menyampaikan ide-ide utama dari konsep Indonesia mengenai Indo-Pacific, seraya memberi masukan bagi Indo-Pacific strategi pihak Amerika Serikat.

Kegiatan Kementerian Luar Negeri (yang dituangkan dalam naskah Press Release, atau wawancara khusus yang menjadi artikel/report) yang dimuat di media berbahasa asing pada tahun 2018, adalah:

- i) Sepanjang 2018, Kementerian Luar Negeri telah mengambil peran terkait pembahasan konsep Indo-Pasifik. Beberapa naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan diantaranya terkait Konsep Indo-Pasifik yang telah dimuat di berbagai media, antara lain *the Strait Times* dengan judul *Time for ASEAN to drive the Indo-Pacific Process*, 7 November 2018 dan di *the Jakarta Post* dengan judul artikel *Indo-Pacific Regionalism Raises, May Need New Name*, yang dimuat di *Jakarta Post*, 6 November 2018. Kedua artikel tersebut membahas bahwa ASEAN harus memiliki konsep bersama terkait Indo-Pasifik dan ASEAN menjadi sentral dalam implementasi konsep tersebut, serta *East-Asia Summit* sebagai platformnya.



■ MEMBUMIKAN POLUGRI. Kementerian Luar Negeri sosialisasikan konsep Indonesia mengenai Indo-Pacific dalam Kongres ke-30 Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Purwokerto, 21 November 2018.

- ii) Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menerbitkan 2 artikel mengenai isu siber. Kedua artikel yang berjudul *"Indonesia's Survival in Age of Cyber Warfare"*, *the Jakarta Post*, 13 Juli 2018 dan *"RI Wants Joint Approach on Tech Threats"*, *the Jakarta Post*, 6 September 2018, mengulas implikasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi Indonesia. Secara khusus artikel membahas mengenai penggunaan internet telah memberikan berbagai dampak positif di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Terlepas dari sisi positif, penggunaan internet juga menimbulkan tantangan yang kompleks. Internet dikenal dengan sifatnya yang publik, dalam arti siapa saja dapat berkontribusi pada penambahan konten atau informasi yang terdapat di internet. Akibatnya, informasi yang terdapat di internet sulit diverifikasi kebenarannya, yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya opini publik yang keliru. Selain itu artikel juga memberi rekomendasi bahwa dalam menanggulangi ancaman siber Indonesia harus memanfaatkan berbagai kerja sama dan forum internasional yang ada. Isu siber merupakan isu global sehingga perlu pendekatan multilateral untuk penanggulangannya.
- iii) Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menerbitkan 2 artikel mengenai pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Artikel yang berjudul *"Indonesia Readies Plans for UN Seat"*, *the Jakarta Post*, 27 April 2018 dan *"Indonesia in UNSC: Promote Holistic Approach to Peace"*, *the Jakarta Post*, 27 Agustus 2018 secara umum menyampaikan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai anggota DK-PBB periode 2019-2020 adalah bukti nyata kepercayaan dunia kepada Indonesia yang harus ditunaikan. Dalam empat tahun terakhir, dunia mengapresiasi rekam jejak diplomasi Indonesia, terutama diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Disebutkan juga bahwa prioritas kerja Indonesia di DK-PBB sudah jelas. Pertama, Indonesia akan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Kedua, Indonesia juga akan meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK-PBB. Ketiga, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif dalam memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme. Keempat, Indonesia akan mendorong kemitraan global dalam mensinergikan penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan.

- iv) Di samping itu, Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Jerman dan Yayasan *Friedrich Ebert Stiftung* telah menyelenggarakan *Bali Democracy Forum-Berlin Chapter* pada tanggal 14 September 2018 di Berlin, Jerman yang mendapatkan liputan berbagai media massa, termasuk dimuat di website *Diplomat Magazine*, Belanda, yang berjudul "*Bali Democracy in Berlin*" dan dimuat di website Kementerian Luar Negeri Jerman dengan judul "*Indonesia: a Strategic Partner for a rules-based order*".
- v) Kementerian Luar Negeri c.q. BPPK telah diminta untuk menjadi penulis salah satu Chapter untuk jurnal yang diterbitkan oleh *Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG)* berjudul "*The Road Ahead: The 21st Century World Order in the Eyes of Policy Planners*". Tulisan itu telah dipublikasikan dalam jurnal yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2018. Dalam tulisan berjudul "*The New Global Landscape: an Indonesian Perspective*", Dr. Siswo Pramono mengulas pandangannya terkait perubahan yang sedang terjadi dalam *world order* saat ini. Perlu diantisipasi sekiranya perubahan tersebut pada akhirnya memunculkan proses *norm setting* baru, tidak hanya dalam bidang kewanitaan dan militer, namun juga dalam hubungan ekonomi. Kepala BPPK juga menggarisbawahi, perlunya mengantisipasi dampak *global economics shift* ke Asia Timur, terhadap *global order* yang ada saat ini. *The emerging powers dan middle powers*, seperti Indonesia dan Brazil, diharapkan dapat turut berperan dalam mengantisipasi tuntutan pembentukan norma baru tersebut (baik dari aspek substansi maupun prosesnya).
- vi) Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan *The 28th International Workshop on Managing Potential Conflict in South China Sea* di Manado yang dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. A.M Fachir pada tanggal 9 September 2018. Sesuai dengan cirinya *one-and-a-half track*, Lokakarya Laut China Selatan (LCS) bertujuan membangun kerja sama lebih erat untuk menjaga perdamaian, stabilitas keamanan dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Laut China Selatan. Lokakarya LCS juga merekomendasikan pentingnya melakukan kerja sama teknik untuk kepentingan bersama, seperti: *marine debris, blue carbon and marine blue economy*. Penyelenggaraan *workshop* tersebut telah diliput dan diberitakan oleh Media *Jakartapost* dengan judul artikel "*Technical Cooperation could ease tension in South China Sea: Forum*". Artikel tersebut telah terbit pada edisi Jumat, 10 September 2018. Artikel ini membahas bahwa *workshop* yang diselenggarakan oleh Indonesia tersebut berhasil mengurangi ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan.



Sepanjang tahun 2018, realisasi Sub Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang dimuat di berbagai media berbahasa asing sebesar 100% dari target 90%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-4 B.1 Tahun 2018

Sub IKU-4 B.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang dimuat di berbagai media berbahasa asing	Jumlah naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang dimuat di berbagai media berbahasa asing	17
	Jumlah naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang diajukan	17
Realisasi		100%
Target		90%
Capaian		111,11%

Uraian:

1. "ISDP received a delegation from Indonesia's Ministry Foreign and Affairs", artikel di website *Institute for Security & Development Policy (ISDP) EU*, 30 Januari 2018;
2. "The New Global Landscape: an Indonesian Perspective", artikel Kepala BPPK di Majalah *Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG)*, Maret 2018;
3. "FUNAG promote a palestra 'The New Global Landscape and the Geopolitics in the Asia and Pacific Region'", artikel di website *A Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG)*, 28 Maret 2018;
4. *Indonesia readies plans for UN Seat*, dimuat di the Jakarta Post, 27 April 2018;
5. *Indonesia assumes leadership in the pursuit of the Indo-Pacific dream*, *Foreign Liaison*, 24 Mei 2018;
6. "Indonesians retains faith in Global Multilateralism", artikel dari wawancara Kepala BPPK dengan Jakarta Post, 23 Juni 2018;
7. *Indonesia's Survival in age of cyber warfare*, dimuat di Jakarta Post, 13 Juli 2018;
8. "ASEAN Must Build Regional Resilience Amid Unclear US Foreign Policy :Experts", artikel di Jakarta Globe, 29 Juli 2018;
9. *Indonesia in UNSC: Promote holistic approach to peace*, dimuat di the Jakarta Post, 27 Agustus 2018;
10. *RI wants joint approach on tech threats*, dimuat di the Jakarta Post, 6 September 2018;
11. *Technical Cooperation could ease tension in South China Sea: Forum*, The Jakarta Post, 10 September 2018;
12. "Indonesia: a strategic partner for a rules-based order", artikel di website Kementerian Luar Negeri Jerman, 14 September 2018;
13. "Bali Democracy Forum in Berlin", artikel di website *Diplomat Magazine*, 14 September 2018;
14. "Bali Democracy Forum über Migration und Demokratie in Berlin", artikel di website *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 19 Oktober 2018;
15. *Indo Pacific Regionalism Rises, May Need New Name*, The Jakarta Post, 6 November 2018;
16. *Time for ASEAN to drive the Indo - Pacific process*, *The Strait Times*, 7 November 2018;
17. *Second Indonesia - Australia - India Senior Officials' Strategic Dialogue*, Website *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*, 11 November 2018.

Secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dalam peliputan media asing dalam kegiatan Kemenlu, untuk topik-topik kegiatan di atas. Namun demikian, partisipasi dan ketertarikan dari media asing masih dapat terus ditingkatkan untuk diseminasi informasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi dan ketertarikan dari media asing, maka perlu dilakukan peningkatan engagement dengan media; termasuk dengan menyediakan sumber informasi yang memadai dan kredibel serta terus berinovasi

untuk menarik minat media dalam meliput kegiatan Kemenlu. Dalam hal ini, Kemenlu telah menyediakan data-data dan analisa sebagaimana yang diminta oleh para jurnalis untuk tulisan-tulisan mereka.

Langkah solutif ke depan, Kemenlu akan terus meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, mengintensifkan media gathering, serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan RI di Luar Negeri untuk pendekatan ke berbagai media asing di wilayah akreditasi, agar naskah-naskah kegiatan yang diselenggarakan dapat dimuat di media tersebut.

Analisis Sub IKU-5 : Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang diterima di berbagai fora internasional

Sepanjang tahun 2018, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan beberapa *Briefing Note* yang terkait dengan isu politik dan keamanan internasional. *Briefing Note* yang pertama adalah mengenai penarikan diri Amerika Serikat dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) atau yang dikenal dengan istilah lain Iran *Nuclear Deal*. Melalui *Briefing Note*, Pusat P2K Multilateral menyampaikan rekomendasi agar Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya-upaya agar JCPOA tetap berjalan dengan pertimbangan bahwa JCPOA selaras dengan sikap konsisten Indonesia untuk mencegah proliferasi senjata nuklir global. Selain itu, Indonesia juga telah memperoleh keuntungan ekonomi dari penerapan JCPOA berupa peningkatan hubungan. Namun demikian, Indonesia perlu menghindari pernyataan sikap yang terkesan konfrontatif terhadap AS dalam isu tersebut.

Diskursus lainnya yang telah disampaikan adalah terkait isu keamanan siber dalam kerangka kerja sama internasional untuk pengembangan kapasitas dan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), terutama di kawasan ASEAN pada kegiatan *Workshop on Cyber Security*. Indonesia dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan kapasitas ASEAN maupun aktif dalam diskusi regional mengenai koordinasi kebijakan keamanan siber di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya telah disampaikan juga diskursus mengenai langkah-langkah strategis untuk meminimalisasi dampak penggunaan teknologi modern dalam situasi humatier internasional pada kegiatan "*Regional Conference on Contemporary Warfare: Global Trends and Humanitarian Challenges*". Terdapat indikasi adanya peningkatan komitmen dan pemahaman bersama untuk penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik yang menggunakan teknologi modern seperti *lethal autonomous weapons* dan *cyber weapons*.

Sebagai salah satu rangkaian Indonesian *Solidarity Week for Palestine* telah diselenggarakan *Foreign Policy Breakfast* bersama Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI pada tanggal 15 Oktober 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka berkoordinasi dalam upaya mendorong isu Palestina agar mendapat perhatian khusus Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia akan terus memberikan perhatian besar bagi isu Palestina. Kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara adalah tanggung jawab bangsa-bangsa di dunia yang masih belum selesai. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia senantiasa ikut membantu perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai bantuan yang telah disampaikan baik dalam bentuk bantuan langsung ataupun peningkatan kapasitas.

Selain itu, guna memberikan pemahaman yang sama atas strategi Indonesia terhadap Indo-Pasifik, dinamika strategi Indonesia di tengah strategi Indo-Pasifik yang diusung negara-negara lain, serta progress dari pemajuan dan penajaman strategi Indonesia. BPPK telah menyiapkan beberapa *Briefing Note* Khusus terkait terkait konsep Indo Pasifik yang telah berkembang pada tahun 2018. Diantaranya adalah *Briefing Note Indo Pasifik* dalam Perspektif Indonesia: "Poros Maritim dan ASEAN-led" Januari 2018 dan *Briefing Note* "Penggunaan Nama Indo-Asia sebagai Alternatif bagi Terminologi Indo-Pacific".

Dalam rangka mendukung posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghargai keragaman dan toleransi dan memperluas pengaruh serta cakupan Bali *Democracy Forum*, pada tahun 2018 Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Jerman dan Yayasan *Friedrich-Ebert-Stiftung* menyelenggarakan



■ Foreign Policy Breakfast bersama Menlu RI dan Menlu Palestina Gedung Pancasila, 15 Oktober 2018

BDF-Chapter Berlin di Berlin, Jerman, tanggal 14 September 2018. BDF Berlin Chapter mengangkat tema *Democracy and Migration* dengan tujuan untuk mendiskusikan dan *sharing best practices* mengenai isu migrasi dan demokrasi. Forum dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri perwakilan Pemerintah, lembaga internasional, LSM, akademisi dan lembaga think tank dari Asia dan Eropa. Hasil dari diskusi pada forum ini selanjutnya akan dilaporkan pada BDF XI di Bali, 6-7 Desember 2018.



■ Pembukaan Bali Democracy Forum- Berlin Chapter, 14 September 2018

Tabel Capaian Sub IKU-5 B.1 Tahun 2018

Sub IKU-4 B.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang diterima di berbagai fora internasional	Jumlah diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang diterima di berbagai fora internasional	22
	Jumlah diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang maritim, polkam dan perbatasan yang diajukan di berbagai fora internasional	22
	Realisasi	100%
	Target	80%
	Toleransi Capaian	125%

Uraian:

1. *Briefing Note Indo Pasifik dalam Perspektif Indonesia: "Poros Maritim dan ASEAN-led"* Januari 2018;
2. *Briefing Note "Tawaran Radar Jepang bagi Pulau-pulau Terluar Indonesia"* - Jakarta, 2 Maret 2018;
3. *Policy Planning Consultation (PPC) RI - Brazil*, Brazil, 24-31 Maret 2018;
4. *Briefing Note "Mengantisipasi Kebijakan CAATSA Donald Trump terhadap Kepentingan Strategis Indonesia"*, 5 Maret 2018;
5. *Briefing Note "Mengelola Peluang Ekspor Alutsista Produk Indonesia ke India"*-Jakarta 3 April 2018;
6. *Briefing Note Wacana Pemindahan Sekretariat IORA dari Mauritius ke Indonesia*, 5 April 2018;
7. *Briefing Note "Pengembangan Kerja Sama Industri Strategis Indonesia-Australia-Jepang"* 12 Mei 2018;
8. *Policy Planning Consultation (PPC) RI - Polandia*, Bali, 15 Mei 2018;
9. *Policy Planning Consultation (PPC) RI - Swiss*, Zurich-Bern, 22-24 Mei 2018;
10. *Briefing Note "Saran Penyelesaian Penggunaan Bendera Mirip Israel pada Upacara Keagamaan Gerakan Sion Kids di Papua"*. 25 Mei 2018;
11. *Briefing Note "Dampak Keputusan Unilateral Amerika Serikat Menarik Diri Dari Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action/ JCPOA"*, 7 Juni 2018;
12. *Briefing Note "Implikasi Kunjungan Perdana Menteri India ke Israel terhadap Geopolitik Kawasan"*, 8 Juli 2018;
13. *Briefing Note "Penggunaan Nama Indo-Asia sebagai Alternatif bagi Terminologi Indo-Pacific"*, 10 Juli 2018;
14. *Briefing Note "Rekomendasi PLTA dan Proyek Penyaluran Air Sungai Digul"* 27 Juli 2018;
15. *Workshop on cyber security, Singapura*, 12-17 Agustus 2018;
16. *"Regional Conference on Contemporary Warfare: Global Trends and Humanitarian Challenges"* di, Jakarta, 5 September 2018;
17. *Focus Group Discussion (FGD) "US Policy toward Southeast Asia under President Donald Trump: Continuity or Change?"* bekerjasama dengan *United States-Indonesia Society (USINDO)*, 27 Juli 2018;
18. *Policy Planning Consultation (PPC) RI - Jerman*, Berlin, 13 September 2018;
19. *Bali Democracy Forum (BDF) - Berlin Chapter*, Berlin, 14 September 2018;
20. *Convener's Note Bali Democracy Forum - Berlin Chapter*, 14 September 2018;
21. *Foreign Policy Breakfast Menteri Luar Negeri Palestina dengan Menteri Luar Negeri Indonesia* 18 Oktober 2018;
22. FKKN "Populism in Europe and Asia and Its Effects on Foreign Policy", Jakarta, 6 November 2018.

Hal-hal atau **kendala yang dihadapi** umumnya adalah karakter sistem internasional yang kental dengan kepentingan tiap negara/aktor yang berbeda. Hal ini membuat prioritas kepentingan Indonesia tidak selalu sejalan dengan prioritas kepentingan negara mitra. Namun demikian, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan justru menjadi fondasi yang kuat untuk membangun *common ground* antara Indonesia dengan negara mitra. Dengan demikian Kemenlu c.q. BPPK dapat terus memainkan perannya sebagai aktor semi *think tank/track 1,5* dalam menggali berbagai isu terkait maritim, polkam dan perbatasan untuk dibicarakan pada forum-forum formal.

Untuk **mengatasi kendala** tersebut, Diskursus perlu disusun dengan muatan substansi yang lebih matang sehingga dapat meyakinkan para pemangku kepentingan di negara terkait mengenai pentingnya konsep bersama yang mencakup kepentingan semua pihak.

Langkah solutif ke depan, Kemenlu akan menyusun dan menawarkan konsep yang dapat diterima negara mitra dan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak.



■ Policy Planning Consultation RI – Jerman, Berlin, 13 September 2018

Langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan menyusun konsep kegiatan dengan lebih terarah dan guna tercapainya hasil kegiatan yang maksimal, serta guna diperolehnya berbagai rekomendasi yang bermanfaat bagi kepentingan nasional RI

Sasaran Strategis (B.2): Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Kuat

“Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat”

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan telah dijalankan dengan efektif dan berkualitas

“Jumlah inisiatif pemberdayaan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri”

IKU ini bertujuan untuk mengetahui jumlah inisiatif yang dilakukan dalam rangka penggalangan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia

Diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat merupakan aspek yang sangat strategis dan merupakan instrumen penting kebijakan luar negeri setiap negara, termasuk Indonesia. Diplomasi ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, dan kerja sama ekonomi teknik.

Diplomasi sosial adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

Sementara diplomasi budaya adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan pelestarian dan pengenalan budaya kepada dunia internasional, dengan penggunaan aset budaya sebuah negara untuk mendukung pemenuhan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia.

Pencapaian Sasaran Strategis “Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat” diukur dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat” dengan pembobotan 100%.

1. SUB IKU-1: Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
2. SUB IKU-2: Persentase Kemajuan Perundingan Perdagangan Bebas dan Investasi;
3. SUB IKU-3 : Jumlah data economic intelligence negara/wilayah akreditasi yang dimiliki;
4. SUB IKU-4 : Jumlah database kebijakan perdagangan yang dimiliki di forum multilateral;
5. SUB IKU-5 : Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi;
6. SUB IKU-6 : Presentase posisi/prakarsa/rekomendasi di bidang ekonomi dan sosial budaya yang diterima pada forum regional dan multilateral;
7. SUB IKU-7 : Jumlah promosi Trade Tourism and Investment (TTI);
8. SUB IKU-8 : Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dimuat di berbagai media berbahasa asing;
9. SUB IKU-9 : Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi sosial dan budaya yang diterima diberbagai fora internasional.

Pada tahun 2018, pencapaian Sasaran Strategis “Diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat” adalah sebesar 108,94%. Nilai capaian tersebut diperoleh dari realisasi IKU “Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat” sebesar 102,93%. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Capaian B.2 Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	IKU	Target 2018	Bobot 2018	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Capaian 2018
1.	Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya	94,48	100%	76,91	102,85	115,38%	121,88%
Capaian B.2							121,88%
Batas Toleransi Capaian							120,00%

Analisis IKU-1 : “Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya”

IKU “Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya” diukur melalui penjumlahan realisasi masing-masing sub iku dengan pembobotan yang berbeda. Pada tahun 2018, IKU “Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya” ditargetkan 94,48 dengan realisasi sebesar 115,16 dan capaian 121,88%. Realisasi tahun 2018 meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 12,31%. Realisasi IKU-1 diperoleh dari pembobotan 9 (sembilan) sub IKU dengan penambahan 1 (satu) sub IKU baru dan berkurangnya 1 (satu) sub IKU tahun 2018. Perbandingan realisasi IKU-1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi IKU-1 Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	IKU	Target 2018	Bobot 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi Pembobotan 2018
1	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya (Sub IKU-1)	83	30	115	32	113	41,57%
2.	Persentase Kemajuan Perundingan Perdagangan Bebas dan Investasi (sub IKU-2)**	100%	15	99,18%	-	-	14,88%
3.	Jumlah data <i>economic intelligence</i> negara/wilayah akreditasi yang dimiliki (Sub IKU-3)	127	10	92	121	127	7,24%
4.	Jumlah database kebijakan perdagangan yang dimiliki di forum multilateral (Sub IKU-4)	82	10	100	-	82	12,20%
5.	Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi (Sub IKU-5)	70%	10	71,43%	50%	53,33%	10,20%
6.	Persentase posisi/ prakarsa/ rekomendasi di bidang ekonomi dan sosial budaya yang diterima pada forum regional dan multilateral (Sub IKU-6)	89,75%	10	96,69%	75,70%	95,88%	10,77%
7.	Jumlah promosi <i>Trade Tourism and Investment</i> (TTI) (Sub IKU-7)	90	5	117	44	99	6,5%
8.	Persentase naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dimuat di berbagai media berbahasa asing (Sub IKU-8)	90%	5	100%	-	100%	5,55%
9	Persentase seminar/ workshop/diskusi internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang berhasil diselenggarakan (Sub IKU-8)*	-	-	-	-	100%	-
10.	Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi sosial dan budaya yang diterima diberbagai fora internasional (Sub IKU-9)*	80%	5	100%	-	100%	6,25%
Realisasi						102,85	115,16%
Target						88,94	94,48%
Capaian						115,64%	120,00%

* IKU baru pada tahun 2017

** IKU baru pada tahun 2018

Analisis Sub IKU-1: “Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya”

Wujud keberhasilan diplomasi ekonomi, sosial dan budaya sepanjang tahun 2018 dapat dilihat dari kesepakatan perjanjian kerjasama yang meliputi beberapa bidang, antara lain: energi, pengembangan jalur ekonomi, pendidikan dan pelatihan diplomatik, agama, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perdagangan dan investasi, serta transportasi.

Perwujudan diplomasi ekonomi juga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi trade, tourism, and investment (TTI) Indonesia di negara-negara kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika dan Eropa. Untuk mendukung penyelenggaraan promosi TTI tersebut, Kementerian Luar Negeri mengkoordinir dan bekerjasama dengan Perwakilan RI untuk menyediakan data economic intelligence guna memberikan gambaran terkait peluang pasar yang ada di negara akreditasi. Sejalan dengan hal tersebut, diplomasi juga terus dilaksanakan secara aktif melalui berbagai fora internasional, khususnya di tingkat intra dan antarkawasan guna memperjuangkan kepentingan ekonomi dan pembangunan Indonesia.

Selama tahun 2018 Indonesia telah menyepakati 115 kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari target 83 kesepakatan, dengan capaian sebesar 138,55% (batas toleransi 120%), sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-1 B.2 Tahun 2018

Sub IKU-1 B.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya	115
	Realisasi	115
	Target	83
	Capaian	138,55%
	Batas Toleransi	120%

Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebanyak 79 naskah kesepakatan dan 36 naskah kesepakatan di wilayah Amerika dan Eropa, beberapa naskah kesepakatan tersebut antara lain:

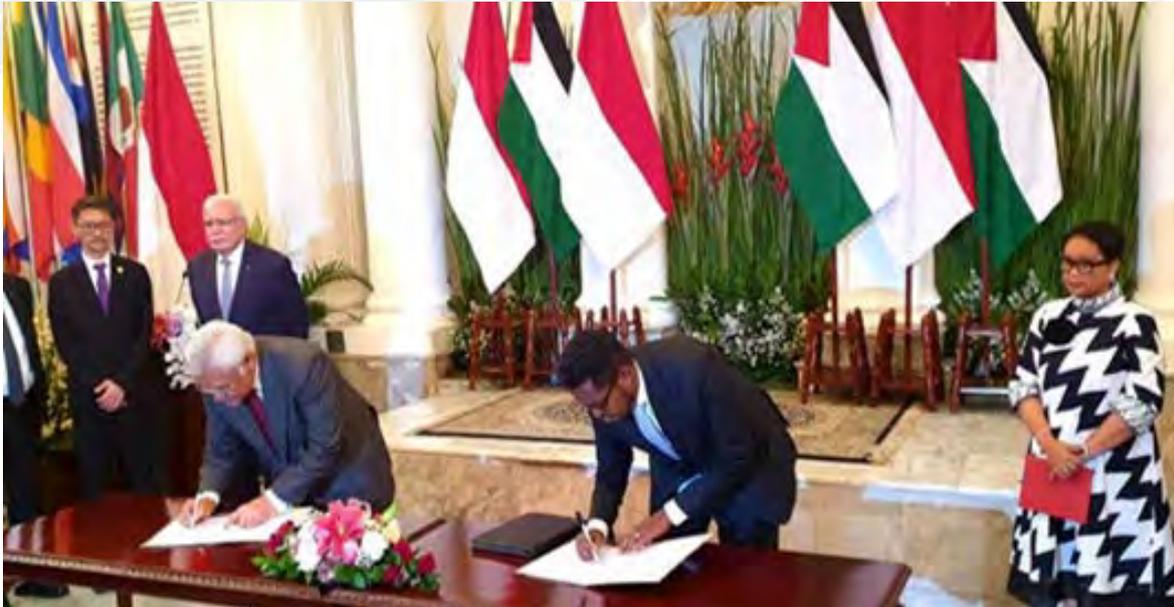
- MoU Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI dengan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi RRT tentang Pembentukan Komite Pengarah Bersama Untuk Pembangunan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional, Beijing, 23 Oktober 2018.
- MoU Kerja Sama Promosi Bersama dalam Kerangka Kerja Visi Poros Maritim Dunia dan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Prakarsa Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 RI - RRT, Beijing, 25 Oktober 2018.
- MoU RI-Maroko dalam bidang kerjasama: (1) Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik, (2) *Religious Affairs Cooperation*, dan (3) Energi, di Jakarta, 26 Oktober 2018.
- Pernyataan Kehendak antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan Republik Filipina mengenai Kerjasama Pendidikan Islam, di Davao City, 3 Januari 2018.
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal, di Bali, 11 Oktober 2018.
- Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama Teknologi Finansial antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Monetary Authority of Singapore (MAS), di Bali, 11 Oktober 2018.
- Program Kerja Sama Kebudayaan untuk Tahun 2019 sampai 2021 tentang Kerja Sama di bidang Seni dan Warisan Budaya antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Masyarakat Republik Singapura, di Bali, 11 Oktober 2018.

- h. Instrumen Perpanjangan pada Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura tentang Kerjasama pada Pengembangan Sumber Daya Manusia Petugas dan Pejabat Pemerintah di bidang Maritim (MoU Pelatihan), di Bali, 11 Oktober 2018.
- i. Memorandum Saling Pengertian antara Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Enterprise Singapore Republik Singapura mengenai Kerja Sama Pengembangan dan Implementasi Industri 4.0, di Bali, 11 Oktober 2018.
- j. Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia dengan Ngee Ann Polytechnic, Republik Singapura tentang Program Pembelajaran Teknologi Keuangan untuk Perguruan Tinggi, di Bali, 11 Oktober 2018.
- k. Nota Kesepahaman mengenai Kunjungan Kapal Pesiar antara PT Pelabuhan III (Persero) dengan Genting Hong Kong Limited, di Bali, 11 Oktober 2018.
- l. *Bogor Ulama Declaration for Peace* antara Ulama Indonesia, Afghanistan dan Pakistan mengenai kerjasama dalam mempromosikan nilai-nilai universal Islam sebagai agama yang damai dan toleran serta dukungan pada proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan, Bogor, 11 Mei 2018.
- m. MoU antara Kementerian Perhubungan RI dengan Kementerian Perkeretaapian India mengenai Kerjasama Teknis Dalam Sektor Perkeretaapian, ditandatangani secara terpisah oleh Menteri Perkeretaapian India, Piyush Goyal di New Delhi, 28 Mei 2018 dan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, di Jakarta 29 Mei 2018.
- n. *Summary Records* Pertemuan Pertama Forum Konsultasi Bilateral RI-Ethiopia mengenai kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi, pertanian dan industri strategis, kekonsuleran, serta people-to-people contact, di Bali, 9 April 2018.
- o. MoU antara RI-India mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang ditandatangani secara terpisah antara Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Ilmu Bumi India, H.E. Dr. Harsh Vardhan di New Delhi, 26 Mei 2018 dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, H.E. Mohamad Nasir di Jakarta, 28 Mei 2018.



- Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya dan Delegasi Ethiopia dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Oceania Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Tsegab Kibebew, pada Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Pertama RI-Ethiopia, di Bali, 9 April 2018

- p. MoU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga/Organisasi Pengawasan Standar Obat Pusat Republik India mengenai Kerjasama Dalam Bidang Regulasi Produk Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi dan Kosmetik, di Jakarta, 28 Mei 2018.
- q. MoU Kesepakatan Kontribusi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), di Jakarta, 16 Oktober 2018. MoU tersebut berisi kesepakatan penyaluran zakat untuk pengungsi Palestina sebesar USD 300.000 (berkisar Rp. 4,5 miliar).



- Penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Ketua BAZNAS Pusat, Duta Besar Zainul Bahar Noor dan Direktur Perencanaan UNRWA, Abdirahman Aynte yang disaksikan oleh Menlu RI, Retno L.P. Marsudi dan Menlu Palestina, Riyad al-Maliki, di Jakarta, 16 Oktober 2018

- r. pengurangan hambatan dagang dan investasi serta peningkatan nilai perdagangan RI-AS dari USD 26 miliar menjadi sebesar USD 50 miliar yang disepakati dalam kunjungan kerja Menteri Perdagangan RI ke Washington DC, AS, pada 23-27 Juli 2018;
- s. pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi *Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)* RI-AS ke-17 telah diselenggarakan pada 14 Mei 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Delegasi RI dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kemendag, dengan keanggotaan lintas kementerian/lembaga (K/L) dari Kemendag, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Perekonomian, Kemenkumham, Kementan, Kemenkominfo, Kemenaker, KKP, BKPM, BI, dan OJK. Pihak AS dipimpin oleh *Acting Assistant US Trade Representative (USTR) for Southeast Asia and the Pacific* dengan keanggotaan wakil dari USTR, *Department of State (DoS)*, *Department of Agriculture (DoA)*, *Department of Labor (DoL)*, dan Kedubes AS di Jakarta;
- t. kesepakatan antara Indonesia dan Kanada (diwakili oleh Pemerintah Provinsi Atlantik) untuk memperdalam peninjauan kerja sama penempatan tenaga kerja sektor kesehatan Indonesia ke Ontario, Kanada (22-24 September 2018);
- u. dalam Rapat *Working Group US Peace Corps (PC)* di Jakarta, 27 Juli 2018, disepakati rencana kegiatan pendukung bagi pengembangan program PC di Indonesia, yaitu kunker WG ke AS atau kunjungan benchmarking ke negara lain di kawasan;
- v. penandatanganan perjanjian Penelitian Bersama antara LEMIGAS dan *Escuela Superior Politecnica del Litoral (ESPOL)* pada 27 Januari 2018 di Guayaquil, Ekuador;

- w. penandatanganan Persetujuan Kerjasama Teknik RI-Brasil (11 Mei 2018);
- x. penandatanganan MoU Kerja Sama Pendidikan Diplomatik RI-Suriname (Desember 2018);
- y. Pada *Working Group on Trade and Investment (WGTI)* di Quito, Ekuador, 19 Desember 2018, RI-Ekuador sepakat untuk melaksanakan pertemuan ke-2 di Indonesia pada 2019 dengan agenda utama pembahasan hasil analisis kemungkinan kerja sama perdagangan Indonesia-Ekuador, serta rencana pembentukan MoU dalam bidang investasi;
- z. pada 26 Maret 2018, RI dan Perancis telah menandatangani Perjanjian di Bidang Mitigasi Bahaya Geologis dan Peningkatan Kapasitas Indonesia dalam Bidang Tersebut sebagai payung kerja sama penelitian untuk vulkanologi dan mitigasi bahaya bencana alam karena letusan gunung api, ditandatangani;
 - aa. Laporan Konsultasi Bilateral RI-Irlandia (31 Mei 2018);
 - bb. Laporan Konsultasi Bilateral RI-Perancis (8 juni 2018);
 - cc. *Collaboration Agreement* antara *UK Met Office* dan BMKG RI (15 Juni 2018);
 - dd. Kesepakatan Kerja Sama Pengembangan Media dan Aktivitas Komunikasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan BBC Media Action (20 Agustus 2018);
 - ee. "*Letter of Arrangement (LoA) on Multi-Stakeholder Forestry Program Phase IV*" (3 September 2018);
 - ff. MoU Kerja Sama Penelitian dan Pendidikan Tinggi RI-Irlandia (17 September 2018);
 - gg. *Agreed Minutes* Pertemuan *Mixed Economic Commission (MEC)* ke-22 RI-Belanda (21 November 2018);
 - hh. MoU Kerjasama Teknis Dalam Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Sistem Ganda (Proyek S4C) RI-Swiss. MoU ditandatangani pada kunjungan Menteri Perindustrian RI ke World Economic Forum, Davos, Swiss, 25 Januari 2018. MoU merupakan perjanjian kedua negara di bidang vokasi. Tindak lanjut dari perjanjian tersebut adalah implementasi proyek "*Skills for Competitiveness Project (S4C)*" untuk mendukung kebutuhan Indonesia. Tujuan dari keseluruhan proyek S4C adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di sektor tertentu pada tingkat pasca-sekunder dan tersier dalam kerja sama yang berkelanjutan dengan sektor swasta;
- ii. MoU Kerjasama Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan RI-Swiss. Penandatanganan MoU dilakukan secara sirkuler pada 18 Juni 2018 (Swiss) dan 28 Juni 2018 (Indonesia). Pemerintah Swiss telah berkomitmen dalam kerja sama pariwisata berkelanjutan di Indonesia sebesar 12 juta CHF untuk periode 2018-2022. Tujuan dari MoU tersebut adalah menyediakan kerangka kerja bagi kerja sama kedua negara untuk membantu mengembangkan destinasi pariwisata berkelanjutan unggulan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di destinasi pariwisata, mengembangkan tenaga kerja pariwisata yang terampil dan mendorong pertumbuhan industri pariwisata Indonesia yang berkelanjutan secara ekonomis, lingkungan, dan sosial;
- jj. *Records of Meeting* Pertemuan Bilateral RI - Austria dalam bidang *FLEGT License*. Pertemuan bilateral kedua negara dalam bidang *FLEGT License* dilaksanakan pada 3 Juli 2018. Pertemuan ini merupakan yang pertama secara bilateral khusus isu *FLEGT* dan diharapkan dapat menjadi model negara-negara lainnya dalam sosialisasi *FLEGT License*. Pertemuan membahas perkembangan implementasi *FLEGT License* di masing-masing negara serta tantangan dan kendala yang dihadapi bersama. Pertemuan menghasilkan beberapa usulan solusi bagi penyelesaian kendala diantaranya meningkatkan komunikasi antar pelaku usaha dan pihak terkait lainnya. Forum juga mengusulkan perlu adanya forum konsultasi *bilateral/joint commission/working group* kedua negara khusus isu *FLEGT*, yang dapat menjadi bagian dari forum konsultasi bilateral yang sudah ada;
- kk. MoU Kerja Sama KADIN Yogyakarta dan KADIN Daerah Moravi, Ceko. Penandatanganan kerja sama dilakukan pada saat kunjungan Presiden Senat Republik Ceko ke Yogyakarta, 18-19 September 2018. Area kerja sama MoU tersebut yaitu tukar informasi dan kerja sama dalam bidang information and communication technology (ICT), *metal processing*, *sains*, inovasi teknologi, industrialisasi, dan nano teknologi. Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk melakukan promosi bersama, mendorong peningkatan realisasi investasi, serta mendorong pertukaran pelajar;

- ll. MoU PT INKA dengan SKODA ELECTRIC, Ceko. Penanda tangan kerja sama dilaksanakan di sela-sela acara pameran industri kereta terbesar di dunia, “Innotrans 2018”, di Jerman, 20 September 2018. Kerja sama ini sebagai upaya “*go international*” dari industri kereta dan perlengkapan kereta Indonesia, sehingga industri kereta Indonesia dapat menjadi pemimpin pengembangan industri kereta di kawasan ASEAN. INKA akan berkolaborasi dengan SKODA, perusahaan asal Republik Ceko, yang handal dalam merancang dan memproduksi sistem propulsi dan kontrol perkeretaapian. Keduanya berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kerja sama ke depannya serta melakukan transfer teknologi pada Traction Motor dan Propulsi;
- mm. MoU bidang Pendidikan RI-Denmark. MoU ditandatangani pada saat kunjungan kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ke Kopenhagen, Denmark, 6 September 2018. Dengan MoU tersebut, kedua negara sepakat untuk mendorong dan memfasilitasi kerja sama dalam bidang pendidikan anak usia dini, formal (pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan khusus), serta pendidikan non-formal;
- nn. Lol Kerja Sama ASDP – PT Melchor – Dok & Perkapalan Kodja Bahri dengan PGZ SW Polandia. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) bersama dengan PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Melchor Tiara Pratama (konsultan kemaritiman) melakukan peninjauan kerja sama dengan representasi Galangan Kapal dan kemaritiman Negara Polandia yaitu PGZ Stocznia Wojenna sp.Z.o.o. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di atas kapal perang Polandia, “Dar Mlodziezy”, pada 2 Oktober 2018. Kerja sama tersebut merupakan upaya untuk mendukung program Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang kemaritiman dan industri galangan kapal. Langkah yang dilakukan adalah memperkuat kegiatan produksi guna menghasilkan produk pembangunan kapal baru dan non kapal serta perbaikan dan pemeliharaan kapal/non kapal yang tepat mutu, tepat waktu dan bersaing di pangsa pasar regional dan internasional;
- oo. *Joint Statement on Partnership Initiative for Institutional Development of Indonesia’s South-South and Triangular Cooperation*. Penandatanganan dilaksanakan pada saat pertemuan *Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) ke-4 RI-Norwegia* pada 28 Oktober 2018 di Bali. Kerja sama tersebut merupakan hasil pertemuan JCBC ke-3 di tahun 2017. Program kerja sama dijadwalkan akan berlangsung hingga tahun 2019, yang terbagi dalam tiga *outputs*, yaitu, *Enhanced Institutional Capacity in Coordinating and Managing Indonesia’s South-South Cooperation; South-South Triangular Initiative Implemented: Peacebuilding through Cross-Border Economic Development between Indonesia and Timor Leste; Enhanced Indonesia’s Role at Global SSTC Forum*.
- pp. *Minutes of Meeting JWG on Agriculture RI-Denmark*. Dokumen ini merupakan *output* dari kegiatan *the 3rd Joint Agriculture Working Group RI-Denmark* pada 24-25 Oktober 2018 di Malang, Jawa Timur. Kegiatan tersebut juga merupakan implementasi kerja sama bidang pertanian sebagaimana tercantum pada MoU Pertanian tahun 2016 yang juga merupakan salah satu program aksi pada dokumen Rencana Aksi 2017-2020 untuk Kemitraan RI-Denmark.
- qq. Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-3 RI-Ukraina dan Forum Bisnis RI-Ukraina, Kyiv, 21 Februari 2018. SKB ini merupakan tindak lanjut dari amanat pertemuan Presiden RI dan Presiden Ukraina di Jakarta pada 5-6 Agustus 2016 sebagai upaya mendorong *direct people to people contact* baik bisnis, perdagangan, investasi, pariwisata dan sosial budaya dan upaya peningkatan nilai ekspor produk Indonesia. Kedua negara berkomitmen untuk kembali meningkatkan perdagangan bilateral di atas 1 milyar USD per tahun;
- rr. Perundingan Putaran Pertama Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA), Jakarta, 8-9 Januari 2018. Terdapat kemajuan dalam pembahasan TOR; identifikasi postur perdagangan dan struktur tarif kedua negara; pengkajian kasus trade remedy yang terjadi antar dua negara; pembahasan *Technical Barrier to Trade dan Sanitary and Phytosanitary Measures*. Dalam perundingan, Indonesia mengusulkan penambahan *Chapter on Economic Cooperation* dalam CEPA oleh Indonesia;
- ss. Perundingan Putaran kedua IT – CEPA, 26-31 Mei 2018. Pertemuan telah masuk ke dalam pembahasan pada beberapa *working group (Trade in Goods, Sanitary and Phytosanitary Measures, Trade Remedies, Rules of Origin, Customs and Trade Facilitation, Cooperation dan Legal Matters)*. Selain itu, kedua delegasi telah saling tukar pandangan terkait isu *Economic Cooperation (EC)* usulan Indonesia, dan e-commerce usulan Turki.

Kedua isu akan dibahas secara internal, dan selanjutnya akan kembali dibahas pada perundingan putaran ketiga di Jakarta pada awal tahun 2019;

- tt. Pertemuan ke-3 *Working Group on Transportation and Infrastructure* Indonesia-Rusia, 24-26 Juli 2018. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemhub) RI dan Deputy Menteri Transportasi Federasi Rusia, Alan V. Lushnikov, terdapat komitmen dari Pihak Rusia untuk tetap melanjutkan sejumlah proyek investasi bidang transportasi di Indonesia;
- uu. *The 2nd Indonesia-Russia Interfaith and Intermedia Dialogue* (IRIID), Moskow 13-15 September 2018. IRIID merupakan komitmen yang disepakati kedua negara melalui pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Rusia di Moskow tanggal 13 Maret 2018. Rangkaian The 2nd IRIID di Moskow tanggal 13-15 September 2018 melibatkan sejumlah tokoh agama, perwakilan pemerintah kedua negara, media, akademisi, kalangan muda, serta masyarakat umum lainnya. The 2nd IRIID menghasilkan program konkrit berupa pemberian 5 (lima) beasiswa pendidikan Islam di UIN oleh RI (Kemenag), tawaran partisipasi pemuda Rusia dalam *Future Faith Leaders Camp* di Indonesia tahun 2019, dan undangan *Civic Chamber* Rusia bagi RI mengikuti *Interfaith Conference and Camp* di Rusia serta kesempatan pemuda RI belajar Kristen Ortodoks di Rusia tahun 2019;
- vv. Pertemuan Konsultasi Bilateral tingkat Direktur RI-Albania di Tirana, Albania, 26 November 2018. Pertemuan ini merupakan pertemuan bilateral antar pejabat tingkat Direktur yang pertama antara RI dan Albania. Pendekatan ke Albania dari sisi ekonomi dan sosial budaya merupakan hal yang baru, mengingat selama ini hubungan bilateral RI-Albania hanya di sisi politik, dan terkendala isu Kosovo;
- ww. Pertemuan Konsultasi Bilateral tingkat Direktur RI-Makedonia di Skopje, Makedonia, 27 November 2018. Pertemuan ini merupakan yang pertama kalinya berlangsung antar pejabat tingkat Direktur antara RI-Makedonia. Kedua pihak menyetujui rencana kerja sebagai tindak lanjut dari pertemuan dimaksud, dan persiapan FKB RI-Makedonia di tahun 2019.
- xx. Pertemuan ke-7 *Defence Industry Cooperation Meeting* RI-Turki, Ankara, 13-16 November 2018. Pertemuan mencatat sejumlah pokok pembahasan perkembangan kerja sama industri pertahanan yang tertuang dalam *list of action items 7th Indonesia-Turkey DICM*. Kedua delegasi juga telah menjajaki bentuk kerja sama kedepan lainnya, termasuk program pelatihan. Kedua pihak telah menjajaki kemungkinan kerja sama pengembangan produk-produk alutsista lainnya, termasuk kemungkinan keterlibatan *Turkish Aerospace Industry* dalam konsorsium MALE class UAV Indonesia.
- yy. SKB ke-12 RI-Rusia bidang Ekonomi, Perdagangan dan kerja sama Teknik, Moskow, 24-26 Oktober 2018. SKB ke-12 RI-Rusia diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta pemahaman yang sama mengenai isu-isu strategis yang selama ini menjadi perhatian kedua belah pihak. Kedua Pihak sepakat untuk membentuk 3 *Working Group* baru dalam kerangka SKB yaitu *WG on Banking and Finance*, *WG on Marine and Fisheries* dan *WG on Agriculture*.
- zz. Pertemuan ke-2 *Working Group on Energy* RI-Rusia, Moskow, 24 Oktober 2018. Terdapat berbagai peluang kerja sama di bidang energi yang dibahas dalam pertemuan WG ini antara lain kerja sama bidang LNG antara Novatek dengan perusahaan di Indonesia, dan kerja sama antara Zarubezhneft dengan Pertamina. Pihak Rusia menawarkan kerja sama baru di bidang energy seperti pemasokan turbin gas ke Indonesia, pengembangan energi panas bumi, hydro dan bidang pelayanan design engineering. Indonesia mengundang perusahaan-perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri batu bara, minyak dan gas bumi di Indonesia. Pihak Indonesia akan menyampaikan informasi mengenai peluang kerja sama yang ada kepada Pihak Rusia.
- aaa. *Working Group on Banking and Finance*, Moskow, 24 Oktober 2018. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk *WG on Banking and Finance* untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara di bidang moneter, sistem pembayaran dan sektor keuangan. Pembentukan *WG on Banking and Finance* merupakan suatu terobosan bagi kedua negara. Dengan adanya WG ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, terkait dengan sistem keuangan dan pembayaran komoditas ekspor impor.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU ini sekaligus perubahan positif yang berhasil diwujudkan, yaitu memperlancar proses ekspor dan pemasaran produk Indonesia ke negara mitra. Prestasi dalam pencapaian IKU ini dilaksanakan melalui inovasi/terobosan yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, antara lain:

- a) menggunakan media digital sebagai media komunikasi non-formal, untuk menjaga intensitas koordinasi dengan semua pihak baik dari dalam Kementerian Luar Negeri, negara mitra, maupun K/L teknis;
- b) memfasilitasi K/L teknis yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (c.q. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara) dalam menyusun konsep awal Perjanjian Pengakuan Sertifikasi Kelaikudaraan RI-Meksiko, demi memperlancar realisasi ekspor pesawat Indonesia ke Mexico;

Walaupun terdapat keberhasilan dalam pencapaian target, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a. Tidak terlaksananya perundingan yang telah direncanakan karena tidak adanya respon dari negara mitra atas usulan Indonesia
- b. Lamanya waktu negosiasi, pembahasan pertukaran draft kesepakatan, serta finalisasi kesepakatan. Proses finalisasi yang memakan waktu relatif lama disebabkan karena kesulitan dalam menyamakan pandangan antara Indonesia dengan para negara mitra, serta proses konsolidasi yang alot dengan para pemangku kepentingan dalam negeri, baik di tingkat nasional maupun daerah yang turut memperlambat disepakatinya posisi Indonesia.
- c. Adanya perubahan prioritas, geopolitik dan pergantian pemerintahan di negara mitra yang menyebabkan batalnya pembentukan kesepakatan.
- d. sulitnya menjalin koordinasi yang berkesinambungan dengan K/L dan para pemangku kepentingan terkait;
- e. hambatan perencanaan dan anggaran akibat perkembangan hubungan bilateral yang dinamis sehingga sulit untuk diperkirakan dalam perencanaan. Kerap kali kunjungan tamu asing diindikasikan/dikonfirmasikan oleh negara mitra beberapa minggu/bulan menjelang kunjungan, atau yang telah direncanakan mendadak dibatalkan atau diubah sehubungan perkembangan terkini yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- f. belum optimalnya sinergi program kegiatan Kementerian Luar Negeri dengan K/L dan *stakeholders* terkait di dalam negeri untuk melakukan promosi peningkatan TTI seperti penetrasi pasar, peningkatan jumlah investasi asing di Indonesia, peningkatan jumlah wisatawan asing ke Indonesia, dan peningkatan volume perdagangan. Dalam upaya penetrasi pasar, promosi investasi, dan promosi pariwisata khususnya di wilayah pasar prospektif masih terdapat perbedaan di kalangan pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas wilayah ataupun negara yang perlu digarap;
- g. belum optimalnya dukungan dari K/L teknis dan para pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari minimnya input dari K/L terkait dan pemangku kepentingan baik dalam pelaksanaan negosiasi, dialog bilateral, maupun hasil kesepakatan di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Masih rendahnya dukungan dari K/L dan para pemangku kepentingan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya monitoring terkait tindak lanjut (implementasi) hasil kesepakatan dan promosi TTI;
- h. tindak lanjut hasil-hasil SKB terdahulu tidak berjalan maksimal karena masih rendahnya awareness K/L yang menjadi *focal point* untuk tindaklanjuti kesepakatan yang dilakukan;
- i. masih tingginya tarif masuk untuk produk Indonesia ke negara-negara di kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia;
- j. kurangnya pengalaman perusahaan dalam mengekspor dan memasarkan produknya ke negara lain, serta masih rendahnya kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi permintaan mitra;
- k. perlunya pembuatan regulasi tertentu untuk mengekspor produk ke negara mitra ...
- l. lambannya pengeluaran izin impor dari negara mitra;
- m. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenakan Generalized System of Preference (GSP) Country Practice Review karena dianggap menghambat akses pasar produk AS di Indonesia. Hingga saat ini, US Trade

Representative belum mengeluarkan hasil revidi. Kurangnya konsistensi antara komitmen Pemri dengan implementasi kebijakan di lapangan melemahkan posisi dan leverage Kementerian Luar Negeri dengan counterpart.

Untuk **mengatasi tantangan** tersebut, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mengupayakan berbagai langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan komunikasi secara intensif melalui Kedutaan Besar RI di Negara Mitra atau Kedutaan Besar Negara Mitra di Jakarta untuk mendapatkan komitmen dilaksanakannya perundingan bilateral serta untuk menyamakan persepsi atas program-program kerja sama yang akan disepakati.
- b. Mengintensifkan pelaksanaan negosiasi bilateral dan pertemuan dengan negara mitra terkait dalam upaya mempercepat proses finalisasi kesepakatan.
- c. Apabila terjadi pembatalan pembentukan kesepakatan, diupayakan untuk mendorong pelaksanaan pembahasan berbagai kesepakatan kerja sama baru dengan negara mitra dalam koridor kepentingan nasional Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Sebagai tindak lanjut dan **proyeksi ke depan**, Kementerian Luar Negeri akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan komunikasi informal kepada negara mitra serta bekerjasama dengan berbagai stakeholders terkait untuk dapat mendorong dilaksanakannya negosiasi dan pertemuan pada tingkat pejabat tinggi kedua negara, sehingga proses finalisasi kesepakatan dapat dilaksanakan lebih cepat.
- b. Mengintensifkan koordinasi dan konsolidasi internal dengan *stakeholders* dalam negeri guna penetapan posisi Pemerintah Republik Indonesia dan secara konsisten berupaya untuk memastikan substansi perjanjian internasional sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan.
- c. meningkatkan dan mempertahankan jalur komunikasi baik formal maupun informal antara Pusat dengan Perwakilan RI untuk menjalin koordinasi yang berkesinambungan;
- d. mengembangkan kerja sama teknik/triangular dengan negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa;
- e. meningkatkan intensitas koordinasi dengan K/L terkait, kalangan bisnis (KADIN, Asosiasi), dan stakeholder dari negara mitra untuk mengantisipasi kegiatan kunjungan tamu-tamu penting dari negara mitra ke Indonesia, dan sebaliknya kunjungan pejabat penting Indonesia ke negara-negara mitra, serta untuk memperlancar pelaksanaan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi dan sosial budaya;
- f. mengedepankan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa melalui penyelenggaraan *interfaith dialogue* dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa;
- g. mendorong pengusaha Indonesia untuk memasuki pasar/melakukan perdagangan langsung ke negara-negara di wilayah pasar non-tradisional di kawasan Amerika dan Eropa; dan
- h. mendorong peningkatan kerja sama dari MoU ke penandatanganan perjanjian perdagangan bilateral/regional dengan negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa, untuk memperlancar akses produk Indonesia ke wilayah tersebut;
- i. melaksanakan *roadmap* yang telah disepakati dengan negara mitra untuk dapat mempercepat proses penyelesaian perjanjian yang masih pending;
- j. melaksanakan bentuk-bentuk kegiatan riil untuk mendorong implementasi hasil-hasil kesepakatan SKB, seperti *business matching/mission* serta mendorong dilaksanakannya *Joint Working Group* yang telah disepakati;
- k. menyelesaikan kesepakatan hukum di bidang perdagangan, investasi (P4M) dan pajak (P3B) untuk mendorong investasi dan perdagangan dengan negara mitra;
- l. menjajaki pembahasan isu tarif dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan, Tengah dan Karibia, guna mereduksi tariff masuk ke negara-negara di kawasan tersebut yang masih dirasa cukup tinggi oleh pengusaha Indonesia;

- m. meningkatkan kerja sama pembangunan dengan negara mitra untuk *capacity building*, khususnya di bidang standarisasi dan peningkatan kualitas, bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga dapat memiliki akses pasar ke negara mitra;
- n. meningkatkan penggunaan konsep *link and match* dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi sehingga terjadi keselarasan antara kebutuhan pemangku kepentingan di dalam negeri dengan permintaan dan kebutuhan pasar di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai promosi TTI dan misi dagang yang secara langsung mempertemukan pengusaha Indonesia dengan mitranya di negara sasaran melalui *business meeting*, maupun mengundang operator pariwisata mancanegara ke Indonesia melalui *familiarization trip*;
- o. berkoordinasi dengan PT DI, KBRI Mexico City, dan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat untuk mempercepat proses sertifikasi pesawat N-219 sehingga dapat memasuki masa komersil pada tahun 2019;
- p. melakukan koordinasi dengan Perwakilan RI di Belgia, Polandia dan Afrika Selatan untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan produsen radioisotop di negara-negara tersebut dengan PT INUKI untuk memasok radioisotop ke ININ melalui skema subkontrak;
- q. melakukan upaya koordinasi dengan KBRI Mexico City untuk mempercepat proses pengeluaran izin impor sampel radioisotop PT. INUKI;
- r. mengawal dan mempercepat implementasi atas kerja sama yang telah disepakati dengan negara mitra tradisional Indonesia, serta menggali peluang-peluang baru yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara-negara tersebut;
- s. menindaklanjuti respon positif Jerman, Swedia, dan Austria untuk melakukan sharing best practice penerapan dual system pendidikan vokasi dengan keterlibatan penuh sektor industri dengan bidang kerja sama yang lain meliputi:
 - dukungan reformasi sistem TVET nasional Indonesia;
 - pengembangan sistem vokasi yang berkaitan dari SMK sampai Politeknik;
 - pengembangan kualitas dan standar kurikulum dengan memperkuat praktek dan keterlibatan pihak swasta.

Analisis Sub IKU-2: “Persentase Kemajuan Perundingan Perdagangan Bebas dan Investasi”

Dalam rangka mengukur kemajuan kinerja perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi Kementerian Luar Negeri telah menyusun mistar perjanjian yakni suatu metode pengukuran target dan capaian atas tahapan kemajuan perundingan perjanjian, mulai dari tahapan penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan naskah dan ratifikasi perjanjian yang disusun di dalam satu mistar. Mistar perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi terdiri dari 245 titik yang diawali oleh titik awal (0) yang menggambarkan tahapan feasibility studies mengenai prospek pembuatan draft perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA/PTA) dan perjanjian investasi (P4M) sampai pada titik akhir (245) yang menggambarkan tahapan monitoring implementasi perjanjian FTA/CEPA/PTA dan P4M yang telah diratifikasi (Mistar Perundingan terlampir). Dengan adanya metode mistar perundingan ini, mekanisme penentuan kinerja perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi dilakukan dengan menentukan antara titik awal dan titik target untuk masing-masing perundingan di awal tahun dan diharapkan dapat menggambarkan kemajuan proses perundingan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Capaian Sub IKU-1 B.2 sebesar 99,18%. Sub IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2018, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi kemajuan perundingan perdagangan bebas dan investasi sebesar 243 yang telah diselesaikan dibagi target setelah dikurangi titik awal sebesar 245, hal ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-2 B.2 Tahun 2018

Sub IKU-1 B.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Kemajuan Perundingan Perdagangan Bebas dan Investasi	Realisasi Kemajuan Perundingan Perdagangan Bebas dan Investasi	243
	Titik Target dikurangi titik awal	245
	Realisasi	99,18%
	Target	100%
	Capaian	99,18%

Pada tahun 2018, terdapat sejumlah perundingan perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian investasi internasional yang dilakukan Pemri dimana Kementerian Luar Negeri cq Ditjen HPI terlibat aktif didalamnya sebagai ketua perundingan atau ketua *sub-working group* dalam perundingan. Perundingan tersebut adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA), Indonesia – Australia CEPA (IACEPA), Indonesia – EFTA CEPA (IECEPA), Indonesia – Chile CEPA (ICCEPA), P4M RI – Singapura, P4M RI – Swiss, Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia – Mozambik, PTA RI – Tunisia, PTA RI – Maroko, Protokol TF – EDSM, dan Indonesia – *United States Trade and Investment Framework Arrangement*.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) (Realisasi Kemajuan: 65)

Berdasarkan mandat para Menteri terkait se-ASEAN, perundingan RCEP seharusnya telah mencapai 'substantial conclusion' pada tahun 2018. Untuk mencapai target tersebut, perundingan RCEP telah dilaksanakan dalam 4 (empat) putaran bergantian di Indonesia, Singapura, Thailand dan New Zealand, ditambah dengan beberapa pertemuan intersesi untuk masing-masing *Working Group*. Secara umum, pertemuan RCEP berhasil mencapai kemajuan signifikan namun belum dapat mencapai target penyelesaian sesuai dengan target yang ditetapkan oleh para Menteri ASEAN. Beberapa isu yang telah mencapai kemajuan signifikan antara lain terkait dispute settlement dalam *Working Group on Legal and Institutional Issues*, kesepakatan atas beberapa modalitas perundingan investasi seperti penggunaan asset-based definition of investment dan ruang lingkup pengaturan investor *state dispute settlement*.

Tidak tercapainya mandat perundingan tersebut mengingat masih terlalu besarnya perbedaan posisi antara 16 negara RCEP. Mandat negosiasi RCEP telah beberapa kali diperpanjang namun negara-negara masih berupaya mempertahankan posisinya sehingga sulit dicapainya kesepakatan atas teks perundingan dan akses pasar. Negara-negara peserta perjanjian TPP (Australia dan New Zealand) umumnya menginginkan komitmen liberalisasi yang tinggi dan disiplin teks yang sesuai dengan TPP. Sebaliknya, posisi negara-negara ASEAN juga terpecah seperti Indonesia dan Thailand yang menginginkan komitmen liberalisasi dan disiplin teks yang normal sesuai dengan ASEAN+1 FTAs berhadapan dengan negara ASEAN anggota TPP (Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam). Selain itu, terdapat juga negara yang mengajukan posisi individual seperti India yang secara umum di bawah posisi ASEAN, dan Vietnam yang mempertahankan pengecualian terhadap Most Favoured Nations untuk perundingan investasi. Pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting di Singapura bulan November 2018, para Menteri ASEAN telah menyetujui untuk memperpanjang mandat perundingan RCEP untuk 1 tahun pada periode 2019.



■ kegiatan persiapan perundingan rcep, bandung 16 september 2018

Indonesia – European Union CEPA (IEUCEPA) (Realisasi Kemajuan: 65)

Perundingan IEUCEPA terakhir diadakan pada bulan Oktober 2018 dan menghasilkan beberapa kemajuan dalam isu akses pasar perdagangan barang pasca dilakukan pertukaran initial offer oleh kedua pihak. Perundingan masih terus membahas beberapa isu krusial terkait *export duties*, *repaired goods*, *remanufactured goods* dan *origin marking*. Terkait perdagangan jasa dan investasi, para pihak juga telah melakukan pertukaran *Schedule of Commitment* masing-masing. Perundingan masih terus membahas isu krusial terkait *Performance Requirement* dan usulan EU terkait pembentukan *Investment Court System (ICS)*. Isu kelapa sawit dibahas pada *WG Trade and Sustainable Development (TSD)*. Secara umum EU masih berkeberatan terhadap posisi Indonesia agar chapter TSD juga mengatur sektor spesifik, yaitu kelapa sawit, perikanan dan kehutanan. Isu kelapa sawit merupakan salah satu kepentingan nasional yang wajib dipertahankan Delri pada WG TSD.

Yang menjadi faktor penghambat/kendala dalam perundingan IEUCEPA pada tahun 2018, yaitu para pihak masih terus menegosiasikan usulan EU mengenai ICS, meskipun Indonesia belum menyepakati pembentukan ICS sehingga perundingan difokuskan pada pembahasan rules terkait dispute settlement. *Rules* seperti *governing law*, prosedur arbitrase, tetap akan dipakai baik dalam ICS ataupun ISDS. Isu ICS juga masih dibahas secara internal di EU. Pemerintah Belgia sedang mengajukan pertanyaan kepada *European Court of Justice* mengenai kewenangan ICS melakukan interpretasi atas hukum EU. Isu yurisdiksi tribunal juga sedang dalam perdebatan khususnya dalam kasus *Achmea v. Slovak Republic*. Keputusan Indonesia untuk menerima atau menolak ICS kiranya perlu menunggu selesainya perkembangan-perkembangan tersebut.

Indonesia – Australia CEPA (Realisasi Kemajuan: 95)

Perundingan IACEPA secara formal telah difinalisasi. Perundingan terakhir dilaksanakan pada bulan Juli 2018 dan pasca pertemuan tersebut, para pihak telah beberapa kali bertemu untuk melakukan legal scrubbing. Perjanjian IACEPA rencananya akan ditandatangani pada pertengahan bulan November 2018 namun tertunda akibat adanya keputusan pemerintah Australia untuk memindahkan Kedutaan Besar dari Tel-Aviv ke Yerusalem.

Secara substansi perjanjian masih menyisakan pending issues terkait dengan custom procedures, TBT, services (SOC), *financial services side letter*, MNP, *economic cooperation*, *dispute settlement*, dan *final provisions*. Selain itu, pembahasan di pihak Indonesia terkait dengan substansi *side letter on health services* yang harus dikomunikasikan dengan K/L terkait.

Indonesia – EFTA CEPA (Realisasi Kemajuan: 100)

Perundingan Indonesia – EFTA CEPA (IECEPA) telah berhasil difinalisasi pada bulan Oktober 2018. Perjanjian IECEPA juga telah ditandatangani pada bulan Desember 2018 oleh Menteri Perdagangan kedua negara. Perjanjian IECEPA merupakan perjanjian perdagangan internasional bilateral Indonesia yang kedua setelah Indonesia-Japan CEPA. Perjanjian menyepakati elemen kerja sama yang komprehensif mencakup perdagangan barang dan jasa, perlindungan investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, kerja sama pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas. Indonesia telah merundingkan IECEPA selama lebih dari 10 tahun dan diharapkan dapat menjadi pendorong finalisasi dan inisiasi perundingan CEPA lainnya.

Perjanjian IECEPA ini masih perlu diratifikasi oleh UU sesuai dengan ketentuan UU Perdagangan. Pemri juga perlu menyiapkan peraturan teknis terkait untuk implementasi perjanjian tersebut terutama terkait customs.

P4M Indonesia – Singapura (Realisasi Kemajuan: 100)

Perundingan P4M Indonesia – Singapura telah selesai ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada bulan Oktober 2018. Perundingan yang dimulai pada bulan Februari 2018 tersebut diselesaikan dalam 5 putaran ditambah 2 putaran intersesi serta 1 pertemuan video conference. P4M ini merupakan perjanjian investasi internasional pertama yang ditandatangani Pemri pasca keputusan review dan discontinue P4M. Adapun konten perjanjian banyak mengakomodasi posisi Pemri yang terdapat dalam model P4M yang telah dibuat Kementerian Luar Negeri, antara lain dengan adanya pasal *Measures against Corruption, Right to Regulate dan Corporate Social Responsibility*. Selain itu, perjanjian juga mencakup banyak *safeguards* penting bagi Indonesia seperti mekanisme penyelesaian sengketa ISDS yang lebih fair dan ketat, ketentuan general and security exceptions dan pengecualian *balance of payments* dan *prudential measures*.

Terkait hal ini, Pemri perlu segera meratifikasi perjanjian tersebut agar dapat diberlakukan segera. Proses ratifikasi mungkin akan terdampak oleh putusan MK yang berimplikasi bahwa P4M RI - Singapura perlu diratifikasi oleh Undang Undang.

Indonesia – EFTA CEPA (Realisasi Kemajuan: 100)

Perundingan Indonesia – EFTA CEPA (IECEPA) telah berhasil difinalisasi pada bulan Oktober 2018. Perjanjian IECEPA juga telah ditandatangani pada bulan Desember 2018 oleh Menteri Perdagangan kedua negara. Perjanjian



■ Perundingan P4M RI- Singapura, Surabaya 14-15 Agustus 2018

IECEPA merupakan perjanjian perdagangan internasional bilateral Indonesia yang kedua setelah Indonesia – Japan CEPA. Perjanjian menyepakati elemen kerja sama yang komprehensif mencakup perdagangan barang dan jasa, perlindungan investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, kerja sama pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas. Indonesia telah merundingkan IECEPA selama lebih dari 10 tahun dan diharapkan dapat menjadi pendorong finalisasi dan inisiasi perundingan CEPA lainnya.

Perjanjian IECEPA ini masih perlu diratifikasi oleh UU sesuai dengan ketentuan UU Perdagangan. Pemri juga perlu menyiapkan peraturan teknis terkait untuk implementasi perjanjian tersebut terutama terkait customs.

P4M Indonesia – Singapura (Realisasi Kemajuan: 100)

Perundingan P4M Indonesia-Singapura telah selesai ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada bulan Oktober 2018. Perundingan yang dimulai pada bulan Februari 2018 tersebut diselesaikan dalam 5 putaran ditambah 2 putaran intersesi serta 1 pertemuan *video conference*. P4M ini merupakan perjanjian investasi internasional pertama yang ditandatangani Pemri pasca keputusan *review dan discontinue* P4M. Adapun konten perjanjian banyak mengakomodasi posisi Pemri yang terdapat dalam model P4M yang telah dibuat Kemlu, antara lain dengan adanya pasal *Measures against Corruption, Right to Regulate dan Corporate Social Responsibility*. Selain itu, perjanjian juga mencakup banyak *safeguards* penting bagi Indonesia seperti mekanisme penyelesaian sengketa ISDS yang lebih fair dan ketat, ketentuan *general and security exceptions* dan pengecualian *balance of payments dan prudential measures*.

Terkait hal ini, Pemri perlu segera meratifikasi perjanjian tersebut agar dapat diberlakukan segera. Proses ratifikasi mungkin akan terdampak oleh putusan MK yang berimplikasi bahwa P4M RI - Singapura perlu diratifikasi oleh Undang Undang.



■ Perundingan P4M RI – Singapura,
Yogyakarta, 25 Feb – 1 Maret 2018

P4M Indonesia – Swiss (Realisasi Kemajuan: 100)

Perundingan Pertama P4M Indonesia – Swiss telah dilaksanakan di Jakarta pada bulan Juli 2018 dan di Bern pada bulan Desember 2018. Kedua negara telah mengusulkan dan membahas draft masing-masing guna melihat sejauh mana perbedaan dan persamaan posisi kedua draft tersebut. Berdasarkan pertemuan terakhir, kedua pihak melihat bahwa perbedaan para pihak tidak terlalu jauh dan dapat dibahas untuk dicarikan solusi jalan tengah. Para pihak juga memiliki banyak persamaan posisi atas banyak pasal antara lain ketentuan Preamble, State to State Dispute Settlement (SSDS), *National Treatment*, *Corporate Social Responsibility*, *Transfers*, *MFN*, *Expropriation*, *Balance of Payment*, *Promotion and Facilitation of Investment*.

Para pihak juga membahas beberapa pasal yang meskipun berbeda namun memiliki kesamaan posisi dan dapat dicarikan jalan keluar, antara lain pasal terkait *Definisi Investor*, *Definisi Investment*, *Treatment of Investment*, *Compensation for Losses/Protection from Strife*, *Subrogation*, *Right to regulate*, *Measures Against Corruption*, *Compliance with Domestic Laws and Regulations*, *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*, *Denial of Benefits*, *Most Favourable Conditions* dan *Exclusion of Claims*. Para pihak masih memiliki perbedaan posisi yang cukup signifikan terkait pengaturan pengecualian perlindungan portfolio investment, pengakuan permanent resident, pengecualian perpajakan (*total carve out*), pengaturan *umbrella clause (contract based ISDS)*, pasal *denial of benefits*, serta pasal *General and Security Exceptions*. Pihak Swiss akan menyampaikan tanggapan atas *counterdraft* Indonesia dan usulan alternatif posisi. Berdasarkan usulan dan tanggapan tersebut, Pemri akan menyiapkan *consolidated draft* untuk dibahas pada pertemuan ketiga yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia pada sekitar bulan Maret 2019.



■ Perundingan P4M RI – Swiss,
Tangerang 4-5 Juli 2018

Indonesia – Chile CEPA (ICCEPA)

Perjanjian ICCEPA telah ditandatangani di Indonesia di Santiago, Chile tanggal 17 November 2017. Sepanjang tahun 2018, perjanjian tersebut melalui proses ratifikasi. Perjanjian telah menerima persetujuan DPR untuk disahkan dengan Perpres. Proses pengesahan oleh Presiden saat ini hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden atas Perpres Pengesahan. Direncanakan pada tahun 2019 akan dilaksanakan proses pemberlakuan perjanjian.

PTA Indonesia – Mozambik (Realisasi Kemajuan: 115)

Sampai saat ini telah tercapai 50 % target capaian perundingan. Adapun capaian terdiri atas: (i) Perundingan dan legal scrubbing main text selesai pada negosiasi ke-2; (ii) Teks Annex ROO telah selesai secara intersession pasca negosiasi ke-2. Adapun pending issue terdiri atas: (i) legal scrubbing Annex ROO; dan (ii) Request and offer Mozambik yang sampai sekarang belum disampaikan. PTA RI-Mozambik direncanakan ditandatangani pada pertengahan 2019 di Jakarta dan diharapkan menyepakati 101 PT request RI dan 150 PT request Mozambik.

PTA Indonesia – Tunisia (Realisasi Kemajuan: 115)

Sampai tahun 2018 telah diselenggarakan 2 (dua) kali perundingan. Draft main text dan draft annex ROO telah disepakati secara prinsip dengan pending beberapa isu minor. Pada perundingan putaran ke-3 akan dilakukan pembahasan antara lain: (i) Legal scrubbing main text dan Annex ROO; dan (ii) Finalisasi perundingan market access (i.e. request Tunisia dan posisi Tunisia mengenai modalitas). PTA RI-Tunisia direncanakan ditandatangani pada tahun 2019 dan diharapkan dapat menyepakati seluruh requests kedua belah pihak.

PTA Indonesia – Maroko (Realisasi Kemajuan: 23)

Indonesia dan Maroko telah melakukan pertemuan untuk *me-launching* dimulainya negosiasi PTA Indonesia – Maroko. Langkah selanjutnya adalah pembahasan tentang substansi yang akan diatur dalam teks dan negosiasi teks.

Task Force on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (Realisasi Kemajuan: 144)

Sepanjang tahun telah diselenggarakan 2 (dua) kali perundingan. Pertemuan terakhir diselenggarakan dalam putaran ke-27 *Task Force – Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (TF – EDSM) di Jakarta, Indonesia pada tanggal 11-14 Desember 2018. Perundingan masih menyisakan 3 (tiga) pending issues utama yaitu: (i) *Third Party Rights*; dan (ii) *Special and Differential Treatment untuk Least Developed Countries (S&D)*; dan (iii) Anggaran. Salah satu capaian penting dalam perundingan yang dimotori Indonesia adalah dihapuskannya elemen *Non-Violation Complaints (VCs)* dan *Situation Complaints (SCs)* dalam teks sebagaimana diusulkan oleh Singapura dan Vietnam.

RI-US Trade and Investment Framework Arrangement (Realisasi Kemajuan: 120)

Pada tahun 2018 telah diselenggarakan serangkaian pertemuan yang membahas isu kekayaan intelektual sebagai salah satu syarat agar Amerika Serikat tidak menghapuskan fasilitas GSP Indonesia.

Pada tanggal 14 Mei 2018 telah diselenggarakan pertemuan ke-17 *Senior Official Meeting* di Jakarta. *Working Group on Intellectual Property* membahas mengenai rancangan *Work Plan on Intellectual Property between the Government of US and the Government of the Republic of Indonesia* sebagaimana diusulkan oleh Amerika Serikat.

Pertemuan menyepakati sebuah *living document* yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengenai berbagai isu yang menjadi perhatian bersama kedua negara di bidang kekayaan intelektual. Atas saran *co-lead* Kementerian Luar Negeri, pertemuan telah berhasil melakukan revisi atas teks *Work Plan* yang terdiri atas: (i) Menghilangkan komitmen untuk menghapus *working patent* dalam Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; (ii) Menolak argumen Amerika Serikat untuk menghapus sistem indikasi geografis, namun sepakat untuk meningkatkan transparansi sistem pendaftaran indikasi geografis; dan (iii) Sepakat untuk melanjutkan komunikasi pembahasan yang sifatnya *non-legally binding text based negotiations*.

Faktor Pendukung, Kendala dan Penyelesaiannya

Faktor-faktor pendorong pencapaian IKU- 3 yaitu adanya kepentingan dan komitmen bersama antara RI dan negara mitra untuk membuat perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral di bidang ekonomi yang dapat menguntungkan masing-masing negara. Selain itu didalam negeri sendiri mulai tumbuh pemahaman perlunya suatu rujukan yang baku yang perlu dimiliki oleh Pemri agar proses perundingan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kepentingan Pemri.

Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala utama yaitu masih belum adanya kesepahaman lembaga/instansi terkait mengenai persoalan isu-isu yang berhubungan dengan perundingan perjanjian di bidang ekonomi.

Beberapa kendala lainnya yang dihadapi dalam pencapaian perjanjian internasional di bidang ekonomi yaitu antara lain adanya perbedaan kondisi dan modalitas antara Indonesia dengan negara mitra. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya strategi dari masing-masing pihak dalam rangka memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Selain itu, masih belum adanya kesepahaman lembaga/instansi terkait mengenai isu-isu yang berhubungan dengan perundingan perjanjian di bidang ekonomi.

Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan langkah, antara lain, penguatan dan intensifikasi koordinasi, konsultasi dan konsinyering yang lebih terstruktur dan berkesinambungan untuk penyelenggaraan dan persiapan perundingan, serta diperlukan pendekatan dan koordinasi intensif dengan negara mitra untuk meyakinkan adanya keuntungan bersama dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Analisis Sub IKU-3: “Jumlah Data Economic Intelligence Negara/Wilayah Akreditasi yang Dimiliki”

Salah satu komponen kegiatan yang turut menjadi perhitungan utama dalam pengukuran IKU “Indeks diplomasi ekonomi, sosial dan budaya” adalah penyusunan data *economic intelligence* oleh Perwakilan RI untuk mencermati potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing negara yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Data *economic intelligence* adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara/wilayah akreditasi. Data *economic intelligence* disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun dari masing-masing negara/wilayah kerja dan rangkapannya.

Informasi yang disajikan dalam data *economic intelligence* Perwakilan RI tersebut nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta sebagai upaya untuk mendorong para pelaku bisnis Indonesia melakukan ekspansi pasar ke negara/wilayah akreditasi. Selain itu, data *economic intelligence* juga dapat digunakan sebagai rujukan informasi terkait potensi ekonomi maupun bisnis serta aturan kebijakan yang diterapkan di negara/wilayah akreditasi.

Pada tahun 2018, terdapat 92 Perwakilan RI yang menyusun data *economic intelligence* negara/wilayah akreditasi, dari target yang ditetapkan sebesar 127 Perwakilan RI. Dengan demikian capaian kinerja untuk sub IKU tersebut adalah sebesar 72,44%, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Sub IKU-2 B.2 Tahun 2017

Sub IKU-2 B.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah data economic intelligence negara/wilayah akreditasi yang dimiliki	Jumlah data economic intelligence negara/wilayah akreditasi yang dimiliki	92
	Realisasi	92
	Target	127
	Capaian	72,44%

Pada tahun 2018 jumlah Perwakilan RI yang telah menyusun data economic intelligence di kawasan Asia Pasifik dan Afrika adalah 38 dan kawasan Amerika dan Eropa adalah 54, sehingga tercatat total sebanyak 92 dari target 127 Perwakilan RI. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah Perwakilan RI yang mengirimkan data economic intelligence pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, yakni dari 127 menjadi 92. Sehingga terjadi penurunan capaian pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 yakni sebesar 40,95% dari 113,39% menjadi 72,44%. Penurunan jumlah perwakilan yang menyampaikan data economic intelligence di kawasan Asia Pasifik dan Afrika disebabkan adanya beberapa data economic intelligence belum akurat, sehingga kurang optimal untuk digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi stakeholders dalam mengetahui peluang ekonomi yang ada di negara akreditasi. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, antara lain: keterbatasan data konkret dan resmi tentang negara akreditasi, kekurangan anggaran untuk melakukan market intelligence yang optimal di negara akreditasi, serta kurangnya pelatihan economic intelligence bagi aparaturnya pelaksana di lapangan.

Dalam **mengatasi tantangan** tersebut, Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Perwakilan RI di luar negeri untuk menghasilkan data economic intelligence yang lebih akurat. Salah satu upaya awal yang dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan langganan penyedia data berbayar untuk mendapatkan raw data negara akreditasi yang lebih akurat.

Selain data *economic intelligence* yang diperoleh dari berita Perwakilan RI yang disampaikan kepada Pusat, Kementerian Luar Negeri turut berkontribusi dalam penerbitan sejumlah buku dan majalah untuk mendukung diplomasi ekonomi ke pasar prospektif, serta memperkenalkan kepada para pelaku usaha di dalam negeri agar lebih *familiar* dengan kawasan pasar non-tradisional di wilayah Amerika dan Eropa. Data economic intelligence dan buku yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat menjadi pegangan, sekaligus panduan dalam melaksanakan diplomasi ekonomi sesuai dengan proyeksi potensi negara mitra.

Sebagai **langkah solutif ke depan**, perlu dipertimbangkan penambahan anggaran khusus Perwakilan RI untuk melakukan kegiatan market intelligence di negara akreditasi, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih optimal dan data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Disamping itu, perlu dipertimbangkan peningkatan kemampuan aparaturnya pelaksana dalam melakukan *economic intelligence*, yang dalam hal ini adalah diplomat yang bertugas di Perwakilan RI melalui program pelatihan khusus. Dalam jangka panjang, program pelatihan dimaksud perlu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan diplomat pada berbagai jenjang/tingkatan.

Disamping itu, perlu dipertimbangkan pula pelaksanaan upaya konkrit dalam menindaklanjuti data *economic intelligence*, sehingga memberikan *impact* yang positif bagi para stakeholders di dalam negeri dalam rangka ekspansi pasar di negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Analisis Sub IKU-4: “Jumlah Database Kebijakan Perdagangan yang Dimiliki di Forum Multilateral”

Sub IKU “Jumlah *database* kebijakan perdagangan yang dimiliki di forum multilateral” merupakan sub IKU di tahun 2018. Sepanjang tahun 2018, realisasi sub IKU sebesar 86 dari target 82, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-4 B.2 Tahun 2018

Sub IKU-2 B.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah database kebijakan perdagangan yang dimiliki di forum multilateral	Jumlah database kebijakan perdagangan yang dimiliki di forum multilateral	100
	Realisasi	100
	Target	82
	Capaian	121,95%
	Batas Toleransi	120%

Capaian sub IKU “jumlah database kebijakan perdagangan yang dimiliki di forum multilateral di tahun 2018 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 18 database dari 82 database pada tahun 2017.

Dalam upaya mendukung pencapaian kemandirian ekonomi nasional, Menteri Luar Negeri telah menekankan pentingnya diplomasi ekonomi diarahkan untuk memberdayakan pasar domestik, peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri, mendorong investasi asing di Indonesia dan membangun kapasitas sumber daya nasional. Dalam konteks multilateral, diplomasi Indonesia dilaksanakan dengan mengoptimalkan keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan untuk memajukan kepentingan pembangunan nasional khususnya terkait pembukaan akses pasar produk nasional, pengamanan pasar dalam negeri dari praktek perdagangan yang tidak fair dan pembangunan kualitas SDM.

Dalam mendorong peningkatan akses pasar dan pengamanan pasar dalam negeri Indonesia, diperlukan informasi-informasi yang komprehensif terkait kondisi pasar dan kebijakan perdagangan di masing-masing negara mitra. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam menyusun strategi yang tepat dalam melakukan diplomasi dan perundingan perdagangan termasuk dalam negosiasi penyelesaian berbagai sengketa dagang yang melibatkan Indonesia. Pemahaman ini juga diharapkan dapat membantu eksportir nasional dalam melakukan promosi dan penetrasi pasar di negara lain.

Dalam upaya membantu meningkatkan efektifitas diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2018 disusunlah *database* kebijakan perdagangan yang dimiliki di forum multilateral sejumlah 100 dari target sejumlah 82, sehingga capaian sub IKU ke-3 ini sebesar 121.95%. *Database* kebijakan perdagangan yang disusun memuat kebijakan tarif, sistem dan prosedur perizinan impor, kebijakan pembatasan atau pelarangan impor, kebijakan standar kesehatan (*Sanitary and Phytosanitary*), ketentuan mengenai standar teknis (*technical regulation*), standar lingkungan, inspeksi pra pengapalan (*pre-shipment inspection*), kebijakan pintu masuk (*port of entry*) dan persyaratan tingkat kandungan lokal (*local content requirement*), kebijakan subsidi, dumping dan pengamanan perdagangan (*safeguard*) serta pemberian hak-hak khusus kepada perusahaan negara. Berbagai kebijakan tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap akses pasar produk Indonesia. Informasi pada database ini berasal dari masukan Perwakilan Indonesia di luar negeri yang dilengkapi dengan informasi dan dari dokumen *Trade Policy Review* masing-masing negara yang dikeluarkan oleh Sekretariat WTO serta sumber-sumber resmi lainnya.

Analisis Sub IKU-5: “Persentase Bantuan Kerja Sama Teknik yang Memberikan Peluang Ekonomi”

Pemberian bantuan teknis dalam bentuk program kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan dan lokakarya) dapat dimanfaatkan sebagai alat diplomasi (*tool of diplomacy*) ekonomi Indonesia ke negara-negara berkembang. Pemanfaatan bantuan teknis tersebut salah satunya dilakukan melalui pengenalan/promosi produk-produk dalam negeri di masing-masing kegiatan. Selain itu, bantuan teknis secara tidak langsung ditujukan untuk mendorong peningkatan kerja sama ekonomi (investasi dan perdagangan) melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemangku kepentingan terkait di negara target penerima bantuan agar mampu melaksanakan hubungan ekonomi antarnegara dengan pemangku kepentingan terkait di Indonesia.

Sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia ke negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Tengah, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) program bantuan teknis (dari total 14 (empat-belas) program) yang memiliki peluang untuk mendorong terciptanya hubungan ekonomi.

Tabel Capaian Sub IKU-5 B.2 Tahun 2018

Sub IKU-2 B.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi	Jumlah kegiatan bantuan KST yang memberikan peluang ekonomi	10
	Jumlah seluruh kegiatan bantuan KST	14
	Realisasi	71,43%
	Target	70%
	Capaian	102,04%

Bantuan teknis untuk Palestina dipilih secara khusus di bidang microfinance dan pengembangan UKM dalam rangka meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan terkait guna membantu mendorong terciptanya kerja sama ekonomi (investasi dan perdagangan) RI-Palestina. Hal yang sama juga diterapkan pada bantuan teknis untuk negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang mengikuti pelatihan pengembangan UKM di Indonesia. Selain untuk meningkatkan kapasitas peserta, kegiatan pelatihan juga dimanfaatkan untuk menciptakan people-to-people contact dengan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri yang mengarah kepada kerja sama ekonomi. Pengenalan produk-produk dalam negeri kepada peserta program bantuan teknis yang berlatar belakang sebagai pegawai pemerintah dan pelaku bisnis diharapkan dapat membawa dampak riil berupa kegiatan ekspor-impor. Dalam beberapa kesempatan, para peserta dikenalkan dengan produk-produk Indonesia yang memiliki teknologi yang cocok, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan negara berkembang, antara lain: pengenalan produk pakan/vitamin/suplemen ikan air tawar dan laut kepada peserta program pelatihan perikanan; mesin pengolah hasil kebun dan peternakan kepada peserta program pelatihan pertanian; mesin pembuat kerajinan batok kelapa kepada peserta program pelatihan kerajinan; alat-alat kesehatan dan obat-obatan kepada peserta program pelatihan kesehatan dan pertolongan medis; produk industri strategis (senjata), jasa Professional Conference Organizer (PCO) dan ground handling kepada peserta program pelatihan pengamanan dan manajemen konferensi internasional.

Kendala dalam rangka mencapai target program bantuan teknis yang memiliki peluang ekonomi berasal dari kesesuaian antara prioritas negara penerima dan kapasitas yg dimiliki Indonesia khususnya yang dapat mendorong ekonomi dengan dukungan/keterlibatan BUMN atau pihak swasta di Indonesia. Kondisi ini dapat ditemukan pada sifat bidang kerja sama teknis yang dilaksanakan atau kondisi negara penerima bantuan yang tidak memungkinkan untuk menciptakan peluang ekonomi. Sebagai contoh, pelatihan peluang ekonomi tidak mudah diciptakan melalui bantuan teknis untuk Afghanistan mengingat kondisi dalam negerinya yang belum kondusif.

Koordinasi yang intensif pada saat perencanaan dengan unit bilateral/regional terkait di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang mengetahui kondisi/kebutuhan negara target penerima bantuan menjadi salah satu langkah upaya untuk mengatasi kendala perencanaan program bantuan teknis yang memiliki peluang ekonomi. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga berkoodinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pihak swasta yang memiliki informasi produk Indonesia yang memiliki orientasi ekspor.

Analisis Sub IKU-6: “Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang Diterima pada Forum Regional dan Multilateral”

Dalam melaksanakan diplomasi ekonomi, sosial dan budaya, Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum dalam lingkup regional dan multilateral yang dihadiri oleh negara-negara guna membahas isu-isu ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum-forum tersebut, telah disampaikan prakarsa dan rekomendasi Indonesia terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan. Dalam proses tersebut, selain menyampaikannya dalam forum, Indonesia juga perlu mengadakan pendekatan atau lobby kepada pihak-pihak terkait sehingga tujuan dapat tercapai. Prakarsa/rekomendasi Indonesia yang telah tercatat, dicantumkan dan disepakati dalam dokumen sidang/pertemuan merupakan salah satu bentuk capaian diplomasi ekonomi, sosial dan budaya Indonesia.

Agenda diplomasi Indonesia di tingkat global untuk mendukung kinerja perekonomian nasional diantaranya:

1. Mendorong komitmen dunia terhadap pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Mendukung pertumbuhan melalui inovasi dan reformasi keuangan, peningkatan kerja sama keuangan dan perpajakan;
3. Mendukung penguatan perdagangan dunia melalui peniadaan proteksionisme dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
4. Menyelesaikan isu-isu global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Sepanjang tahun 2017, realisasi Sub IKU “Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada forum regional dan multilateral” sebesar 96,69% dari target 89,75% yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-6 B.2 Tahun 2018

Sub IKU-6 B.2.1.6	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada forum regional dan multilateral	Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima	146
	Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang disampaikan	151
	Realisasi	96,69%
	Target	89,75%
	Capaian	107,73%

Pada tahun 2018, terdapat sejumlah pertemuan-pertemuan puncak di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dihadiri oleh Indonesia. Pertemuan tersebut antara lain KTT G20 pada 30 November – 1 Desember 2018 di Buenos Aires, Argentina G20. Pada pertemuan tersebut, Wakil Presiden RI telah menjadi *Lead Speaker* pada Sesi terkait *Sustainable Development dan Climate Change*. Wakil Presiden RI juga telah menyampaikan intervensi pada sesi lainnya terkait “*Global Economy, Future of Work, Women Empowerment*” dan “*Infrastructure, Energy Transition, Sustainable Food Future*”. Sejumlah kepentingan Indonesia juga berhasil dimasukkan ke dalam *G20 Leaders’ Declaration*, seperti *biofuel, sustainable development* dan *ekonomi digital*.



■ Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, 2018

Beberapa highlight capaian diplomasi bidang sosial dan budaya pada berbagai forum multilateral sepanjang tahun 2018 antara lain sebagai berikut.

1. Pada pertemuan ITU Plenipotentiary Conference 2018 di Dubai, 4 (empat) resolusi usulan Indonesia berhasil disetujui oleh negara-negara International Telecommunication Union (ITU) yaitu menjembatani kesenjangan digital (Resolusi 139), masyarakat informasi dan ekonomi digital (Resolusi 131), conformance and interoperability (Resolusi 177), serta perlindungan anak di dunia maya (Resolusi 179).
2. Disepakatinya Bali Declaration pada penyelenggaraan Inter-Ministerial Meeting on South-South and Triangular Cooperation di Bali pada tanggal 18-20 September 2018. Deklarasi tersebut antara lain memuat sejumlah hal yang menjadi perhatian Indonesia, utamanya penguatan kerja sama antar negara berkembang untuk mengatasi tantangan dan masalah kependudukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
3. Indonesia juga telah melanjutkan peran aktifnya dalam penguatan kerja sama di bidang kesehatan, khususnya keamanan kesehatan global. Pada pertemuan The 5th Global Health and Security Agenda Ministerial Meeting yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 6-8 November 2018, telah disahkan Bali Declaration yang pada pokoknya mendorong komitmen negara-negara GHSA untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menangani ancaman penyakit menular terhadap keamanan kesehatan global.
4. Indonesia juga telah berpartisipasi aktif dalam forum UNESCO untuk mengedepankan kepentingan nasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi. Pada tahun 2018, Indonesia berhasil menominasikan tiga cagar biosfer nasional yaitu Berbak-Sembilang (2018), Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu (2018), Rinjani (2018), masuk ke dalam Man and Biosphere UNESCO.
5. Indonesia juga telah berpartisipasi aktif dalam perumusan dan pengambilan keputusan dalam forum UNESCO dalam kapasitasnya sebagai anggota Executive Board (EB) UNESCO. Dalam pertemuan EB UNESCO ke-204 pada tanggal 9-17 April 2018 di Paris, Indonesia juga berhasil mencatatkan dua geopark nasional, yaitu Ciletuh-Pelabuhan Ratu dan Rinjani Lombok masuk dalam daftar UNESCO Global Geoparks.
6. Indonesia terpilih sebagai Vice President pada pertemuan Inter-Governmental Conference to Adopt Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (IGC GCM) yang diselenggarakan di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 10-11 Desember 2018. GCM menjadi dokumen PBB pertama terkait tata kelola migrasi internasional. Pokok-pokok GCM telah sejalan dengan prioritas Indonesia dalam penguatan mekanisme perlindungan migran Indonesia, termasuk pekerja migran.

- Menteri Luar Negeri saat memimpin sesi pleno IGC GCM Marrakesh, Maroko, 10 Desember 2018



7. Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan multilateral di bidang kerja sama selatan-selatan (KSS) termasuk di antaranya Global South-South Development Expo di New York, 28 – 30 November 2018. Dalam pertemuan ini, Indonesia turut menjadi Co-host side event Asia-Pacific Directors-General Forum on SSTC dan pembicara sesi SSTC in Sustaining Peace And Promoting Inclusive Development.
8. Bersama dengan South Centre, Indonesia menyelenggarakan The Second Annual Developing Country Forum for Cooperation in International Tax Matters di Yogyakarta pada 25-27 April 2018. Forum dimaksud merupakan forum kedua yang diselenggarakan Pemri bersama South Centre yang mendiskusikan isu perpajakan negara berkembang yang berkaitan dengan pembiayaan bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia, selain berperan aktif pada berbagai forum multilateral, Kementerian Luar Negeri juga terus berinovasi untuk mendorong kepemimpinan Indonesia pada berbagai forum regional di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kepemimpinan Indonesia pada forum-forum regional sepanjang tahun 2018 dapat dilihat antara lain sebagai berikut.

1. Pertemuan *Senior Official Meeting (SOM) Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* ke-15 di Putrajaya, Malaysia, 25-27 Februari 2018. Pertemuan membahas beberapa agenda terkait tindak lanjut pertemuan SOM CPOPC ke-14, program kerja dan anggaran CPOPC, serta strategi kebijakan CPOPC dan negara anggota dalam menghadapi berbagai tantangan komoditas kelapa sawit di perdagangan internasional, terutama rencana revisi *Renewable Energy Directive II* oleh Uni Eropa.
2. Indonesia berhasil memfasilitasi kunjungan Pelapor Khusus Hak atas Pangan PBB (*Special Rapporteur on Right to Food*), untuk meninjau pemenuhan hak atas pangan di Indonesia pada tanggal 9-18 April 2018. Selain melakukan pertemuan dengan sejumlah Menteri, Pelapor Khusus juga melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah Provinsi yaitu Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Maluku



- Kunjungan ke Balai Budidaya Perikanan Laut (BBL) Maluku, untuk melihat peran Pemerintah dalam membantu para nelayan kecil mendapatkan akses terhadap benih ikan serta rumput laut

Sepanjang tahun 2018, prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa adalah pada forum berikut:

- 1) Pertemuan *Senior Official Meeting (SOM) Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke-15*.
- 2) *FEALAC Coordination & Working Group Meeting back-to-back dengan 8th FEALAC Seminar on Cyber Secretariat Workshop*, Gwangju, 10-11 April 2018.
- 3) *38th ASEF Board of Governors' Meeting, Bucharest*, 5-9 Juni 2018.
- 4) *3rd Meeting of the Council of Ministers of the Pacific Alliance with the Observer States*, 23-24 Juli 2018.
- 5) Pertemuan dengan Delegasi Uruguay (*President Pro Tempore MERCOSUR*), 23-24 Juli 2018.
- 6) *Indonesia-CARICOM Economic Seminar*, 25 Oktober 2018.
- 7) *Indonesia-Pacific Alliance Business Forum*, 26 Oktober 2018.
- 8) *39th ASEF Board of Governors' Meeting*, Singapura, 20-23 November 2018.

Kerja Sama RI-Uni Eropa (EU)

1. **Pertemuan *Senior Official Meeting (SOM) Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke-15*, Putrajaya, Malaysia, 26 Februari 2018**

Indonesia berhasil menyampaikan gagasan kepada CPOPC untuk menguatkan upaya bersama dalam menghadapi tantangan terhadap diskriminasi sawit di Uni Eropa khususnya terkait rencana kebijakan *Renewable Energy Directive II*

Kerja Sama Forum Regional Asia dan Eropa (ASEM)

2. ***38th ASEF Board of Governors' Meeting, Bucharest*, 5-9 Juni 2018**
3. ***39th ASEF Board of Governors' Meeting*, 20-24 November**

Salah satu wujud peran aktif Indonesia dalam ASEM adalah menjadi Ketua *Finance & Audit Committee* yang dijabat oleh Duta Besar Soemadi Brotodiningrat, yang juga merupakan Gubernur Indonesia pada Dewan Gubernur ASEF. Beliau juga menjadi anggota *Executive Committee* Dewan Gubernur ASEF. Pertemuan juga telah menyetujui laporan keuangan ASEF (audited) tahun 2017 dan berbagai proposal proyek ASEF untuk tahun 2019.

Kerja Sama FEALAC (*Forum for East Asia-Latin America Cooperation*)

4. ***FEALAC Coordination & Working Group Meeting back-to-back dengan 8th FEALAC Seminar on Cyber Secretariat Workshop*, Gwangju, 10-11 April 2018**

Delegasi Indonesia telah menyampaikan perkembangan proyek inisiasi Indonesia yaitu *FEALAC Youth Center* dan rencana kolaborasi dengan negara-negara anggota FEALAC. Selain itu, delegasi Indonesia juga menyampaikan kembali usulan untuk penyelenggaraan *FEALAC Day* yang disambut baik oleh negara-negara anggota.

Kerja Sama Pacific Alliance (Aliansi Pasifik)

5. ***3rd Meeting of the Council of Ministers of the Pacific Alliance with the Observer States*, 23-24 Juli 2018**

Delegasi Indonesia telah menyampaikan masukan pada Sesi Diskusi Panel bertemakan "*the Role of the Pacific Alliance as Free Trade Promoter*" mengenai peluang besar Indonesia menjadi mitra kerja sama Aliansi Pasifik (AP) dan kesiapan Indonesia untuk membuka hubungan lebih luas dengan AP.

Meksiko dan Peru menyambut baik minat Indonesia untuk menjadi associate member AP yang disampaikan dalam pembicaraan bilateral dengan delegasi kedua negara.

6. **Pertemuan dengan Delegasi Uruguay (*President Pro Tempore MERCOSUR*), 23-24 Juli 2018**

Delegasi Indonesia telah menerima konfirmasi komitmen Uruguay selaku ketua MERCOSUR saat ini untuk mendorong proses negosiasi PTA/FTA dengan Indonesia.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah diterimanya dukungan dan tanggapan positif dari negara-negara mitra atas berbagai usulan Indonesia yang merupakan wujud keseriusan komitmen Indonesia dalam memajukan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Perubahan positif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah menggalang dukungan dari negara mitra dalam berbagai tingkatan dan memberikan keyakinan bahwa usulan yang dimajukan bermanfaat tidak saja bagi Indonesia tetapi juga negara mitra. Hal ini tidak terlepas dari inovasi kinerja Kementerian Luar Negeri dalam berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung peran aktif Indonesia dalam berbagai forum regional dimaksud.

Tidak terdapat **kendala** berarti dalam pencapaian IKU ini di wilayah Amerika dan Eropa. Untuk **proyeksi kedepan**, Kementerian Luar Negeri akan terus mengembangkan kerja sama yang bermanfaat bagi kepentingan Indonesia dan negara mitra dan terus meningkatkan koordinasi internal untuk memastikan tindak lanjut usulan-usulan Indonesia yang telah diterima oleh negara mitra, termasuk juga menjajaki rencana pembukaan perundingan perjanjian perdagangan dengan organisasi-organisasi regional di kawasan Amerika Latin.

Beberapa prakarsa/ rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Pada KTT IMT-GT Ke-11, 28 April 2018 di Singapura, Delegasi RI yang dipimpin oleh Presiden RI menyampaikan beberapa prakarsa yang diterima dengan baik. Prakarsa tersebut terkait berbagai upaya peningkatan kerja sama di kawasan termasuk dalam bidang transportasi dan ICT, perdagangan dan investasi, pariwisata, pertanian, SDM, pendidikan dan kebudayaan, antara lain: (1) Pembentukan gugus tugas bersama untuk operasionalisasi konektivitas laut RoRo Dumai-Melaka. Indonesia mendorong tindak lanjut existing rute seperti Belawan-Penang dan Krueng Geukeuh-Port Klang serta pembentukan rute baru; (2) Pembentukan *sub-working group* ICT untuk mendukung perkembangan *e-commerce* di kawasan IMT-GT; (3) Pembangunan IMT-GT *Business Centre* di lokasi Bukit Bunga, Malaysia dan Pekanbaru, Riau; (4) Mendorong percepatan IMT-GT menjadi *one single tourism destination*; serta (5) Mendorong kerja sama dengan UNINET dalam rangka pengembangan SDM yang terlatih.
- b. Pada Pertemuan tingkat menteri IMT-GT ke-24 di Melaka, Malaysia pada 28 September - 3 Oktober 2018, Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait: (1) Reviu koridor ekonomi, khususnya percepatan operasionalisasi RoRo Dumai-Melaka yang masuk dalam koridor ekonomi 4; (2) Optimalisasi koridor 5 melalui peningkatan kerja sama yang menghubungkan Phuket-Krabi-Penang-Langkawi-Sabang, khususnya dalam bidang pariwisata. Rekomendasi tersebut diterima dengan baik dan dihasilkan pula sejumlah kesepakatan dalam rangka tindak lanjut berbagai rekomendasi Kepala Negara IMT-GT pada KTT ke-11 di Singapura.
- c. Pada momentum Melanesian Art and Culture Festival (MACFest) yang berlangsung di Honiara, Solomon Islands pada 6-9 Juli 2018, telah dilaksanakan pertemuan dengan Dirjen MSG. Dalam pertemuan ini, Indonesia menyampaikan prakarsa untuk penguatan kerja sama negara-negara MSG di bidang sosial budaya dan pendidikan yaitu rencana penyelenggaraan Festival Melanesia di Indonesia. Sekretariat MSG menyambut baik prakarsa tersebut dan akan mendukung serta mendorong negara-negara anggota MSG untuk berpartisipasi.

Sebagai salah satu bentuk engagement Pemri di Pasifik, Tim Kesenian Indonesia dari Pemprov Papua turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian MACFest 2018 tersebut. Selain itu, Delegasi Indonesia juga membuka Rumah Indonesia yang berisikan informasi, barang seni budaya, dan paparan tentang komunitas Melanesia di 5 provinsi Melanesia Indonesia.

Hal-hal atau kendala yang dihadapi dan mempengaruhi kinerja sub IKU-6 antara lain: ada tidaknya political will negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan di bidang ekonomi, social budaya, dan pembangunan di berbagai forum internasional, dan tingkat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri untuk merumuskan satu posisi di bidang pembangunan dan ekonomi yang akan disampaikan pada berbagai forum internasional. Selain itu, terkait upaya menghasilkan naskah kesepakatan multilateral, Kementerian Luar Negeri

terkadang menghadapi kendala dengan banyaknya jumlah negara yang terlibat dalam suatu forum multilateral sehingga terdapat perbedaan kepentingan negara-negara dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat multilateral dan juga perbedaan kepentingan di antara para pemangku kepentingan dalam negeri, sehingga proses pembahasan kesepakatan memakan waktu lama.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan upaya peningkatan peran Indonesia sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang, sehingga berbagai kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat tercapai. Selain itu juga perlu terus didorong upaya peningkatan dialog dan menggunakan channel of communication yang telah terbentuk untuk membahas permasalahan dan implementasi kerja sama ke depan terkait isu-isu dimaksud.

Langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus meningkatkan peran aktifnya sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berimbang sekaligus mencapai kepentingan nasional. Kementerian Luar Negeri juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam negeri dalam mencapai suara/posisi yang satu di berbagai forum internasional yang membahas isu ekonomi, sosial dan budaya.

Tantangan utama yang dihadapi Kementerian Luar Negeri dalam pencapaian IKU ini antara lain: kurang optimalnya respon dari negara mitra terhadap usulan prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Selain itu, dihadapi pula tantangan yang berasal dari rendahnya partisipasi Pemerintah Daerah dan swasta lokal dalam penanganan proyek serta adanya kendala pendanaan.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa melakukan upaya pendekatan dan koordinasi kepada pihak-pihak dan negara-negara terkait guna mempromosikan usulan prakarsa/rekomendasi Indonesia sehingga dapat diterima pada forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong koordinasi dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dan swasta lokal untuk berperan aktif dalam kerja sama ekonomi sub-regional.

Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan berupaya mengintensifkan pertemuan informal dan formal dalam rangka mempertemukan mutual understanding atas national interest dengan negara mitra. Pertemuan akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan 6-12 bulan sebelum pelaksanaan Forum Regional.

Tingginya capaian IKU ini disebabkan karena seluruh prakarsa/rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia sesuai rencana aksi baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya diterima seluruhnya pada forum regional kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa.

Prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima di forum intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa sekaligus perubahan positif yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Pertemuan *Senior Official Meeting (SOM) Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* ke-15. Dalam pertemuan ini Indonesia berhasil menyampaikan gagasan kepada CPOPC untuk menguatkan upaya bersama dalam menghadapi tantangan terhadap diskriminasi sawit di Uni Eropa khususnya terkait rencana kebijakan *Renewable Energy Directive II*;
- 2) *FEALAC Coordination & Working Group Meeting back-to-back dengan 8th FEALAC Seminar on Cyber Secretariat Workshop*, Gwangju, 10-11 April 2018. Pada pertemuan ini, Indonesia telah menyampaikan progress perkembangan proyek inisiasi Indonesia yaitu *FEALAC Youth Center* dan rencana proyek yang akan diselenggarakan yaitu *FEALAC Youth Forum*. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan kembali usulan untuk penyelenggaraan "*FEALAC Day*" yang disambut baik oleh negara anggota FEALAC;
- 3) *38th ASEF Board of Governors' Meeting*, Bucharest, 5-9 Juni 2018. Pada pertemuan ini, Duta Besar Soemadi Brotodiningrat selaku Gubernur Indonesia untuk Dewan Gubernur ASEF juga bertindak sebagai Ketua *Finance & Audit Committee*. Dewan Gubernur ASEF telah menyetujui laporan keuangan ASEF (audited) tahun 2017 dan berbagai proposal proyek ASEF untuk tahun 2019;

- 4) *3rd Meeting of the Council of Ministers of the Pacific Alliance with the Observer States*, 23-24 Juli 2018. Dalam pertemuan ini, Indonesia menyampaikan intervensi pada WG *"The Role of the Pacific Alliance as Free Trade Promoter"* mengenai peluang besar Indonesia menjadi mitra kerja sama Aliansi Pasifik (AP) dan kesiapan Indonesia untuk membuka hubungan lebih luas dengan AP. Meksiko dan Peru menyambut baik minat Indonesia untuk menjadi associate member AP yang disampaikan dalam pembicaraan bilateral dengan delegasi kedua negara;
- 5) Pertemuan dengan Delegasi Uruguay (President Pro Tempore MERCOSUR), 23-24 Juli 2018. Pada pertemuan ini, Uruguay selaku ketua MERCOSUR mengonfirmasi komitmennya untuk mendorong proses negosiasi PTA/FTA dengan Indonesia;
- 6) Indonesia-CARICOM Economic Seminar, 25 Oktober 2018. Networking session berhasil mempertemukan beberapa perusahaan Indonesia dengan perusahaan-perusahaan negara anggota CARICOM untuk peninjauan peluang bisnis;
- 7) *Indonesia-Pacific Alliance Business Forum*, 26 Oktober 2018. *Business matching* berhasil mempertemukan beberapa perusahaan Indonesia dengan perusahaan-perusahaan dari negara anggota Aliansi Pasifik untuk membahas prospek kerja sama bisnis;
- 8) *39th ASEF Board of Governors' Meeting*, Singapura, 20-23 November 2018. Pada pertemuan ini, Dewan Gubernur ASEF telah menyetujui anggaran yang diusulkan ASEF untuk tahun 2019 serta berbagai proposal proyek ASEF untuk tahun 2019-2021.

Keberhasilan capaian ini didorong oleh inovasi/terobosan dalam mengkoordinasikan pembahasan isu dan membangun kesepahaman antara berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri. Ketepatan metode pendekatan yang dipilih dalam forum intrakawasan dan antarkawasan juga memiliki peran sentral dalam diterimanya berbagai dukungan terhadap usulan Indonesia di forum FEALAC, seperti mengedepankan program-program kepemudaan mengingat besarnya potensi para pemuda kedua kawasan.

Tidak terdapat **kendala** berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sebagai **proyeksi kedepan**, Kementerian Luar Negeri akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) memperkuat upaya bersama dengan Malaysia dalam CPOPC agar perumusan RED II tidak diskriminatif terhadap sawit;
- b) menyiapkan TOR *FEALAC Day* untuk disirkulasikan kepada negara anggota FEALAC menjelang pelaksanaan FEALAC SOM 2018;
- c) meningkatkan koordinasi internal serta K/L terkait mengenai pembukaan perundingan perjanjian perdagangan dengan *Pacific Alliance*; pembukaan perundingan perjanjian perdagangan dengan MERCOSUR; dan pembentukan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-CARICOM;
- d) meningkatkan koordinasi dengan Kadin dan Apindo untuk memonitor tindak lanjut dari kegiatan, khususnya hasil *business matching*;
- e) meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan anggota Aliansi Pasifik serta mengembangkan hubungan investasi dan pariwisata dua arah dengan negara-negara dari kawasan tersebut.

Diplomasi ekonomi, sosial dan budaya merupakan tolak ukur yang kuat serta kunci penting untuk mewujudkan cita-cita ASEAN yang *people-centered* dan *people-oriented*. Di bidang ekonomi dan sosial budaya, rekomendasi dan prakarsa Indonesia juga telah disampaikan melalui pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra wicara mulai dalam berbentuk workshop hingga pada pertemuan tingkat pejabat tinggi/*Senior Official Meeting*. Beberapa kegiatan menonjol dalam kerja sama ekonomi dan sosial budaya di tahun 2018 antara lain adalah:

1. Pertemuan 20th ASEAN-India *Senior Officials Meeting* (SOM) di Hanoi, Vietnam dilaksanakan pada 5-6 April 2018
2. Pertemuan 25th ASEAN-New Zealand Dialogue di Jakarta, Indonesia, 10-11 April 2018 dimana Indonesia bertindak selaku tuan rumah
3. Pertemuan 15th ASEAN-Canada *Dialogue* di Manila, Filipina, yang dilaksanakan pada 2-3 Mei 2018
4. Pertemuan 33rd ASEAN-Japan Forum (AJF) di Tokyo, Jepang, dilaksanakan pada 13 Juni 2018
5. Pertemuan 22nd ASEAN-Republic Korea *Dialogue* (ROK) di Seoul, ROK, dilaksanakan pada 20-22 Juni 2018
6. Pertemuan Tahunan ke-10 *Council of the ASEAN-Korea Centre* (AKC) tanggal 26-27 Februari 2018 di Busan, Republik Korea (ROK)
7. Pertemuan the 37th Annual Meeting Council of ASEAN-Japan Centre di Tokyo, Jepang tanggal 26-28 Maret 2018.

Beberapa rekomendasi dan prakarsa Indonesia lainnya juga disampaikan pada seminar/workshop seperti pada :

- (1) *The 2nd High-Level Brainstorming Dialogue in Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development*, Bangkok, Thailand, 30 Maret 2018 ;
- (2) *Inaugural Meeting of the Network of ASEAN-Russia Think Tanks (NARTT)* di Moskow, Rusia, 20-21 April 2018 ;
- (3) *The 6th East Asia Forum (EAF): Promoting Sustainable Development and Prosperity in East Asia*, Luang Prabang, Laos, 29-30 Agustus 2018 ;

Selain itu, mengingat lokasi negara-negara Asia Tenggara yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap ancaman bencana alam, Indonesia mengambil inisiatif pada pertemuan ke-8 ACDM WG on Recovery dan ASEAN Workshop on Resilient Recovery, Bali, 7-8 Februari 2018. Pertemuan tersebut menerima Prakarsa usulan Indonesia untuk mengadakan pelatihan mengenai *recovery planning, back to back* dengan pelaksanaan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 2018 pada bulan November 2018 di Cilegon, Jawa Barat.

Di bidang kesehatan, Indonesia berperan aktif di pertemuan ke-4 ASEAN Health Cluster 1 di Laos, 3rd Meeting of ASEAN Health Cluster 3 di Singapura, dan 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 2 di Myanmar. Pada ketiga pertemuan tersebut, Indonesia mengambil inisiatif dan menyampaikan beberapa konsep yang kemudian berhasil disetujui. Beberapa konsep yang diusulkan oleh Indonesia diantaranya adalah terkait *Food Safety Emergency Response Plan*, *ASEAN Concensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*.

Tak luput dari perhatian, Kementerian Luar Negeri juga turut berpartisipasi aktif di bidang lingkungan, diantaranya di 10th Meeting of ASEAN Working Group on Environmental Education (10 th AWGEE) and Related Meetings, Da Lat, Vietnam, 17-20 Juli 2018, dimana usulan Indonesia untuk mengembangkan “*green meeting guidelines*” untuk pertemuan-pertemuan ASEAN bidang lingkungan hidup dengan tujuan menghemat sumber daya alam dan meminimalisir dampak lingkungan diterima.

Dalam rangka kembali menunjukkan komitmennya, Indonesia juga menawarkan diri untuk kembali menyelenggarakan ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2018. Indonesia mengusulkan agar AYIC dapat menjadi *Senior Officials' Meeting on Youth flagship activity* dibawah ASEAN Work Plan on Youth 2016-2020 dan agar negara anggota ASEAN lainnya dapat menjadi tuan rumah AYIC dengan sistem rotasi setelah penyelenggaraan AYIC ke-2 tahun 2018.

Sementara itu, terkait dengan isu ketenagakerjaan, Indonesia mengusulkan untuk memasukan *migrant workers* sebagai salah satu *key performance target* dalam AHC3 Work Programme periode berikutnya dan telah dicatat secara resmi oleh ASEAN Secretariat dalam Report of the 3rd Meeting of AHC3, sehingga dapat digunakan sebagai eferensi ketika menyusun Work Programme periode pasca 2020.

Pada sidang Senior Labour Official Meeting (SLOM) 24-29 November 2018 di Malaysia, Indonesia juga sampaikan pentingnya jaringan ASEAN Labour Inspector guna memperkuat koordinasi lintas batas negara dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan dan meningkatkan *capacity building* bagi Labour Inspector.

Pada Pertemuan ASEAN *Labour Minister Meeting* (ALMM) mengenai implementasi *Action Plan dan Self-Assesment Tools* dari ASEAN *Consensus*, Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan berbagai program kegiatan yang telah disepakati dalam *work program* dan mengusulkan untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif baru guna memperkaya implementasinya. Indonesia menyampaikan rencana kegiatan *Education Access for the Children of Migrant Workers dan pre-Departure Orientation* untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2018-2025.

Kendala Kegiatan

Walaupun pelaksanaan kegiatan secara umum berlangsung dengan baik, ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian target. Antara lain adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan di antara negara-negara ASEAN yang belum dapat dijumpai. Terutama terjadi ketika ada perbedaan kepentingan Singapura selaku negara maju dan Ketua ASEAN 2018 dengan kepentingan Indonesia.

Salah satu contoh kendala pertemuan pada tahun 2018 ketika Singapura menjabat sebagai ketua ASEAN adalah terkait isu lingkungan. Singapura senantiasa mempertahankan peran ASEAN *Specialised Meteorological Centre* dalam berbagai sektor kerja sama lingkungan hidup dengan mengklaim lembaga tersebut ditugaskan sebagai pemantau regional untuk kondisi meteorologi dan asap. Klaim Singapura tersebut bertentangan dengan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dan *Term of Reference ASEAN Senior Officials on the Environment* (TOR ASOEN) serta menyebabkan terhambatnya 2 hal: (i) Pendirian ASEAN *Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACCTHPC) di Indonesia dan (ii) Penyelesaian *work plan* lingkungan hidup ASEAN sejak 2016.

Kerjasama bidang lingkungan hidup di ASEAN mencakup berbagai isu sehingga muncul inisiatif-inisiatif sporadis yang tidak terkoordinasi di luar badan sektoral lingkungan hidup, termasuk dengan mitra wicara. Hal ini tidak sesuai dengan sentralitas ASEAN dan tidak mendukung pencapaian target-target badan sektoral lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karena itu, pada beberapa sidang yang terkait isu sensitif atau strategis, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh Delegasi RI dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Selain itu, perbedaan persepsi dan prioritas di antara Negara Anggota ASEAN yang masih sangat dirasakan pada tahun 2018 semakin menunjukkan adanya kontestasi kepentingan masing-masing negara anggota dengan bayang-bayang pengaruh negara-negara besar terhadap isu-isu strategis di ASEAN. Hal yang sama pun dihadapi Indonesia dalam mendorong rekomendasi prakarsa yang diusung agar dapat disetujui, termasuk di dalamnya mengenai pentingnya konsep Indo-Pasifik bagi ASEAN.

Dalam menyiapkan, menyampaikan dan menegosiasikan prakarsa dan rekomendasi, Kementerian Luar Negeri telah mengacu pada asas efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi, meningkatkan persiapan dalam hal administrasi dan substansi sedini mungkin dan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga *focal point*.

Rencana Tindak Lanjut

Pada tahun 2019, keketuaan Singapura di ASEAN akan berpindah ke Thailand. Selama masa keketuaan Singapura, terdapat banyak hambatan yang didasari atas perbedaan kepentingan antara Singapura dengan Indonesia. Namun demikian, dengan banyaknya kesamaan kepentingan antara Indonesia dan Thailand selaku negara “berpenghasilan menengah” di kawasan, diharapkan akan terdapat peningkatan peluang diterimanya berbagai prakarsa dan rekomendasi Indonesia. Dalam rangka terus memperkuat kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan mewujudkan kepentingan kawasan, berikut adalah langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri :

1. Meningkatkan sinergitas ketiga Pilar Masyarakat ASEAN, terutama dalam aspek koordinasi lintas pilar dan lintas sektor untuk mewujudkan visi Masyarakat ASEAN 2025. Keterlibatan masyarakat merupakan kunci penting untuk mewujudkan cita-cita ASEAN yang *people-centered dan people-oriented*.

2. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang dalam menghadapi Masyarakat ASEAN dengan terus meningkatkan kapasitas diri, seperti mempelajari bahasa Inggris dan bahasa negara anggota ASEAN, meningkatkan kreativitas serta pengetahuan mengenai ASEAN.
3. Senantiasa aktif meningkatkan koordinasi antar Kementerian terkait, melakukan pendampingan sidang ASEAN pada Kementerian/Lembaga yang menangani isu terkait pembahasan sidang ASEAN, melaksanakan rapat konsinyering/seminar dialog kebijakan dengan para pemangku kepentingan antara lain Kementerian/Lembaga terkait (*focal points*), pemerintah daerah, akademisi dan tokoh masyarakat dalam rangka penyampaian saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kontribusi bagi terwujudnya perdamaian dan kemakmuran di kawasan dan dunia. Dalam hal ini, inisiatif Indonesia mengenai Konsep Indo-Pasifik pada dasarnya dapat menjadi peluang dimana konsep ini bisa berfungsi sebagai global platform ASEAN sekaligus penegasan sentralitas ASEAN untuk memastikan relevansi ASEAN di tengah perubahan dan dinamika yang terjadi di kawasan dan dunia.

Analisis Sub IKU-7: “Jumlah Promosi Trade, Tourism, and Investment (TTI)”

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas diplomasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan, melalui kegiatan koordinasi interkem, mengundang counterpart, mengundang wartawan, business meeting, pendampingan, penggalangan pengusaha, presentasi ekonomi, promosi kuliner, promosi budaya, memfasilitasi konsultasi antara kalangan usaha RI dengan lembaga negara sahabat dan sebaliknya, mengupayakan perolehan alih teknologi, peningkatan kapasitas, dan mengupayakan penempatan kerja bagi skilled workers Indonesia ke negara-negara sahabat.

Capaian Sub IKU 7 B.2 Jumlah promosi Trade, Tourism and Investment (TTI) sebesar 130% dari target 90 kegiatan promosi TTI. Capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-7B.2 Tahun 2018

IKU-4 (B2.1)	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah Promosi Trade, Tourism, and Investmen (TTI)	Jumlah Promosi Trade, Tourism, and Investmen (TTI)	117
	Target	117
	Realisasi	90
	Capaian	130%
	Batas Toleransi	120%

Kegiatan promosi *Trade, Tourism and Investment* (TTI) yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 di wilayah Asia dan Pasifik sebanyak 72 kegiatan dari 49 kegiatan Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

- a. Promosi Investai dan Perdagangan pada Kunjungan Kerja Bidang Perminyakan Delegasi Kementerian Luar Negeri dan Pertamina ke Nigeria, 4-7 Maret 2018.
- b. Promosi TTI Indonesia melalui Indonesia – *Africa Forum* di Bali, 10-11 April 2018.
- c. Promosi Perdagangan dan Investasi pada Kunjungan Delegasi Kementerian Luar Negeri RI dan BUMN (PT. WIKA dan Indonesia Exim Bank) ke Zanzibar, 11-14 Agustus 2018.



- d. Promosi TTI Indonesia melalui Indonesia - Middle East Annual Gathering on Economy (IMAGE) di Yogyakarta, 21-23 Oktober 2018. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pengusaha dari Kawasan Timur Tengah, antara lain: Mesir, Maroko, Yaman, Syria, Kuwait, Irak, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab (UAE).
- e. *Business Meeting* RI-Timor Leste, 28 Juni 2018.
- f. *Business Meeting* RI-Brunei Darussalam, 19 Juni 2018.
- g. Promosi produk industri strategis pertahanan dan investasi pada "10 New Bali" pada Kunjungan Sultan Brunei Darussalam ke Indonesia, 2-4 Mei 2018.
- h. Negosiasi penyelesaian permasalahan perpajakan investor Indonesia di Viet Nam, 6-12 September 2018.
- i. Seminar "*Going Forward: Thailand-Indonesia Trade and Investment Cooperation*" di Bangkok, 28 September 2018.
- j. Kunjungan diplomatic corps ke PT Japfa dalam rangka pengembangan ekspor produk daging ayam dan olahannya, 5-6 November 2018.

Sementara itu kegiatan promosi TTI yang telah dilaksanakan di wilayah Amerika dan Eropa sebanyak 45 kegiatan dari target 41 kegiatan. Sejumlah kegiatan promosi TTI yang telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) Program Seminar Investasi Indonesia: How to Attract Investors from US' Investors Perspective. Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) RI-AS ke-17 telah diselenggarakan pada 14 Mei 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi investasi Indonesia di pasar AS, serta untuk menajamkan strategi promosi investasi Indonesia melalui diskusi dan sharing lessons learned dari investor AS. Delegasi RI (Delri) dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kemendag, dengan keanggotaan lintas kementerian/lembaga (K/L) dari Kemendag, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Perekonomian, Kemenkumham, Kementan, Kemenkominfo, Kemenaker, KKP, BKPM, BI, dan OJK. Pihak AS dipimpin oleh Acting Assistant US Trade Representative (USTR) for Southeast Asia and the Pacific dengan keanggotaan wakil dari USTR, Department of State (DoS), Department of Agriculture (DoA), Department of Labor (DoL), dan Kedubes AS di Jakarta;

- 2) Pelaksanaan *Indonesian Tourism Trade Show* dalam kegiatan *Remarkable Indonesia Fair* di *Chicago, AS*, pada 5-7 Juli 2018, untuk promosi potensi investasi pariwisata Indonesia, khususnya wilayah Banyuwangi. Promosi peluang pasar kerja tenaga *caregiver/registered nurse* di kawasan Amerika Utara kepada publik dalam negeri, pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda dan Angkat Sumpah Perawat Profesional (NERS) ke XIV pada 22 Maret 2017 di Bandung. Selain itu telah dilaksanakan *Benchmarking NCLEX* ke India dan Filipina dalam upaya peningkatan akses pasar tenaga kerja terampil *caregiver/registered nurse* ke Amerika Utara;
- 3) Pengiriman misi dagang ke *Indonesian Festival* di *Ottawa*; *Investment Forum* di *Montreal*; serta *Business Matching* Perusahaan Indonesia-Kanada tanggal 27-31 Juli 2018;
- 4) *Roadshow* Industri Strategis Indonesia ke Meksiko dan Kosta Rika, 25-28 September 2018.
- 5) Fasilitasi PT Pelindo II dan PT IPC Car pada pelaksanaan *Lazaro Cardenas Business Forum* ke-10 di *Lazaro Cardenas, Meksiko*, 8-9 November 2018.
- 6) Pengiriman misi dagang Indonesia ke *Coffee and Tea Show* di *Toronto, Kanada*, 23-24 September 2018.
- 7) Misi Bisnis Sektor Pariwisata Indonesia dalam "*Vitrina Turistica*" di *Kolombia* (21 – 23 Februari 2018);
- 8) Temu bisnis pengusaha di *Medan* (21-23 Maret 2018);
- 9) Penggalangan Pengusaha di *Lampung* (16-19 April 2018);
- 10) Misi Bisnis Dalam "*Feria Internacional del Aire y del Espacio*" (FIDAE) di *Chile* (3-8 April 2018);
- 11) Penggalangan Pengusaha di *Jember, Jawa Timur* (17 – 19 Juli 2018);
- 12) Partisipasi Indonesia pada Pameran *Espacio Food and Services 2018* di *Santiago, Chile* (25-27 September);
- 13) Partisipasi pada Pameran *Expo Alimentaria* di *Lima, Peru* (26-28 September);
- 14) Temu Bisnis di *Yogyakarta*, 26 Oktober 2018;
- 15) Temu bisnis di *Surakarta*, 29 Oktober 2018;
- 16) Misi Bisnis Gastronomi ke *Quito, Ekuador*, 24 – 26 November 2018;
- 17) Misi Bisnis Gastronomi ke *Bogota, Kolombia* 24 November – 1 Desember 2018;
- 18) *London Infrastructure Forum*;
- 19) *Focus Group Discussion on ISPO: Penguatan Diplomasi Bilateral*;
- 20) *SEG Brussel* dan Temu Bisnis di *Paris* dan *Marseille*;
- 21) *Sectorial Business Meeting* di *Madrid* September 2018;
- 22) *ALFI Global Distribution Conference dan Business Forum* di *Luksembourg & Belgia*;
- 23) *SIAL Food Exhibition Paris*;
- 24) *Business Forum Middelburg*;
- 25) Keikutsertaan Indonesia pada Pameran Pariwisata *Danish Travel Show dan Business Meeting*, 23 - 25 Februari 2018. Kementerian Luar Negeri berpartisipasi pada pameran pariwisata "*Danish Travel Show*" dan penyelenggaraan *business meeting*. Pada pameran, tercatat anjungan Indonesia dikunjungi lebih dari 6 ribu orang atau 9,89% Pada pameran tahun 2018, terdapat 3 TA/TO yang mengikuti pameran berasal dari Jakarta (*Adventure Indonesia*), Bali (*BeWish International*), dan Swedia (*Asianparadiseresor*). Tercatat TA/TO *BeWish International* mendapatkan potential buyer sebanyak kurang lebih 800 wisatawan Denmark yang berniat ke Indonesia dan membeli paket yang ditawarkan antara USD 950 – USD 2050 selama 14 – 18 hari. TA/TO *Travel2Bali* juga berhasil menjual 1250 paket wisata selama 16 hari ke Bali dengan harga berkisar USD 2250-3500. Pelaksanaan promosi pariwisata di Denmark merupakan salah satu bidang yang tertuang dalam PoA 2017 - 2019 RI - Denmark yang ditandatangani kedua negara. Pada tanggal 24 - 26 April 2018, dilakukan pembahasan interkem untuk implementasi PoA lebih lanjut;

- 26) **Kegiatan Business Meeting Pariwisata, di Oslo, 27 - 28 Februari 2018.** Kementerian Luar Negeri berhasil menyelenggarakan *business meeting* pelaku industri wisata. Pada kegiatan tersebut, terdapat 4 peserta (terdiri dari 3 TO, yaitu Caraka Travelindo Tour&Travel, Lotus Asia Tours, Indonesia Travel Connection dan satu resort, yaitu Suarti Ubud Resort). Mereka dipertemukan dengan sekitar 50 peserta dari Norwegia yang terdiri dari TO, pebisnis, jurnalis, dan penggiat wisata. Dari hasil temu bisnis tersebut terdapat sekitar 10 potential appointment yang akan dijajaki oleh peserta temu bisnis;
- 27) **Keikutsertaan Indonesia pada Pameran Pariwisata Utazas dan Business Meeting, 1-4 Maret 2018.** Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi pada pameran pariwisata Utazaaz dan menyelenggarakan *business meeting*. Pada pameran tahun 2018, Indonesia diwakili oleh 7 agen perjalanan dan delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut. Selama pameran, tercatat 50 pax kunjungan yang dilakukan oleh Suarti Boutique Village Ubud dan 62 potential buyers yang ditindaklanjuti oleh Bali *Online* serta Nusa Dua Bali
- 28) **Kegiatan Business Meeting Pariwisata di Bratislava, 4-5 Maret 2018.** Kementerian Luar Negeri berhasil menyelenggarakan *business meeting* pelaku industri wisata. Pada kegiatan tersebut, terdapat 4 peserta (terdiri dari 3 TO, yaitu Caraka Travelindo *Tour&Travel*, Lotus Asia *Tours*, Indonesia *Travel Connection* dan satu resort, yaitu Suarti Ubud Resort). Dua tour operator dari Slowakia, yaitu *Royal* dan *Pax Travel* yang belum pernah membuat paket ke Indonesia menyatakan minat mereka untuk membuka pasar dan membawa tamu ke Indonesia. *Tour Operator Royal* pun meminta agen di Indonesia agar dapat menyediakan guide yang bisa berbahasa Slowakia atau Ceko;
- 29) **Kegiatan Business Meeting Pariwisata, di Praha, 5-6 Maret 2018.** Kementerian Luar Negeri berhasil menyelenggarakan *business meeting* pelaku industri wisata. Pada kegiatan tersebut, terdapat 4 peserta (terdiri dari 3 TO, yaitu Caraka Travelindo *Tour&Travel*, Lotus Asia *Tours*, Indonesia *Travel Connection* dan satu resort, yaitu Suarti Ubud Resort. Sementara, dari Slowakia terdapat 6 agen perjalanan. Dalam pertemuan tersebut para agen perjalanan berkesempatan saling menawarkan produk. Dengan pola ini, para pelaku industri memiliki kesempatan mengeksplorasi kerja sama yang lebih terbuka;
- 30) **Kegiatan Business Meeting Pariwisata, di Zurich, 14 Maret 2018.** Kementerian Luar Negeri berhasil menyelenggarakan *business meeting* pelaku industri wisata. Kegiatan diikuti oleh 6 tour operator maupun pemilik Hotel terkemuka di Indonesia, sedangkan dari pihak Swiss diikuti oleh 8 pelaku industri pariwisata.
- 31) **Keikutsertaan Indonesia pada Pameran Furniture "Wohnen & Interieur" dan Business Meeting, di Wina, Austria, 10-18 Maret 2018, dan Business Meeting di Hamburg, 20 Maret 2018.** Direktorat Eropa II bersama dengan KBRI Wina dan KJRI Hamburg telah berpartisipasi pada pameran furnitur "*Wohnen & Interieur*" dan menyelenggarakan *business meeting* di Hamburg. Kegiatan diikuti oleh 5 perusahaan furnitur Indonesia dan selama pameran tercatat transaksi tunai senilai lebih dari 200.000 euro, beberapa pesanan furniture lemari dan kursi yang ditotal dapat mencapai 1 kontainer. Selain itu, tercatat juga komitmen pengusaha Austria untuk berkunjung langsung ke pabrik-pabrik produk kayu pengusaha Indonesia. Untuk tahun 2019, KBRI/PTRI Wina berencana untuk mengikuti *Wonhen & Interieur* di Wina pada Maret dan *International Trade Fair for Restaurant and Hotel Industry* di Salzburg, 2019. Sementara, *business meeting* di Hamburg menghasilkan komitmen dari beberapa pengusaha Hamburg yang telah menjadwalkan kunjungan ke pabrik-pabrik produk kayu pengusaha Indonesia untuk dapat melihat secara langsung proses pembuatan dan jenis produk yang ditawarkan. Pengusaha Hamburg tertarik dengan produk kayu jati dan pengolahan produk dari material bekas.
- 32) **Keikutsertaan Indonesia pada Pameran Polagra Food Fair (PFF), 7-11 Mei 2018.** Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi pada pameran makanan dan minuman terbesar di Polandia, *Polagra Food Fair*, dan menyelenggarakan *business meeting*. Beberapa hal menonjol selama pelaksanaan antara lain permintaan perusahaan distributor BVO International (Jerman), King Gen (Maroko), Polmarkus (Polandia), kepada Maesindo Indonesia. Selain PFF dilaksanakan pula *business meeting* dengan potential *buyers*. Kombinasi keikutsertaan *food fair* dan pertemuan bisnis dengan potential *buyers* merupakan strategi misi dagang yang jitu karena tercapainya komunikasi dan dialog yang lebih intensif dan detail, serta lebih memiliki *output* yang lebih produktif.

- 33) **Kegiatan Promosi Kopi dan Pagelaran Busana Batik Indigo Indonesia “the Colours of Indonesia”, Swedia dan Latvia, 14-18 Mei 2018.** Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan promosi terpadu yang menampilkan produk-produk unggulan Indonesia, yakni kopi dan batik. Kegiatan promosi kopi dilakukan dengan mengambil tema *From Farm to Cup*, yang dilanjutkan dengan promosi batik dalam bentuk *workshop*, pameran, dan pagelaran busana batik dengan tema *From Nature to Fashion*. Swedia dan Latvia dikenal sebagai negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi dan penduduk yang memiliki selera berbusana yang bagus. Dari segi kopi, terdapat potensi untuk meningkatkan ekspor kopi Indonesia. Namun, perlu didukung dengan adanya jaringan pemasok yang kuat.
- 34) **Pameran COTECA, Hamburg, 10-12 Oktober 2018.** Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi pada pameran kopi, teh, dan kakao, COTECA, dan menyelenggarakan *business meeting* pelaku industri kopi. Pada pameran COTECA, paviliun Indonesia diisi oleh 9 perusahaan (*co-exhibitors*) asal Indonesia yang merupakan eksportir produk kopi, teh dan kakao. Para *co-exhibitors* di paviliun Indonesia memperoleh prospek potensi dagang dari calon buyers sebesar USD 146 juta yang berasal dari 36 negara
- 35) **Fact Finding Mission and Business Mission Financial Technology on Swiss Fintech, 6-9 November 2018.** Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan Misi *Bisnis Fact-Finding Mission on Swiss Fintech*. Kegiatan diikuti sekitar 30 orang yang terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, OJK, bank – bank nasional dan daerah, perusahaan start up, serta jurnalis. Dari pelaksanaan kegiatan, terdapat komitmen kerja sama antara Asosiasi Fintech Indonesia dengan F10 (perusahaan inkubator dan akselerator fintech Swiss) untuk pengembangan dan pembangunan inkubator dan akselerator *fintech* Indonesia. Asosiasi *fintech* Indonesia berencana meluncurkan inkubator dan akselerator *fintech* di awal tahun 2019. Kerja sama berupa transfer knowledge dalam hal manajemen, pengembangan program, dan pendanaan.
- 36) **Pertemuan dengan Kamar dagang Industri Belarus di Minsk; dan Business Gathering di Georgia** Dalam pertemuan dengan *Belarusian Chamber of Commerce and Industry* di Minsk, Belarus, Delri mendorong interaksi *business to business* dan membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Plt. Asdep Kemenko Perekonomian bidang Eropa, Afrika dan Timteng menyampaikan presentasi mengenai potensi dan peluang bisnis dan investasi di Indonesia. Sementara di Tbilisi, 21 Mei 2018, telah dilaksanakan Indonesia – Georgia *Business Gathering* dengan beberapa pelaku bisnis Georgia membahas perlunya peningkatan b-to-b;
- 37) **Partisipasi dalam Sarajevo Business Forum di Sarajevo, 25-26 April 2018.** Bapak Hassan Wirajuda hadir dalam Sarajevo *Business Forum* memberikan keynote speech dengan judul “*Can we work together for a better future?*”. Beliau menyampaikan gagasan bahwa kawasan Eropa Tenggara dan Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan akibat dari potensi konflik yang tinggi antar negara di kawasan. Tetapi keberhasilan ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan selama 51 tahun memberikan kebebasan kepada ASEAN untuk memfokuskan energi dan waktunya pada perkembangan ekonomi. Untuk itu kawasan Balkan dapat menjadikan ASEAN sebagai acuan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan menjaga stabilitas di kawasan;
- 38) **Kegiatan Penggalangan Potensi Kerja Sama Perikanan dan Pariwisata di Provinsi Maluku dengan Negara-Negara Kawasan ETT, 22-24 April 2018.** Kementerian Luar Negeri telah melakukan pertemuan dengan pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Ketua DPD Asita Maluku, LSM Perikanan dan para pelaku usaha tour operator dan akademisi Universitas Pattimura;
- 39) **‘Promosi Potensi Ekonomi dan Investasi Aceh bagi Pelaku Bisnis Turki’ di Banda Aceh, 9-11 Juli 2018.** Provinsi Aceh berkesempatan mempromosikan (*showcasing*) bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi langsung kepada pengusaha Turki. Dilaksanakan forum B2B yang melibatkan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul dan dihadiri pengusaha asal Turki yaitu Hitay *Holding*, Aksa Energi Uretim, dan Rosin Indonesia;

- 40) **Festival Indonesia ke-3 tahun 2018 di Moskow, Rusia diadakan pada 2-5 Agustus 2018.** Rangkaian acara diawali dengan penyelenggaraan Russian-Indonesia *Business Forum* pada 2 Agustus 2018 yang dihadiri sekitar 700 peserta dari Indonesia dan Rusia. Festival digelar di Taman Krasnaya Presnya, Moskow, Rusia pada 3-5 Agustus 2018 dengan total pengunjung sekitar 135.000 orang. Dari pihak Indonesia, Festival dihadiri oleh antara lain Menteri Bappenas, Gubernur Sumatera Barat dan Gubemur Bangka Belitung, sedangkan dari pihak Rusia dihadiri oleh pejabat kantor Walikota Moskow Bidang Hubungan Luar Negeri. Forum bertema "*Industry, Energy and Regional Potential: Trade and Cooperation Opportunities*" dihadiri sekitar 100 peserta yang membahas kondisi dan potensi kerjasama Indonesia - Rusia di bidang perdagangan, industri, energi dan peluang pengembangan daerah di Indonesia;
- 41) **Business Matching bidang TTI dengan Mitra dari Kawasan Eropa Timur dan Tenggara di Bali melalui kegiatan Promosi Peluang Ekspor Indonesia - Belarus di Bali, 4-6 November 2018.** Pertemuan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan bisnis antara pengusaha bidang pertanian dan perikanan di Bali dengan Kedubes Belarus di Jakarta. Para pengusaha Indonesia mendapatkan informasi langsung terkait prosedur dan persyaratan ekspor ikan dan buah-buahan tropis Indonesia ke Belarus. Pihak Belarus mendapatkan informasi lengkap mengenai produk ekspor Indonesia untuk menjawab kebutuhan dalam negeri maupun kawasan Eurasian Economic Union (EAEU) yang meliputi Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan dan Kyrgystan. Kegiatan tidak hanya memfasilitasi pertemuan pelaku usaha Indonesia (*supply*) dan pihak Belarus yang menjadi tujuan ekspor (*demand*) tapi juga mengevaluasi berbagai masalah dan tantangan ekspor produk ikan dan buah-buahan tropis ke Belarus;
- 42) **Kegiatan Penggalangan Pengusaha dari Eropa Timur dan Tenggara ke Indonesia "Indonesia Eastern Europe Business Meeting" di sela-sela Trade Expo Indonesia (TEI) 26 Oktober 2018.** Memanfaatkan momentum TEI untuk kehadiran para pengusaha dari negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tenggara, mengingat cukup sulit menyakinkan pengusaha tersebut untuk datang ke Indonesia. Terjadi peningkatan jumlah delegasi bisnis dari negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tenggara serta nilai potensi perdagangan, khususnya dari Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria dan Rumania;
- 43) **Kegiatan Forum Bisnis RI-Rumania dalam rangka Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) RI-Rumania di Bucharest, Rumania, 28 November 2018.** Kegiatan ini membangun sinergi antara Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Luar Negeri Rumania dan KADIN Rumania untuk mendorong kontak bisnis antar pengusaha Indonesia dan pengusaha Rumania. Pelaksanaan Bisnis Forum diadakan secara *back-to-back* dengan pertemuan WGTII RI-Rumania, sehingga mendapatkan dukungan Kementerian Luar Negeri dan KADIN Rumania.
- 44) **Misi Bisnis Indonesia ke Turki dalam MUSIAD Expo ke-17, 21-24 November 2018.** Kementerian Luar Negeri berperan aktif dalam pelaksanaan misi bisnis pengusaha Indonesia dalam MUSIAD Expo ke-17 guna mendorong tercapainya hasil optimal partisipasi pengusaha Indonesia dalam Expo. Partisipasi Indonesia dalam Expo ini merupakan kali pertama. Stand/booth Indonesia dimanfaatkan untuk promosi produk-produk dari berbagai perusahaan Indonesia. Membuka link antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Turki, dalam pertemuan, Tim juga mengidentifikasi dan mencatat masalah umum yang dihadapi para pengusaha kedua negara. Telah dilakukan juga pertemuan dengan penyelenggara Expo sebagai peninjauan awal rencana partisipasi pebisnis Indonesia dalam MUSIAD Expo ke-18 di Istanbul tahun 2020.
- 45) **"Indonesian-Belarus Expo-Fest 2018"** di Minsk, Belarus. Kegiatan yang pertama kali diselenggarakan di Belarus dengan mendatangkan sejumlah pelaku bisnis Indonesia ke Belarus dengan memfasilitasi business contact antara pelaku usaha Indonesia dengan Belarus. Kegiatan meliputi forum bisnis, *business matching*, seminar, dan pameran budaya dan perdagangan. Kegiatan diperkirakan menghasilkan kesepakatan bisnis senilai sekitar USD 600 ribu.

Prestasi yang berhasil diraih di IKU ini, termasuk perubahan positif yang berhasil diwujudkan dari pencapaian IKU ini, antara lain:

- a) lebih dikenalnya masyarakat budaya dan produk perekonomian Indonesia oleh masyarakat di negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa;
- b) memberikan akses dan kemudahan bagi kalangan pengusaha Indonesia untuk mempromosikan produk ekspor Indonesia di kawasan Amerika Eropa;
- c) membuka peluang kerja sama antar pengusaha Indonesia dan negara mitra dalam bidang TTI;
- d) ekspansi pasar produk Indonesia di negara mitra;
- e) meningkatnya jumlah investasi ke Indonesia dari kawasan Amerika dan Eropa;
- f) meningkatnya nilai perdagangan dengan negara-negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa;
- g) meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dari kawasan Amerika dan Eropa; Keberhasilan dalam mencapai target IKU ini, Kementerian Luar Negeri melakukan inovasi/ terobosan antara lain
- a) mendorong pengusaha Indonesia untuk berpartisipasi pada pameran TTI di negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa yang belum mengenal Indonesia, terutama di pasar-pasar non-tradisional kawasan Amerika Selatan, Tengah dan Karibia, serta Eropa Timur;
- b) memanfaatkan kesempatan pada pameran TTI untuk melakukan one-on-one /business meeting yang melibatkan pengusaha setempat;
- c) meminta perwakilan RI untuk mengidentifikasi jadwal pameran TTI yang dapat diikuti oleh pengusaha Indonesia;
- d) melaksanakan rapat interkem untuk memperoleh data dan informasi peluang kerja sama TTI dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa;
- e) mengadakan penggalangan pengusaha-pengusaha daerah untuk berpartisipasi pada berbagai pameran internasional TTI di wilayah Amerika dan Eropa.

Meskipun capaian pada IKU ini sangat signifikan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a) promosi TTI yang dilaksanakan masih bersifat sporadis dan belum terdapat sinergi di kalangan K/L teknis dalam pelaksanaannya. Hal ini antara lain disebabkan masih terdapat perbedaan di kalangan pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas wilayah ataupun negara yang perlu digarap;
- b) dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk dapat berpartisipasi pada pameran internasional di sebagian kawasan Amerika dan Eropa;
- c) pelaksanaan kegiatan seringkali tergantung pada kesiapan mitra tersebut, mengingat kegiatan promosi bekerjasama dengan instansi lainnya atau pemerintah setempat di negara mitra.
- d) Jumlah pengusaha Indonesia yang ikut serta dalam kegiatan promosi TTI tidak memenuhi kuota. Hal ini kemungkinan disebabkan karena masih adanya stigma yang belum melihat beberapa negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagai pasar potensial.
- e) Pembatalan acara pameran oleh pihak penyelenggara setempat, dikarenakan dinamika situasi politik dan keamanan negara penyelenggara yang kurang kondusif.
- f) Berkurangnya dukungan APBN untuk ikut membiayai partisipasi UKM dalam kegiatan promosi.
- g) Masih rendahnya motivasi para pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan promosi perdagangan di negara-negara pasar prospektif, karena adanya faktor keterbatasan informasi yang dimiliki terkait potensi di negara-negara tersebut serta besarnya biaya yang

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan stakeholders terkait mengupayakan berbagai langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan forum bisnis untuk memberikan sosialisasi kepada dunia usaha nasional mengenai potensi dan peluang ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, khususnya ke pasar prospektif (non-tradisional).

- b. Terkait pembatalan acara promosi/pameran TTI oleh pihak penyelenggara setempat, diupayakan untuk mendorong pihak penyelenggara untuk menjadwalkan ulang kegiatan pameran/promosi atau mengarahkan anggaran kegiatan promosi TTI ke event pameran/promosi TTI lainnya.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan instansi terkait guna mengupayakan sponsorship bagi UKM untuk mengikuti kegiatan promosi.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan market intelligence sebagai sumber data dan informasi bagi para pengusaha nasional terkait berbagai potensi yang ada di negara-negara pasar prospektif.

Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan RI serta stakeholders terkait lainnya untuk peningkatan jumlah pelaksanaan program promosi, khususnya promosi perdagangan yang terpadu dan bersinergi, baik antar kementerian pemerintah, maupun sektor pelaku usaha dan pelaku ekspor melalui pameran dagang, misi dagang, *instore promotion*, pembangunan pusat-pusat promosi produk potensi ekspor Indonesia di luar negeri (misalnya: *Indonesia Trading House dan House of Indonesia*), serta *buying mission*. Salah satu kegiatan promosi yang perlu ditingkatkan adalah pameran dagang berskala internasional yang dilaksanakan di dalam negeri (seperti: *Trade Expo Indonesia*), sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak lagi pelaku usaha nasional dengan biaya yang relatif lebih murah.
- b. Meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan terkait dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan promosi yang sifatnya terintegrasi antara sektor investasi, perdagangan dan pariwisata (*trade, tourism and investment - TTI*) serta budaya dan kuliner Indonesia, termasuk melibatkan Pemerintah Daerah dan sektor swasta lainnya. Promosi TTI tersebut dilakukan dengan sistem tematik yang disesuaikan dengan perkembangan waktu dan kecenderungan kebutuhan konsumen.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Perwakilan RI untuk menggalakkan pelaksanaan promosi TTI secara *“door-to-door”* kepada konsumen potensial di negara akreditasi. Kegiatan ini selain untuk promosi TTI juga bertujuan untuk dapat memperoleh feed back secara spesifik dari masing-masing konsumen potensial, khususnya terkait kemungkinan perlunya fasilitasi *business matchmaking* dengan *stakeholders* terkait di Indonesia, serta kendala yang mungkin dihadapi di lapangan, sehingga dapat diupayakan penyelesaiannya.

Sebagai proyeksi kedepan, Kementerian Luar Negeri akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) meningkatkan intensitas kerja sama dengan perwakilan RI dan K/L teknis terkait promosi TTI di kawasan Amerika dan Eropa;
- b) mendorong partisipasi para produsen/eksportir produk lokal Indonesia untuk berpartisipasi dalam promosi TTI baik di pasar tradisional maupun non tradisional kawasan Amerika dan Eropa;
- c) meningkatkan inisiatif untuk menggalang pengusaha di daerah guna mengikuti pameran TTI di kawasan Amerika dan Eropa.

Analisis Sub IKU-8: “Persentase Naskah Mengenai Kebijakan Indonesia di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dimuat di Berbagai Media Berbahasa Asing”

Sub IKU ini untuk mengukur seberapa banyak kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang telah dihasilkan Kemlu. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai artikel, *press release*, *interview*, diseminasi dan kegiatan yang dimuat di media, khususnya media berbahasa asing.

Selama tahun 2018 Kemenlu c.q. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) telah menerbitkan naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diajukan sebanyak 26 dari target 26 naskah, dengan capaian sebesar 111,11%, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-2 B.2 Tahun 2018

Sub IKU-1 B.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Naskah Mengenai Kebijakan Indonesia di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dimuat di berbagai Media Berbahasa Asing	Jumlah Naskah mengenai Kebijakan Indonesia di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dimuat di berbagai media berbahasa Asing	26
	Jumlah Naskah Mengenai Kebijakan Indonesia di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diajukan	26
	Realisasi	100%
	Target	90%
	Capaian	111,11%

Beberapa artikel di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterbitkan, atau naskah *press release* dan wawancara khusus yang menjadi artikel atau *report* di media massa diantaranya adalah sbb:

Indo - Pacific

- (i) Kemenlu telah menerbitkan artikel yaitu “*Time for ASEAN to drive the Indo Pacific Process*” yang dimuat pada surat kabar Singapura *The Strait Times*. Artikel ditulis oleh Dr. Arifi Saiman (Kapus P2K2 Aspasaf, BPPK-Kemenlu) dan Endy Bayuni (Editor *The Jakarta Post*) dalam menyambut ASEAN Summit di Singapura pada tanggal 11-15 November 2018. Artikel tersebut menegaskan pentingnya Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk memimpin dalam proses penyusunan konsep Indo Pasifik.
- (ii) Artikel: *Indonesia Connection: Indonesia for air, maritime connectivity with TN, keep on improving ties with India* terbitan *The Deccan Chronicle*, surat harian terbesar di Chennai, India. Artikel tersebut merupakan bagian dari *press release* yang diluncurkan pada saat pelaksanaan kegiatan Seminar dan Bisnis Forum Indonesia – India di Andaman-Nicobar dan Chennai pada tanggal 29 November – 1 Desember 2018.

INDONESIA CONNECTION

Indonesia for air, maritime connectivity with TN, keen on improving ties with India

J V SIVA PRASADHAN
KUMAR | DC
CHENNAI, DEC 1

With Tamil Nadu's proximity to Indonesia, that country is keen on exploring ways and means to ensure direct air and maritime connectivity with Tamil Nadu. Indonesia's instant noodles and agricultural products are the other areas that Indonesia is eager to export to India.

"Unfortunately we don't have direct flight from Sumatra to Chennai. Until now the flight is through different countries like Malaysia or Singapore. So, hopefully the commitment of the new leader - Prime Minister Narendra Modi and President Joko Widodo besides business men will help materialise the air and maritime connectivity," says Ase Subandjar, Consul

General of the Republic of Indonesia, Manado.

Mr Subandjar who led a business delegation to the city on Saturday says his team from Aceh, a province of Indonesia, located at the northern end of Sumatra, was in Arakmana and discussed with the chamber of commerce there to improve the bilateral ties.

"Tamil Nadu shares a common maritime border with us and both Tamil Nadu and Aceh would stand to gain if the maritime, aviation and tourism sectors are developed," Mr Subandjar said. On a visit to Chennai, the top official evaded hope that the heads of the two countries would take the bilateral trade to greater heights.

Launching cruise tourism too had emerged during the talks between the two heads. "Now this is the challenge the two countries face as Indonesia's border with

Chennai is very close - just about 90 nautical miles," he said and added that Garuda Indonesia Airlines operated direct flight from Mumbai to Bali but not to Jakarta. Direct air connectivity with Chennai would drastically reduce travel time, he asserted during a chat with this *Asian Chronicle* correspondent.

Ready to export construction material: There is tremendous potential for business to grow in the Aceh and Chennai regions, as they are geographically close. "That is why we are in Chennai. We can provide construction material, including sand, which is so scarce in Chennai," he added.

"Aceh is ready to export construction material to Chennai. We can provide the construction of houses. I wish to see more interaction.

Please come to Aceh for exploring the business on both the sides," Mr Subandjar urged.

Indonesia is most attractive destination to Indians: Indonesia is one of the most attractive destinations to Indian tourists with its rich culture, wonderful nature, friendly people and much more that will make a once-in-a-life time experience. Among the key attractions are: spa, ecotourism, marine tourism and MICE and these draw visitors. Further, the Visit Free Visa facility opened by Indonesia for Indian nationals make it easier for Indian travellers to visit Indonesia.

India has been ranked sixth among the top ten tourism markets for Indonesia and the number of Indian visitors are increasing steadily. Indonesia has set target of

7,00,000 Indian Tourists visiting Indonesia in 2023 against 4,80,354 in 2017. "With the commencement of non-stop flight of Garuda Indonesia Airlines from Mumbai to Bali we are sure to achieve this goal," he said.

Indonesia's stunning natural landscape offers plethora of opportunities for Indian film industry to explore the splendour and reap good harvests.

"Both the countries share much in common - geographical expanse, size and diversity of the population, culture, history and a colonial past as well as the similar direction of foreign policies in the post-independence era.

History informed us that the India-Indonesia relation dates back long ago when the Indian traders arrived in Indonesia in the 1st Century. Both have been having trade and cultural links for the last 2,000 years," he said.

INDIA'S LINK WITH INDONESIA IS OVER 2,000 YEARS OLD

Chennai: Indonesia finds mention in our epics. Java in *Yanubhiga* and Sumatra is *Suvarnadvipa*. The *Kumudini* region, it is said, has originated from Cambodia or Kamboja or Kambhaja in the Indian texts.

India's connection with Indonesia, especially the trade and cultural links, is over 2,000 years. Even to this day, a ship sails from the port of Paradeep in Orissa to Bali and the voyage is known as *Bali Vatra*.

An early Hindu archaeological relic of a Ganesha statue from the 1st Century AD has been found on the summit of Mount Rinjani in Puraikan Island and another in the area of Rami on the Mahakam River in east Kalimantan.

Three rough plates dating from the beginning of the fourth century are recorded in the *Pallavi* script of India.



■ Liputan Media The Deccan Chronicle The Indonesia - India Seminar and Business Forum di Andaman Nicobar dan Chennai, 20 November 2018



■ Ekspedisi kapal Aceh - Andaman Nicobar dalam rangka Pengembangan Konektivitas dan Kerja Sama Ekonomi Aceh dan Andaman Nicobar, 11 Desember 2018

IMF dan Ekonomi Global

(iii) (Artikel dari Dr. Awidya Santikajaya (Kasubbid Kajian...) yang berjudul "*Chance to Push for IMF Quota Reform?*") telah dimuat di harian the Jakarta Post pada tanggal 18 Januari 2018. Artikel tersebut membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan reformasi pada susunan dan formasi IMF. Isu reformasi IMF telah lama menjadi tren pembahasan diantara negara-negara berkembang dengan mempertimbangkan bahwa saat ini tengah terjadi pergeseran pada struktur dan distribusi ekonomi global. Tekanan dari negara-negara G-20 dan BRICS juga semakin memanasakan isu mengenai reformasi IMF tersebut. Pertemuan tahunan IMF tahun 2018 yang dilaksanakan di Indonesia akan menarik untuk diikuti, khususnya mengenai isu reformasi IMF. Artikel tersebut juga membahas mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Indonesia dalam menanggapi isu reformasi tersebut.

(iv) Middle Power dan Isu Ekonomi Global

(v) Artikel dari Dr. Awidya Santikajaya (Kasubbid Kajian Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup) yang berjudul "*MIKTA's Future: from a consultative to a 'functional group' of middle powers*" dan artikel dari Dr. Siswo Pramono (Kepala BPPK, Kemenlu) yang berjudul "*The Potential of Palm Oil Based energy in Indonesia: MIKTA's sharing experience on renewable energy*" telah dimuat pada Buku Bunga Rampai "*MIKTA: Current situation and The Way Forward*" (Tahun 2018, ISBN:9786025135804).

Geopark Natuna, Diplomasi Perbatasan, dan Pengembangan Pariwisata

(vi) Melalui *press release*, *interview* dan media diseminasi lainnya, kegiatan Kemenlu mengenai pembentukan Geopark Natuna telah dimuat secara luas di media berbahasa asing. Pokok liputan dari media berbahasa asing adalah mengenai pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Natuna melalui rencana pencalonan Natuna sebagai geopark nasional serta masuk kedalam *Global Geopark Network* (GGN) of UNESCO. Artikel tersebut menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Pemerintah Kabupaten Natuna telah melaksanakan penelitian dan pengkajian mengenai potensi geologi yang dimiliki Natuna untuk diajukan sebagai geopark nasional dan GGN. Selain potensi geologi, penelitian dan pengkajian yang dilakukan di Natuna juga menyentuh bidang budaya, sejarah, dan pariwisata.



■ BALIHO DI RANAI, NATUNA. Kementerian Luar Negeri melalui koordinasi dengan berbagai Kementerian/ Lembaga terkait telah berhasil menghantarkan Natuna menjadi Geopark Nasional pada tanggal 18 November 2018. Selanjutnya, mulai tahun 2019 akan diperjuangkan menjadi Global Geopark Network of UNESCO

Kelapa Sawit dan Diplomasi Ekonomi

- (vii) Selain itu, Kemenlu bekerja sama Universitas Jambi (UNJA) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) telah melaksanakan *Executive Oil Palm Program* bagi para Duta Besar negara anggota Uni Eropa untuk Indonesia pada 15-18 April 2018 dan *Regular Oil Palm Course (ROPC)* 2018 bagi warga Eropa di Bogor dan Jambi pada 19-26 November 2018. Melalui *press release*, wawancara, dan media diseminasi lainnya, kegiatan ini memperoleh publikasi yang cukup luas dan telah dimuat dalam Kantor Berita Spanyol, EFE, pada tanggal 19 November 2018 dengan judul *"Aceite de palma sacó de la pobreza a 10 millones de personas, según Indonesia"*.
- (viii) Salah satu Alumni ROPC, Mr. Markus Wolter, yang bekerja di *World Wildlife Fund (WWF)*, telah menulis artikel pada tahun 2018 yang dimuat dalam website WWF yang berjudul *"Try Sumatera: How Palm Oil can become more sustainable"*. Dalam artikel ini disampaikan bahwa dirinya telah diberikan kesempatan mengikuti ROPC dan berkunjung ke Jambi, untuk belajar langsung mengenai perkebunan sawit di Sumatera. Dalam tulisannya, ditekankan bahwa terdapat masa depan yang cerah bagi perkebunan sawit Indonesia, karena telah dibuktikan secara ilmiah bahwa perkebunan sawit dapat digabungkan dengan tanaman lain, tanpa mengurangi produktivitasnya (Sistem Tumpang Sari Sawit).



■ HASIL KONKRIT DIPLOMASI SAWIT. Artikel Markus Wolter (Alumnus ROPC) dalam website WWF yang berjudul *"Try Sumatera: How Palm Oil can become more sustainable"*

- (ix) Melalui *press release* dan media diseminasi lainnya, kegiatan Kementerian Luar Negeri telah dimuat di media berbahasa asing, yakni *"The potentials of Economic Cooperation with Visegrad"*, yang dimuat di Harian Bali Post. Dalam tulisan tersebut disampaikan bahwa masih terdapat potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia di wilayah Visegrad.



■ Pembukaan Oil Palm Course 2018 oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Jakarta, 19 November 2018

Indonesianis dan Penguatan Kajian mengenai Indonesia

- (x) Selain menyusun naskah mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya, Kementerian Luar Negeri c.q. BPPK juga mendorong peran para Indonesianist, khususnya Generasi Millennial untuk lebih mempromosikan Indonesia di dunia internasional melalui tulisan/naskah ataupun karya ilmiah. Kegiatan *Focused Group Discussion: "The World Indonesianist Forum: the Role of Millennial Generation"* di Denpasar Bali pada 28 - 30 Oktober 2018 dihadiri oleh 213 orang Indonesianist dari 43 negara yang sedang mengajar atau studi di berbagai universitas di Indonesia.



■ WORLD INDONESIANIST FORUM 2018. Menlu RI menggalang kecintaan generasi milenial asing pada Indonesia, Denpasar, 30 Oktober 2018

Uraian:

1. "Indonesia tries educating Palm Oil Critics", artikel di Bangkok Post, 15 Januari 2018;
2. *Chance to push for IMF quota reform*, artikel di the Jakarta Post, 18 Januari 2018;
3. *Try Empathy at ASEAN – Australia Talks*, *The Jakarta Post*, 13 Maret 2018;
4. "Indonesia told to Accelerate CEPA talks with EFTA", artikel di Jakarta Post, 3 Maret 2018;
5. *The potential of palm-oil based energy in Indonesia: MIKTA's sharing experience on renewable energy*; diterbitkan pada buku *MIKTA: Current Situation and the Way Forward*, Maret, 2018;
6. *MIKTA's Future: from a consultative to a "functional group" of middle powers*; diterbitkan pada buku *MIKTA : Current Situation and the Way Forward*, Maret, 2018;
7. "The New Global Landscape and the Geopolitics in the Asia and Pacific Region", artikel di FUNAG, Brazil, 28 Maret 2018;
8. *Forum a Mantra For Closer Indonesia – Africa ties*, oleh Kepala P3K2 Aspasaf, *The Jakarta Post*, 10 April 2018;
9. "The Potentials Economic Cooperation with Visegrad", artikel di Bali News, 16 Mei 2018;
10. "Palm Oil and Prejudice: The Need Scientific-Based Data", artikel di Majalah Indonesia Invites, Juni 2018;
11. "Palm Oil not Threat to nature: Research", artikel di Jakarta Post, 18 April 2018;
12. *Natuna has potential to become global geopark: Foreign Affairs Ministry*, artikel di Antaranews, 5 Juli 2018;
13. *ACCI delegation visiting Sumatera from Andaman to Fulfill Modi's dream*, oleh n/a, *United News of India*, 8 Juli 2018;
14. *Asian Games a Success if Legacy Prevails*, *The Jakarta Post*, 19 Agustus 2018
15. *Regulating Chinese Workers under Belt and Road*, oleh Kepala P3K2 Aspasaf, *The Jakarta Post*, 20 Agustus 2018;
16. "Foreign Ministry holds World Indonesianist Forum to Discuss Millenials' Roles", artikel di *Antara News online*, 30 Oktober 2018;
17. *Indo Pacific Regionalism Rises, May Need New Name*, oleh Kepala P3K2 Aspasaf, *The Jakarta Post*, 6 November 2018;
18. *Time for ASEAN to drive the Indo-Pacific process: Jakarta Post Writers*, oleh Kepala P3K2 Aspasaf dan Endy M. Bayuni, *The Straits Times*, 7 November 2018;
19. *Second Indonesia-Australia-India Senior Officials' Strategic Dialogue, Canberra, Australia, Media Release* dari Website Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 11 November 2018
21. *India, Indonesia Explore Potential Of Cooperation Between Sumatera Islands And Andaman And Nicobar Islands*, oleh n/a, *BW BUSSINESWORLD*, 12 November 2018;
22. "11 Countries to participate in Regular Oil Palm Course 2018", artikel di *Republika online* edisi Bahasa Inggris, 17 November 2018;
23. "Foreign Ministry to Organize Palm Oil Course", artikel di *Antara News*, 17 November 2018;
24. "Aceite de palma sacó de la pobreza a 10 millones de personas, según Indonesia", artikel di website Kantor Berita Spanyol, EFE, 19 November 2018;
25. *Palm Oil Support 20 Percent of Indonesia Population*, artikel di situs BPDP-KS dalam Bahasa Inggris, 20 November 2018;
26. *Indonesia-India Seminar and Business Forum Deccan Chronicle Newspaper* <http://epaper.deccanchronicle.com/articledetailpage.aspx?id=12001501>.

Secara umum **tidak terdapat kendala** yang berarti dalam peliputan media asing dalam kegiatan Kementerian Luar Negeri, untuk topik-topik kegiatan di atas. Namun demikian, partisipasi dan ketertarikan dari media asing masih dapat terus ditingkatkan untuk diseminasi informasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi dan ketertarikan dari media asing, maka perlu dilakukan peningkatan engagement dengan media; termasuk dengan menyediakan sumber informasi yang memadai dan kredibel serta terus berinovasi untuk menarik minat media dalam meliput kegiatan Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri telah menyediakan data-data dan analisa sebagaimana yang diminta oleh para jurnalis untuk tulisan-tulisan mereka.

Langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, mengintensifkan media gathering, serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan RI di Luar Negeri untuk pendekatan ke berbagai media asing di wilayah akreditasi, agar naskah-naskah kegiatan yang diselenggarakan dapat dimuat di media tersebut.

Analisis Sub IKU-9 : Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi sosial dan budaya yang diterima di berbagai fora internasional

Sepanjang tahun 2018, realisasi Sub **Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi sosial dan budaya yang diterima di berbagai fora internasional** sebesar 100% dari target 80%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Sub IKU-9 B.2 Tahun 2018

Sub IKU-8 B.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi sosial dan budaya yang diterima di berbagai fora internasional	Jumlah diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang <u>diterima</u> di berbagai fora internasional	34
	Jumlah diskursus mengenai kebijakan Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang <u>diajukan</u> di berbagai fora internasional	34
	Realisasi	100%
	Target	80%
	Capaian	125%
	Batas Toleransi	120%

Kegiatan diskursus dengan mitra asing (pemerintah maupun lembaga non pemerintah) dalam bentuk *Workshops/Courses*, FKKLN, *Policy Research Meetings*, *Policy Planning Consultations/Dialogues*, *Focus Group Discussions*, dll, direfleksikan dalam *output* berupa *briefing note* dan laporan lainnya, yang disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri.

Dalam berbagai *briefing note* dan laporan tersebut, termasuk pula *output* laporan mengenai penyelenggaraan diplomasi ekonomi di sektor kelapa sawit. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan *Executive Oil Palm Program for EU Ambassador* di Jambi, 15-18 April 2018, dihadiri oleh 7 Duta Besar dan 2 diplomat Uni Eropa di Indonesia.



■ Para Duta Besar dan diplomat Uni Eropa di Indonesia tengah berkunjung di perkebunan kelapa sawit di Jambi, dalam program *Executive Oil Palm Program for EU Ambassador*, tanggal 16 April 2018

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan diskursus ekonomi dan sosial budaya, khususnya terkait posisi Indonesia mengenai Sawit Berkelanjutan. Pada tanggal 18-26 November 2018 dilaksanakan *Regular Oil Palm Course (ROPC)* di Bogor dan Jambi, dihadiri oleh kalangan akademisi, jurnalis, dan pengusaha dengan jumlah 15 orang dari 11 negara. Dalam rangka diseminasi hasil kajian Sawit, telah dilakukan kunjungan pada 2-9 Desember 2018 ke Den Haag, Frankfurt dan Brussel untuk melakukan penyebaran informasi positif terkait dengan Sawit lestari dengan LSM bidang pelestarian lingkungan, *Stichting Both Ends*, *Sustainable Palm Oil Forum (FONAP)*, *WWF* dan *Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil (BASP)* serta *European Palm Oil Association*.

Di samping itu, untuk pertama kali telah diadakan *Oil Palm Course for Peace 2018*, berkolaborasi dengan Pemerintah Kolombia untuk berbagi informasi atas proses perdamaian kepada para mantan Kombatan di Kolombia, Filipina, Thailand, Papua Nugini dan Provinsi Aceh melalui negosiasi perdamaian dan penanaman kelapa sawit bagi kesejahteraan para mantan kombatan. Kementerian Luar Negeri juga secara aktif ikut berpartisipasi pada pertemuan/*workshop/ seminar/diskusi* tingkat internasional dalam rangka penyampaian diskursus berbagai kebijakan nasional Indonesia. Salah satu bentuk konkrit partisipasi Kementerian Luar Negeri adalah keikutsertaan pada *Brisbane Roundtable Diplomacy in the Indo-Pacific*, *Griffith University, Brisbane, Australia*.

Kementerian Luar Negeri juga secara aktif ikut berpartisipasi pada pertemuan/*workshop/ seminar/diskusi* tingkat internasional dalam rangka penyampaian diskursus berbagai kebijakan nasional Indonesia. Salah satunya melalui pertemuan *The 2nd MIKTA Policy Planning Consultation*. Indonesia menyampaikan diskursus terkait *renewable energy and energy security*. Negara-negara anggota MIKTA menyadari adanya peningkatan kebutuhan energi dalam skala global, dan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan dapat menjawab permintaan tersebut. Untuk itu, perlu kerja sama riset, terutama dalam efisiensi energi, energi terbarukan, akses energi, dan bauran energi. Dapat juga dilaksanakan *energy expert meeting* yang memungkinkan negara-negara MIKTA mempresentasikan *best practices* dalam pengembangan energi terbarukan, misalnya Indonesia dalam *CPO-based power plant*.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan Diskusi Terbatas mengenai Kekayaan Alam dan Budaya di Natuna sebagai Aset Diplomasi Budaya Maritim. Diskusi Terbatas dimaksud diselenggarakan sebagai bentuk dari upaya untuk merealisasikan roadmappencalonan Kepulauan Natuna sebagai geopark nasional serta *Global Geopark Network (GGN) of UNESCO*. Pengembangan potensi kekayaan alam dan budaya Kepulauan Natuna merupakan aset/instrumen penting diplomasi budaya maritim nasional yang ditujukan tidak saja untuk pengembangan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat setempat, namun juga bagi penguatan wilayah Kepulauan Natuna sebagai bagian utuh kedaulatan NKRI.

Selain itu, diskursus terkait modalitas pelaksanaan KSS Indonesia, telah disampaikan pada pertemuan *Regional Consultation on South-South Cooperation for Asia dan the Pacific: Towards the Buenos Aires Plan of Action 40th Anniversary*. Visi Indonesia dalam pelaksanaan KSS adalah *A better partnership for prosperity*, yang berlandaskan pada prinsip *equality, mutual respect, non-conditionality, sharing of experience, knowledge and comparative advantages, demand driven and striving of mutual benefits, dan opportunities and sustainability*. Disampaikan pula mengenai program *flagship* dalam penyelenggaraan KSS Indonesia yaitu di bidang *development issue, good governance, dan economic issues* beserta beberapa contoh program KSS yang telah dilaksanakan oleh Indonesia.

Uraian:

1. *Policy Planning Dialogue Indonesia - India*, New Delhi, 15-16 Januari 2018;
2. *Policy Research Meeting (PRM)* di Stockholm, Swedia 29-31 Januari 2018;
3. FKKLN “Pengembangan Kerja Sama Ekonomi Komoditas dan Investasi Strategis Indonesia-Afrika”, Bandung, 2 Februari 2018;
4. *Focus Group Discussion* terkait Kajian Mandiri “Memanfaatkan Konektivitas Perdagangan dan Investasi di wilayah Zona Ekonomi Khusus Aqaba, Yordania” Februari 2018;
5. *MIKTA Policy Planning Consultation*, Surabaya, 20 – 22 Februari 2018
6. FKKLN EFTA bersama Kedutaan Besar Switserland membahas isu tentang *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) currently negotiated between the European Free Trade Association (EFTA) and Indonesia*, Depok, 2 Maret 2018;
7. FKKLN “Strategi Diplomasi Indonesia di Asia Selatan” di Universitas Sumatera Utara, Medan, 23 Maret 2018;
8. *Policy Planning Dialogue/Consultation* terkait Kajian Mandiri “Memanfaatkan Konektivitas Perdagangan dan Investasi di wilayah Zona Ekonomi Khusus Aqaba, Yordania” ke Mesir, April 2018;
9. “Peluang Kerja Sama RI – Brazil di Bidang Ekonomi dan Perdagangan : Masukan awal dalam rangka Persiapan Kunjungan Presiden Brazil”, 11 April 2018;
10. *Policy Planning Dialogue (PPD)* RI-Iran, Teheran, 28 April 2018;
11. *Policy Planning Dialogue/Consultation* terkait Kajian Mandiri “Memanfaatkan Konektivitas Perdagangan dan Investasi di wilayah Zona Ekonomi Khusus Aqaba, Yordania” ke Yordania, Mei 2018;
12. FKKLN “Pengembangan Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia-Mercosur”, Yogyakarta, 11 Mei 2018;
13. FKKLN “ASEAN dalam Konsep Indo-Pasifik: Tantangannya dan Peran Indonesia”, Jember, 14 Mei 2018;
14. FKKLN “*Indonesia Economic Diplomacy : Economic Cooperation Towards Visegrad*”, Bali, 16 Mei 2018;
15. *Policy Planning Dialogue/Consultation* terkait Kajian Mandiri “Memanfaatkan Konektivitas Perdagangan dan Investasi di wilayah Zona Ekonomi Khusus Aqaba, Yordania ke Turki, Juni 2018;
16. *Policy Planning Dialogue/Consultation* terkait Kajian Mandiri “Memanfaatkan Konektivitas Perdagangan dan Investasi di wilayah Zona Ekonomi Khusus Aqaba, Yordania ke Perserikatan Emirat Arab, Juni 2018;
17. *Briefing Note* mengenai “Kekayaan Alam dan Budaya di Natuna sebagai Aset Diplomasi Budaya Maritim”, 22 Juni 2018;
18. *Policy Planning Dialogue (PPD)* RI-Pakistan, di Islamabad, 9 Juli 2018;
19. Diskusi Terbatas Kajian “Pengembangan energi Berbasis Kelapa Sawit di Pasar Tradisional, Pasar Non-Tradisional dan Peluang Investasi Asing ke Pasar Dalam Negeri”, Jakarta, 3 September 2018;
20. *Policy Planning Dialogue (PPD)* RI-Korea di Jakarta, 3 September 2018;
21. *Policy Research Meeting (PRM)* dalam rangka kajian mandiri BPPK, Kemenlu, di Budapest, Hongaria, 2-3 April 2018;

22. *Executive Oil Palm Program for EU Ambassador* di Jambi, 15-18 April 2018;
23. *Policy Planning Dialogue (PPD) RI-Vietnam*, di Jakarta, 22 Juni 2018;
24. *Regional Consultation on South-South Cooperation for Asia dan the Pacific: Towards the Buenos Aires Plan of Action 40th Anniversary*, di Bangkok, Thailand, 26-30 Juni 2018
25. "Kebijakan Proteksionisme AS terhadap Uni Eropa", Edisi Juli-September 2018;
26. *Policy Planning Dialogue/Consultation* terkait Kajian Mandiri "Memanfaatkan Konektifitas Perdagangan dan Investasi di wilayah Zona Ekonomi Khusus Aqaba, Yordania ke Australia, 12 September 2018;
27. *Policy Planning Dialogue/Consultation* terkait Kajian Mandiri "Memanfaatkan Konektifitas Perdagangan dan Investasi di wilayah Zona Ekonomi Khusus Aqaba, Yordania ke Belgia dan Belanda, tanggal 15-19 September 2018;
28. "Keanggotaan Indonesia dalam Kerja Sama *Regional Pacific Alliance* dari *observer* menjadi *associate member*", Edisi Oktober-Desember 2018;
29. Seminar Internasional "*IORA and Dialogue Partners*" Surabaya, 8 November 2018;
30. *Regular Oil Palm Course (ROPC)* di Bogor dan Jambi, 18-26 November 2018.
31. *Indonesia - India Business Forum Port Blair*, Andaman Nicobar, India, 29 November 2018;
32. *Indonesia - India Business Forum Chennai*, India, 1 Desember 2018;
33. Diseminasi Hasil Kajian Sawit Lestari di Belanda, Jerman dan Belgia, 2-9 Desember 2018;
34. *Oil Palm Course for Peace*, di Jambi, 10-14 Desember 2018.

Hal-hal atau kendala yang dihadapi umumnya adalah karakter sistem internasional yang kental dengan kepentingan tiap negara / aktor yang berbeda. Hal ini membuat prioritas kepentingan Indonesia tidak selalu sejalan dengan prioritas kepentingan negara mitra. Namun demikian, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan justru menjadi fondasi yang kuat untuk membangun *common ground* antara Indonesia dengan negara mitra. Dengan demikian Kementerian Luar Negeri c.q. BPPK dapat terus memainkan perannya sebagai aktor semi *think tank/track 1,5* dalam menggali berbagai isu ekonomi, sosial dan budaya untuk dibicarakan pada forum-forum formal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Diskursus perlu disusun dengan muatan substansi yang lebih matang sehingga dapat meyakinkan para pemangku kepentingan di negara terkait mengenai pentingnya konsep bersama yang mencakup kepentingan semua pihak.

Langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan menyusun dan menawarkan konsep yang dapat diterima negara mitra dan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak.

Sasaran Strategis (B.3): Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI yang Prima



Pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan adanya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut dituangkan dalam Nawa Cita Jokowi - JK tentang upaya menghadirkan negara untuk melindungi hak dan keselamatan Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya Pekerja Migran Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban negara untuk melindungi WNI kemudian ditegaskan kembali dalam Nawa Cita Presiden RI yang menyebutkan bahwa isu perlindungan WNI merupakan salah satu program prioritas dalam visi - misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 - 2019, yaitu "Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara".

Untuk memperkuat komitmen melindungi WNI sesuai dengan amanat konstitusi, Kementerian Luar Negeri selama empat tahun terakhir telah meningkatkan upaya perlindungan melalui dua langkah. Pertama, perubahan corporate culture para diplomat Indonesia untuk memberikan perlindungan secara lebih optimal kepada WNI. Kedua, meningkatkan pembangunan sistem perlindungan termasuk melalui inovasi teknologi.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 01/B/RO/IV/2015/01 tanggal 6 April 2015 menyatakan bahwa “arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri ke-5 adalah Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, serta pemberdayaan diaspora, yang diwujudkan melalui 5 (lima) langkah strategis, yaitu:

- 1) Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan;
- 2) Memperkuat sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di dalam dan luar negeri, dengan memperhatikan aspek pencegahan (prevention), deteksi dini (early detection), dan perlindungan secara cepat dan tepat (immediate response);
- 3) Memperkuat diplomasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri melalui pembentukan instrumen internasional untuk perlindungan WNI, upaya pengampunan bagi WNI yang terancam hukuman mati, dan repatriasi WNI serta meneruskan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik;
- 4) Mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri;
- 5) Memperkuat sinergi dalam perlindungan WNI di luar negeri dengan komunitas Indonesia di luar negeri serta pelayanan dan pemberdayaan diaspora dan masyarakat madani”.

Selaras dengan agenda Nawacita Prioritas Nasional 2015-2019 yaitu **“Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara”** dan Visi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”**, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler memiliki visi yaitu **“Menjadi penggerak utama pelayanan publik dan perlindungan WNI BHI yang prima”**.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler memiliki 3 (tiga) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dan memperkuat diplomasi Perlindungan WNI BHI pada tataran bilateral, regional, dan multilateral, serta memberdayakan diaspora.
2. Mewujudkan pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik yang profesional.
3. Memperkuat organisasi, manajemen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.



Analisis IKU-1 : “Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI”

Pada tahun 2018, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI menyusun strategi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut, antara lain penetapan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di angka 4 (skala 4) sesuai dengan Lampiran C1 pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenlu. Serta menetapkan Indeks IKU dalam pengukuran kinerja perlindungan WNI dan BHI yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri tahun 2018 sebesar 82,21 yang telah dicantumkan dalam Lampiran B3 IKU Kemenlu tahun 2018.

Penetapan IKU Direktorat Perlindungan WNI dan BHI tahun 2018 masih melanjutkan struktur IKU sebelumnya, yaitu dari pengukuran capaian target IKU “Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI” melalui 3 (tiga) Sub IKU berikut:

1. Sub IKU-1 : Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri, dengan bobot 65%;
2. Sub IKU-2 : Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, dengan bobot 20%;
3. Sub IKU-3 : Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, dengan bobot 15%.

IKU “Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI” diukur melalui penjumlahan realisasi masing-masing sub iku dengan pembobotan yang berbeda dan melalui beberapa komponen, dengan formula:

$$(65\% \times \text{Realisasi Sub IKU 1}) + (20\% \times \text{Realisasi Sub IKU 2}) + (15\% \times \text{Realisasi Sub IKU 3})$$

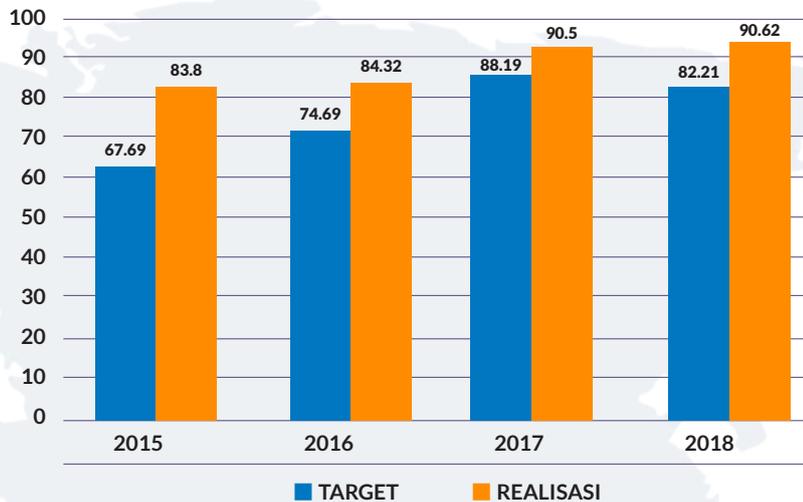
Pada tahun 2018, capaian IKU “Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI” **ditargetkan 82,21** dengan **realisasi sebesar 90,58** dan **capaian 110,18%**, yang diperoleh dari 3 (tiga) Sub IKU dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian B.3 Tahun 2017 dan 2018

No	Sub IKU	Bobot 2018	Realisasi 2017	Realisasi Pembobotan 2017	Realisasi 2018	Realisasi Pembobotan 2018
1	Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-1)	65	80,62	52,40	77,38	50,29
2.	Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-2)	20	118,66	23,73	113	22,60
3.	Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-3)	15	95,76	14,37	118,17	17,73
				Realisasi	90,50	90,58
				Target	80,19	82,21
				Capaian	112,86%	110,18%
				Batas Toleransi	120%	120%

Jika melihat pencapaian target IKU sejak tahun 2015, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah berhasil meraih capaian yang terus meningkat setiap tahunnya, seperti grafik di bawah ini.

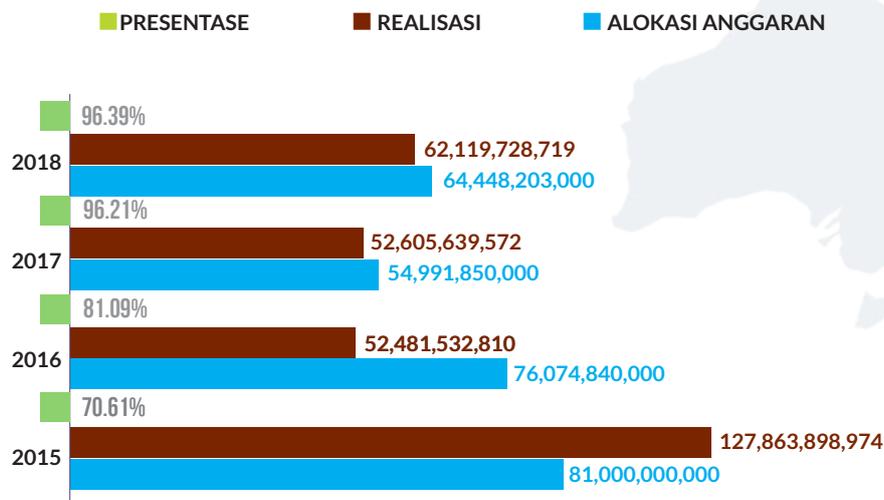
REALISASI IKU 2015-2018



Peningkatan nilai capaian tersebut tidak berarti terjadi penurunan beban kerja di lingkungan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Justru sebaliknya, dengan semakin berkembangnya isu-isu sosial serta teknologi komunikasi, jenis kasus yang ditangani lebih beragam dan semakin kompleks. Selain itu tuntutan dari masyarakat untuk tindakan respon cepat, transparan, profesional dan akuntabel semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai auditor sekaligus penilai dari kinerja jajaran pemerintah.

Sebagai gambaran, berikut adalah grafik realisasi anggaran Direktorat Perlindungan WNI dan BHI sejak tahun 2015-2018.

REALISASI ANGGARAN



Beberapa capaian yang menjadi *highlight* selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 21.126 kasus telah diselesaikan (74,57%) dari total 28.330 kasus yang diterima seperti:
 - 1.1. Membebaskan 62 orang WNI terancam hukuman mati, 2 orang dieksekusi mati dan sisa kasus yang masih ditangani sejumlah 166 kasus;
 - 1.2. Pengembalian Hak-Hak Finansial (sisa gaji, asuransi, diyat): Rp 129.630.880.939 (per Okt 2018);
 - 1.3. 88 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil diselesaikan;
 - 1.4. Sebanyak 890 buah paspor telah diterbitkan bagi Persons of Indonesian Descent (PID) di Filipina Selatan;
 - 1.5. Sandera: 6 WNI berhasil dibebaskan dari penyanderaan di perairan Filipina Selatan;
2. Pengesahan Permenlu 05/2018 tentang Perlindungan WNI yang lebih komprehensif;
3. Penandatanganan MoU antara Kementerian Luar Negeri dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Pelatihan Bimtek: 243 aparatur sipil negara yang di daerah telah mendapatkan pelatihan penanganan permasalahan WNI di luar negeri;
5. Launching program aplikasi perjalanan Safe Travel yang dapat diakses oleh seluruh pengguna telepon genggam berbasis Android dan Ios;
6. Implementasi sistem pelayanan dan perlindungan WNI oleh 92 Perwakilan RI di luar negeri berbasis aplikasi Portal Peduli WNI;
7. Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di bidang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri;
8. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah berhasil meraih penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Analisis Sub IKU-1 : Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI selalu menerapkan prinsip “*beyond protection*” dalam pelaksanaan perlindungan WNI dengan menjunjung tinggi azas kepedulian dan keberpihakan.

Selama tahun 2018, berdasarkan data di e-perlindungan, Kementerian Luar Negeri bersama dengan Perwakilan RI dan pemangku kepentingan terkait telah berhasil menyelesaikan sebanyak 21.126 kasus WNI di luar negeri; membebaskan 62 WNI dari ancaman hukuman mati; memfasilitasi pemulangan ribuan WNI, khususnya Pekerja Migran, yang menghadapi situasi rentan di luar negeri; mengembalikan hak-hak finansial WNI senilai lebih dari Rp120 milyar; membebaskan 6 (enam) orang sandera dari Filipina Selatan, menyelesaikan 88 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penerbitan Paspor RI bagi Persons of Indonesian Descent (PID) di Filipina Selatan.



■ Serah Terima Korban Penyanderaan Awak Kapal WNI



■ Penetapan Status Kewarganegaraan dan Pemberian Paspor RI kepada warga keturunan Indonesia (People of Indonesian Decents /PIDs) di, Davao City, Filipina

Realisasi Sub IKU Indeks penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri sebesar 82,77 dari target 76,15. Indeks ini diukur melalui 2 komponen sebagaimana tabel berikut dengan formula penghitungan:

$$(65\% \times \text{Realisasi Sub-IKU 1.1}) + (35\% \times \text{Realisasi Sub-IKU 1.2})$$

Tabel Perbandingan Capaian Komponen Sub IKU-1 Tahun 2017 dan 2018

Sub IKU	Bobot	Realisasi 2017	Realisasi Pembobotan 2017	Realisasi 2018	Realisasi Pembobotan 2018
Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan (Komponen-1)	65	95,37%	61,99	81,38%	52,90
Persentase Kasus-kasus Umum yang diselesaikan (Komponen-2)	35	53,23%	18,63	69,97%	24,49
Realisasi Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-1)					77,39
Target					76,15
Capaian					101,63%
Batas Toleransi Capaian					120%

Beberapa kendala, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Sub IKU-1 selama tahun 2018, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik karena faktor mutasi dan berakhirnya masa tugas di lingkungan Direktorat PWNI dan BHI. Hal ini memerlukan koordinasi dengan pihak Sekretariat Ditjen Protokol dan Konsuler, Biro SDM, dan Biro PO Kemenlu, baik di tingkat *middle management* sampai dengan *top management*;

2. Sistem pendataan pelayanan dan penanganan kasus WNI masih belum terintegrasi antara Pusat dan Perwakilan. Diharapkan per Januari 2019, dengan penerapan aplikasi Portal Peduli WNI oleh seluruh Perwakilan RI maka pencatatan pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI dapat lebih tertata.

Solusinya adalah perlunya peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di dalam dan di luar negeri untuk percepatan penyelesaian kasus WNI di luar negeri;

Analisis Komponen 1 Sub IKU-1 : Persentase kasus khusus yang diselesaikan

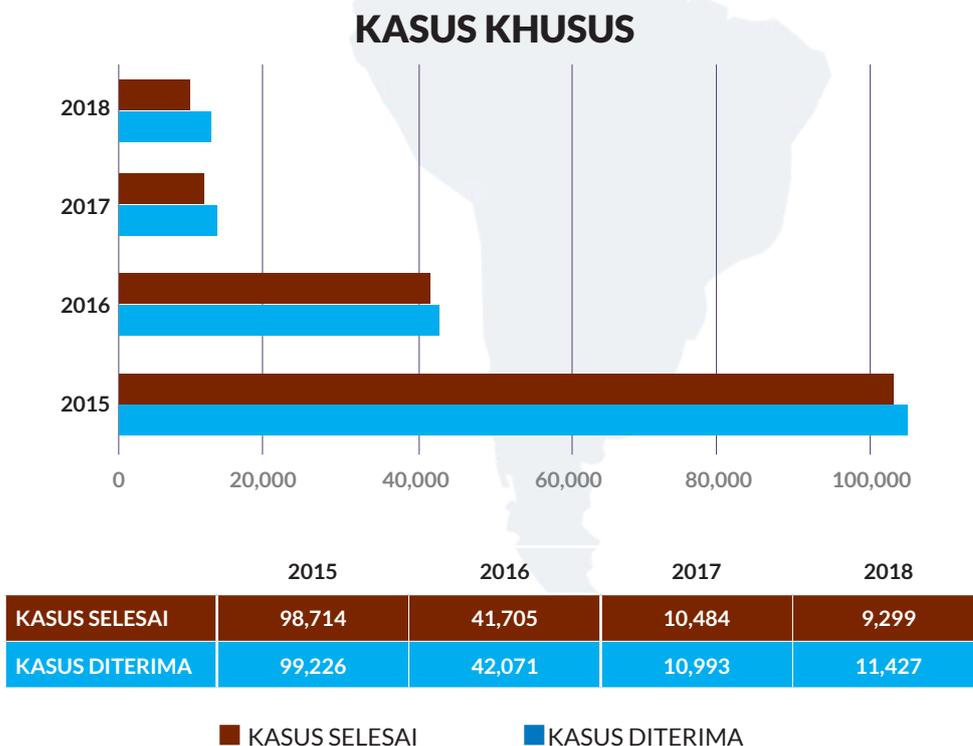
Kasus khusus merupakan kasus WNI/BHI di luar negeri yang memiliki kategori high profile case (kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang mendapatkan perhatian luas masyarakat dan media massa asing/nasional). Selama tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan 9.299 kasus khusus dari 11.427 kasus yang ditangani, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Komponen 1 Sub IKU-1 B3 Tahun 2018

Komponen 1 Sub IKU-1 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase kasus khusus yang diselesaikan	Kasus khusus yang selesai	9.299
	Kasus yang ditangani	11.427
	Realisasi	81,38%
	Target	73%
	Capaian	111,48%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
(KS dibagi dengan KT) x 100%

Perbandingan jumlah penanganan kasus khusus tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:



Analisis Komponen 2 Sub IKU-1 : Persentase kasus umum yang diselesaikan

Kasus umum merupakan kasus WNI/BHI di luar negeri yang terkait permasalahan perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia (sakit, kecelakaan lalu lintas), pencurian, pencucian uang, pemerkosaan, dan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman ringan.

Kasus yang selesai adalah kasus umum yang tertangani secara tuntas dan mencapai solusi akhir sesuai prosedur, aturan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak. Kriteria/ruang lingkupnya kasus WNI/BHI di luar negeri.

Selama tahun 2018, Indonesia telah menyelesaikan kasus umum 11.827 dari 16.903 kasus yang ditangani, sebagaimana tabel berikut:

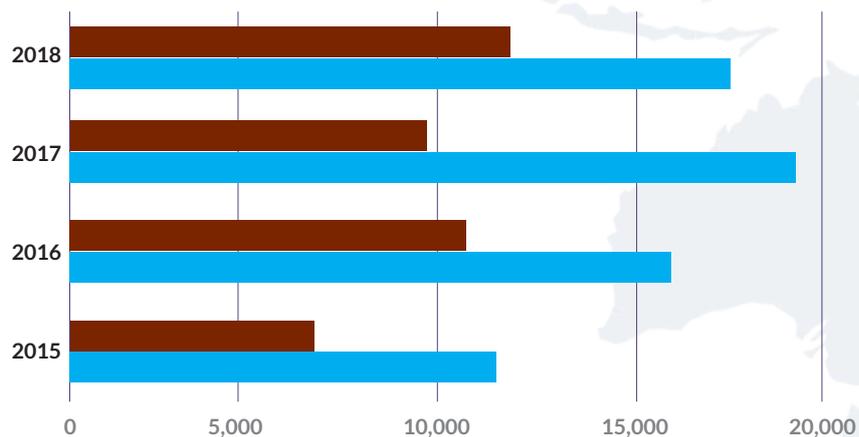
Tabel Capaian Komponen 1 Sub IKU-1 B3 Tahun 2018

Komponen 1 Sub IKU-1 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase kasus umum yang diselesaikan	Kasus umum yang selesai	11.827
	Kasus yang ditangani	16.903
	Realisasi	69,97%
	Target	82%
	Capaian	85,33%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
(KS dibagi dengan KT) x 100%

Perbandingan jumlah penanganan kasus umum tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

KASUS UMUM

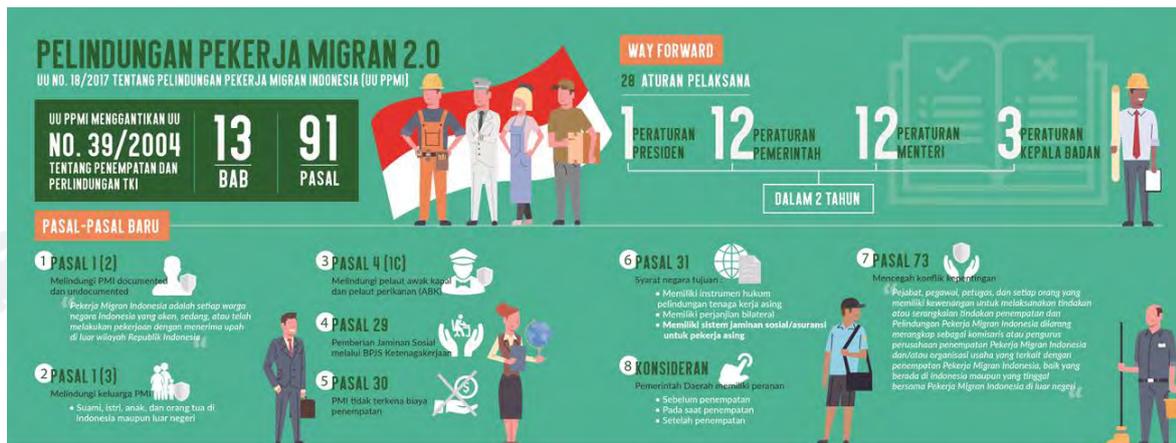


	2015	2016	2017	2018
KASUS SELESAI	7,079	10,412	9,812	11,827
KASUS DITERIMA	11,242	15,069	18,434	16,903

■ KASUS SELESAI

■ KASUS DITERIMA

Analisis Sub IKU-2 : Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri



Dengan penguatan sistem kelembagaan internal yang kuat serta koordinasi yang intensif antara para pemangku kepentingan serta diplomasi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara setempat, kasus-kasus yang ditangani dapat terselesaikan secara lebih efektif.

Beberapa capaian yang telah diraih pada Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri pada tahun 2018, antara lain adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) bagi Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 21 Desember 2018. Kerjasama dengan BPJS ini bertujuan untuk mendukung pertukaran dan pemanfaatan data informasi terkait PMI di luar negeri, sosialisasi bersama, dan kerja sama strategis lain yang disepakati.

Pending matters tahun 2017 terkait revisi Permenlu No. 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga telah berhasil diselesaikan dengan penandatanganan Permenlu No. 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI pada 19 September 2018. Sejalan dengan perkembangan dinamika migrasi WNI ke luar negeri terdapat kecenderungan peningkatan varian dan kompleksitas kasus-kasus WNI di luar negeri. Kondisi ini kian nampak pada periode 2015 – 2018 dimana muncul kasus-kasus penyanderaan, bencana alam dan konflik politik di luar negeri yang melibatkan WNI sebagai korban. Dalam kaitan ini, Dit. Perlindungan WNI dan BHI (Dit. PWNI dan BHI) melihat adanya keperluan untuk merevisi Permenlu Pelayanan Warga guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi seluruh WNI di luar negeri.

Revisi bertujuan untuk (i) memperluas lingkup obyek perlindungan, bukan hanya TKI melainkan seluruh WNI di luar negeri; (ii) meningkatkan partisipasi Lembaga/Badan terkait dan elemen masyarakat dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri; dan (iii) penguatan aspek hukum dan standarisasi bagi pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan oleh Fungsi Konsuler di seluruh Perwakilan RI di luar negeri.

Untuk mendukung manajemen kelembagaan di lingkungan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah dilaksanakan evaluasi dan penyusunan 11 Petunjuk Teknis untuk melengkapi SOP Makro dan SOP Mikro yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi SOP dan pembenahan manajemen sumber daya di Direktorat Perlindungan WNI dan BHI juga dilaksanakan dalam rangka sertifikasi ISO 9001:2015 bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI di luar negeri, serta untuk mencapai status Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PAN RB. Pada bulan Agustus 2018 Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah berhasil meraih sertifikasi ISO tersebut. Pada bulan November 2018 Kementerian PAN RB telah menetapkan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI sebagai unit kerja dengan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kementerian Luar Negeri.

Terkait dengan peningkatan kapasitas SDM di bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi pejabat dan staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Perwakilan RI, serta Kementerian / Lembaga terkait.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk pejabat dan staf Kementerian / Lembaga terkait, khususnya pejabat pada level teknis yang menangani pelayanan dan perlindungan WNI, dilaksanakan sebanyak 3 kali di Bandung (untuk wilayah Sumatera, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat), Lombok (untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), dan Malang (untuk wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur). Jumlah peserta sebanyak 258 orang.

Kegiatan pelatihan untuk pejabat dan staf Fungsi Konsuler Perwakilan RI dilakukan sebanyak 2 kali di Jawa Barat. Pelatihan difokuskan pada penggunaan fitur-fitur Portal Peduli WNI. Kegiatan ini diikuti oleh 178 peserta.

Untuk pejabat dan staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dilaksanakan kegiatan pelatihan Pelayanan Publik dan Manajemen Stress. Modul pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sebagai pelayan publik yang profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta mampu untuk mengatur emosi dan pikiran dalam memberikan pelayanan. Kegiatan dibagi dalam dua gelombang dan diikuti oleh 60 orang peserta.

Pada tahun 2018 Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah meluncurkan Portal Peduli WNI untuk mewujudkan manajemen data dan pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri oleh Perwakilan RI melalui platform tunggal berbasis aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini, maka manajemen data WNI dapat terkoneksi antara Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, Kementerian Dalam Negeri, BNP2TKI, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Peluncuran fitur-fitur di Portal Peduli WNI dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari fitur Laporan Diri berlanjut ke fitur Pelayanan dan fitur Perlindungan. Diharapkan kedepannya seluruh instansi terkait yang menggunakan data WNI dapat terintegrasi ke dalam aplikasi ini. Sehingga manajemen data kependudukan WNI dapat terorganisir dengan baik.

Selama tahun 2018, sebanyak 50 Perwakilan RI telah menyelesaikan proses integrasi basis data. Sementara itu, pada tanggal 10 September 2018, di Seoul, Korea Selatan, Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan penggunaan Portal Peduli dan menginstruksikan pelaksanaan penggunaan aplikasi tersebut di seluruh Perwakilan RI di luar negeri per Januari 2019.

Sampai dengan 31 Desember 2018, 92 Perwakilan RI telah menerapkan implementasi seluruh fitur Portal Peduli melalui kegiatan bimbingan teknis kepada pejabat dan staf Perwakilan RI pada akhir November 2018. Kegiatan bimbingan teknis serupa akan dilanjutkan pada triwulan pertama tahun 2019 untuk pejabat dan staf Perwakilan RI yang belum mengikuti pelatihan sebelumnya.

Sepanjang tahun 2018, realisasi Sub IKU Indeks sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri sebesar 112,85 dari target 100. Indeks ini diukur melalui 4 komponen sebagaimana tabel berikut dengan formula penghitungan:

$$(30\% \times \text{Sub IKU 2.1}) + (30\% \times \text{Sub IKU 2.2}) + (20\% \times \text{Sub IKU 2.3}) + (20\% \times \text{Sub IKU 2.4})$$

Tabel Perbandingan Capaian Komponen Sub IKU-2 Tahun 2017 dan 2018

Sub IKU	Bobot	Realisasi 2017	Realisasi Pembobotan 2017	Realisasi 2018	Realisasi Pembobotan 2018
Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di Luar Negeri (Komponen-1)	30	135%	40,5	100%	30
Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang diterapkan (Komponen-2)	30	85%	25,5	123%	36,90
Persentase Pejabat/Staf yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri (Komponen-3)	20	244%	48,8	129,53%	25,91
Persentase Implementasi Aplikasi Portal Pelayanan dan Perlindungan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri*	20	20%	4	100%	20
Realisasi Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-1)					112,81
Target					100%
Capaian					112,81%
Batas Toleransi Capaian					120%

* Komponen IKU baru pada tahun 2018

Analisis Komponen 1 Sub IKU-2 : Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di Luar Negeri

Pada komponen 1 Sub IKU-2 ditandai dengan tercapainya integrasi basis data dari target 30 Perwakilan. Keberhasilan integrasi basis data tersebut turut didukung oleh kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI kepada pejabat dan staf Fungsi Protokol dan Konsuler bagi Seluruh Perwakilan RI. Integrasi basis data tidak hanya mencakup data lapor diri saja, akan tetapi juga data pengaduan dan penanganan kasus/permasalahan WNI di luar negeri, dan layanan kekonsuleran melalui Portal Peduli WNI.

Penerapan secara integrasi basis data melalui Portal Peduli WNI secara serentak akan dilaksanakan pada 1 Januari tahun 2019.

Pada komponen 1 Sub IKU-2 ditandai dengan tercapainya dokumen kesepakatan integrasi dengan kementerian/ lembaga terkait yang ditandatangani, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Tabel Capaian Komponen 1 Sub IKU-2 B3 Tahun 2018

Sub IKU-8 B.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di Luar Negeri	Persentase integrasi database Perwakilan RI dengan database Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (IPW)	40%
	Persentase dokumen kesepakatan integrasi dengan K/L terkait yang ditandatangani (IKL)	60%
	Realisasi	100%
	Target	100%
	Capaian	100%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
 $IPW + IKL$

Catatan:

IPW : Presentase Integrasi Database Perwakilan RI dengan Database Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

IKL : Presentase Dokumen Kesepakatan Integrasi dengan K/L terkait yang ditandatangani

Persentase Integrasi Database Perwakilan RI dengan Database Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (IPW)

	Informasi Kinerja	Jumlah	Realisasi
Persentase Integrasi Database Perwakilan RI dengan Database Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (IPW)	Jumlah Perwakilan RI yang telah melakukan integrasi	30	100%
	Jumlah Perwakilan RI yang akan melakukan	30	

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
 $(\text{Jumlah Perwakilan yang telah melakukan integrasi} \div \text{Jumlah target Perwakilan yang akan diintegrasikan}) \times 100\%$

Persentase Dokumen Kesepakatan Integrasi dengan K/L terkait yang Ditandatangani (IKL)

	Informasi Kinerja	Jumlah	Realisasi
Persentase Dokumen Kesepakatan Integrasi dengan K/L terkait yang Ditandatangani (IKL)	Jumlah integrasi dengan K/L terkait yang terlaksana	3	100%
	Jumlah K/L terkait yang ditargetkan	3	

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
 $(\text{Jumlah integrasi dengan K/L terkait} \div \text{Jumlah K/L yang menjadi target integrasi}) \times 100\%$

Analisis Komponen 2 Sub IKU-2 : Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang diterapkan

Pada komponen ini, telah tercapai perumusan 11 petunjuk teknis terkait pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri.

11 Petunjuk Teknis tersebut akan ditandatangani oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI serta diterapkan pada tahun 2018.

Selain itu, pada tahun 2018, telah tercapai pengesahan Permenlu 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, yang lebih komprehensif memberikan dalam perlindungan kepada semua WNI di luar negeri.

Tabel Capaian Komponen 1 Sub IKU-2 B3 Tahun 2018

Komponen 2 Sub IKU-2 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang diterapkan	Produk hukum yang disahkan dan diterapkan	60%
	Panduan teknis yang disahkan dan diterapkan	62,86%
	Realisasi	122,86%
	Target	100%
	Capaian	122,86%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
 $(PH \times 60\%) + (PT \times 40\%)$

Catatan:

PH : Produk Hukum Yang Disahkan dan Diterapkan

PT : Panduan Teknis Yang Disahkan dan Diterapkan

Analisis Komponen 3 Sub IKU-2 : Persentase Pejabat/Staf yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri

Secara garis besar, capaian pada Komponen 3 Sub IKU-2 tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian yang dihasilkan telah melampaui target yang ditetapkan. Diantara kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang telah dilakukan pada tahun 2018 meliputi:

- Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri bersama Pemangku Kepentingan daerah (Disnakertrans, BP3TKI, Kepolisian Daerah, Pengadilan Agama, dll) di Bandung pada Februari 2018
- Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri bersama Pemangku Kepentingan daerah (Disnakertrans, BP3TKI, Kepolisian Daerah, Pengadilan Agama, dll) di Lombok pada Agustus 2018
- Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri bersama Pemangku Kepentingan daerah (Disnakertrans, BP3TKI, Kepolisian Daerah, Pengadilan Agama, dll) di Malang pada Oktober 2018
- Pelatihan Aplikasi PORTAL Pelayanan dan Perlindungan WNI di luar negeri bagi seluruh Perwakilan RI, dilaksanakan di Depok, Jawa Barat, pada November 2018

Pada tahun 2019, target tersebut akan ditingkatkan sejalan dengan beberapa program peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan, yaitu bimbingan teknis Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri bersama Pemangku Kepentingan di Daerah dan pelatihan aplikasi PORTAL Pelayanan dan Perlindungan WNI di luar negeri bagi seluruh Perwakilan RI.

Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri bersama Pemangku Kepentingan di Daerah



Tabel Capaian Komponen 3 Sub IKU-2 B3 Tahun 2018

Komponen 3 Sub IKU-2 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Pejabat/Staf yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	Angka bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (PPK)	54%
	Angka bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Perwakilan RI (PPW)	41,53%
	Angka bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Kementerian Luar Negeri selain Ditjen Protkons, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, LSM, akademisi dan unsur masyarakat lainnya (PKL)	34%
	Realisasi	129,53%
	Target	100%
	Capaian	129,53%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
 $(PPK \times 45\%) + (PPW \times 35\%) + (PKL \times 20\%)$

Catatan:

PPK : Angka Bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

PPW : Angka Bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Perwakilan RI.

PKL : Angka Bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Kementerian Luar Negeri selain Ditjen Protkons, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, LSM, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya.

Angka Bobot Capaian Pelatihan dari Unsur Pejabat/Staf Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (PPK)

	Informasi Kinerja	Jumlah	Realisasi
Angka Bobot Capaian Pelatihan dari Unsur Pejabat/Staf Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (PPK)	Jumlah pejabat/staf Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang memperoleh Sertifikat	60	120%
	Target yang ditetapkan	50	

Angka Bobot Capaian Pelatihan dari Unsur Pejabat/Staf Perwakilan RI (PPW)

	Informasi Kinerja	Jumlah	Realisasi
Angka Bobot Capaian Pelatihan dari Unsur Pejabat/Staf Perwakilan RI	Jumlah pejabat/staf Perwakilan RI yang memperoleh Sertifikat	178	118,67%
	Target yang ditetapkan	150	

Angka bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Kementerian Luar Negeri selain Ditjen Protkons, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, LSM, akademisi dan unsur masyarakat lainnya (PKL)

	Informasi Kinerja	Jumlah	Realisasi
Angka bobot capaian pelatihan dari unsur pejabat/staf Kementerian Luar Negeri selain Ditjen Protkons, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, LSM, akademisi dan unsur masyarakat lainnya (PKL)	Jumlah orang dari unsur pejabat/staf Kementerian Luar Negeri selain Ditjen Protkons, dan/atau Kementerian/Lembaga terkait, dan/atau Pemerintah Daerah, dan/atau LSM, dan/atau akademisi, dan/atau unsur masyarakat lain yang memperoleh sertifikat pelatihan	258	172%
	Target yang ditetapkan	150	

Analisis Komponen 4 Sub IKU-2 : Persentase Implementasi Aplikasi Portal Pelayanan dan Perlindungan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri

Capaian selama tahun 2018 untuk Komponen 4 Sub IKU-2 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 50 perwakilan yang mengimplementasikan aplikasi Portal Peduli WNI pada tahun 2018.

Implementasi Portal Peduli WNI oleh Perwakilan RI mencakup layanan “lapor diri”, penerbitan Nomor Induk Kependudukan, layanan kekonsuleran, dan layanan pengaduan kasus.

Implementasi aplikasi Portal Peduli WNI turut didukung oleh kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan kepada pejabat dan staf Perwakilan RI dalam penggunaan aplikasi. Pada tahun 2018 masih terdapat sejumlah Perwakilan RI yang belum bisa mengikuti kegiatan Bimtek dikarenakan kendala keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pada tahun 2019 (Triwulan I, akan diselenggarakan kegiatan Bimtek kepada sekitar 38 Perwakilan RI yang sebelumnya tidak dapat mengikuti kegiatan Bimtek.



■ Presiden Joko Widodo meluncurkan Aplikasi Portal Peduli WNI di Luar Negeri Bertempat di di KBRI Seoul pada 11 September 2018

Tabel Capaian Komponen 4 Sub IKU-2 B3 Tahun 2018

Komponen 3 Sub IKU-2 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Implementasi Aplikasi Portal Pelayanan dan Perlindungan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri	Jumlah Perwakilan RI yang melakukan Implementasi Aplikasi Portal Pelayanan dan Perlindungan	50
	Jumlah Perwakilan RI yang menjadi target Implementasi Aplikasi Portal Pelayanan dan Perlindungan	50
	Realisasi	100%
	Target	100%
	Capaian	100%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
 $(JP \div JT) \times 100\%$

Catatan:

JP: Jumlah Perwakilan RI yang melakukan Implementasi Aplikasi Portal Pelayanan dan Perlindungan

JT: Jumlah Perwakilan RI yang menjadi target Implementasi Aplikasi Portal Pelayanan dan Perlindungan

Analisis Sub IKU-3 : Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri

Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian koordinasi dan negosiasi dalam bidang perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Mekanisme koordinasi dan negosiasi dilakukan secara konstruktif dengan pemangku kepentingan terkait tingkat nasional dan internasional dalam membentuk payung hukum dan norma-norma dasar perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, termasuk memberdayakan komunitas WNI.

Pada tahun 2018, beberapa capaian yang perlu mendapat perhatian adalah hasil dari program kegiatan pendukung Sub IKU-3, diantaranya pengembangan aplikasi Safe Travel yang dapat digunakan oleh pengguna telepon genggam dengan sistem ios.

Aplikasi Safe Travel merupakan platform yang dapat digunakan oleh WNI yang bepergian sementara ke luar negeri (wisata, studi, umrah, dsb) untuk melaporkan keberadaannya secara daring (online). Safe Travel juga dilengkapi dengan Tombol Darurat sehingga Kementerian Luar Negeri dapat memiliki tren perjalanan luar negeri WNI; memantau keberadaan WNI secara real-time; dan memberikan bantuan dengan cepat dalam kondisi darurat.

Safe Travel juga menyediakan informasi-informasi yang diperlukan oleh WNI ketika berada di luar negeri, misalnya kondisi keamanan, imigrasi, fasilitas kesehatan, makanan halal, hingga tempat ibadah sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan WNI selama berada di luar negeri.

Sampai dengan 21 Desember 2018, Safe Travel telah diunduh oleh 35.736 pengguna (30.880 Android, dan 4.856 iOS) di seluruh dunia. Terkait pemanfaatan aplikasi, sejak launching multiplatform Safe Travel di bulan April – 21 Desember 2018, telah digunakan 4.092 pengguna mendaftarkan perjalanannya ke luar negeri, dan 37 pengguna menggunakan tombol darurat dan sudah ditangani dengan cepat.

Dengan capaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian program kampanye penyadaran publik yang terkait dengan tujuan preventif, deteksi dini, serta edukasi masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

Sepanjang tahun 2018, realisasi Sub IKU Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri sebesar 125 dari target 84,75. Indeks ini diukur melalui 4 komponen sebagaimana tabel berikut dengan formula penghitungan:

$$(25\% \times \text{Sub IKU 3.1}) + (30\% \times \text{Sub IKU 3.2}) + (25\% \times \text{Sub IKU 3.3}) + (20\% \times \text{Sub IKU 3.4})$$

Tabel Perbandingan Capaian Komponen Sub IKU-3 Tahun 2017 dan 2018

Sub IKU	Bobot	Realisasi 2017	Realisasi Pembobotan 2017	Realisasi 2018	Realisasi Pembobotan 2018
Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional (Komponen-1)	25	100%	25	200%	50
Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI/BHI (Komponen-2)	30	100%	30	100%	30
Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI (Komponen-3)	25	83,04%	20,76	83,07%	20,77
Persentase pemberdayaan kelompok masyarakat dalam kerangka perlindungan WNI di luar negeri* (Komponen-4)	20	100%	20	87%	17,4
Indeks Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri (Sub IKU-3)					118,17
Target					84,75
Capaian					139,43%
Batas Toleransi Capaian					120%

* IKU baru pada tahun 2017

Pada tahun 2017, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI berpartisipasi dalam 6 forum perundingan internasional, diantaranya Pertemuan Kedua *GFMD Migration Laboratory*, Rabat, Maroko pada 14-18 Pebruari 2018; *The 3rd Meeting of Working Group Study Consular Assistance by ASEAN Missions in Third Countries ti Nationals of ASEAN Member States* tgl 8-10 Februari 2018; *Global forum on migration and development migration laboratory* tanggal 13-18 Februari 2018; Negosiasi zero draft pada " *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*" di New York pada tanggal 13-17 Maret 2018; Pertemuan persiapan perundingan ASEAN Consensus (02625/wn/03/2018/66) dan (r-00089/singapura/180402) - lap 11st meeting of the ASEAN declaration on the protection of the right of migrant workers, 27-29 maret 2018.

Pada perundingan-perundingan tersebut Direktorat Perlindungan WNI dan BHI berperan dalam memberikan masukan dan pandangan terkait dengan bidang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada komponen ini tidak ditetapkan target jumlah rekomendasi yang disampaikan dan diterima. Karena Direktorat Perlindungan WNI dan BHI bukan sebagai focal point tetapi berpartisipasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah RI, khususnya di bidang perlindungan WNI di luar negeri.

Tabel Capaian Komponen 1 Sub IKU-3 B3 Tahun 2018

Komponen 1 Sub IKU-3 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional	Jumlah rekomendasi yang diterima	6
	Jumlah rekomendasi yang disampaikan	3
	Realisasi	200%
	Target	82%
	Capaian	243,90%
	Toleransi Capaian	120%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
 $(\text{Jumlah rekomendasi yang diterima} \div \text{Jumlah rekomendasi yang disampaikan}) \times 100\%$

Analisis Komponen 2 Sub IKU-3 : Persentase Rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam Kebijakan/Regulasi Nasional terkait Perlindungan WNI-BHI

Isu perlindungan WNI di luar negeri masih menjadi prioritas nasional dan politik luar negeri RI. Karena itu, Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI banyak menerima permintaan masukan atau diminta sebagai narasumber pada forum-forum rapat/rapat koordinasi/sarasehan/lokakarya pada berbagai tingkatan. Selain itu, terkait dengan perumusan regulasi dan pembahasan isu-isu yang ada kaitannya dengan isu perlindungan, semua masukan dan rekomendasi Dit. Perlindungan WNI dan BHI diterima sebagai referensi.

Capaian komponen ini selama tahun 2018 didominasi oleh rekomendasi yang disampaikan dan diterima saat penyusunan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

Ke depannya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI akan terus meningkatkan koordinasi dengan satker terkait di Kementerian Luar Negeri dalam upaya penguatan kebijakan / regulasi pelayanan perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, keikutsertaan dalam forum-forum tersebut juga harus ditunjang dengan peningkatan kapasitas para pejabat untuk mempertajam rekomendasi yang disampaikan.

Tabel Capaian Komponen 2 Sub IKU-3 B3 Tahun 2018

Komponen 1 Sub IKU-3 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI/BHI	Jumlah rekomendasi yang diterima	4
	Jumlah rekomendasi yang disampaikan	4
	Realisasi	100%
	Target	87%
	Capaian	114,94%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:
 $(\text{Jumlah rekomendasi yang diterima} \div \text{Jumlah rekomendasi yang disampaikan}) \times 100\%$

Analisis Komponen 3 Sub IKU-3 : Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

Public Awareness Campaign merupakan kegiatan yang menterjemahkan fungsi pencegahan dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya keamanan bermigrasi serta pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Selama tahun 2018 Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI tidak hanya menggalakkan kegiatan kampanye penyadaran publik (*Public Awareness Campaign*) ke daerah-daerah kantong PMI akan tetapi juga melakukan beberapa kali sesi video interview di media/televisei. Tujuannya antara lain memberikan edukasi dan diseminasi mengenai cara-cara bermigrasi yang tepat dan aman serta memberikan penjelasan bagaimana peran Pemerintah/Perwakilan RI di luar negeri dalam memberikan perlindungan WNI di luar negeri. Target kampanye selain masyarakat luas, termasuk akademisi, pelajar, LSM dan juga aparat pemerintah daerah hingga tingkat desa atau kelurahan dimana asal mulanya proses perekrutan calon-calon PMI.

Melalui serangkaian kegiatan PAC, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah menyebarkan 541 kuesioner dengan jumlah hasil responden yang memberikan umpan balik positif sebanyak 427, atau senilai 83,04%.

Public Awareness Campaign



■ Interview di media TV



■ Radio Interview di daerah-daerah kantong PMI

Tabel Capaian Komponen 3 Sub IKU-3 B3 Tahun 2018

Komponen 3 Sub IKU-3 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Responden yang memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI	Jumlah responden yang memberikan umpan balik positif dengan nilai 100	427
	Total jumlah responden	541
	Realisasi	83,07%
	Target	87%
	Capaian	95,48%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:

(Jumlah responden yang memberikan umpan balik positif dengan nilai 100 ÷ Jumlah total responden) × 100%

Analisis Komponen 4 Sub IKU-3 : Persentase pemberdayaan kelompok masyarakat dalam kerangka perlindungan WNI di luar negeri

Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat bertujuan untuk membentuk proxy / perpanjangan tangan Pemerintah RI dalam melaksanakan upaya penanganan perlindungan WNI di luar negeri. Komponen ini akan mengukur tidak hanya partisipasi dari masyarakat, tetapi bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kegiatan tersebut.

Di tahun 2018 telah dilaksanakan 1 kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat Indonesia di Taiwan, sesuai yang direncanakan dengan tema "Temu Masyarakat Indonesia Se- Taiwan: Hidup Aman di Taiwan" di Taoyuan, Taiwan, 23-27 November 2018. Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat bertujuan untuk mengedukasi secara langsung pentingnya keamanan bermigrasi dan bekerja di luar negeri serta sejumlah pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri yang kini telah dapat dinikmati lewat media sosial dan aplikasi smartphone.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala dalam penyebaran lembar kuisioner. Dari 500 lembar kuisioner yang disebar kepada peserta kegiatan, hanya 100 lembar kuisioner yang dikembalikan. Kegiatan yang dilaksanakan outdoor dan jumlah SDM yang belum mencukupi turut menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengukuran persentase respon positif pemberdayaan kelompok masyarakat dalam kerangka perlindungan wni di luar negeri. Untuk mengatasi kendala yang serupa di tahun 2019, kuisioner dapat disebar melalui media social dan diserahkan oleh peserta kepada panitia sebagai syarat mengikuti kegiatan/acara.



■ Kegiatan Per pemberdayaan Kelompok Masyarakat "Temu Masyarakat Indonesia Se- Taiwan: Hidup Aman di Taiwan" di Taoyuan, Taiwan, 23-27 November 2018



Tabel Capaian Komponen 4 Sub IKU-3 B3 Tahun 2018

Komponen 4 Sub IKU-3 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Respon Positif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam kerangka Perlindungan WNI di Luar Negeri	Jumlah Responden yang memberikan Respon Positif Nilai 100	87
	Jumlah Peserta Pemberdayaan	100
	Realisasi	87%
	Target	82%
	Capaian	106,09%

Capaian realisasi kinerja tersebut di atas didapat dari formula penghitungan:

$$(\text{Jumlah Responden yang memberikan Respon Positif Nilai 100} \div \text{Jumlah Peserta Pemberdayaan}) \times 100\%$$

Sasaran Strategis (B.4): Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Kuat

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut penyesuaian dalam mendorong kinerja diplomasi. Diplomasi konvensional saat ini perlu dilengkapi dengan cara-cara non-konvensional, salah satunya dengan Diplomasi Digital. Diplomasi Digital memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan: mengumpulkan dan menganalisis informasi penting untuk mendukung kebijakan luar negeri; mengkomunikasikan posisi kebijakan luar negeri; serta melindungi kepentingan negara dan warga negara. Diplomasi digital menawarkan cara baru dalam berkomunikasi dan memberikan kesempatan untuk memberikan ekspresi yang sesuai dengan perkembangan zaman. (penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terkini dalam mendukung aktivitas diplomasi, baik yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, negara lain, serta publik).

Pada Tahun 2018, pencapaian Sasaran Strategis “Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri yang Sistematis dan Kuat” adalah sebesar 60,17%. Nilai capaian tersebut diperoleh dari realisasi IKU “Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI” sebesar 96,31%, “Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI” sebesar 83,12%, “Peningkatan impresi dan *engagement* pada media sosial Kemenlu” sebesar 140,39%, “Persentase peningkatan jumlah pengunjung Portal Situs Kemlu” sebesar 46,29%, dan “Peringkat Keterbukaan Informasi Publik” adalah peringkat 9. IKU pertama dan kedua merupakan hasil *refinement* dari IKU tahun 2017 yaitu IKU “Persentase sentimen positif pada media massa online dan media sosial terhadap kebijakan hubungan Polugri RI” dan . IKU ketiga merupakan *refinement* IKU “Persentase impresi dan interaksi pada media sosial Kemenlu”.

Sementara itu, IKU persentase peningkatan jumlah pengunjung portal situs Kemlu merupakan IKU baru di Tahun 2018, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian sasaran strategis Diplomasi Digital dan Persentase Impresi dan Interaksi pada Media Sosial Kemenlu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian B.4 Tahun 2018

No.	IKU	Target 2018	Bobot 2018	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Capaian 2018	Realisasi Pembobotan (Realisasi dibagi target dikali bobot)
1	Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI*)	90%	20%	96,31%	96,36%	107,07%	21,41%
2	Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI*)	90%	20%	88,39%	83,12%	92,36%	30
3	Persentase peningkatan impresi dan <i>engagement</i> pada media sosial Kemenlu	20%	20%	-	140,39%	701,96%	140,39%
4	Persentase peningkatan jumlah pengunjung Portal Situs Kemlu**)	10%	20%	-	46,29%	462,90%	92,58%
5	Peringkat keterbukaan informasi publik	15	20%	-	9	140%	28%
Rata-Rata Capaian B4							60,17%

*IKU *refinement* tahun 2018 **IKU baru pada tahun 2017

IKU B 4.1 : Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI

IKU ini bertujuan untuk mengukur sentimen positif media massa nasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI.

Pada tahun 2018, realisasi IKU Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI sebesar 96,36% dengan capaian 107,07% dari target 90%. Dalam realisasinya, dari 32.877 pemberitaan tentang kebijakan hubungan luar negeri RI yang dipantau sepanjang tahun 2018 pada media massa nasional, terdapat 31.681 pemberitaan yang memiliki sentimen berita yang positif ataupun netral. Dengan demikian jumlah sentimen berita yang positif sebesar 96,36%, yang membentuk opini positif di kalangan pembacanya.

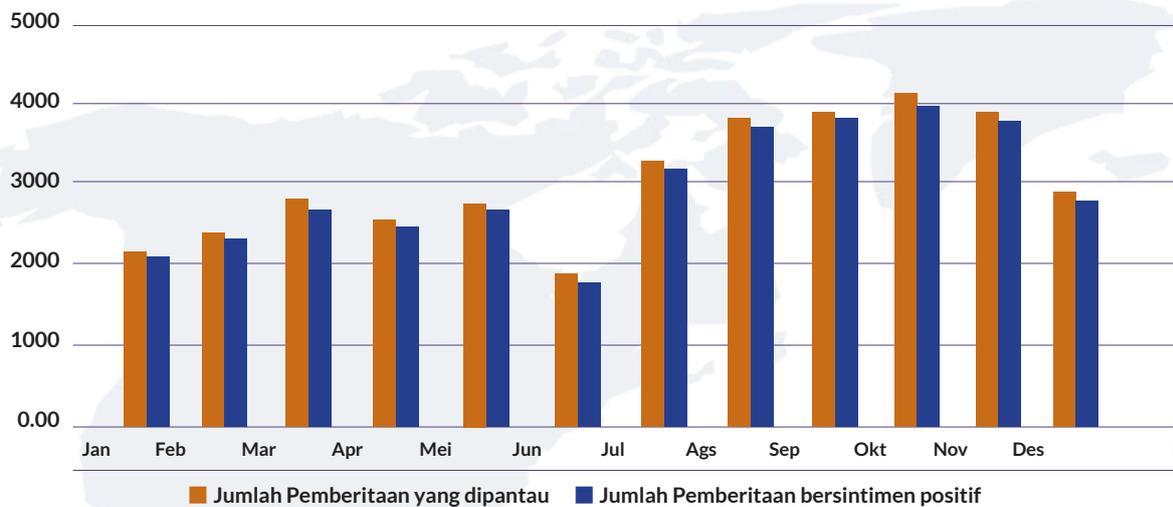
Berita yang disajikan media massa merupakan berita faktual, aktual, akurat, dan berimbang, serta yang paling penting sebagian besar substansi pemberitaan media massa tidak bernada negatif baik terhadap kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan lainnya yang memberikan citra baik (positif) tentang Indonesia dan Kemlu. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 107,07% (diperoleh dari persentase realisasi dibagi persentase target dikali 100%) sebagaimana tabel di bawah:

Tabel Capaian IKU- B4.1 Tahun 2018

IKU-B4.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	Jumlah berita yang memiliki sentimen positif pada media massa nasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	31.681
	Jumlah pemberitaan yang dipantau pada media massa nasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	32.877
	Realisasi	96,36%
	Target	90,00%
	Capaian	107,07%

Jumlah persentase yang tinggi terhadap pemberitaan dengan sentimen positif di media massa nasional mengenai kebijakan hubungan luar negeri RI yang tinggi disebabkan oleh aktivitas dan peran strategis upaya diplomasi Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan, terutama mengenai Palestina. Selain itu, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB juga menjadi salah satu capaian diplomasi yang banyak diangkat oleh media nasional. Kegiatan Diplomacy Festival (DiploFest) yang digagas oleh Kementerian Luar Negeri untuk mendiseminasikan capaian diplomasi Indonesia juga mendapatkan media coverage yang luas dengan sentimen positif.

Trend Pemberitaan dengan Sentimen Bernada Positif
tentang kebijakan Hubungan Luar Negeri RI pada Media Massa Nasional Sepanjang Tahun 2018



Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, dan jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri juga senantiasa melakukan engagement dengan jurnalis maupun generasi muda guna mendongkrak sentimen positif pemberitaan di media nasional. Untuk mendukung terbangunnya pemberitaan/sentiment positif yang meningkat dari waktu ke waktu, maka Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik selama kurun waktu 2018 telah melaksanakan engagement terhadap jurnalis khususnya dalam menangani publikasi isu-isu khusus dan strategis yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan capaian diplomasi Indonesia.

Kegiatan-kegiatan engagement yang dilaksanakan meliputi kegiatan Journalist Visit Program (JVP), Fasilitas Peliputan Media Massa pada Sidang Internasional, press briefing, dan media gathering, penganugerahan Adam Malik Awards, dan kegiatan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri.



■ Penganugerahan Adam Malik Awards 2018



■ Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2018

Pada tahun 2018, Kementerian Luar Negeri juga mengundang 19 (Sembilan belas) orang jurnalis nasional pada kegiatan Journalist Visit Program (JVP) Luar Negeri di 4 (empat) negara: Bangladesh, Pakistan, Senegal, dan Rusia, untuk melakukan liputan terhadap hasil konkret diplomasi Indonesia di negara-negara dimaksud.



■ Kunjungan ke RTS di Dakar, Senegal



■ Doorstop Menlu RI

Contoh hasil liputan Bali Democracy Forum (BDF) ke-XI:

1. <https://international.sindonews.com/read/1360429/40/retno-sebut-bdf-2018-forum-anak-muda-dan-civil-society-1544029900>
2. <https://www.medcom.id/internasional/asia/yNLv7Z2k-menlu-australia-bdf-peluang-penting-lindungi-demokrasi>
3. <http://www.thejakartapost.com/news/2018/12/06/bdf-returns-bali-with-focus-democracy-prosperity.html>
4. <http://bali.tribunnews.com/2018/12/06/bdf-2018-diikuti-470-peserta-berbagai-negara-tahun-ini-angkat-tema-kemakmuran-rakyat>
5. <http://www.beritasatu.com/dunia/526272-bali-democracy-forum-konsisten-promosikan-nilainilai-demokrasi.html>

Contoh hasil liputan KTT ASEAN di Singapura, Juli 2018:

1. <https://m.detik.com/news/berita/d-4144479/retno-ingin-produk-yang-go-international-punya-nilai-keindonesiaan>
2. <https://www.thejakartapost.com/seasia/2018/08/01/indonesia-opens-fashion-pop-up-store-in-singapore.html>
3. <http://m.metrotvnews.com/read/2018/07/31/909196/pada-pertemuan-asean-menlu-fokus-pada-konsep-indo-pasifik>
4. <https://m.detik.com/news/berita/4145401/menlu-retno-turki-apresiasi-indonesia-konsisten-bela-palestina>
5. <https://youtu.be/khalPPLn3CQ>

Liputan UNGA di New York, September 2018

1. <https://www.antaranews.com/berita/751753/isu-rohingya-masih-akan-mengemuka-di-smu-pbb>
2. https://m.kumparan.com/@kumparannews/menlu-di-forum-antiterorisme-global-wanita-harus-jadi-agen-perdamaian-1537980500752636797?utm_source=Mobileapp&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share
3. <https://www.antaranews.com/berita/752209/indonesia-galang-dana-untuk-badan-bantuan-palestina>
4. https://kompas.id/baca/utama/2018/09/28/pesan-kuat-indonesia/?utm_source=kompas_id&utm_medium=social&utm_campaign=socmed_share
5. https://kompas.id/baca/utama/2018/09/30/dunia-sampaikan-simpati-untuk-palu/?utm_source=kompas_id&utm_medium=social&utm_campaign=socmed_share

Selain itu dalam memperkuat pemberitaan yang memberikan sentimen positif terhadap Indonesia, Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan kantor Menkopolkum melakukan pelatihan kepada pegawai Kemlu tentang pembuatan konten positif di media sosial dan teknis sharing berita dalam Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN).

Secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam pencapaian IKU dimaksud. Kendala hanya terkait konfirmasi penentuan jadwal dan kepastian calon peserta (JVP) yang membatalkan keikutsertannya pada saat terakhir dan kapasitas ruang hall Nusantara yang kurang cukup menampung antusias undangan pada saat PPTM. Sementara langkah perbaikan yang akan dilakukan kuantitas dan kualitas pengelolaan/penyediaan /diseminasi informasi, baik secara konvensional (penerbitan press release), media digital (situs portal dan media sosial) Kemlu maupun media gathering/press briefing akan lebih ditingkatkan, mengingat ketiga wadah tersebut banyak menjadi rujukan bagi para jurnalis dalam menulis pemberitaan tentang isu-isu yang terkait Kemlu dan pelaksanaan diplomasi/hubungan luar negeri Indonesia. Media gathering (doorstop) langsung oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri selama ini juga menjadi bobot berita yang khusus dan diminati para jurnalis.

IKU B 4.2: Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI

IKU ini bertujuan untuk mengukur sentimen positif media massa Internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI. Pada tahun 2018, realisasi IKU Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI sebesar 83,12% dengan capaian 92,36% dari target 90%. Dalam realisasinya, dari 4.047 pemberitaan tentang kebijakan hubungan luar negeri RI yang dipantau sepanjang tahun 2018 pada media massa internasional, terdapat 3.364 pemberitaan yang memiliki sentimen berita yang positif ataupun netral. Dengan demikian jumlah sentimen berita yang positif sebesar 83,12%, yang membentuk opini positif di kalangan pembacanya.

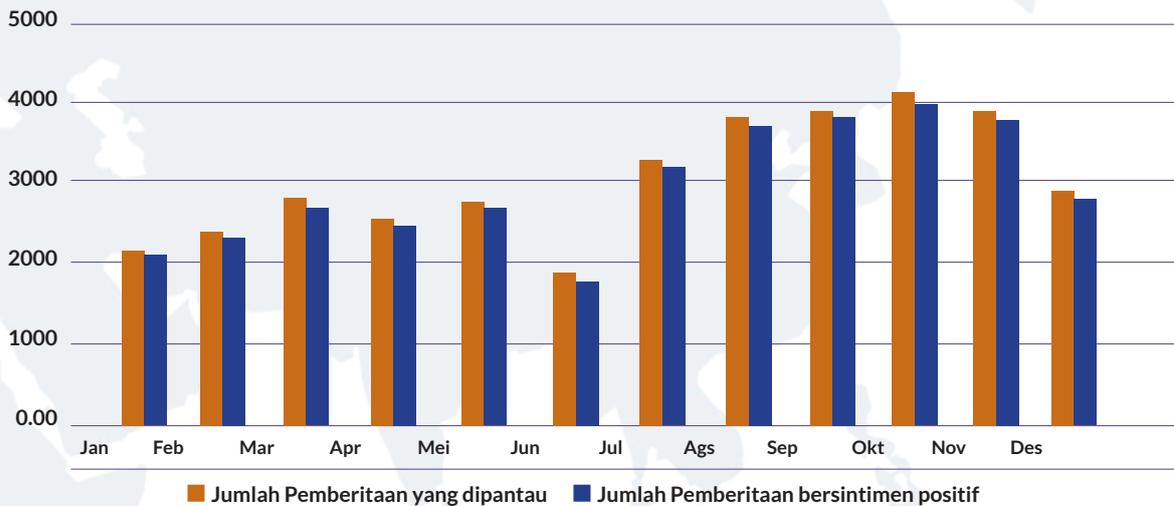
Berita yang disajikan media massa merupakan berita faktual, aktual, akurat, dan berimbang, serta yang paling penting sebagian besar substansi pemberitaan media massa tidak bernada negatif baik terhadap kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan lainnya yang memberikan citra baik (positif) tentang Indonesia dan Kemlu. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 92,36% (diperoleh dari persentase realisasi dibagi persentase target dikali 100%) sebagaimana tabel di bawah:

Tabel Capaian IKU-B 4.2 Tahun 2018

IKU-B4.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	Jumlah berita yang memiliki sentimen positif pada media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	3.364
	Jumlah pemberitaan yang dipantau pada media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	4.047
	Realisasi	83,12%
	Target	90,00%
	Capaian	92,36%

Jumlah persentase yang tinggi terhadap pemberitaan dengan sentimen positif di media massa internasional mengenai kebijakan hubungan luar negeri RI disebabkan oleh aktivitas dan peran strategis upaya diplomasi Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan, terutama mengenai Palestina. Selain itu, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB juga menjadi salah satu capaian diplomasi yang banyak diangkat oleh media internasional. Peran Indonesia di regional dan kawasan, terutama di ASEAN dan Pasifik, kerja sama ekonomi dengan negara sahabat, juga menjadi sorotan dalam pemberitaan di media internasional.

Trend Pemberitaan dengan Sentimen Bernada Positif tentang kebijakan Hubungan Luar Negeri RI pada Media Massa Internasional Sepanjang Tahun 2018



Guna melakukan engagement dengan media internasional, Kementerian Luar Negeri juga melakukan kegiatan-kegiatan antara lain Fasilitasi Kunjungan Jurnalis Asing/Kru Film yang melakukan liputan ke daerah-daerah di Indonesia dan Journalist Visit Program (JVP) 2018. Dalam kaitan tersebut, Direktorat Jenderal IDP mengundang 10 (sepuluh) jurnalis dari 6 (enam) negara dari kawasan Indo-Pacific, diantaranya India, Bangladesh, dan Sri Lanka dari kawasan Asia Selatan, serta Fiji, Papua New Guinea, dan Solomon Islands dari kawasan Pasifik untuk melakukan kunjungan ke Jakarta, DI Yogyakarta, Labuan Bajo – Nusa Tenggara Timur, dan Bali selama 10 (sepuluh) hari, pada 23 – 31 Juli 2018. Outcome dari program JVP yakni meningkatnya citra positif Indonesia di luar negeri melalui pemahaman tentang kemajuan dan pembangunan Indonesia, promosi wisata, budaya, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia melalui liputan dan publikasi yang akan dibuat oleh para jurnalis selama mengikuti program tersebut.



■ Courtesy Call Peserta JVP 2018 ke Wakil Menteri Luar Negeri RI

Berikut beberapa tulisan atau pemberitaan dengan sentimen positif tentang Indonesia yang ditulis oleh para peserta dari program JVP 2018:

1. <http://theislandsun.com.sb/indonesia-pledges-support-towards-peace-building/>
2. <http://theislandsun.com.sb/a-place-where-culture-and-heritage-thrives/>
3. <http://theislandsun.com.sb/citizen-journalism-new-trend/>
4. <http://fjijisun.com.fj/2018/08/01/yogyakarta-hopes-to-bring-more-tourists/>
5. <http://fjijisun.com.fj/2018/08/02/drinking-coffee-harvested-from-cat-poop/>
6. <http://fjijisun.com.fj/2018/08/13/online-news-that-is-believed/>
7. <http://fjijisun.com.fj/2018/07/25/indonesia-reaffirms-fiji-ties/>
8. http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=189454
9. http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=189003
10. http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=189085
11. http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=188802
12. <http://ibtbtd.net/h-e-dr-m-fachir-vice-minister-foreign-affairs-republic-indonesia/>

Sebagai contoh pemberitaan bersentimen positif pada media massa cetak internasional terhadap kebijakan hubungan polugri RI, antara lain :

Secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam pencapaian IKU dimaksud. Ke depannya akan dilakukan perbaikan dalam segi kuantitas dan kualitas pengelolaan/penyediaan/diseminasi informasi, baik secara konvensional (penerbitan *press release*), media digital (situs portal dan media sosial) Kemlu maupun media *gathering/press briefing* akan lebih ditingkatkan, mengingat ketiga wadah tersebut banyak menjadi rujukan bagi para jurnalis dalam menulis pemberitaan tentang isu-isu yang terkait Kemlu dan pelaksanaan diplomasi/hubungan luar negeri Indonesia.

CO-OPERATION

Indonesia Reaffirms Fiji Ties

FONUA TALEI
JAKARTA, INDONESIA

The Indonesian Government has reaffirmed its stance to continue economic co-operation with Fiji.

Speaking to 10 foreign journalists in Jakarta on Monday, Indonesian Vice Foreign Minister Dr. Abdirahman Mohamad Fachir said co-operation in the blue economy was vital for maritime nations because of the similarities they shared as archipelagic countries.

The "Blue Economy" is an emerging concept which encourages better stewardship of our ocean or "blue" resources.

It highlights, in particular, the close linkages between the ocean, climate change and the wellbeing of people.

Dr Fachir said infrastructure on land and between islands were prominent and so is marine tourism.

Journalists at his Jakarta office said: "You are very instrumental in sharing information and delivering messages and we need your assistance to promote the exchange and connection between our people and the world."

During the course of 10 days the group of journalists will visit different cities in Indonesia, including Labuan Bajo, Bali and Yogyakarta.

On Monday the group visited the Jakarta Smart City office and were shown an application of a smart city concept designed to optimise the use of information and communication technology (ICT) to control various resources in the city of Jakarta more effectively and efficiently.

Members of the group were told that the concept would lead to maximum public service, provided solutions to problems and supported sustainable development.

After the visit to the smart city the



■ Contoh Berita Positif terhadap Polugri Indonesia di Koran The Nation, Fiji

IKU B4.3: Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Portal Situs Kemlu

IKU persentase peningkatan jumlah pengunjung Portal Situs Kemlu merupakan IKU baru yang mula ditetapkan pada tahun 2018. IKU ini dibuat untuk mengukur sejauh mana jangkauan informasi yang ditayangkan melalui Portal Situs Kemlu sampai kepada masyarakat dinilai dari peningkatan jumlah pengunjung Portal Situs Kemlu dari waktu ke waktu. Pada tahun 2018, realisasi persentase peningkatan jumlah pengunjung Portal Situs Kemlu adalah sebesar 46,29% dengan capaian 46.29% (batas toleransi 120%) dari target 10%, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Capaian IKU B4.3 Tahun 2018

IKU-B4.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase peningkatan jumlah pengunjung Portal Situs Kemlu	Jumlah pengunjung Portal Situs Kemlu tahun berjalan	2.533.310
	Jumlah pengunjung Portal Situs Kemlu tahun sebelumnya	1.731.762
	Realisasi	46,29%
	Target	10,00%
	Capaian	462,90%
	Batas Toleransi	120%

Sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan ke Portal Situs Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik telah melakukan kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pejabat Penerangan dan Humas (PENHUMAS) bagi perwakilan RI di Kawasan Eropa dan Asia Pasifik, yang diselenggarakan di KBRI Roma dan KJRI Hong Kong dan dihadiri oleh seluruh perwakilan RI di kawasan Eropa dan Asia Pasifik. Selain itu, telah diselenggarakan juga lokakarya peningkatan kapasitas PENHUMAS bagi pejabat di perwakilan RI yang diadakan di KBRI Bangkok, KBRI Ankara, dan KBRI Pyongyang.

■ Lokakarya Penhumas bagi Perwakilan RI di Kawasan Asia-Pasifik di Hongkong, RRT



■ Lokakarya Penhumas di KBRI Ankara, Turki

Dalam rangka memformalkan regulasi pengelolaan konten pada Portal Situs Kemlu dan media sosial, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik juga telah menyelesaikan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Kendala utama yang dihadapi dalam merealisasikan IKU dimaksud adalah sulitnya koordinasi dalam penyediaan/ updating data dan informasi oleh satker Kemlu, khususnya konten yang bersifat kebijakan dan layanan publik. Selain itu, beberapa berita yang dikirimkan oleh satker belum memenuhi kaidah-kaidah penulisan jurnalistik dan tidak disertai dengan foto yang memiliki nilai berita. Beberapa perwakilan RI juga belum menguasai teknis pengunggahan berita dan foto ke situs perwakilan RI, sehingga konten di situs Perwakilan RI tidak terupdate dan mempengaruhi produktivitas konten pada Portal Situs Kemlu.

Dalam rangka menyasati kendala yang dihadapi, telah dilakukan berbagai upaya antara lain (a) mendorong partisipasi aktif unit/satker lainnya di Kemlu dan Perwakilan RI dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui media digital (situs portal dan media sosial) Kemlu, (b) peningkatan koordinasi dan kerja sama antara satuan kerja/unit organisasi lainnya terkait di Kemlu dan Perwakilan RI dalam hal penyediaan updated data/information secara *realtime*, (c) peningkatan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga dan (d) peningkatan *engagement* dengan publik.

IKU B4.4 : Persentase Peningkatan Impresi dan Engagement pada Media Sosial Kemenlu

Pada tahun 2018, realisasi peningkatan impresi dan engagement pada media sosial Kemlu adalah sebesar 140,39% dengan capaian 701,96% (batas toleransi 120%) dari target 20%, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Capaian IKU-B4.4 Tahun 2018

IKU-B4.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Peningkatan impresi dan engagement pada media sosial Kemenlu	Jumlah impresi dan engagement media sosial Kemlu tahun berjalan	70.278.414
	Jumlah impresi dan engagement media sosial Kemlu tahun sebelumnya	29.234.883
	Realisasi	140,39%
	Target	20 %
	Capaian	701,96%
	Batas Toleransi	120%

Dari target peningkatan persentase impresi dan *engagement* pada Media Sosial Kemenlu sebesar 20%, tercatat realisasi jumlah impresi dan *engagement* sebanyak 70,28 juta selama tahun 2018. Dalam mendukung pencapaian IKU tersebut, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan sebagaimana target pada IKU dimaksud, yaitu Pengelolaan Media Digital dan *Digital Diplomacy Gathering* (DDG).

Pada bulan Mei 2018, Kemlu telah melaksanakan *workshop* pengelolaan media digital dan *audio visual*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pengelola informasi di Kementerian Luar

Negeri guna mendukung proses diseminasi informasi. *Workshop* dimaksud menghadirkan para narasumber yang memberikan materi seputar pengelolaan media sosial, penyusunan agenda *setting* media sosial, teknik penyusunan press release yang baik, dan teknik pengambilan foto berita.

Sepanjang tahun 2018, kegiatan *Digital Diplomacy Gathering* (DDG) telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergi antar satuan kerja di Kemlu dalam pengelolaan dan diseminasi informasi di Portal Situs dan media sosial Kemlu. Dalam pertemuan dibahas mengenai agenda *setting* diseminasi informasi, pemutakhiran konten statis dan kebijakan Portal Situs Kemlu, finalisasi buku putih strategi diplomasi digital, finalisasi Permenlu tentang pengelolaan media digital Kemlu dan Perwakilan RI, serta koordinasi antar anggota Tim SIMAN Kemlu.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik juga telah menyelesaikan naskah narasi besar media sosial Kemlu. Narasi besar ini merupakan suatu acuan dalam menjalankan diseminasi informasi di media sosial terkait diplomasi dan kebijakan hubungan luar negeri bagi Kemlu dan Perwakilan RI. Narasi besar berupa tagar #IniDiplomasi yang diturunkan menjadi 4 (empat) tagar lain yang mencerminkan prinsip utama kebijakan hubungan luar negeri RI, yaitu: #NegaraMelindungi (pelindungan WNI dan BHI), #IndonesiaUntukDunia (peran Indonesia di forum internasional), #DemiNKRI (diplomasi terkait kedaulatan NKRI), dan #RintisKemajuan (diplomasi ekonomi). Sementara itu, untuk Perwakilan RI, dibuat tagar #IndonesiaWay untuk mencerminkan upaya diplomasi RI di negara-negara akreditasi.

Tagar-tagar tersebut telah rutin digunakan oleh Kemlu maupun perwakilan RI dalam diseminasi informasi di media sosial. Sebagai contoh:



■ Contoh screenshot konten media sosial dengan tagar #IniDiplomasi

Adapun terkait kendala dalam pencapaian IKU dimaksud adalah koordinasi dalam penyediaan/*updating* data dan informasi oleh satker. Hal ini mengingat kegiatan pengelolaan informasi di media digital Kemlu yang meliputi pengisian konten situs portal Kemlu (naskah,

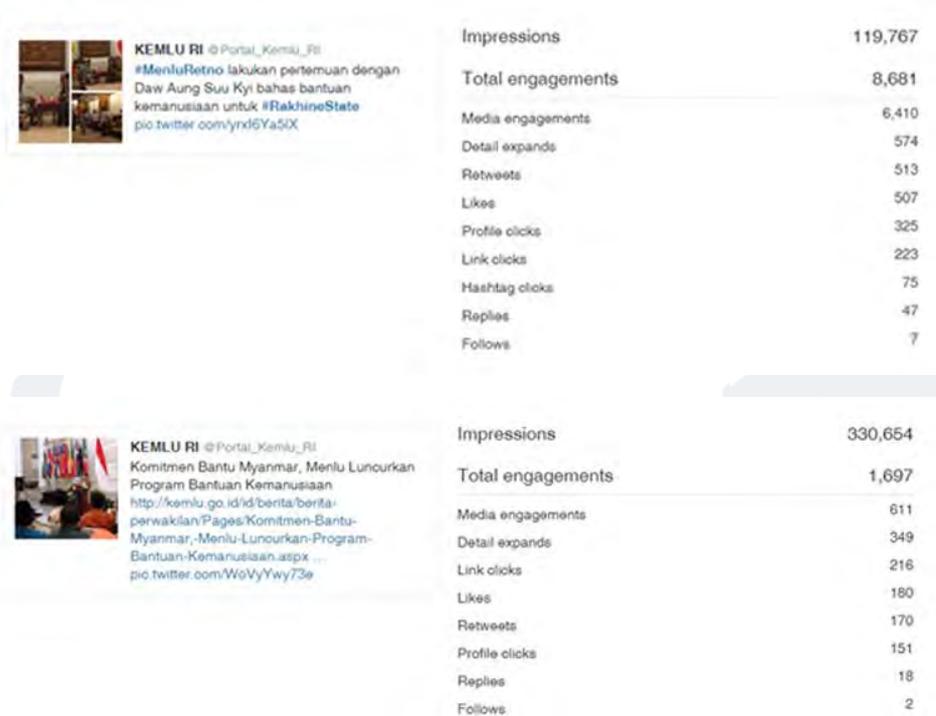
foto, video, infografis), posting atau tweets yang disebarluaskan melalui facebook dan twitter Kemlu, yang kesemuanya memiliki nilai berita yang tinggi dan harus disajikan secara *realtime*. Disamping itu, kebutuhan SDM pengelola media digital di Direktorat Informasi dan Media yang memiliki keterampilan di bidang monitoring, infografis, analisa, dan pengelolaan media social juga sangat diperlukan.

Dalam rangka meniyasati kendala yang dihadapi, telah dilakukan berbagai upaya antara lain (a) mendorong partisipasi aktif unit/satker lainnya di Kemlu dan Perwakilan RI dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui media digital (situs portal dan media sosial) Kemlu, (b) peningkatan koordinasi dan kerja sama antara satuan kerja/unit organisasi lainnya terkait di Kemlu dan Perwakilan RI dalam hal penyediaan updated data/information secara realtime, (c) peningkatan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga dan (d) peningkatan engagement dengan publik.

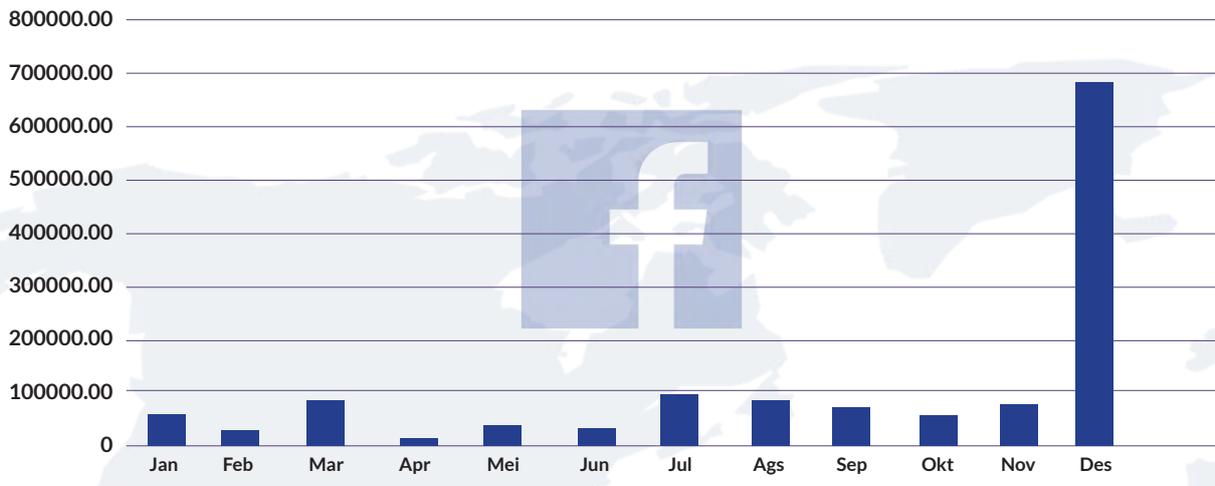
Capaian IKU yang jauh melebihi target antara lain disebabkan oleh:

- a. Iklim media sosial dan penggunaannya (warganet) sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh isu yang perkembangannya sangat cepat.
- b. Akun instagram Kemlu mengalami peningkatan yang sangat pesat, tercatat pada tahun 2018 jumlah pengikut akun instagram Kemlu meningkat sebanyak kurang lebih 600%. Hal ini otomatis menambah tingkat impresi dan engagement yang didapatkan oleh instagram Kemlu.
- c. Adanya beberapa isu yang menjadi sorotan warganet dan pengikut akun media sosial Kemlu, antara lain terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Selain itu kegiatan yang melibatkan generasi muda juga menambah interaksi dengan warganet, salah satunya dari kegiatan Diplomacy Festival.

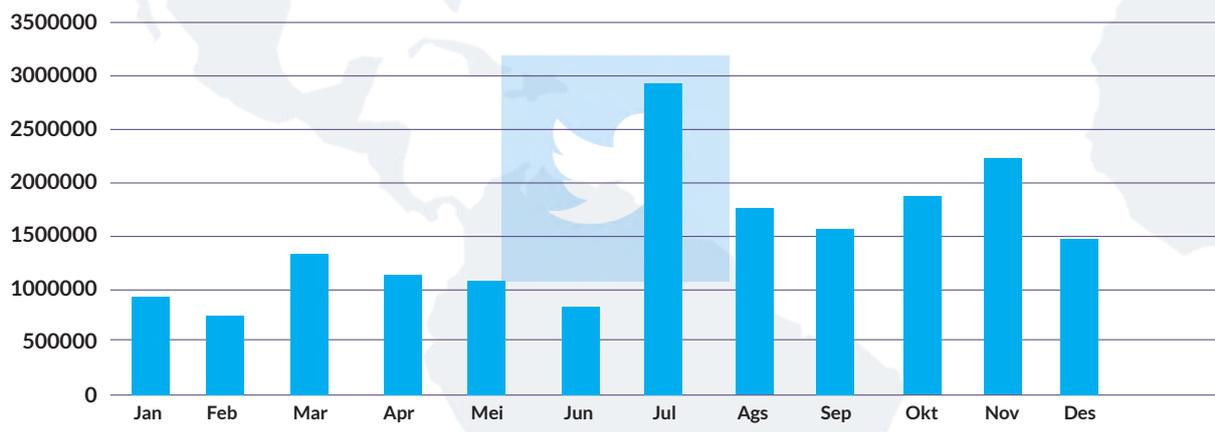
Sebagai contoh jumlah impresi dan engagement pada media sosial Twitter Kementerian Luar Negeri:



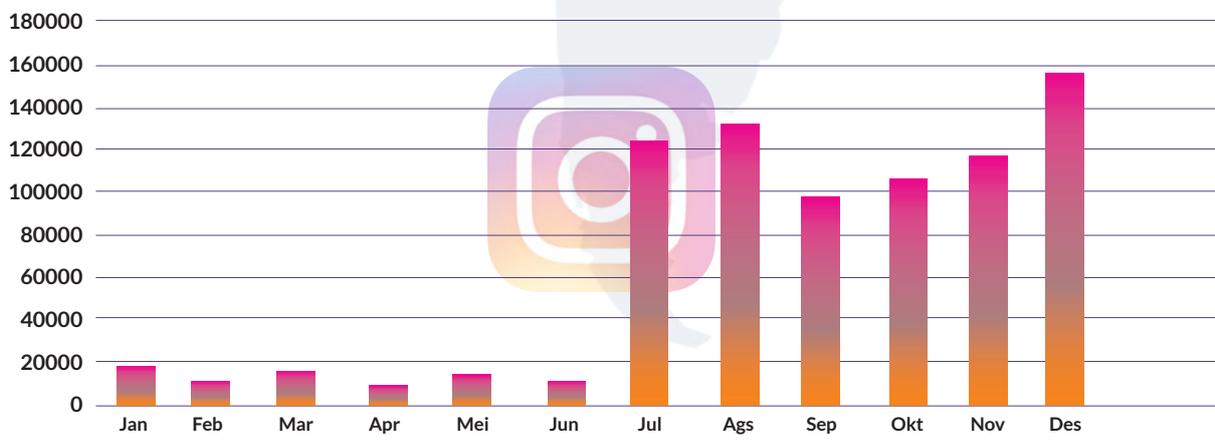
Trend Jumlah Impresi Dan Interaksi Pada Media Sosial Facebook Kemenlu Sepanjang Tahun 2018



Trend Jumlah Impresi Dan Interaksi Pada Media Sosial twitter Kemenlu Sepanjang Tahun 2018



Trend Jumlah Impresi Dan Interaksi Pada Media Sosial Instagram Kemenlu Sepanjang Tahun 2018



IKU B4.5 : Peringkat Keterbukaan Informasi Publik

IKU ini bertujuan untuk mengukur hasil Survey Keterbukaan Informasi Badan Publik Oleh Komisi Informasi Publik (KIP). Pada tahun 2018, realisasi Peringkat keterbukaan informasi publik adalah peringkat 9 dengan capaian **140%** dari target **15**, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Capaian IKU B4.5 Tahun 2018

IKU-B4.5	Informasi Kinerja	Jumlah
Peringkat keterbukaan informasi publik	Hasil survey keterbukaan informasi badan publik oleh KIP	9
	Realisasi	9
	Target	15
	Toleransi capaian	120%

Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui wadah PPID Kemlu.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik telah menyelenggarakan Forum Admin PPID pada tanggal 27-28 Maret 2018 serta Uji Konsekuensi tanggal 16 Agustus 2018 guna penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dihadiri oleh para Admin PPID unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri. DIK telah ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi nomor: 01318/SK/DM/08/2018/58. Lebih lanjut, dalam monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, Kementerian Luar Negeri telah berhasil memperoleh kategori "Menuju Informatif" dengan nilai akhir 80,40.



■ Pertemuan Admin PPID Kementerian Luar Negeri

Kendala dalam mendukung pencapaian IKU pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tersebut antara lain: (a) Koordinasi antara Kemlu dan Komisi Informasi Pusat, (b) terbatasnya pemahaman Satker terkait pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (c) keterbatasan informasi dari setiap satuan kerja di Kemlu, karena rotasi staf (Admin PPID) setiap satker yang cepat dan (d) terbatasnya SDM perihal teknis pengelolaan Informasi Publik di Kemlu.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja dimaksud adalah: (a) mendorong partisipasi aktif satuan kerja di Kemlu dalam pengelolaan dan penyediaan informasi yang terkait program kebijakan-kebijakan hubungan luar negeri, (b) peningkatan koordinasi dengan satker dalam pelayanan informasi dari masyarakat yang diajukan melalui PPID, (c) peningkatan koordinasi Kemlu dan Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui forum-forum pertemuan PPID tingkat Pusat, (d) menyelenggarakan forum dan bimbingan teknik bagi para Admin PPID satuan kerja di Kemlu secara berkala, dan pelatihan khusus kepada staf PPID agar dapat menjadi humas kompeten.

III.4 CAPAIAN KINERJA

Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis (L.1): SDM Kemenlu yang Kompeten

Pencapaian sasaran strategis Kementerian Luar Negeri pada “SDM Kemenlu yang Kompeten” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Pejabat Kemenlu yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan”.

Peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu amanat reformasi birokrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi nasional khususnya di bidang pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri. Untuk itu, dipandang perlu untuk menerapkan kebijakan promosi atau pengisian lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Kementerian Luar Negeri berdasarkan sistem merit dan terbuka. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan dan mendorong ASN untuk dapat mengisi jabatan-jabatan strategis guna meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi Kementerian Luar Negeri dan pada saat yang sama membuka kesempatan yang sama bagi ASN untuk mengembangkan diri dan menduduki jenjang jabatan pimpinan tinggi.

Pengisian JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kemlu menyelenggarakan Seleksi JPT untuk mendapatkan calon – calon pegawai potensial yang dapat diberikan tanggung jawab dalam jabatan struktural di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

IKU “Persentase Pejabat Kemenlu yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan”

IKU ini untuk mengukur sejauh mana sumber daya manusia di Kemenlu telah memenuhi syarat minimal dalam menduduki setiap jabatan, serta memastikan setiap jabatan diisi oleh pegawai yang sesuai dengan kompetensinya

Analisis IKU-1: Persentase pejabat Kemenlu yang memenuhi standar kompetensi jabatan

Pada tahun 2018, capaian IKU “Persentase Pejabat Kemenlu yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan” ditargetkan 85% dengan realisasi sebesar 97,37% dan capaian 114,55%, yaitu sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian S.3 Tahun 2017 dan 2018

IKU: Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	2017	2018
Realisasi	80,5%	97,37%
Target	75%	85%
Capaian	107%	114,55%

Sepanjang tahun 2018, realisasi IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan sebesar 97,37% dari target 85%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian IKU-1 S.3 Tahun 2018

Komponen 4 Sub IKU-3 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu yang telah memenuhi kompetensi jabatan	74
	Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu	76
	Realisasi	97,37%
	Target	85%
	Capaian	114,55%

Peningkatan capaian secara cukup signifikan ini antara lain didukung dengan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan proses Seleksi JPT pada Tahun Anggaran 2018. Tim yang terlibat pada proses Seleksi JPT terdiri dari perwakilan dari seluruh Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri.

Terdapat 22 (dua puluh dua) jabatan di Kementerian Luar Negeri yang telah diisi dengan Seleksi JPT selama tahun 2018, antara lain:

1. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
3. Direktur Eropa II;
4. Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
6. Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN;
7. Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan;
8. Direktur Informasi dan Media;
9. Direktur Fasilitas Diplomatik;
10. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
11. Inspektur Wilayah II;
12. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral;
13. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
14. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan;
15. Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri;
16. Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri;
17. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
18. Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi;
19. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup;
20. Kepala Biro Umum;
21. Direktur Konsuler; dan
22. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa.

Dalam proses seleksi tersebut kendala-kendala yang seringkali muncul yaitu tahap pelaksanaan asesmen yang waktunya terlalu dekat dengan tahap wawancara hasil asesmen, sehingga kemungkinan terjadinya human error dalam rekapitulasi hasil asesmen menjadi lebih besar. Untuk mengatasi hal tersebut, Biro Sumber Daya Manusia menambah jumlah staf dan waktu kerja untuk memverifikasi rekapitulasi hasil asesmen tersebut.

Sebagai langkah ke depan, Kementerian Luar Negeri akan melaksanakan asesmen kompetensi secara bertahap untuk pejabat selain Eselon I dan II. Asesmen akan dimulai dari pejabat Eselon III dan IV pada tahun 2019, dan kemudian dilanjutkan kepada seluruh pejabat fungsional yang ada di Kementerian Luar Negeri. Ditargetkan pada tahun 2024 seluruh pejabat struktural dan fungsional yang ada telah sesuai dengan standar kompetensi jabatannya masing-masing.



■ Pelantikan Bulan Januari 2018



■ Pelantikan Bulan April 2018



■ Pelantikan Sahli



Pada bulan Juni 2018 Biro Sumber Daya Manusia menerima Penghargaan BKN Award untuk Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Kategori Kecil



Sasaran Strategis (L.2): Organisasi dan Tata Kelola yang Baik

IKU-1 : Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu

IKU ini untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan kondisi *good governance*.

IKU-2 : Nilai evaluasi AKIP Kemenlu

IKU ini untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

IKU-3 : Indeks engagement Pegawai Kemenlu

IKU ini untuk mengukur sejauh mana tingkat engagement pegawai di lingkungan Kemenlu atas kinerja aspek-aspek pelayanan dan/atau kinerja organisasi secara umum

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap lima tahunan sampai tahun 2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010 – 2025. Pentingnya RB kembali ditegaskan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dengan ditempatkannya RB sebagai agenda pembangunan nasional, terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Oleh karena itu, RB diharapkan dapat memperkuat upaya organisasi pemerintahan, dalam hal ini Kemenlu, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Dalam hal ini, Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) selaku koordinator pelaksanaan RB di Kemenlu, terus berupaya meningkatkan koordinasi baik antar kelompok kerja (Pokja) RB Kemenlu, satuan kerja (satker) di Kemenlu, dan Perwakilan RI. Guna melaksanakan amanat sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Kemenlu juga menyusun *Road Map* RB fase ke-2 (2015 – 2019) yang diarahkan guna mewujudkan Kemenlu sebagai organisasi birokrasi yang berbasis kinerja.

Pencapaian sasaran strategis “Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik” diukur dengan 3 (tiga) IKU, yaitu “Nilai RB Kemenlu”, “Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu” dan “Indeks *Engagement* Pegawai Kemenlu. Adapun capaian rata-rata SS Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik adalah sebesar 100,42% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Rata-rata SS Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik

No.	IKU	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	74,91	85	77,44	90	76,44	84,93%
2	Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu	74,70	75 (BB)	75,94	76	75,56	99,42%
3	Indeks Engagement Pegawai Kemenlu		3	3,44	3,75	3,42	91,20%
Rata-Rata Capaian							91,85%

L.2.1. Analisis IKU: Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu

Pada tahun 2018, capaian IKU "Nilai RB Kemenlu" ditargetkan mencapai nilai 90 (A) dengan realisasi sementara sebesar 77,44 yang merupakan capaian pada tahun sebelumnya. Adapun nilai RB untuk tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Kemen PANRB. Capaian sementara adalah 86,04%.

Tabel Capaian IKU-1 S.3 Tahun 2018

Komponen 4 Sub IKU-3 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	Nilai RB yang dinilai oleh KemenPARB	76,44
	Realisasi	76,44
	Target	90
	Capaian	84,93%

Kemenlu sebagai organisasi birokrasi telah menghadapi berbagai perubahan eksternal dan internal. Dalam menghadapi dinamika tersebut, baik di level global dan nasional dan tetap menjalankan fungsi utama yang diamanatkan oleh konstitusi, Kemenlu memiliki kebutuhan untuk beradaptasi agar mampu senantiasa berkinerja optimal dan memenuhi harapan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dalam era keterbukaan saat ini, Kemenlu juga setiap saat mendapat sorotan publik dan dituntut untuk selalu meningkatkan tata kelolanya agar menjadi institusi yang profesional, akuntabel, bersih, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam mencapai sasaran RB, Kemenlu telah melakukan sejumlah upaya, khususnya melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian PANRB selalu instansi pembina, melakukan koordinasi dengan seluruh satker dalam kaitannya dengan kegiatan RB, serta melakukan diseminasi dan kampanye pengimplementasian RB.

Kemajuan pelaksanaan RB di Kemenlu tercermin dari indikator meningkatnya indeks RB Kemenlu dari tahun ke tahun. Di 2016, Kemenlu berhasil memperoleh nilai 74,91 pada kategori sangat baik (BB), dan pada 2017 mampu mempertahankan kategori BB tersebut dengan nilai 77,44 yaitu meningkat dari presentase sebelumnya sesuai kemajuan dan capaian strategis yang diraih. Di tahun 2018 ini Kemenlu mengalami penurunan mendapatkan nilai 76,44 pada kategori sangat baik (BB). Kemenlu menggunakan nilai Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan dan RB melalui surat nomor B/214/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Walaupun terdapat upaya peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi, namun hal ini belum mampu memicu perbaikan yang signifikan dan menyeluruh pada perbaikan penerapan reformasi birokrasi di Kemenlu terutama di unit kerja dan rincian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Manajemen Perubahan

Pada setiap satker telah ditunjuk agen perubahan yang diharapkan menjadi motivator dan penggerak perubahan sesuai dengan budaya kerja Kemenlu yang telah ditetapkan dalam Kepmenlu No. 01/B/RO/II/2017/01 Tahun 2017, yaitu "profesionalisme, integritas, manfaat, proaktif, inovatif, dan nilai kejujuran" (PIMPIN). Untuk tahun 2018, Kemenlu telah memberbarui keanggotaan Agen Perubahan, dan telah melakukan beberapa kegiatan penting:

- Pengarahan Wakil Menteri Luar Negeri RI terkait RB kepada Agen Perubahan dan jajaran pimpinan dan staf di Kemenlu pada bulan Mei 2018; dan
- kegiatan peningkatan kapasitas Agen Perubahan di Yogyakarta pada bulan Juli 2018, serta penyusunan Charter Perubahan oleh seluruh pejabat Eselon I.



■ Pengarahan Wakil Menteri Luar Negeri RI terkait RB kepada Agen Perubahan dan jajaran pimpinan dan staf di Kemenlu pada bulan Mei 2018;



■ Kegiatan peningkatan kapasitas Agen Perubahan di Yogyakarta pada bulan Juli 2018, serta penyusunan Charter Perubahan oleh seluruh pejabat Eselon I.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri, Peraturan Eselon I, dan Peraturan Sekretaris Jenderal di Lingkungan Kementerian Luar Negeri serta pertemuan koordinasi berkala terkait perkembangan Rancangan Permenlu dan Rancangan Perpres lainnya yang diprakarsai oleh Kemenlu.

c. Penguatan Kelembagaan

Kemenlu telah melakukan sejumlah upaya guna penguatan kelembagaan Kemenlu, antara lain:

- Restrukturisasi organisasi Kemenlu yang memperkuat jabatan fungsional;
- Evaluasi indeksasi, analisis beban kerja, dan reviu organisasi terhadap 132 Perwakilan;
- Analisis Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kemenlu.

d. Penguatan Tata Laksana dan E-Government

Kemenlu telah melakukan penataan bisnis proses dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di level organisasi dan unit kerja, antara lain:

- Terbitnya Permenlu No. 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bisnis Proses dan SOP di Kemenlu dan Perwakilan RI;
- Tersusunnya Bisnis Proses Kemenlu dan Perwakilan RI yang ditetapkan dengan Kepmenlu No. 48/B/RO/VI/2017/01 tahun 2017 tentang Peta Bisnis Proses Kemenlu dan Perwakilan RI;

- Tersusunnya Kepmenlu No. 49/B/RO/VI/2017/01 tahun 2017 tentang SOP Makro Kemenlu dan Perwakilan RI yang memuat 145 SOP Makro;
- Penyusunan SOP Mikro yang sesuai dengan Bisnis Proses oleh satuan kerja di Kemenlu. Terdapat 2183 SOP Mikro yang tersusun;
- Penyusunan dan implementasi SOP Mikro generik Perwakilan RI; dan
- Reviu dan evaluasi Peta Bisnis Proses dan SOP Makro Kemenlu sepanjang kurun waktu triwulan IV tahun 2018.

Selain itu, Kemenlu telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Kemenlu dan melakukan sejumlah upaya pengembangan *e-government* (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) secara terintegrasi, antara lain implementasi persuratan elektronik (*e-office*) dan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- Terlaksananya sejumlah tahapan pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Kemenlu sejak 2016 untuk mengisi kekosongan jabatan pada tingkat Madya dan Pratama;
- Dilakukannya penyusunan, reviu, dan penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) atas sejumlah jabatan fungsional di Kemenlu;
- Telah diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB tentang 2 (dua) jabatan fungsional baru binaan Kemenlu, yaitu Penata Kanselera dan Pranata Informasi Diplomatik; dan
- Dilaksanakannya inpassing nasional untuk beberapa jabatan fungsional, antara lain pustakawan, sandiman, dan arsiparis

f. Penguatan Akuntabilitas

Pada tahun 2018, telah diterbitkan Permenlu 04 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Kemenlu terus mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja dengan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dapat memonitor dan mengukur capaian kinerja unit kerja di Kemenlu dan Perwakilan RI. BSC telah digunakan di seluruh unit kerja pusat, dan mulai digunakan di Perwakilan pada tahun 2018. Selain itu, telah dilakukan *monev* kinerja berkala secara bulanan.

g. Penguatan Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, Menteri Luar Negeri telah menetapkan peraturan atau kebijakan terkait *Whistle Blowing System* (WBS), penanganan gratifikasi dan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, penerapan manajemen risiko, serta pedoman teknis dan pedoman pengawasan SPIP.

Melanjutkan keberhasilan unit kerja Kemenlu, yaitu KBRI Singapura, memperoleh anugerah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2017, upaya pembinaan Zona Integritas dilakukan secara intensif pada unit kerja di pusat maupun Perwakilan. Untuk tahun 2018, 4 (empat) Perwakilan RI dan 1 (satu) unit kerja Kemenlu berhasil memperoleh anugerah WBK, yaitu: KBRI Seoul; KJRI Kota Kinabalu; KJRI Johor Bahru; dan Direktorat Pelindungan WNI dan BHI

h. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins

Pada aspek pelayanan publik, Kemenlu telah melakukan inovasi dengan optimalisasi pemanfaatan *e-government* guna mencegah praktik KKN dan mempercepat waktu layanan, membangun gedung layanan terpadu, serta melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala. Sejumlah inovasi pemanfaatan *e-government* Kemenlu, antara lain:

- Sinkronisasi penerbitan Ijin Tinggal melalui aplikasi ijin tinggal online dengan penerbitan ID Diplomatik dan Stikerisasi legalisasi;
- Penggunaan aplikasi android untuk: penerbitan paspor diplomatik dan dinas (Desember 2017), permohonan exit permit dan rekomendasi visa;

- Pelayanan permohonan ruang VIP bandara oleh Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional;
- Pelayanan permohonan izin lintas udara/flight clearance (FCIS);
- Pelayanan permohonan izin perkapalan (e-CAIT);
- Peresmian peluncuran multi-platform Safe Travel.

Kemenlu juga telah mendapatkan penghargaan untuk kategori Top 40 SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik) melalui: (a) Museum Konferensi Asia Afrika, dengan inovasi Jarum Pentul (Jadi Relawan Museum itu Penting dan Gaul); dan (b) KJRI Kota Kinabalu, dengan inovasi MENIKUM (Menikah Untuk Melindungi), yaitu Pelayanan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Bagi WNI di Luar Negeri

Sejumlah tantangan Kemenlu dalam upayanya untuk mencapai sasaran dan target RB yang telah ditetapkan, antara lain:

1. luasnya cakupan kerja dan struktur organisasi Kemenlu yang unik. Selain satuan kerja di pusat, Kemenlu memiliki 132 satker Perwakilan dengan karakter koordinasi yang khusus, yang tidak dimiliki oleh K/L lain. Keberadaan Perwakilan yang tersebar di berbagai kawasan dunia menjadi tantangan manajemen tersendiri. Dalam konteks RB, bagaimana Perwakilan, sebagaimana satuan kerja di pusat, dapat senantiasa terlibat aktif dalam pembangunan, pelaksanaan, serta pengembangan berkelanjutan infrastruktur tata kelola yang diupayakan oleh Kemenlu;
2. rotasi pegawai di Kemenlu yang cukup tinggi sehingga berdampak pada kesinambungan pelaksanaan program-program RB karena kehilangan peran informasi (*knowledge sharing*) dalam melaksanakan program RB tersebut;
3. belum optimalnya pelaksanaan RB pada level unit kerja, khususnya Perwakilan RI. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman atas isu-isu RB di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI serta masih minimnya keterlibatan para pegawai dalam menunjang implementasi RB di lingkungan Kemenlu; dan
4. kurang optimalnya peran Agen Perubahan di level unit kerja organisasi dalam mendorong perubahan di lingkungan unit kerjanya.

Guna menyalasi dan tantangan bagi upaya penguatan RB seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi, Kemenlu telah melakukan upaya penguatan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan KemenPANRB guna memastikan upaya-upaya RB di Kemenlu telah dilaksanakan sejalan dalam koridor kebijakan nasional dan terdapat kesepahaman atas capaian dan kemajuan RB yang diperoleh Kemenlu.

Kemenlu juga memperkuat koordinasi dan konsolidasi internal, khususnya koordinasi Tim RB Kemenlu dan Agen Perubahan Kemenlu secara lebih intensif. Peningkatan kesadaran dan pemahaman akan implementasi RB telah dilakukan di lingkungan Kemenlu, antara lain: (a) Rapat koordinasi seluruh Tim RB secara berkala guna mengevaluasi dan melakukan update perkembangan dan pencapaian RB Kemenlu; dan (b) Bimtek peningkatan kapasitas para Agen Perubahan guna percepatan RB dan mengampanyekan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kemenlu.

Sebagai langkah ke depan, Kemenlu akan melakukan sejumlah upaya agar implementasi RB dapat terus ditingkatkan:

1. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan Agen Perubahan guna optimalisasi peran nyata Agen Perubahan dalam membangun budaya perubahan positif;
2. Mendorong keterlibatan jajaran pimpinan baik di tingkat organisasi maupun unit organisasi agar menjadi role model perubahan positif mental aparatur dan budaya kerja di Kemenlu guna mewujudkan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi;
3. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan Agen Perubahan ;
4. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kemenlu guna melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dapat memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur;

5. Melakukan koordinasi berkala baik secara internal dengan seluruh Tim RB dan seluruh satker, maupun secara eksternal dengan KemenPANRB; dan
6. Mainstreaming implementasi RB Kemenlu kepada seluruh pegawai di pusat dan Perwakilan melalui komunikasi, sosialisasi, dan internalisasi secara masif dan berkelanjutan;
7. Menargetkan 6 Wilayah Bebas Korupsi (WBK) baru dan 1 Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) baru pada tahun 2019.

L.2.2. Analisis IKU : Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu

Pada tahun 2018, capaian IKU “Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu” ditargetkan sebesar 76 (BB) dengan realisasi 75,56 atau memperoleh Capaian kinerja sebesar 99,42%, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian IKU-2 Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu Tahun 2018

Komponen 4 Sub IKU-3 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN & RB	75,56
	Realisasi	75,56
	Target	76
	Capaian	99,42%

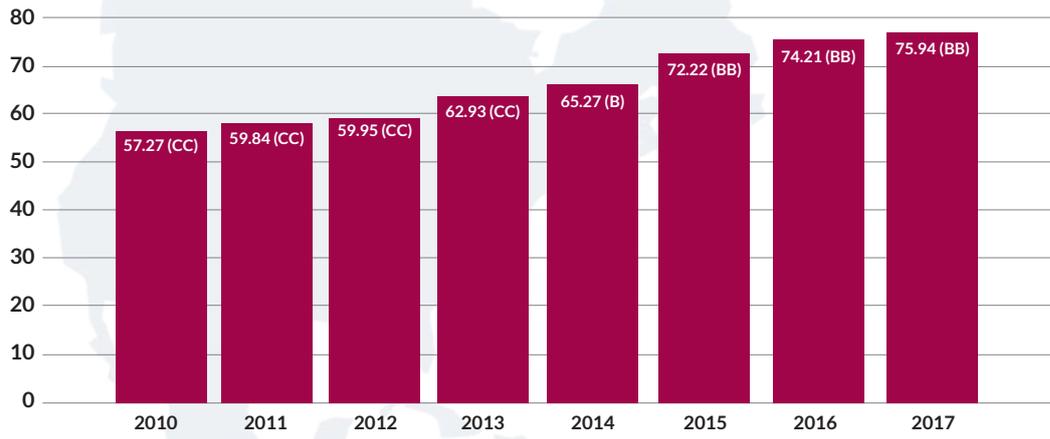
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Evaluasi AKIP mencakup seluruh proses pengelolaan kinerja dari suatu organisasi secara baik dan akuntabel di dalam satu siklus kinerja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi. Dalam hal ini, penyusunan dokumen AKIP seperti Renstra, Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan pengelolaan kinerja organisasi yang akuntabel

Tabel Capaian Komponen AKIP Kemenlu Tahun 2016 dan 2017

No.	IKU	Bobot (%)	2016	2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30	24,27	24,61	24,57
2	Pengukuran Kinerja	25	18,61	18,65	18,58
3	Pelaporan Kinerja	15	10,17	10,35	10,33
4	Evaluasi Kinerja	10	7,40	7,57	7,20
5	Capaian Kinerja	20	14,25	14,76	14,88
Nilai Hasil Evaluasi			74,21	75,94	75,56
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB

Prestasi “BB” dengan range nilai >70-80 dengan arti “Sangat Baik”, menandakan bahwa Kementerian Luar Negeri telah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Komponen yang menjadi penilaian diantaranya meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Grafik Prestasi AKIP Kementerian Luar Negeri
Tahun 2010-2017



Berkenaan dengan kendala yang dihadapi Kementerian Luar Negeri dalam peningkatan nilai AKIP antara lain (a) penyusunan dokumen AKIP yang baik belum sesuai dengan pedoman dan sejalan atau terintegrasi dengan SAKIP Kementerian Luar Negeri dan Satker/Unit Kerja terkait. (b) rumusan indikator yang digunakan dalam mengukur target dan capaian kinerja masih pada tingkatan kegiatan (output) dan belum sepenuhnya sejalan dan merefleksikan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra dan PK) Kementerian Luar Negeri serta satker/unit kerja terkait Kementerian Luar Negeri.

Dalam upaya menyalasi tantangan bagi upaya peningkatan nilai AKIP, Kementerian Luar Negeri terus melakukan upaya koordinasi dan asistensi bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait agar dokumen AKIP yang disusun Satker Kementerian Luar Negeri Pusat dan Perwakilan tidak saja mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Luar Negeri, tetapi juga memiliki indikator kinerja tinggi, yakni pada tataran hasil (outcome).

Sejalan dengan upaya tersebut, pengelolaan dan penyusunan dokumen AKIP secara baik dan akuntabel perlu juga didukung dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan SDM tentang pengelolaan kinerja, yang selama ini dirasakan masih terbatas. Untuk tujuan tersebut, telah diselenggarakan kegiatan *transfer of knowledge*, dalam bentuk penyusunan pedoman SAKIP dan kegiatan sosialisasi serta bimbingan teknis. Selain itu juga telah ditetapkan home staff di Perwakilan RI yang akan ditugaskan sebagai manajer kinerja, sehingga proses pengelolaan kinerja dapat dilaksanakan dan dimonitor dengan baik.

Dalam mendukung peningkatan sistem manajemen kinerja, sejak tahun 2017, telah diterapkan sistem aplikasi pemantauan dan penilaian kinerja (e-Kinerja) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan Satker Pusat dengan tujuan agar pengelolaan kinerja Kementerian Luar Negeri menjadi lebih terukur dan terarah, yang mencakup capaian kinerja seluruh satker dan pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 2018, implementasi Sistem Manajemen Kinerja berbasis *Balanced Scorecard* tersebut juga telah diterapkan di Perwakilan RI.

L.2.3. Analisis IKU : Indeks engagement pegawai Kemenlu

Pencapaian sasaran strategis Kementerian Luar Negeri pada “Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “*Indeks Engagement Pegawai Kemenlu*”.

Untuk mendapatkan *Indeks Engagement Pegawai Kemenlu* dilakukan sebuah survei (*Employee Engagement Survey/EES*). Indeks Engagement Pegawai Kemenlu tersebut menunjukkan tingkat keterikatan (*engagement*) pegawai Kemenlu terhadap organisasi kementerian dan satuan kerja, yang merupakan cerminan dari tingkat kepuasan serta komitmen pegawai terhadap pekerjaannya maupun terhadap organisasi. Dengan kata lain, hasil survei menggambarkan tingkat engagement berdasarkan ketercapaian tujuan individu/pegawai (berupa kepuasan maksimum) dan tujuan organisasi (berupa kontribusi kinerja maksimum), atau perpotongan antara tujuan individu/pegawai dengan tujuan organisasi (Kementerian Luar Negeri). Level engagement tertinggi adalah apabila tercapai kepuasan maksimum dan kontribusi kinerja maksimum. Semakin tinggi engagement, mengindikasikan tingkat pemahaman dan kepedulian yang tinggi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam proses pekerjaannya.

Pegawai dengan tingkat keterikatan yang tinggi dapat dicirikan oleh sejumlah hal berikut, yaitu: (1) memahami dengan baik visi, misi, tujuan, program dan peraturan organisasi; (2) menikmati pekerjaan mereka untuk mencapai sasaran kerja; (3) memiliki komitmen dan motivasi kerja yang tinggi sehingga produktif dan berupaya meningkatkan mutu kinerjanya; (4) menjaga hubungan baik dan kerja sama dengan rekan dan mitra kerjanya; (5) merasa sebagai bagian dari keluarga besar organisasi; dan (6) lebih puas dengan kehidupan di tempat kerja dan rumah.

Mengingat bahwa tingkat keterikatan pegawai pada organisasi sangat mempengaruhi tingkat kinerja pegawai yang bersangkutan yang kelak juga dapat mempengaruhi tingkat kinerja organisasi, maka Kemenlu pada tahun 2017 dan 2018 mengadakan survei tingkat keterikatan pegawai guna melihat sampai seberapa jauh tingkat keterikatan pegawai pada organisasi. Hasil dari survei ini kelak akan digunakan sebagai bahan acuan untuk mengambil kebijakan yang produktif bagi pembangunan keterikatan pegawai, peningkatan kinerja pegawai (dan organisasi) serta penyelesaian bagi masalah-masalah sumber daya manusia dalam organisasi. Hasil survei perlu ditindaklanjuti dengan merancang program-program yang dapat

Hasil survei perlu ditindaklanjuti dengan merancang program-program yang dapat mempertahankan aspek-aspek yang sudah baik dan meningkatkan aspek-aspek yang masih belum optimal. Dengan demikian, diharapkan ada peningkatan keterikatan pegawai Kemenlu terhadap organisasi yang ditampilkan dalam kinerja serta kepuasan yang optimal, di mana pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi secara efektif dan optimal.

Sumber data survei berasal dari kuesioner kuantitatif dengan skala likert 5 (1= sangat rendah, 2 = rendah, 3 = cukup, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi). Kuesioner terdiri dari 13 dimensi, 12 dimensi pada perspektif kepuasan dan 1 dimensi perspektif kinerja yang dinilai secara mandiri oleh pegawai (self assessment). Jumlah pertanyaan kuesioner berjumlah 70 terdiri dari 66 yang bersifat kepuasan dan 4 yang bersifat kinerja.

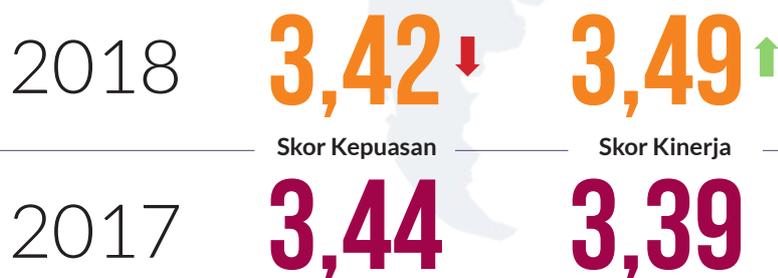
Tabel Tabulasi dimensi dan variabel/pertanyaan Survei

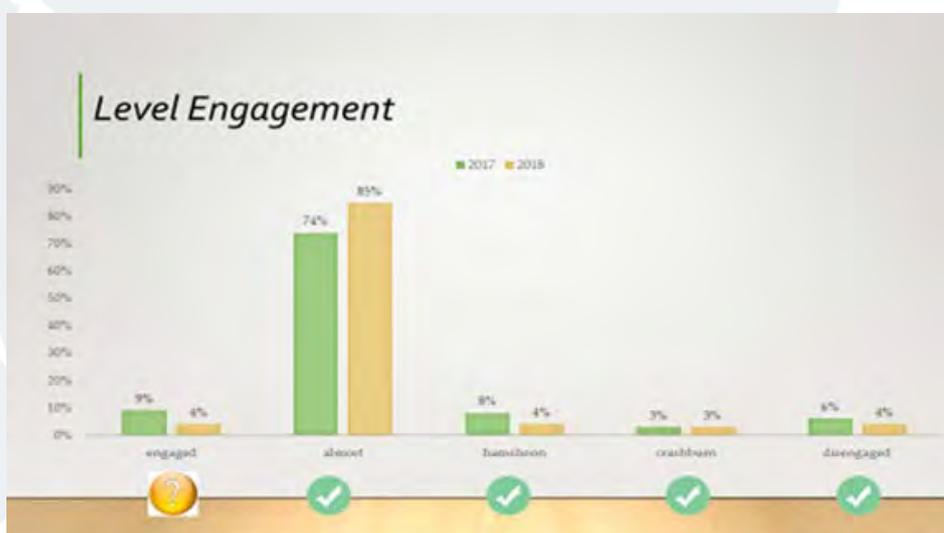
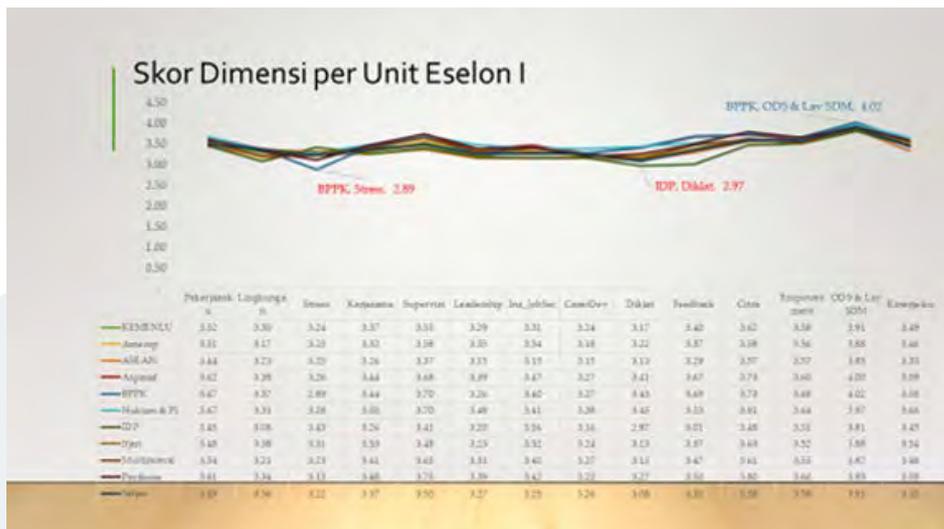
Perspektif	Dimensi	Jumlah Pertanyaan
Kepuasan	Pekerjaanku	5
	Lingkungan	4
	Stress kerja	4
	Kerjasama & Rekan Kerja	6
	Supervisi	5
	Leadership & Management	9
	Insentif dan Kelangsungan Kerja	5
	Promosi & Pengembangan Karir	5
	Pelatihan	4
	Feedback	3
	Citra	6
	Empowerment	5
	ODS & Layanan SDM	5
Kinerja	Kinerja-ku	4
Jumlah		70

Pada tahun 2018, capaian IKU “Indeks Engagement Pegawai” ditargetkan 3,75 dengan realisasi sebesar 3,42 dan capaian 91.2%, yaitu sebagai berikut

Tabel Perbandingan Capaian L.3 Tahun 2017 dan 2018

IKU: Indeks engagement pegawai	2017	2018
Realisasi	3,44	3,42
Target	3	3,75
Capaian	114.67%	91.2%





Indeks engagement pegawai tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017, namun penurunan tersebut tidak signifikan. Meskipun demikian, skor 3,42 masih di bawah skor ideal yang menjadi target capaian, yaitu 3,75. Skor ini mengindikasikan secara umum tingkat keterikatan pegawai Kemenlu berada pada kisaran sedang. Jika dibandingkan, hasil survei tahun 2017 dan 2018 mencerminkan tingkat keterikatan pegawai pada kisaran yang relatif sama dengan mayoritas level engagement yang serupa. Hasil survei 2018 juga menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di level "almost engaged" (85%), di mana pada tahun 2017 mayoritas pegawai yang mengikuti survei juga berada pada level "almost engaged" (74%).

Pegawai pada level "almost engaged" memiliki kontribusi/kinerja dan kepuasan pada tingkat sedang-tinggi tapi masih belum konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai survei ini adalah mereka yang memiliki kontribusi cukup optimal dan relatif puas dengan pekerjaannya, namun hal ini masih belum terlalu konsisten dalam artian pegawai pada kategori ini dalam saat-saat tertentu tidak menikmati pekerjaannya atau tidak merasa puas.

Survei engagement pegawai dilaksanakan pada bulan November 2018, dengan melibatkan 800 orang partisipan (Diplomat, Petugas Komunikasi, BPKRT dan PDDN) dari total 2004 pegawai, atau 39,92% jumlah populasi pejabat/pegawai di Kementerian Luar Negeri yang bertugas di dalam negeri.

Dalam rangka mendukung peningkatan engagement pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri, berikut rekomendasi yang kiranya dapat menjadi pertimbangan:

1. Menyusun atau merasionalkan analisis beban kerja (ABK) dan menganalisis jabatan sesuai *job description*, tanggung jawab dan kedudukannya guna mengurangi tingkat stress kerja;
2. Melaksanakan program penghargaan untuk pegawai yang berprestasi baik yang sudah diatur (misal kenaikan pangka pangkat luar biasa) atau program penghargaan lain yang didesain menarik;
3. Menyusun pola karir (*career plan*) yang jelas dan setara untuk setiap kelompok pegawai;
4. Menyusun *Training Need Analysis* (TNA) dan *Individual Development Plan* (IDP), sehingga diklat sesuai dengan kebutuhan pegawai/pengembangan karir dan tujuan organisasi;
5. Dalam merumuskan kebijakan perbaikan di atas, agar dapat memperhatikan tingkat kepuasan, capaian kinerja dan level engagement pada setiap kategori (unit kerja, jabatan Kementerian Luar Negeri, jabatan ASN, gender, tingkat pendidikan, usia, masa kerja PNS dan masa kerja ASN).

Dalam pelaksanaan kegiatan survei *engagement* pegawai terdapat kendala kurangnya tingkat partisipasi pegawai dalam mengisi survei, sehingga periode survei diperpanjang selama 1 (satu) minggu dari rencana semula menjadi hingga awal Desember 2018. Untuk kegiatan survei *engagement* pegawai periode berikutnya akan dilaksanakan pada awal triwulan ke III di bulan Juli guna meningkatkan partisipasi lebih banyak para pegawai.

mempertahankan aspek-aspek yang sudah baik dan meningkatkan aspek-aspek yang masih belum optimal. Dengan demikian, diharapkan ada peningkatan keterikatan pegawai Kemenlu terhadap organisasi yang ditampilkan dalam kinerja serta kepuasan yang optimal, di mana pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi secara efektif dan optimal.

Sumber data survei berasal dari kuesioner kuantitatif dengan skala likert 5 (1= sangat rendah, 2 = rendah, 3 = cukup, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi). Kuesioner terdiri dari 13 dimensi, 12 dimensi pada perspektif kepuasan dan 1 dimensi perspektif kinerja yang dinilai secara mandiri oleh pegawai (*self assessment*). Jumlah pertanyaan kuesioner berjumlah 70 terdiri dari 66 yang bersifat kepuasan dan 4 yang bersifat kinerja.

Sasaran Strategis (L.3): Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Memadai

Analisis IKU-1: "Persentase Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana"

Definisi

Sarana adalah alat dan juga benda-benda yang bertujuan untuk menunjang kegiatan organisasi agar dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi tersebut. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

Memadai adalah kuantitas dan kualitas terpenuhi dengan layak dan berfungsi untuk menunjang kegiatan perkantoran sehari-hari

Yang dipenuhi sesuai rencana yaitu Tepat waktu sesuai dengan RKA-K/L yang disahkan menjadi DIPA.

Latar Belakang:

Sebuah organisasi tentunya memiliki berbagai kebutuhan untuk dapat mendukung maupun membantu agar kegiatan di dalam organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ada. Kebutuhan akan sarana dan prasarana merupakan kebutuhan penting agar terlaksananya setiap kegiatan yang ada. Tujuan utama dari sasaran ini adalah untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana Kemenlu dan Perwakilan yang berjalan sesuai rencana.

Capaian IKU -1

KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2018	INFORMASI KINERJA	REALISASI (REAL) 2018	
				UNIT	%
IKU-1 S1.1	Persentase Sarana dan Prasarana Kemenlu yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipenuhi sesuai dengan DIPA	2.487	80.80%
			Total Sarana dan Prasarana yang direncanakan sesuai dalam DIPA	3.078	

Sarana dan Prasarana Kemenlu yang dipenuhi sesuai dengan rencana pada tahun 2018 sebesar 80,80 % yang terdiri atas kendaraan dinas, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran serta rehabilitasi gedung dan sarana prasarana Kementerian Luar Negeri (rincian sebagaimana daftar terlampi). Adapun realisasi IKU termaksud pada tahun 2016 mencapai 76,47% sedangkan pada tahun 2017 mencapai 143.93%.

Pada tahun 2018 pagu anggaran untuk pelaksanaan IKU Persentase Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana adalah sebesar Rp701.696.487.000,00 dengan realisasi Rp635.176.809.013,00 atau 90,52%.

A. Kendaraan Bermotor

Biro Umum selama tahun 2018 telah melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sejumlah 40 unit, Bus Jemputan 5 unit, Ambulance 1 unit serta 20 unit kendaraan bermotor roda 2 untuk mendukung mobilitas pejabat beserta seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri. Pengadaan kendaraan dinas dilakukan melalui *e-purchasing* pada website *e-catalogue* dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).



B. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional unit Sekretariat Jenderal dan telah dilakukan pengadaan komputer sejumlah 104 unit, pengadaan printer 416 unit, pengadaan notebook 33 unit, pengadaan peralatan pendukung pengolah data 606 unit serta pengadaan perangkat lunak sejumlah 492 unit.

C. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

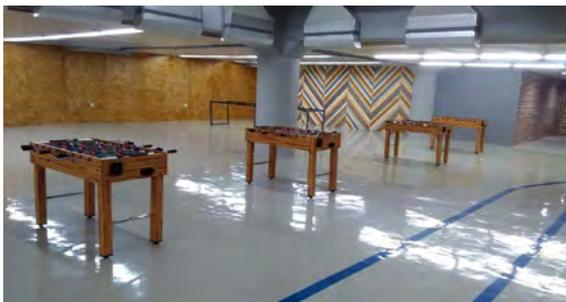
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dibutuhkan untuk mendukung seluruh kebutuhan kerja serta fasilitas perkantoran untuk melaksanakan kegiatan operasional. Fasilitas perkantoran tersebut diwujudkan oleh Biro Umum melalui pengadaan pendingin ruangan 47 unit, pengadaan meubelair kantor 108 unit, pengadaan lemari penyimpanan 56 unit, pengadaan peralatan inventaris lainnya 508 unit dan inventaris pengganti bagi pegawai lama dan baru 5 paket.





D. Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Kementerian Luar Negeri

Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Kementerian Luar Negeri dilakukan secara berkesinambungan sesuai prioritas kebutuhan dan kondisi fisik Gedung. Pada tahun 2018 telah dilakukan berbagai rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Kementerian Luar Negeri antara lain: Renovasi Basement Gedung Tower, Renovasi Taman Belakang, Renovasi Direktorat Timur Tengah dan Direktorat Asia Selatan dan Tengah, Renovasi Rumah Dinas Eselon I, Renovasi Basement Pusdiklat Senayan, serta Rehabilitasi gedung lainnya. Selain itu terdapat pula pengadaan Gedung Sekretariat ASEAN melalui metode kontrak tahun jamak serta pengadaan Gedung pada Perwakilan RI di Luar Negeri pada tahun 2018 untuk KJRI Chicago, KJRI Johor Bahru, KRI Tawau dan KBRI Warsawa.



Pada praktiknya terdapat beberapa kendala pada pencapaian IKU sarana dan prasarana Kemenlu yang dipenuhi sesuai dengan rencana antara lain:

1. Proses perizinin serta perbedaan peraturan pengadaan barang/jasa di dalam negeri dan di luar negeri mengakibatkan terhambatnya waktu dimulainya pekerjaan beberapa pengadaan barang/jasa.
2. Terdapat beberapa kali gagal lelang sehingga beberapa pengadaan renovasi gedung tidak dapat dilaksanakan karena ketebatasan waktu tahun anggaran.
3. Harga pada *e-catalogue* untuk pengadaan elektronik baru diupdate oleh LKPP pada bulan September yang menyebabkan beberapa pengadaan mundur dari waktu seharusnya.
4. Adanya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa terbaru untuk tahun 2018 yang dikeluarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diberlakukan pada bulan Juli tahun 2018 yang mengharuskan adanya perubahan untuk beberapa rencana pengadaan.
5. Sistem pengendalian atas karwas kontrak di Kementerian Keuangan tidak cukup optimal sehingga beberapa kali terdapat kesalahan dokumen maupun pendaftaran kontrak pada aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan.



Solusi yang dibutuhkan atas berbagai kendala pencapaian IKU yaitu:

1. Pemahaman yang mumpuni dan memadai pada proses pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan s.d. tahap pembayarannya sehingga tidak terdapat hambatan teknis karena kurangnya dokumen administrasi.
2. Dibutuhkan Aplikasi pengawasan keuangan dengan early warning system yang memastikan semua karwas kontrak yang sudah didaftarkan telah ditagihkan/dibayarkan.

Langkah ke depan untuk memastikan ketercapaian IKU adalah:

1. Penetapan rencana kerja dan spesifikasi serta perizinin dilakukan sedini mungkin, sekiranya terdapat perubahan rencana dapat dilakukan penyesuaian rencana kerja yang lebih akurat.
2. Koordinasi lebih terstruktur dengan LKPP untuk mengetahui perkembangan terkini untuk data pada *e-catalogue* ataupun implementasi peraturan pengadaan barang/jasa.
3. Akan disusun dashboard yang memetakan periode pengadaan barang/jasa mulai dari tahap penyusunan dokumen s.d. pekerjaan selesai dilaksanakan (seperti *timeline*) sehingga para pengelola keuangan memahami dengan pasti ketercapaian rencana kerja.



Sasaran Strategis (L.4): Sistem Informasi Manajemen Kemenlu yang Terintegrasi

IKU-1 : Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

IKU ini untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan kondisi good governance.

IKU-2 : Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)

IKU ini untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Sistem Informasi Manajemen Kemenlu yang Terintegrasi (L.4) menunjukkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan efisien sesuai Rencana Induk Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi bisnis Kementerian Luar Negeri. Terintegrasinya sistem informasi manajemen menghasilkan interoperabilitas sistem sehingga pertukaran data/informasi dapat berlangsung secara cepat dan akurat, sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas proses bisnis, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri.

Pencapaian sasaran strategis "Sistem Informasi Manajemen Kemenlu yang Terintegrasi" diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) "Indeks Keamanan Informasi (KAMI)" serta "Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)" dengan pembobotan masing-masing sebesar 50%.

Adapun capaian rata-rata nilai SS L.4: Sistem Informasi Manajemen Kemenlu yang Terintegrasi Tahun 2018 adalah 105,8%, dengan perbandingan target dan capaian tahun 2016 - 2018 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel Perbandingan Capaian L.4 Tahun 2016-2018

Keterangan	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)			Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Target	2	2.50	3	3,45	3.55	3.55
Realisasi	1,86	2.88	3.5	3,32	3.37	3.37
Capaian	93%	115.20%	116,67%	96,23%	94,93%	94,93%
Bobot			50%			50%
Capaian Nilai L.4						105,8%

Analisis IKU-1: Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan hasil evaluasi yang memberikan gambaran kondisi kesiapan dari sisi kelengkapan dan konsistensi keamanan informasi, dan identifikasi tingkat kematangan penerapan pengamanan informasi. Analisis dilakukan berdasarkan kategorisasi tingkat kepentingan Sistem Elektronik (SE). Terdapat 5 area yang dievaluasi yaitu Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset Informasi, serta Teknologi dan Keamanan Informasi.

Penilaian dilakukan secara mandiri oleh pihak ketiga (konsultan) menggunakan borang Indeks KAMI yang disediakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah diselaraskan dengan SNI ISO/IEC 27001:2013 yang terdiri dari seratus tiga puluh satu pertanyaan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Sistem Elektronik Kementerian Luar Negeri termasuk kategori STRATEGIS, yang jika mengalami kegagalan akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pada tahun 2018, Kementerian Luar Negeri memperoleh nilai 452 dari nilai maksimum kondisi BAIK yaitu 645. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peran keamanan informasi telah terdefinisi pada Kementerian Luar Negeri tetapi masih membutuhkan perbaikan. Berdasarkan perbandingan nilai yang diperoleh dari nilai maksimum sesuai kategori Sistem Elektronik terhadap area yang dievaluasi, maka didapatkan rentang indeks berada pada skala 3.5, yang menunjukkan Tingkat Kematangan Indeks KAMI Kementerian Luar Negeri berada pada posisi Kondisi Terdefinisi dan Konsisten atau Tingkat Kematangan III+ dari Tingkat Kematangan V. Dengan demikian, pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Keamanan Informasi (KAMI) tahun 2018 sebesar 3.5 dari target 3, dengan persentase capaian 116.67%, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel Capaian IKU-1 L.4 Tahun 2018

Komponen 4 Sub IKU-3 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks diperoleh dari penilaian tingkat kepentingan dan evaluasi kelengkapan pengamanan informasi	3.5
	Realisasi	3.5
	Target	3
	Capaian	116.67%

Tabel Perbandingan Capaian IKU-1 L.4 Tahun 2016 - 2018

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2016	2017	2018
Target	2.0	2.5	3
Realisasi	1.86	2.88	3.5
Capaian	93%	115.20%	116.67%

Adapun rekomendasi Peningkatan Tingkat Kematangan Indeks KAMI Kementerian Luar Negeri untuk setiap area yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Area Tata Kelola Keamanan Informasi

- a. Menetapkan dan mengesahkan kebijakan tentang Manajemen Pihak Ketiga dan secara periodik meninjau dokumen tersebut;
- b. Membuat standar metrik dan laporan tentang *cybersecurity* dan Secara periodik meninjau efektifitas dari metrik tersebut dan diperbarui jika dibutuhkan;
- c. Mendefinisikan komite mengenai *cybersecurity* yang terdiri dari *top level* management dan/atau chief;
- d. Melakukan perencanaan *cybersecurity* dan proses penyesuaian;
- e. Menetapkan dan melaksanakan prosedur pelaporan mengenai *cybersecurity* kepada top level management (komite *cybersecurity*) dan secara periodik meninjau prosedur dan memperbarui jika dibutuhkan;

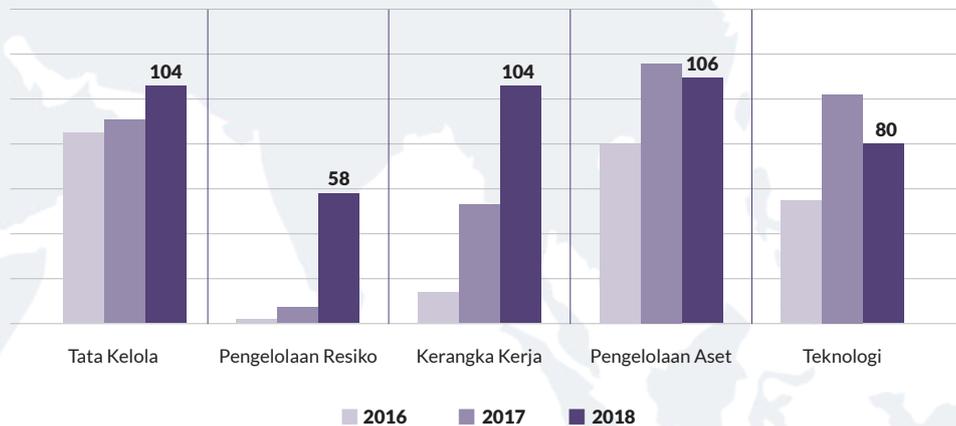
- f. Menetapkan dan memformalkan prosedur komunikasi eksternal dan secara periodik meninjau prosedur dan memperbarui jika dibutuhkan;
 - g. Membuat kebijakan tentang *security awareness training* dan secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan tersebut minimal 1 tahun sekali;
 - h. Membuat kebijakan dan prosedur mengenai persiapan dan kegiatan pelatihan dan secara berkala meninjau kebijakan serta prosedur pelatihan;
 - i. Membuat kebijakan dan prosedur tentang tes dan survei setelah pelatihan yang bertujuan untuk peninjauan;
 - j. Menetapkan prosedur pelaporan kesadaran keamanan dan secara berkala melakukan peninjauan prosedur.
- 2. Area Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi**
- a. Menentukan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di seluruh organisasi dan secara berkala Meninjau dan memperbarui Manajemen Risiko minimal setiap satu tahun;
 - b. Menentukan *Business Impact Analysis* (BIA) dan secara berkala meninjau dan memperbarui BIA minimal setiap satu tahun;
- 3. Area Kerangka Kerja Keamanan Informasi**
- a. menentukan kebijakan & prosedur perencanaan insiden keamanan (*Incident Response Plan*) dan secara berkala meninjau dan memperbarui semua dokumentasi yang berkaitan dengan perencanaan insiden keamanan;
 - b. Menetapkan prosedur formal terkait pencatatan insiden dan Secara berkala meninjau dan menguji efektivitas proses penanganan insiden termasuk bukti dan dokumentasi pendukung;
 - c. Menentukan prosedur dari *incident analysis*, Mengembangkan prosedur formal kegiatan forensik dan Secara berkala meninjau dan menguji efektifitas proses *incident analysis* termasuk bukti dan dokumentasi pendukung;
 - d. Membuat rencana percobaan (*Business Continuity Planning*) BCP dan (*Disaster Recovery Planning*) DRP yang meliputi Skenario tes secara partial, Skenario tes secara keseluruhan, proses dan sistem kritikal maupun non-kritikal, Melakukan testing BCP dan DRP minimum sekali dalam satu tahun;
 - e. Membuat template laporan untuk BCP dan DRP, Meninjau hasil percobaan BCP dan DRP sebagai input untuk meningkatkan BCP and DRP.
- 4. Area Pengelolaan Aset Informasi**
- a. Membuat kebijakan mengenai *Asset Management* dan Secara berkala meninjau dan memperbarui dokumen mengenai *Asset Management*;
 - b. Membuat prosedur *Asset Management* serta meninjau dan memperbarui prosedur *Asset Management* secara periodik (minimum sekali dalam satu tahun);
 - c. Membuat kebijakan dan prosedur manajemen perubahan (*Change Management*) dan Meninjau secara berkala prosedur *Change Management*;
 - d. Membuat kebijakan untuk *User Access Management* dan Secara berkala meninjau, memperbarui kebijakan secara periodik;
 - e. Menentukan dan memperbarui strategi dan roadmap pada proses *User Access Management* (termasuk integrasi target sistem);
 - f. Menetapkan prosedur dan melakukan *provisioning* akses pengguna dengan kontrol akses berbasis peran serta meninjau dan memperbarui prosedur secara periodik;
 - g. Mendefinisikan prosedur *Security Monitoring*.

5. Area Teknologi dan Keamanan Informasi

- Membuat dokumen kebijakan dan prosedur mengenai *Security hardening*;
- Membuat dokumen mengenai *Security Hardening Baseline*;
- Mengembangkan dan memformalkan dokumen *security hardening baseline*;
- Melakukan pengawasan penerapan *security hardening baseline* secara berkala;
- Melakukan proteksi terhadap perangkat *end point*, termasuk perlindungan terhadap *malware*;
- Meninjau aktivitas pengawasan *security hardening*;
- Menetapkan, memformalkan dan melakukan prosedur *log and event documentation*.

Terdapat peningkatan nilai capaian Indeks KAMI dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0.62 poin, dari 2.88 (2017) menjadi 3.5 (2018). Berikut grafik pencapaian 5 (lima) area penilaian Indeks KAMI Kementerian Luar Negeri:

Gambar 1. Grafik Pencapaian Masing-Masing Area Penilaian Indeks KAMI



Tabel Pencapaian Masing-Masing Area Penilaian Indeks KAMI

	TATA KELOLA	PENGELOLAAN RISIKO	KERANGKA KERJA	PENGELOLAAN ASET	TEKNOLOGI
2016	90	1	14	81	55
2017	91	10	52	118	101
2018	104	58	104	106	80

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks KAMI, Kementerian Luar Negeri secara umum tercatat menghadapi kendala pada area ke-5 yakni belum lengkapnya instrumen Pengelolaan Risiko, yang mencakup mengenai identifikasi risiko, pengelolaan risiko, mitigasi risiko, serta pengelolaan kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*business continuity dan disaster recovery plans*). Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menyiapkan draft Dokumen Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri untuk dapat ditetapkan dan disahkan dalam bentuk Keputusan Menteri Luar Negeri dan juga menyiapkan SOP Teknis semua kegiatan TIK serta dokumen pendukung Manajemen Risiko di Kementerian Luar Negeri.

Di samping itu, Kementerian Luar Negeri juga berencana akan melakukan tindak lanjut atas kegiatan percepatan penanggulangan kendala di area lainnya, dengan melakukan:

1. Mempersiapkan standarisasi pelaksanaan, pengembangan, dan operasional teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan pengelolaan keamanan informasi.
2. Meningkatkan kapabilitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari sumber daya manusia, data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur, sehingga keamanan informasi dapat lebih terjamin.
3. Melakukan identifikasi dan pencatatan *asset* untuk mempermudah pengelolaan *asset*.
4. Melakukan evaluasi SOP secara berkala untuk mengetahui kesesuaiannya dengan proses bisnis yang ada.

Analisis IKU 2 : Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)

Indeks Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan alat yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah, dorongan bagi peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif, serta untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah secara nasional.

Pemeringkatan PeGI dilakukan pada lima dimensi penilaian, yaitu:

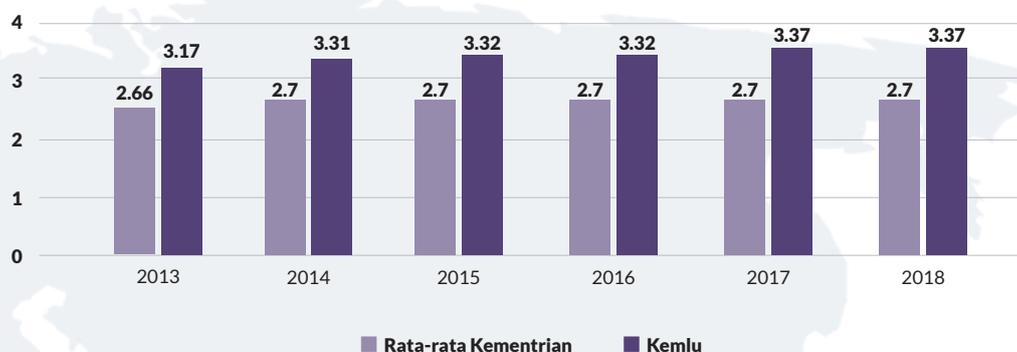
1. Dimensi kebijakan, merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi *e-Government*;
2. Dimensi kelembagaan, berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Dimensi infrastruktur, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Dimensi aplikasi, berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan *e-Government* secara langsung (*front office*) atau tidak langsung (*back office*);
5. Dimensi perencanaan, berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks PeGI tahun 2018 adalah sebesar 3,37 dari target 3,55 (dengan persentase capaian 94,92%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian IKU-1 L.4 Tahun 2018

Komponen 4 Sub IKU-3 B3	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	Indeks PeGI diperoleh dari nilai rata-rata pemeringkatan terhadap lima dimensi e-Government yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara	3,37
	Realisasi	3,37
	Target	3,55
	Capaian	94,93%

Nilai indeks 3,37 diperoleh dari nilai rerata dari semua dimensi yang dinilai dalam penilaian dan menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-Government* di Kementerian Luar Negeri berada dalam kategori baik dan saat ini menduduki peringkat ke-3 dari 31 Kementerian. Berikut capaian Indeks Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) dalam kurun waktu lima tahun terakhir dibandingkan nilai rata-rata PeGI K/L dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 2. Grafik Capaian Indeks PeGI Kementerian Luar Negeri Tahun 2013-2018

Berikut data capaian PeGI Kementerian Luar Negeri periode 2016 s/d 2018 dengan merujuk pada target yang akan dicapai sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian IKU-1 L.4 Tahun 2016 - 2018

IKU: Indeks Pemeringkatan <i>e-Government</i> Indonesia (PEGI)	2016	2017	2018
Target	3,32	3,37	3,37
Realisasi	3,45	3,55	3,55
Capaian	96,23%	94,93%	94,93%

Penilaian penerapan *e-Government* (PeGI) Kementerian Luar Negeri untuk setiap dimensi adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Kebijakan

- a) Nilai dimensi Kebijakan adalah BAIK (3,33);
- b) *E-leadership* dinilai baik dengan diterbitkannya Peraturan Menlu Nomor 4 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang mengatur adanya fungsi Chief Information Officer (CIO) dan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c) Dilakukan perombakan struktur organisasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 dan penambahan bidang yang secara spesifik memiliki tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan dan tata kelola di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- d) Inisiatif membangun dan mengoperasikan *Command Center* sebagai kebijakan yang tepat mendukung efektifitas tugas dan fungsi kementerian yang semakin kompleks.

2. Dimensi Kelembagaan

- Nilai dimensi Kelembagaan adalah **BAIK** (3,40);
- Adanya struktur organisasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan yang sudah beroperasi sejak 2018, yang sudah memiliki fungsi tambahan dibanding masa sebelumnya seperti tata kelola Teknologi Informasi.
- Tersedianya SDM dalam jumlah banyak untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian yang memerlukan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang andal dan aman.
- Sudah menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Dimensi Infrastruktur

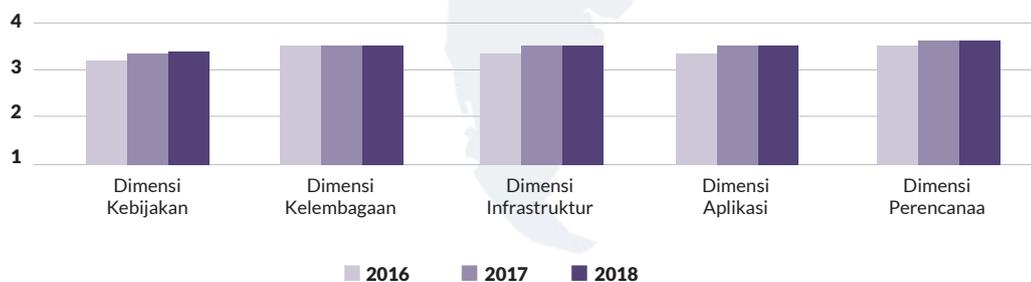
- Nilai dimensi Infrastruktur adalah BAIK (3,33);
- Tersedianya 2 (dua) data center yang berfungsi sebagai pusat data dan pusat pemulihan dalam rangka mendukung ketersediaan/keberlangsungan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Mengoperasikan *Network Operation Center* (NOC) yang mengendalikan jaringan koneksi internasional sebesar 350 Mbps dan koneksi Nasional sebesar 1 Gbps dengan *backup bandwidth* koneksi internasional 350 Mbps dan koneksi Nasional 500 Mbps.
- Sudah melakukan pengamanan informasi dengan cara penyediaan dan pengoperasian antivirus dan perangkat lainnya.
- Sudah melakukan asesmen internal keamanan informasi dengan menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

4. Dimensi Aplikasi

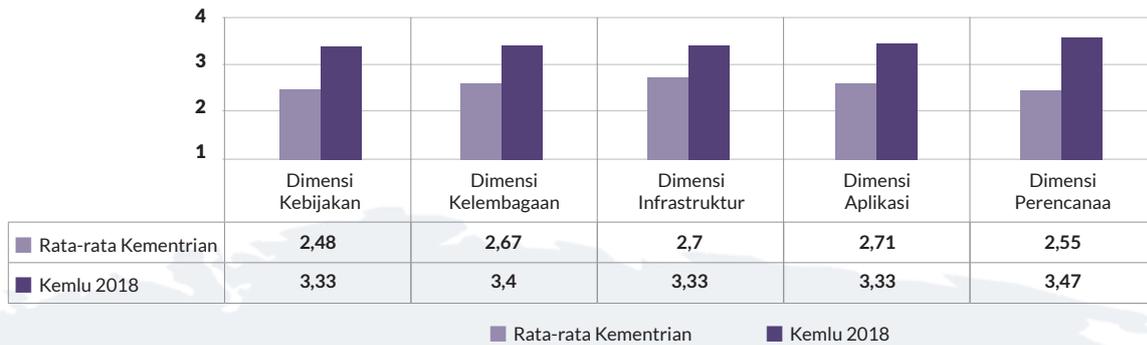
- Nilai dimensi Aplikasi adalah BAIK (3,37);
- Situs web resmi yang dikelola dengan baik dan sudah mengintegrasikan fitur media sosial dan multi media.
- Adanya berbagai aplikasi fungsional untuk mendukung fungsi dan peran kementerian yang cukup lengkap.
- Selain aplikasi internal, kementerian juga mengembangkan aplikasi inovatif layanan publik yaitu *SafeTravel* yang bermanfaat bagi WNI yang bepergian ke luar negeri.
- Kementerian sudah meningkatkan pemanfaatan teknologi terbuka (*open source*) dalam pengembangan berbagai aplikasi yang dioperasikan.

5. Dimensi Perencanaan

- Nilai dimensi Perencanaan adalah BAIK (3,47);
- Kementerian sudah memiliki Rencana Induk Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (RISTIK) Kementerian Luar Negeri 2016 – 2020 yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri
- Kementerian sudah menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan dan pengoperasian Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 119.782.967.000,-
- Sudah memiliki bidang yang bertanggung jawab atas perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Pencapaian Dimensi Indeks PeGI Tahun 2016-2018



Gambar 4. Grafik Pencapaian Dimensi Indeks PeGI Tahun 2018

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Indeks PeGI terutama belum diimplementasikannya instrumen kebijakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara maksimal di Kementerian Luar Negeri, dan perlunya penataan kembali infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah ada. Dalam menyiasati kendala-kendala dimaksud, Kementerian Luar Negeri melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya percepatan, yaitu:

UPAYA PERCEPATAN
Kementerian Luar Negeri

- PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA TIK**
Revisi Permenlu Nomor 4 Tahun 2016
- PEMBANGUNAN SEOUL DATA CENTER**
untuk memberi kemudahan dan kelancaran akses sistem informasi dan aplikasi layanan publik, khususnya untuk pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri
- PEMBENTUKAN KOMITE TIK**
Mengarahkan kebijakan terkait TIK agar bersinergi dengan RISTIK yang mengakomodasi kebutuhan Satker serta melakukan peninjauan atas evaluasi investasi implementasi TIK yang dilakukan oleh CIO
- PENETAPAN JABATAN PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK**
Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
- PENATAAN KEMBALI INFRASTRUKTUR TIK**
Optimalisasi konfigurasi perangkat Data Center dan Disaster Recovery Center disesuaikan dengan praktik terbaik arsitektur TIK

Gambar 5. Upaya Percepatan Kementerian Luar Negeri

1. Peningkatan sistem tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengatur ketentuan lanjutan terkait tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Luar Negeri dengan melakukan revisi Permenlu Nomor 4 Tahun 2016;
2. Pembentukan Komite TIK yang mengarahkan kebijakan terkait TIK sehingga tercipta TIK yang sejalan dan Sinergi dengan Rencana Induk Strategis TIK yang mengakomodasi kebutuhan Satker serta melakukan peninjauan atas evaluasi investasi implementasi TIK yang dilakukan oleh CIO;
3. Penataan kembali infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui optimalisasi konfigurasi perangkat *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) disesuaikan dengan praktik terbaik arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Gambar 6. Perangkat DC di Kementerian Luar Negeri dan DRC di Cijantung

4. Penetapan Jabatan Pranata Informasi Diplomatik sebagai upaya pembentukan jenjang karir yang jelas bagi pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik;
5. Pembangunan *Seoul Data Center* untuk memberi kemudahan dan kelancaran akses sistem informasi dan aplikasi layanan publik, khususnya untuk pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Data akan disinkronisasikan secara langsung antara Pusat Data Seoul dan pusat data di Jakarta.



Gambar 7. Peresmian Seoul Data Center oleh Menteri Luar Negeri



Gambar 8. Peresmian Seoul Data Center oleh Menteri Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri selanjutnya akan menindaklanjuti berbagai kegiatan bagi upaya percepatan penanggulangan kendala yang ada, dengan melakukan:

1. Mempersiapkan standardisasi pelaksanaan, pengembangan, dan operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa Standar Operasional Prosedur teknis setiap bidang di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri;
2. Meningkatkan kapabilitas sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari sumber daya manusia, data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur, sehingga layanan teknologi informasi dan komunikasi dapat diberikan secara efektif dan efisien.

Sasaran Strategis (L.5): Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel

IKU-1 : “Persentase Realisasi Anggaran Kemenlu”

IKU ini untuk mengukur seberapa jauh anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

IKU-2 : “Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu”

IKU ini untuk mengukur seberapa jauh tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan Kemenlu

Pengelolaan anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan Sekretariat Jenderal dalam satu tahun anggaran yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan datang. Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel memiliki arti bahwa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan keuangan telah dilaksanakan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait ruang lingkup pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker), serta diakhiri dengan penyerahan hasil kegiatan kepada pihak-pihak penerima manfaat akhir yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Sasaran Strategis pengelolaan anggaran Kemenlu tersebut, Kemenlu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu (1) Persentase Realisasi Anggaran Kemenlu dan (2) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

L.5.1. Analisis IKU: Persentase Realisasi Anggaran Kemenlu

Untuk capaian realisasi anggaran Kemenlu per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 96,15% (sembilan puluh enam koma lima belas persen) atau sebesar Rp7.544.007.942.937 (tujuh trilyun lima ratus empat puluh empat milyar tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari Pagu Anggaran 2018 sebesar Rp7.845.758.894.000 (tujuh trilyun delapan ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran 2018 berdasarkan jenis belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp3.373.674.823.286, Belanja Barang sebesar Rp3.192.121.127.170, dan Belanja Modal sebesar Rp978.211.992.481.

Capaian realisasi anggaran Kemenlu dimaksudkan meningkat dibandingkan tahun 2017, yakni dari sebesar 91,67% (2017) menjadi 96,15% pada tahun 2018. Berikut perincian realisasi anggaran Kemenlu Tahun 2017 dan 2018:

Realisasi Anggaran Kemenlu Periode Tahun 2017 dan 2018

KODE	IKU	TARGET 2018	INFORMASI KINERJA	REALISASI 2017		REALISASI 2018	
				JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
IKU-1 L.5	Persentase realisasi anggaran	100%	Realisasi Anggaran Kemenlu	6.680.241.628.935	91,67%	7.544.007.942.937	96,15%
			Total Anggaran Kemenlu	7.286.902.468.000		7.845.758.894.000	

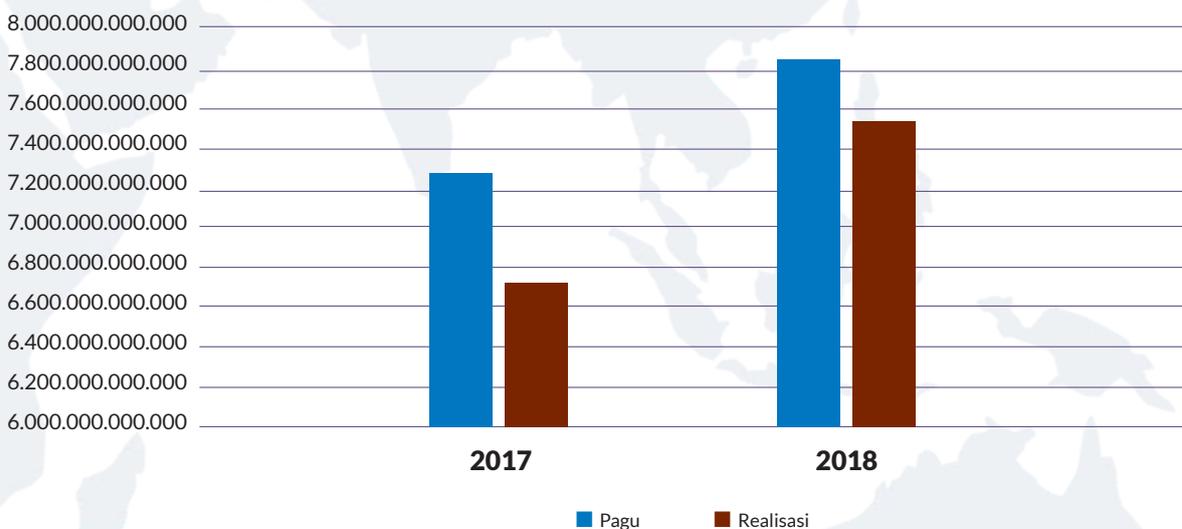
Perbandingan realisasi anggaran antara Satker Pusat dan Perwakilan RI di luar negeri berdasarkan atas realisasi SP2D masing-masing sebesar 96,51% dan 95,91%. Adapun perincian data realisasi adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Anggaran antara Kemenlu Pusat dan Perwakilan
Berdasarkan Realisasi SP2D Tahun 2018**

Satker	Pagu DIPA	Realisasi SP2D	Persentase
Pusat	3.203.839.635.000	3.091.963.970.131	96,51%
Perwakilan	4.641.919.259.000	4.452.043.972.806	95,91%
Total	7.845.758.894.000	7.544.007.942.937	96,15%

Berikut grafik Perbandingan Capaian Realisasi IKU Persentase Realisasi Anggaran Kemenlu selama 2 tahun terakhir sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan 2018



Dari sisi pelaksanaan anggaran, Kemenlu terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya seoptimal mungkin atas anggaran yang telah digunakan. Namun demikian, selama tahun 2018 Kemenlu masih menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan khususnya di Perwakilan RI di luar negeri, antara lain:

1. Adanya perubahan politik, ekonomi dan sosial budaya di beberapa negara telah mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program kerja yang direncanakan sebelumnya;
2. Permasalahan fluktuasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sejak triwulan II tahun 2018, dengan nilai tukar yang mencapai Rp15.400,00/dolar AS. Nilai tukar pasar tersebut lebih besar Rp2.000/dolar AS daripada asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.400,00/dolar AS. Hal ini menyebabkan Perwakilan RI, sebagai Satker pengguna mata uang dolar AS mengalami kekurangan anggaran akibat selisih kurs.

3. Terjadinya pagu minus pada belanja mengikat yang disebabkan oleh kekurangan anggaran tahun 2018. Kemenlu telah mengajukan permintaan anggaran belanja tambahan (ABT) pada tahun 2018, namun tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Kemenkeu dan pagu minus ini akan diselesaikan pada tahun 2019. Permasalahan ini juga berpengaruh pada meningkatnya pinjaman pihak ketiga (PFK) dan peminjaman dana kas besi periode 31 Desember 2018.
4. Tidak tersedianya alokasi anggaran cadangan untuk menutupi kekurangan anggaran akibat rugi selisih kurs memberikan konsekuensi untuk melakukan revisi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan optimalisasi anggaran antar Satker Kemenlu memerlukan proses yang tidak singkat.
5. Kondisi teknologi informasi di beberapa negara yang kurang mendukung pengoperasian beberapa aplikasi keuangan dan barang telah menghambat proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Untuk mewujudkan capaian Kinerja IKU ini, Kemenlu telah mengalokasikan anggaran untuk beberapa kegiatan/ rencana aksi (renaksi) selama tahun 2018 meliputi, di antaranya adalah:

- a. Kegiatan Harmonisasi Rancangan Pengaturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Tunjangan Dubes LBBP;
- b. Penelaahan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Perwakilan RI Abuja, Hamburg, Madrid, Ottawa dan Port Moresby;
- c. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana PNBK Perwakilan RI Tahun 2018;
- d. Monitoring dan Evaluasi Dana Mutasi Pegawai (Penempatan dan Penarikan) dan Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Mutasi Home Staff;
- e. Sosialisasi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri pada Kemenlu dan Pelaksanaan Cashless (layanan Perbankan secara elektronik);
- f. Rekonsiliasi Pagu DIPA Awal dan Perhitungan UP Perdana Satker Perwakilan RI di Luar Negeri TA 2018;
- g. Rekonsiliasi Pagu dan Anggaran Perwakilan serta Evaluasi Permasalahan Proses Pengelolaan Keuangan (revolving) Perwakilan RI di Luar Negeri;
- h. Rekonsiliasi Rekening Kemenlu dan Finalisasi Kertas Kerja BAPK Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pusat;
- i. Asistensi Perbaikan Pembukuan dan Penyelesaian Selisih Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Perwakilan Wilayah Amerika, Asia, Eropa dan Timur Tengah.

Terkait pengelolaan anggaran, Pimpinan Kemenlu menekankan perubahan kultur dan *mindset* pengelolaan keuangan di Pusat maupun di Perwakilan untuk saat ini dan di masa mendatang. Pimpinan Kemenlu telah mencanangkan hashtag “Digitalisasi Pengelolaan Anggaran” yang meliputi tiga hal yaitu:

- Perubahan pola kerja yang berorientasi pada inovasi teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat cepat.
- Perubahan dari sistem manual (paper based) menjadi sistem digital.
- Meninggalkan metode pembayaran tunai menjadi cashless di seluruh satker Perwakilan di luar negeri.
 1. *Cashless*, penerapan sistem cashless yang berupa kartu kredit/debit pemerintah seluruh satker Kemenlu.
 - Penggunaan Kartu Debet untuk Satker Pusat yang rencana akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 Maret 2019.
 - Satker Perwakilan akan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan Sistem Kontrol Bank Operasional (BO) Valas yang diharapkan selesai pada Semester I tahun 2019.
 2. Mobile Application Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemenlu (Mobile App Simkeu), merupakan aplikasi tambahan sebagai alat pembukuan yang digunakan oleh pengelola keuangan untuk dapat membukukan pengeluaran secara langsung, kapanpun dan dimanapun secara mobile, serta dapat melihat pagu, realisasi anggaran dan perkembangan cashflow uang secara realtime. Sehingga dapat menghindari terjadinya pagu minus dan kesalahan pembebanan akun pengeluaran belanja.

L.5.2. Analisis IKU: Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa independen Pemerintah mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Kemenlu RI berhasil meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemenlu Tahun 2017, yang diserahkan secara langsung oleh Dr. Agung Firman Sampurna, Anggota I BPK RI kepada Abdurrahman M. Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri, di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN BPK pada tanggal 6 Juni 2018.

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TW IV 2018	INFORMASI KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	TARGET 2018	REALISASI 2018	KONVERSI
IKU-2 L.5	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	WTP	Opini BPK yang Dicapai	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
			Opini BPK yang Diharapkan	WTP	WTP	WTP	WTP	



■ Penyerahan LHP dan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI, di Jakarta tanggal 6 Juni 2018.

Capaian Realisasi Opini BPK berupa WTP untuk Laporan Keuangan Kemenlu tersebut merupakan capaian tersendiri mengingat selama 3 tahun berturut-turut Kemenlu berhasil mempertahankan prestasi dimaksud, yakni:

Opini	2015	2016	2017
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	WDP	WTP	WTP

Meskipun opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2018 telah diperoleh, masih terdapat beberapa kendala dalam mempertahankan opini WTP untuk tahun 2018 dari BPK RI antara lain:

1. Keunikan transaksi yang terjadi pada Satker-satker di Kemenlu khususnya Satker Perwakilan RI di Luar Negeri;
2. Perubahan kebijakan terkait transaksi aset dan persediaan yang diakibatkan oleh penerapan PMK 160/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Di samping itu, Penerapannya masih belum didukung oleh sistem aplikasi yang mengakomodir keunikan transaksi di Satker-satker Kemenlu;
3. Kebijakan akuntansi keuangan yang sangat dinamis;
4. Kompetensi SDM penyusun laporan keuangan tingkat Satker yang belum memadai.

Untuk mempertahankan opini BPK agar tetap baik (WTP), salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kemenlu adalah dengan menindaklanjuti temuan-temuan/rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa BPK, antara lain:

1. Kemenlu telah membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Selisih Kas di Bendahara Pengeluaran, terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, dengan tugas utama yaitu menyelesaikan selisih kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2017 khususnya pada 13 (tiga belas) Satker Perwakilan yang menurut BPK RI terdapat selisih yang cukup material. Selama tahun 2018, Tim Terpadu Penyelesaian telah melakukan penelusuran selisih kas; validasi dokumen keuangan; dan asistensi pembukuan secara langsung ke 13 satker Perwakilan tersebut. Pada akhir tahun 2018, Tim telah menyelesaikan sebagian besar permasalahan selisih kas pada Bendahara Pengeluaran di Perwakilan.
2. Kemenlu telah berhasil menagih pihak-pihak yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dalam kasus Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Negara. Pihak-pihak tersebut antara lain Bendahara Perwakilan maupun non-bendahara. Hingga akhir tahun 2018, dari 1506 kasus Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi telah diselesaikan sebanyak 1404 kasus dengan nilai pelunasan sampai akhir tahun 2018 seluruhnya ekuivalen dalam rupiah sebesar Rp34,235,421,458.92.

(Catatan: US\$ 1,380,561.37; Rp9,461,225,971.80; HK\$99,959.65; RM122,629.81; SG\$5,960.00; €134,057.87; CHF99.20; SEK2,644.00; NOK1,027.72; GBE3.261,51; AU\$31,175.18; K60,571.48; CAD29,710.00; FJ\$47.54; NZ\$3,867.71; BN\$1,110.00; Peso\$922.55)

3. Selain itu dibidang administratif keuangan, Kemenlu bersama Kementerian Keuangan dan BPK telah merumuskan format kertas kerja tambahan Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK) yang baru dengan menambahkan informasi seperti selisih yang terjadi antara pembukuan dengan dokumen pendukung dan rincian saldo Kas Kemenlu dan Atase Teknis di Perwakilan. Format BAPK yang baru tersebut telah disetujui oleh BPK karena dinilai telah dapat memberikan gambaran secara rinci dan detail terkait selisih uang yang ada di kas dan perbedaan saldo bank. Format kertas kerja tambahan BAPK direncanakan akan diterapkan di satker Perwakilan pada tahun 2019.

Untuk itu, dalam rangka peningkatan kualitas laporan Keuangan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain;

1. Meningkatkan koordinasi internal dengan Satker-satker Pusat maupun Perwakilan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi;
2. Bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya untuk memberikan panduan maupun bimbingan terkait pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan keuangan bagi Satker Pusat dan Perwakilan guna meningkatkan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan tingkat Satker;
3. Berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu dalam menyikapi kendala aplikasi maupun kebijakan-kebijakan akuntansi atas transaksi yang terjadi di Satker-satker Kemenlu.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPK RI agar dapat melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel sehingga dapat meraih opini WTP.

Untuk mewujudkan capaian Kinerja IKU ini, Kemenlu telah mengalokasikan anggaran untuk beberapa kegiatan/ rencana aksi (renaksi) selama tahun 2018 guna mendukung kegiatan rekonsiliasi dan konsolidasi data realisasi anggaran dalam pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual yang merupakan kegiatan rekonsiliasi data mencakup akun-akun berpengaruh pada Laporan Keuangan Kemenlu. Kegiatan akan melibatkan Kemenkeu sebagai counterpart Kemenlu.

Kegiatan lainnya yang juga mencakup upaya rekonsiliasi internal antara Aplikasi SAIBA dengan Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN untuk laporan keuangan tahun 2017, antara lain:

- a. Rekonsiliasi data SPM dan SP2D Satker Setjen Triwulan IV TA 2017 pada tanggal 10-12 Januari 2018 dengan melibatkan KPPN Jakarta I;
- b. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran dan Sisa UP/TUP Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun 2017, pada tanggal 15 dan 17 Januari 2018;
- c. Rekonsiliasi Data SIMAK dan SAIBA Sekretariat Jenderal Triwulan IV TA 2017, pada tanggal 16-18 Januari 2018;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Satker Perwakilan RI dan Satker Pusat Tahun 2017, pada tanggal 25 Januari – 03 Februari 2018.

Selain mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tersebut, Kemenlu juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan RI pada tanggal 21 Februari 2018 sebagai Kementerian/Lembaga terbaik ke-3 dengan DIPA sedang (2,5 Trilyun s.d. 10 Trilyun) dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal Kemenlu, bersamaan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Kementerian Keuangan. Keberhasilan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada Kemenlu dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.



■ Penyerahan Penghargaan sebagai salah satu Kementerian/ Lembaga Berkinerja terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

III.5 REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Kementerian Luar Negeri

Realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri tahun 2018 adalah sebesar **Rp 7,544,007,942,937** atau **96,15%** dari pagu **7,845,758,894,000**. Realisasi anggaran tersebut meningkat cukup signifikan yakni sebesar **4,48%** dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar **91,67%** sebesar **Rp 6.680.213.661.760,-** meningkat **5,79%** dibandingkan tahun 2016, dengan komposisi sebagai berikut:

REKAP REALISASI SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN PER 31 DESEMBER 2018

SATUAN KERJA	TOTAL PAGU BELANJA (Rp)	TOTAL REALISASI BELANJA (Rp)	SISA PAGU BELANJA (Rp)	PERSENTASE (%)
SATKER PUSAT	3,203,839,635,000	3,091,963,970,131	111,875,664,869	96.51%
SATKER PERWAKILAN	4,641,919,259,000	4,452,043,972,806	189,875,286,194	95.91%
TOTAL	7,845,758,894,000	7,544,007,942,937	301,750,951,063	96.15%

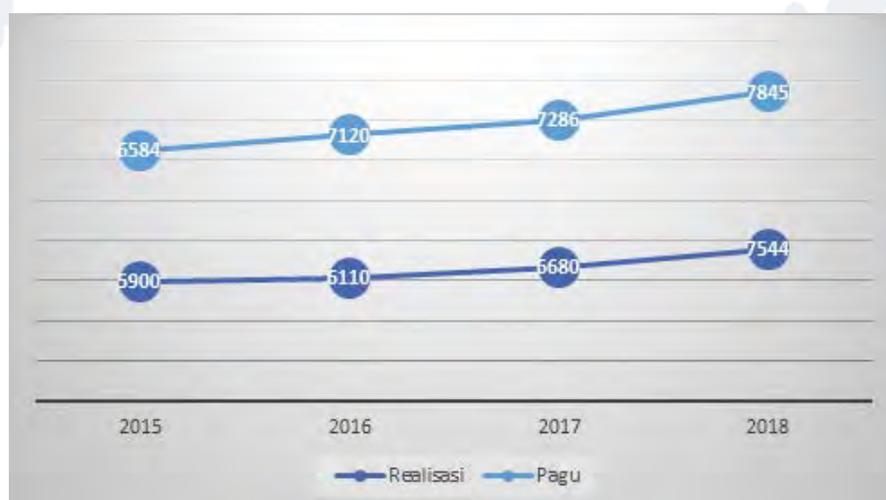
Selain tabel rekap realisasi Kementerian Luar Negeri berdasarkan wilayah (Satker Pusat dan Perwakilan RI), berikut tampilan realisasi per jenis belanja tahun 2018:

REKAP REALISASI PER BELANJA PER 31 DESEMBER 2018

Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu: Rp. 3,453,705,701,000,-	Pagu: Rp. 3,329,075,250,000,-	Pagu: Rp. 1,062,977,943,000,-
Realisasi: Rp. 3,373,674,823,286,-	Realisasi: Rp. 3,192,121,127,170,-	Realisasi: Rp. 978,211,992,481,-
Persentase serapan: 97.68%	Persentase serapan: 95.89%	Persentase serapan: 92.03%

Program	Anggaran 2017		Anggaran 2018	
	Pagu (Rp.)	Realisasi	Pagu (Rp.)	Realisasi
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerja Sama ASEAN	58.685.315.000,-	56.858.578.514,- (96,88%)	59,830,021,000	59,418,417,058 (99,31%)
Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	737.297.156.000,-	733.600.486.034,- (99,50%)	787,806,556,000	784,740,655,305 (99,61%)
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	82.525.036.000,-	82.525.036.000,- [100,00 %]	76,657,482,000	75,220,130,191 (98,12%)
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	46.524.509.000,-	45.132.605.595,- (97%)	52,673,535,000	52,402,436,175 (99,49%)
Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	40.161.454.000,-	38.683.737.870,- [96,32 %]	43,232,550,000	41,942,136,140 (97,02%)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	117.874.291.000,-	112.098.626.836,- (95,10%)	136,701,366,000	131,655,881,538 (96,31%)
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	92.094.148.000,-	84.714.689.904,- [91,99 %]	104,481,322,000	99,697,150,083 (95,42%)
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri	32.637.961.000,-	29.505.277.252,- (90,40%)	33,109,334,000	32,418,872,264 (97,91%)
Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	28.340.081.000,-	28.017.776.521,- (98,86%)	38,140,641,000	37,572,822,656 (98,51%)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.754.304.188.000,-	4.434.295.283.247,- (93,27%)	4,918,776,399,000	4,748,581,662,398 (96,54%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri	718.006.257.000,-	515.650.603.344,- (71,82%)	1.016.908.688.000	935.657.683.829 (92,01%)
Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	578.452.072.000,-	523.684.946.243,- (90,53%)	577.441.000.000	544.700.095.300 (94,33%)
Total	7.286.902.468.000,-	6.680.213.661.760,- (91,67%)	7,845,758,894,000	7,544,007,942,937 96,15%

Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2018

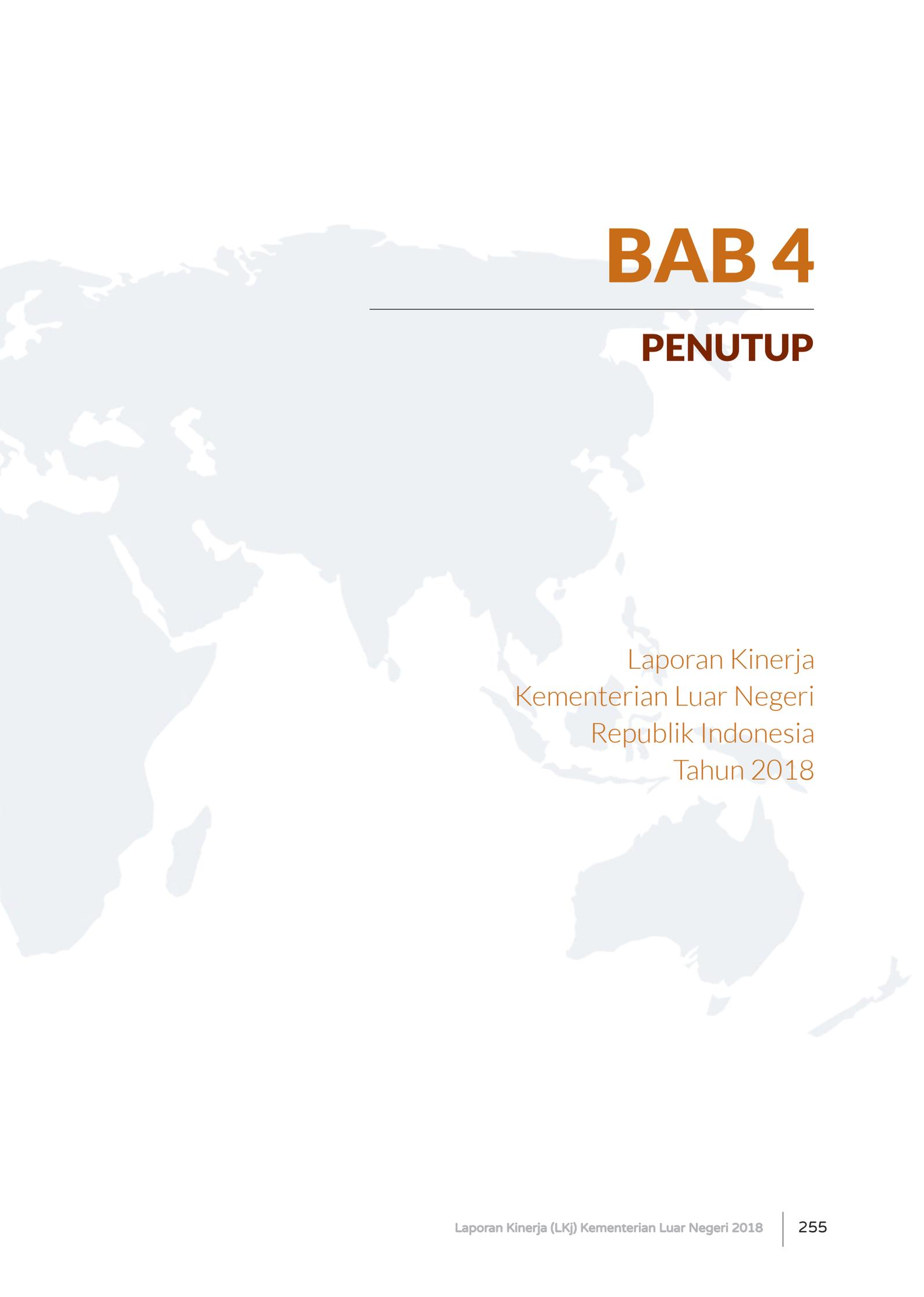


Dari grafik perbandingan di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri dari tahun 2015 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan usaha terus-menerus dari organisasi ini untuk merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun berjalan sehingga anggaran dapat diserap dengan lebih baik dari tahun ke tahun.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan *resource* yang ada untuk mendukung kinerja organisasi yang lebih baik. Hal ini tercermin dengan telah diterbitkannya Permenlu No. 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, yang menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi, satuan kerja, Perwakilan Republik Indonesia dan seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard*. Dengan adanya sistem manajemen kinerja tersebut, diharapkan setiap individu pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI berkinerja tinggi, bersinergi dan berkontribusi maksimal. Hal ini didasarkan pada aspek kinerja yang lebih terukur dan terarah.

Selain itu, mandatory Presiden RI untuk melakukan efisiensi pada setiap K/L, Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan langkah *streamlining* pertemuan atau sidang, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, pembatasan jumlah SDM yang terlibat dalam setiap kegiatan dengan tetap mempertahankan kualitas dan hasil kinerja. Upaya-upaya tersebut mendorong Kementerian Luar Negeri untuk lebih efisien dalam pelaksanaan diplomasi dengan tetap menjaga kualitas kinerja.



BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja
Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
Tahun 2018

Selama tahun 2018, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Luar Negeri Tahun 2018. Tercatat sebanyak 14 Sasaran Strategis (SS) dan 25 Indikator Utama (IKU) terangkum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Luar Negeri Tahun 2018.

Secara umum capaian kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Tercatat sebanyak 15 IKU yang memenuhi target, antara lain pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional, tindak lanjut/ implementasi kesepakatan internasional oleh *stakeholders* dalam negeri, diplomasi maritim, Polkam dan perbatasan, diplomasi ekonomi, sosial dan budaya dan diplomasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri untuk Tahun 2018 mencapai 105,36% ("Sangat Memuaskan") atau meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 104,34%. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil perhitungan pelaksanaan program-program yang terangkum dalam 4 perspektif, dengan capaian dan pembobotan sebagai berikut:

- a. Nilai Capaian Kinerja Perspektif *Stakeholder* dengan bobot 25% sebesar 105,29%;
- b. Nilai Capaian Kinerja Perspektif *Customer* dengan bobot 15% sebesar 110,40%;
- c. Nilai Capaian Perspektif *Internal Business Process* dengan bobot 30% sebesar 109,97%;
- d. Nilai Capaian Perspektif *Learning and Growth* dengan bobot 30% sebesar 98,29%.

Terkait beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Luar Negeri dalam pencapaian target kinerja tahun 2018, dapat dibagi dalam 2 bagian yakni sisi internal maupun sisi eksternal. Sejumlah kendala eksternal antara lain perkembangan dan dinamika perubahan global yang cepat, situasi politik negara mitra, kurangnya respon dan prioritas negara mitra atas usulan Indonesia terhadap perundingan perbatasan, perbedaaan prioritas isu dan persepsi dari negara mitra dengan Indonesia, koordinasi yang tidak berjalan lancar dengan kementerian/lembaga mitra. Sedangkan kendala internal yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri adalah keterbatasan jumlah SDM dan waktu mutasi pegawai Kementerian Luar Negeri yang sangat cepat.

Sebagai upaya menyasiasi kendala eksternal, Kementerian Luar Negeri senantiasa meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri dalam menghadapi dinamika politik luar negeri, khususnya terkait percepatan proses perundingan dan tindak lanjut kesepakatan yang dihasilkan, konsolidasi program-program kerja sama yang akan dan telah disepakati serta menginsentifkan pendekatan dan lobby dan kerja sama dengan negara mitra terkait isu-isu strategis dalam mendukung kepentingan nasional.

Dalam upaya mengatasi kendala internal, Kementerian Luar Negeri melakukan penyempurnaan peta jabatan dan standar kompetensi jabatan serta pelaksanaan assesment pada seluruh pegawai, sehingga proses mutasi dan promosi pegawai dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih optimal. Disamping itu Kementerian Luar Negeri juga telah dan akan terus melakukan proses rekrutmen dan pengangkatan pegawai baru pada tahun 2018 dalam mendukung *resources* yang diperlukan.

Berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2018, Kementerian Luar Negeri akan melakukan sejumlah langkah strategis, baik secara internal maupun eksternal, dalam upaya meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang sebagai berikut:

Langkah internal

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Luar Negeri, khususnya dengan mengimplementasikan sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard*;
2. Mengoptimalkan upaya diplomasi dengan Negara mitra.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja serta akuntabilitas dalam hal pengelolaan anggaran.

Langkah eksternal

1. Menjaga kedaulatan Indonesia melalui penyelesaian perundingan penetapan batas negara;
2. Mengintensifkan diplomasi ekonomi melalui mengembangkan hubungan ekonomi pasar non-tradisional dan memperdalam pasar tradisional kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata, terutama menghadapi kampanye negatif produk unggulan Indonesia dan mengintensifkan perundingan kerjasama ekonomi dan perdagangan kemitraan (*partnership*);
3. Memperkuat kerja sama pembangunan, khususnya Kerja Sama Selatan-Selatan dan Trilateral (KSST) dalam memperkokoh diplomasi Indonesia, termasuk rencana pembentukan satu badan (*single agency*);
4. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia pada ASEAN terutama dalam memperkokoh persatuan dan sentralitas ASEAN dalam mendukung kepentingan nasional dan terciptanya ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan;
5. Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum regional dan internasional, terutama mensukseskan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, pencalonan Indonesia di berbagai organisasi dunia dan penguatan Bali *Democracy Forum* (BDF) sebagai forum pembelajaran demokrasi bersama;
6. Terus melakukan inovasi dan penyempurnaan sistem pelayanan dan perlindungan WNI yang lebih baik, sebagaimana prinsip "*beyond protection*" dan kehadiran Negara bagi seluruh rakyat;
7. Terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi bersama K/L terkait dalam hal pengelolaan kinerja anggaran yang *prudent* dan akuntabel, termasuk melakukan upaya inovasi dan penyempurnaan atas sistem keuangan yang ada.

Secara keseluruhan, selama tahun 2018 capaian diplomasi Indonesia telah memberi kontribusi nyata kepada pembangunan dan kepentingan nasional serta berkontribusi pada perdamaian, keamanan dan kesejahteraan global

